



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



PERUBAHAN **RKPD PROVINSI** **SUMATERA SELATAN** **TAHUN 2025**



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam hal terdapat beberapa penyesuaian program pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi dalam melakukan penyesuaian/ perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 perlu menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta program Asta Cita;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan hasil fasilitasi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur, maka Pemerintah Provinsi perlu menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7);
8. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, terdiri atas:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II PELAKSANAAN RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - f. BAB VI : PENUTUP

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Juni 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 18

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Maksud dan Tujuan	I - 2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan	I - 3
1.4. Hubungan Antar Dokumen	I - 8
1.5. Sistematika Perubahan RKPD	I - 14
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II PELAKSANAAN RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020	II - 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II - 1
1. Dinas Pendidikan	II - 18
2. Dinas Kesehatan	II - 19
3. RS Dr. Ernaldi Bahar	II - 20
4. RSUD Siti Fatimah	II - 21
5. Rumah Sakit Mata	II - 22
6. Rumah Sakit Gigi dan Mulut	II - 23
7. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	II - 24
8. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	II - 25
9. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	II - 26
10. Satuan Polisi Pamong Praja	II - 27
11. Dinas Sosial	II - 28
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	II - 29
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	II - 30
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II - 31
15. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	II - 32
16. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	II - 33
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II - 34
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II - 35
19. Dinas Perhubungan	II - 36
20. Dinas Komunikasi dan Informatika	II - 37
21. Dinas Koperasi dan UKM	II - 38
22. Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	II - 39
23. Dinas Pemuda dan Olahraga	II - 40
24. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	II - 41
25. Dinas Perpustakaan	II - 42
26. Dinas Kearsipan	II - 43

	27. Dinas Kelautan dan Perikanan	II - 44
	28. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	II - 45
	29. Dinas Perkebunan	II - 46
	30. Dinas Kehutanan	II - 47
	31. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	II - 48
	32. Dinas Perdagangan	II - 49
	33. Dinas Perindustrian	II - 50
	34. Sekretariat Daerah	II - 51
	35. Sekretariat DPRD	II - 52
	36. BAPPEDA	II - 53
	37. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	II - 54
	38. Badan Pendapatan Daerah	II - 55
	39. Badan Kepegawaian Daerah	II - 56
	40. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	II - 57
	41. Badan Penelitian dan Pengembangan	II - 58
	42. Badan Penghubung	II - 59
	43. Inspektorat	II - 60
	44. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	II - 61
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III - 1
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III - 1
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III - 64
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV - 1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV - 2
	4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV - 7
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V - 1
	1. Dinas Pendidikan	V - 2
	2. Dinas Kesehatan	V - 3
	3. RS Dr. Ernaldi Bahar	V - 4
	4. RSUD Siti Fatimah	V - 5
	5. Rumah Sakit Mata	V - 6
	6. Rumah Sakit Gigi dan Mulut	V - 7
	7. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	V - 8
	8. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	V - 9
	9. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	V - 10
	10. Satuan Polisi Pamong Praja	V - 11
	11. Dinas Sosial	V - 12

12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V - 13
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	V - 14
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	V - 15
15. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	V - 16
16. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	V - 17
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V - 18
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	V - 19
19. Dinas Perhubungan	V - 20
20. Dinas Komunikasi dan Informatika	V - 21
21. Dinas Koperasi dan UKM	V - 22
22. Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP	V - 23
23. Dinas Pemuda dan Olahraga	V - 24
24. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V - 25
25. Dinas Perpustakaan	V - 26
26. Dinas Kearsipan	V - 27
27. Dinas Kelautan dan Perikanan	V - 28
28. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	V - 29
29. Dinas Perkebunan	V - 30
30. Dinas Kehutanan	V - 31
31. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	V - 32
32. Dinas Perdagangan	V - 33
33. Dinas Perindustrian	V - 34
34. Sekretariat Daerah	V - 35
35. Sekretariat DPRD	V - 36
36. BAPPEDA	V - 37
37. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	V - 38
38. Badan Pendapatan Daerah	V - 39
39. Badan Kepegawaian Daerah	V - 40
40. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	V - 41
41. Badan Penelitian dan Pengembangan	V - 42
42. Badan Penghubung	V - 43
43. Inspektorat	V - 44
44. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	V - 45

BAB VI	PENUTUP	VI - 1
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Isu Strategis RKPD 2025 dengan Penyesuaian Isu Strategis Perubahan RKPD Tahun 2025	I - 11
Tabel 1.2. Keterkaitan Prioritas Nasional Tahun 2025-2029 dengan Prioritas Daerah Tahun 2025-2029	I - 12
Tabel 2.1. Capaian Indikator Makro Daerah RPJMD Provinsi Sumsel Tahun 2024	II - 5
Tabel 2.2. Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II - 17
Tabel 3.1. Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2024 (Persen, yoy)	III - 10
Tabel 3.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, 2019-2023	III - 19
Tabel 3.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2023	III - 20
Tabel 3.4. PDB Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023 (Milyar Rupiah)(ADHB)	III - 21
Tabel 3.5. PDRB ADHB menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Miliar Rupiah)	III - 22
Tabel 3.6. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Miliar Rupiah)	III - 23
Tabel 3.7. Nilai Impor Migas dan Nonmigas Sumatera Selatan Januari-Desember 2023	III - 24
Tabel 3.8. Nilai Impor Sepuluh Golongan Barang Nonmigas Sumatera Selatan, Januari – Desember 2023	III - 25
Tabel 3.9. Indikator Kemiskinan Sumatera Selatan Maret 2023	III - 34
Tabel 3.10. Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 TW II dan 2024 TW II	III - 36
Tabel 3.11. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dan 2024 TW II (Persen)	III - 37
Tabel 3.12. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2024 TW I	III - 38
Tabel 3.13. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2023-Maret 2024 (TW1)	III - 40
Tabel 3.14. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sumatera Selatan, Maret 2023-Maret 2024 (TW1)	III - 41
Tabel 3.13. Proyeksi Pertumbuhan Sektor PDRB ADHK Sisi Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	III - 46
Tabel 3.15. Realiasi Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 – 2024	III - 64
Tabel 3.16. Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah RKPD	III - 68
Tabel 3.17. Anggaran dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 – 2024	III - 71

Tabel 3.18.	Realiasi Anggaran dan Proyeksi/Target Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024	III - 72
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran serta Target Pembangunan pada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	IV - 3
Tabel 4.2.	Isu Strategis dan Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	IV - 9
Tabel 4.3.	Tujuan dan Sasaran serta Penjabaran Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	IV - 14
Tabel 4.4.	Sasaran Pembangunan RKP dan Perubahan RKPD Tahun 2025	IV - 27
Tabel 4.5.	Keterkaitan Prioritas Nasional RKP Tahun 2025 dengan Prioritas Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025	IV - 28
Tabel 4.6.	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025-2029	IV - 45
Tabel 4.7.	Progres Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan	IV - 49
Tabel 4.8.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu	IV - 56
Tabel 4.9.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ilir	IV - 62
Tabel 4.10.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Muara Enim	IV - 66
Tabel 4.11.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Lahat	IV - 72
Tabel 4.12.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas	IV - 76
Tabel 4.13.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Banyuasin	IV - 82
Tabel 4.14.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Banyuasin	IV - 87
Tabel 4.15.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	IV - 94
Tabel 4.16.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	IV - 98
Tabel 4.17.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Ilir	IV - 102
Tabel 4.18.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Empat Lawang	IV - 107
Tabel 4.19.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	IV - 111
Tabel 4.20.	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas Utara	IV - 115
Tabel 4.21.	Capaian dan Target Indikator Makro Kota Palembang	IV - 119
Tabel 4.22.	Capaian dan Target Indikator Makro Kota Prabumulih	IV - 123
Tabel 4.23.	Capaian dan Target Indikator Makro Kota Pagar Alam	IV - 125
Tabel 4.24.	Capaian dan Target Indikator Makro Kota Lubuklinggau	IV - 130
Tabel 4.25.	Isu Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan	IV - 135

Tabel 4.26.	Isu Strategis dan Upaya Tindaklanjuti Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan	IV - 145
Tabel 4.27.	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Pokok- Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025	IV - 145
Tabel 4.26.	Isu Strategis dan Upaya Tindaklanjuti Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan	IV - 152

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2025 TW I	III - 20
Gambar 3.2. Perkembangan Nilai Ekspor Migas dan Nonmigas Sumatera Selatan, Maret 2025	III - 26
Gambar 3.3. Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Sumatera Selatan Maret 2025	III - 29
Gambar 3.4. Inflasi Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2025 TW I	III - 33
Gambar 3.5. Gini Ratio Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	III - 33
Gambar 3.6. Perkembangan Kemiskinan di Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	III - 34
Gambar 3.6. Perkembangan Tingkat Kemiskinan per- Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	III - 35
Gambar 3.7. Perkembangan Tingkat Kemiskinan per- Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	III - 35
Gambar 3.8. Tren Perkembangan Indeks Kedalaman (P1) Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024	III - 38
Gambar 3.9. Tren Perkembangan Indeks Kedalaman (P2) Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024	III - 39
Gambar 3.10. Tren Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024	III - 40
Gambar 3.11. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Per Provinsi di Indonesia Tahun 2024	III - 41
Gambar 3.12. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem per- Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	III - 43
Gambar 3.13. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Selatan Tahun 2015-2024	III - 44
Gambar 3.14. Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan	III - 45
Gambar 3.15. Persentase Penduduk Bekerja di Sektor Formal dan Informal Provinsi Sumatera Selatan	III - 46
Gambar 3.16. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	III - 48
Gambar 3.17. Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Sumatera Selatan Bulan Januari 2024 – April 2025 (Persen)	III - 52
Gambar 4.1. Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah	IV - 8
Gambar 4.2. Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026	IV - 11
Gambar 4.3. Sasaran Pembangunan Nasional	IV - 20
Gambar 4.4. Priortas Nasional RKP Tahun 2025	IV - 28
Gambar 4.5. KSP Kawasan Sekayu dan Sekitarnya	IV - 34
Gambar 4.6. KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya	IV - 36
Gambar 4.7. KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya	IV - 38
Gambar 4.8. KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya	IV - 40
Gambar 4.9. KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya	IV - 41

Gambar 4.10.	Peta Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No.12 Tahun 2024	IV - 48
Gambar 4.11.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs)	IV - 133
Gambar 4.12.	Pemetaan Goals, Target dan Indikator TPB/SDGs Provinsi Sumatera Selatan	IV - 134

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- a. kesesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih dengan menyinergikan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dan prioritas daerah;
- b. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pasal 343 ayat (4) Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Pada Pasal 343 ayat (7) dan (8) penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD. Dalam hal penambahan program merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini dilakukan penyesuaian pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk memastikan kesesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih dengan menyinergikan Asta Cita

Presiden dan Wakil Presiden dan prioritas daerah serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah triwulan I tahun 2025.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berbagai pertimbangan di atas disebut sebagai dasar perlunya Perubahan RKPD Tahun 2025. Selanjutnya Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang memuat rencana kerja, program dan indikasi kegiatan secara terukur.

1.2. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 akan menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2025, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 hingga ke Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 atas Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); (ditambahkan dari SK)
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 543);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7).
37. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
38. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 9);

39. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan penyesuaian yang dilakukan pada tahun 2025 yang menjadi tahun pertama dari pelaksanaan rangkaian besar RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, juga tahun pertama pada periodisasi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang menyesuaikan kebijakan dan isu strategis yang menjadi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dan kebijakan daerah pada Visi, Misi, Program Strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Secara detail keterkaitan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 ini, dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1. Perubahan RKPD dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

Perubahan Tahun 2025 dilakukan dengan penyesuaian pada arah kebijakan Asta Cita Pemerintah Pusat dan kebijakan daerah Visi, Misi, dan Program Strategis Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode 2025-2029. Berdasarkan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, isu strategis daerah Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan Stunting yang Masih Tinggi;
2. Produktivitas Pertanian dan Hilirasi Komoditi Unggulan Belum Optimal;
3. Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal;

4. Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal;
5. Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor Belum Optimal;
6. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal;
7. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah;
8. Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan;
9. Reformasi Birokrasi.

1.4.2. Perubahan RKPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Wilayah Sumatera dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, pengembangan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang adapun kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan antara lain :

1. Pengembangan Sistem Pusat Permukiman secara berhierarki, terpadu dan berkualitas;
2. Pengembangan dan peningkatan konektivitas serta aksesibilitas sistem jaringan prasarana wilayah yang berkualitas secara terpadu;
3. Pemantapan kawasan berfungsi lindung secara berkelanjutan;
4. Pengembangan fungsi budi daya secara produktif, terpadu dan berkelanjutan berbasis potensi wilayah;
5. Pengembangan kawasan strategis berbasis potensi wilayah;
6. Pemanfaatan ruang secara produktif, harmonis dan berkelanjutan; dan
7. Pengendalian fungsi lindung dan fungsi budi daya secara berkelanjutan.

Sinkronisasi dan sinergi Perubahan RKPD dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan di

wilayah Sumatera Selatan dapat lebih terarah serta mampu mendorong percepatan pembangunan wilayah. Selain itu, sinkronisasi dan sinergi RPJMD dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan juga diarahkan: (1) mewujudkan ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat; (2) memberikan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; (3) meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; (4) meningkatkan keterpaduan perencanaan tata ruang kabupaten/kota dengan wilayah nasional dan provinsi; (5) mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; (6) mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; serta (7) menjaga keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian kegiatan antar sektor dan antar Perangkat Daerah.

Dalam menyusun Perubahan RKPD, selain berpedoman pada RTRWP, juga perlu memperhatikan RTRW Nasional. Hal ini untuk melihat posisi Provinsi Sumatera Selatan dalam tataran perencanaan ruang di tingkat nasional. Beberapa wilayah Sumatera Selatan dalam konstelasi tata ruang nasional masuk ke dalam Pusat Kawasan Nasional, Pusat Kawasan Wilayah dan Pusat Kawasan Lokal.

Selain itu Perubahan RKPD Sumatera Selatan mencoba melihat arahan RTRW daerah/provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini adalah Provinsi: Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung. Telaah terhadap RTRW provinsi yang berbatasan tersebut diarahkan untuk: (1) tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar provinsi; (2) keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota; (3) dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4.3. Perubahan RKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 mengacu pada dokumen RKP 2025 terutama menyangkut prioritas, sasaran dan arah kebijakan. Keterkaitan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025 menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kebijakan Pemerintah Pusat sehingga menghasilkan Prioritas Daerah Tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024, target RKP Tahun 2025 serta mempertimbangkan situasi terkini sehingga didapat 7 (tujuh) isu strategis yaitu:

1. Perlindungan sosial dan pemberdayaan peningkatan pendapatan masyarakat belum optimal
2. Hilirisasi sektor unggulan daerah belum optimal
3. SDM berbasis kompetensi belum optimal
4. Kinerja pelayanan publik berbasis digital belum optimal
5. Akses, Kualitas, dan Kuantitas Infrastruktur Layanan Pendidikan dan Kesehatan belum optimal
6. Infrastruktur Wilayah dan Infrastruktur Dasar belum optima
7. Pengelolaan SDA dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung.

Dalam prosesnya terdapat penyesuaian isu strategis dalam mengakomodir dinamika kebijakan baik pusat maupun daerah, sebagai berikut :

Tabel 1.1

Isu Strategis RKPD 2025 dengan Penyesuaian Isu Strategis Perubahan RKPD Tahun 2025

Isu Strategis RKPD 2025	Penyesuaian Isu Strategis Perubahan RKPD 2025
1. Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrim dan Stunting	1. Perlindungan sosial dan pemberdayaan peningkatan pendapatan masyarakat belum optimal
2. Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Mandiri dan Berdaya Saing	2. Hilirisasi sektor unggulan daerah belum optimal
3. Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang unggul didukung teknologi dan digitalisasi	3. SDM berbasis kompetensi belum optimal
4. Peningkatan iklim investasi sektor unggulan didukung Pemerataan Infrastruktur	4. Kinerja pelayanan publik berbasis digital belum optimal
5. Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi dan Penanganan Bencana	5. Akses, Kualitas, dan Kuantitas Infrastruktur Layanan Pendidikan dan Kesehatan belum optimal
6. Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	6. Infrastruktur Wilayah dan Infrastruktur Dasar belum optimal
	7. Pengelolaan SDA dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung

Penyelarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah berdasarkan Isu Strategis Daerah dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Keterkaitan Prioritas Nasional Tahun 2025-2029 dengan Prioritas Daerah Tahun 2025-2029

PRIORITAS NASIONAL 2025-2029	PRIORITAS DAERAH SUMATERA SELATAN 2025-2029	ISU STRATEGIS DAERAH
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	6. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	1. Kinerja pelayanan publik berbasis digital belum optimal
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	2 Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	2. Hilirisasi sektor unggulan daerah belum optimal
	3 Ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Pengelolaan SDA dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2 Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	2. Hilirisasi sektor unggulan daerah belum optimal
	4 Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan.	6. Infrastruktur Wilayah dan Infrastruktur Dasar belum optimal
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1 Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas	3. SDM berbasis kompetensi belum optimal 5. Akses, Kualitas, dan Kuantitas Infrastruktur Layanan Pendidikan dan Kesehatan belum optimal
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan	2 Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	2. Hilirisasi sektor unggulan daerah belum optimal 1. Perlindungan sosial dan pemberdayaan peningkatan pendapatan masyarakat belum optimal

PRIORITAS NASIONAL 2025-2029	PRIORITAS DAERAH SUMATERA SELATAN 2025-2029	ISU STRATEGIS DAERAH
Nilai Tambah di Dalam Negeri	5 Kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan	
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4 Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan.	6. Infrastruktur Wilayah dan Infrastruktur Dasar belum optimal
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	6 Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	4. Kinerja pelayanan publik berbasis digital belum optimal
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	7 Kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, berorientasi pada kearifan lokal	3. SDM berbasis kompetensi belum optimal

Penyesuaian Sasaran Makro Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 pada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 beserta targetnya yaitu:

Sasaran Makro RKPD 2025		Sasaran Makro P-RKPD 2025	
Indikator	Target	Indikator	Target
Pertumbuhan Ekonomi	5,3–5,5	Persentase Rata-Rata LPE	5,3–5,5
Pendapatan per Kapita (ADHB)	80,77-80,89	PDRB per Kapita (ADHB)	78,68 - 79,03
Angka Pengangguran	3,82–3,93	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,82 – 3,93
Angka Kemiskinan	9,37-10,37	Kontribusi PDRB Provinsi	3,06
Rasio Gini	0,316-0,320	Tingkat Kemiskinan	9,37-10,37
Indeks Modal Manusia	0,53	Rasio Gini	0,316-0,320
		Indeks Modal Manusia	0,53
		Penurunan Intensitas Emisi GRK	69,97
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	68,19

1.4.4. Perubahan RKPD Provinsi dengan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota

Capaian pembangunan Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya adalah akumulasi dari capaian pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota. Oleh karena itu sinergitas perencanaan pembangunan yang disusun di tiap tingkatan menjadi sangat penting untuk mencapai target-target pembangunan.

1.4.5. Perubahan RKPD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perubahan RKPD Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Perubahan Renja PD merupakan penjabaran teknis Perubahan RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

1.5. Sistematika Perubahan RKPD

1. Bab I : Pendahuluan
2. Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan I Pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025
3. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
4. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
5. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
6. Bab VI : Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I PELAKSANAAN RKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 berperan sangat strategis bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, karena merupakan penjabaran perubahan rencana strategis ke dalam rencana operasional untuk mengatasi tantangan pembangunan terkini. Dokumen Perubahan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.

Perubahan RKPD menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah dan instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, dan kinerja pelayanan Perangkat Daerah di tahun berjalan agar selaras dengan apa yang direncanakan.

Hasil sangat tinggi dan tinggi menunjukkan pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah memenuhi target, hasil sedang menunjukkan pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal, sedangkan hasil rendah dan sangat rendah menunjukkan pencapaian atau realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 serta telah menyelaraskan dengan Asta Cita prioritas pembangunan nasional. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian kinerja pembangunan daerah hingga akhir Triwulan I Tahun 2025 dan mengidentifikasi berbagai kendala serta langkah strategis untuk triwulan selanjutnya.

Dalam rangkaian capaian makro daerah, Perekonomian Sumatera Selatan tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen, masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 24,69 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 18,35 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,59 persen.

Pertumbuhan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh signifikan sebesar 9,39 persen; diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,35 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,84 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,48 persen; dan Real Estate sebesar 8,17 persen. Industri Pengolahan; Pertambangan dan Penggalian dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 4,39 persen; 3,33 persen dan 2,59 persen.

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Sumatera Selatan masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sumatera Selatan yaitu sebesar 61,75 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 31,01 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,26 persen; Komponen PK-P sebesar 6,17 persen dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,61 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 24,80 persen.

Konsumsi rumah tangga tahun 2023 tumbuh sebesar 4,82 persen, didukung oleh subkomponen konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel karena faktor peningkatan aktivitas wisata dan tingginya mobilitas masyarakat. Selain itu, menjelang tahun pemilu 2024 konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga tahun 2023 tumbuh mencapai 9,83 persen. Tingginya aktivitas kampanye, distribusi logistic kebutuhan pemilu, dan sosialisasi pelaksanaan pemilu memengaruhi tingginya realisasi ini.

Perekonomian Provinsi Sumatra Selatan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2024 mencapai Rp165,13 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 95,06 triliun. Struktur PDRB Sumatra Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan II-2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 24,14 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 18,07 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,02 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatra Selatan mencapai 56,23 persen.

Penetapan berbagai asumsi kerangka ekonomi makro Provinsi Sumatera Selatan ditujukan untuk memberikan suatu dorongan (stimulus) dan sekaligus peluang bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi baru dan mengembangkan usaha. Dengan

bertambahnya investasi dan meningkatnya skala usaha diharapkan mendorong perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

Pendapatan perkapita Sumatera Selatan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 Pendapatan Perkapita Sumsel sebesar 53,84 juta rupiah per orang pertahun, tahun 2024 telah meningkat pada angka 75,13 juta rupiah per orang pertahun. Selama lima tahun ini mengalami peningkatan sebesar 21,29 juta rupiah per orang pertahun dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 5,32 juta rupiah per orang pertahun. Walaupun mengalami peningkatan, tetapi PDRB Perkapita Sumatera Selatan masih berada di bawah PDRB Nasional.

Angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai 10,97% dari total penduduk Provinsi Sumatera Selatan. Angka kemiskinan pada tahun 2023 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka kemiskinan pada tahun 2023 yang sebesar 11,78%. Penurunan ini searah dengan kondisi yang terjadi secara nasional. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan darkemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Pada Maret 2024 terlihat sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) sebesar 74,57 persen sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) sebesar 25,43 persen.

Komoditi yang memberikan sumbangan terbesar pada GK pada umumnya hampir sama antara perkotaan dan perdesaan. Beras dan rokok kretek filter masih memberi sumbangan terbesar yakni 19,64 persen dan 10,26 persen di perkotaan. Di perdesaan, beras memberi sumbangan sebesar 25,38 persen dan rokok kretek filter 11,52 persen. Komoditi lainnya adalah daging ayam ras (5,07 persen di perkotaan dan 3,29 persen di perdesaan), telur ayam ras (4,42 persen di perkotaan dan

3,68 persen di perdesaan), mie instan (3,33 persen di perkotaan dan 2,43 persen di perdesaan), cabe merah (2,95 persen di perkotaan dan 2,28 persen di perdesaan), gula pasir (2,51 persen di perkotaan dan 2,88 persen di perdesaan) dan seterusnya.

Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan (8,10 persen di perkotaan dan 8,29 persen di perdesaan), bensin (3,87 persen di perkotaan dan 5,13 persen di perdesaan), listrik (3,58 persen di perkotaan dan 2,21 persen di perdesaan), pendidikan (1,99 persen di perkotaan dan 1,12 persen di perdesaan) dan lainnya.

Rasio Gini Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2024 cenderung lebih rendah yaitu sebesar 0,331 daripada tahun sebelumnya yang sebesar 0,338. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan ketimpangan pendapatan antar penduduk di Sumatera Selatan pada tahun 2024. Angka Gini Rasio Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2024-2024 capaiannya selalu lebih baik dari capaian Nasional karena angkanya selalu lebih kecil dibandingkan Gini Rasio Nasional.

Pembangunan Manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami kemajuan, pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 73,84 yang sebelumnya 71,62 pada tahun 2023. Hal ini tentunya merupakan keberhasilan bagi Provinsi Sumatera Selatan, tentunya tidak lepas dari angka capaian Kabupaten/Kota.

Jumlah penduduk yang menganggur sebanyak 179.710 orang (3,86%) pada Agustus 2024, terjadi penurunan pengangguran sebanyak 8.800 orang dibandingkan Agustus 2023 sebesar 188.510 orang (4,11%). Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh yaitu 62,31% (2,79 juta orang), Sisanya 37,69% (1,69 juta orang) merupakan Pekerja Tidak Penuh. Tingkat Setengah pengangguran sebesar 9,83%, Pekerja paruh waktu di Sumsel sebesar 27,87%, artinya dari 100 orang penduduk yang bekerja terdapat sekitar 27-28 orang pekerja paruh waktu. Dibandingkan Agustus 2023, Tingkat Pekerja Paruh Waktu mengalami peningkatan sebesar 1,95 persen point. Untuk meningkatkan jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Capaian makro Provinsi Sumatera Selatan seperti terlihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro Daerah RPD Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		Capaian Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3–5,5	5,03	100
2	Pendapatan Per Kapita	Juta Rp/Kapita	73,33	75,13	110
3	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	%	6,39	6,31*	100
4	Indeks Entropi Theil	Indeks	2,090	2,331*	110
5	Nilai Tukar Petani	Nilai	109,56	124,18	110
6	Indeks Ekosistem Inovasi	Indeks	2,73	3,38	110
7	Tingkat Inflasi Daerah	%	2,5 +/- 1	1,20	100
8	Tingkat Kemiskinan	%	9,37 – 10,37	10,51	100
9	Gini Ratio	-	0,316 – 0,320	0,331	100
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,82 – 3,93	3,86	100
11	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,96	73,84	100
12	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,47	93,25*	98,70
13	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	72,5	54	74,48
14	Prevalensi Stunting	%	13,3	20,3	110
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,98	72,69	110
16	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	8,04	20,20	42,87
17	Indeks Risiko Bencana Sumsel	Indeks	136,01	131,24	96,49
18	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,5 (B)	74,58 (BB)	110
19	Nilai SAKIP	Nilai	69,25 (B)	77,53	110
20	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,88 (A)	89,99 (A)	110

Ket:
* : data Tahun 2023

Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

Realisasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Selatan hingga Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 berdasarkan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan

- a) Realisasi belanja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.436.299.326.038,- dengan realisasi kinerja sebesar 24,86%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

2. Dinas Kesehatan

- a) Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.45.245.532.380,- dan realisasi kinerja sebesar 12,95%.
- b) Tidak ada hambatan berarti dalam pelaksanaan program di Dinas Kesehatan, meskipun terjadi pergeseran kegiatan, perubahan alokasi dana atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan namun tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Rumah Sakit Ernaldi Bahar

- a) Realisasi Belanja RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp.8.987.694.701,- dengan realisasi fisik sebesar 22,21%.
- b) Belum ada kendala yang dihadapi yang berpengaruh pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

4. RSUD Siti Fatimah

- a) Realisasi Belanja RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp.27.502.280.601,- dengan realisasi fisik sebesar 8,24%.
- b) Kendala yang dihadapi:
 - 1) Ada beberapa program kegiatan yang masih dalam proses pembayaran.
 - 2) Pelaksanaan kegiatan yang belum dilakukan.

- 3) Adanya kegiatan yang masih dalam proses kontrak, tender, dan klik.
- 4) Barang yang masih dalam proses pengiriman.

5. Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat

- a) Realisasi Belanja Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp.5.853.155.504,- dengan realisasi fisik sebesar 16,34%.
- b) Belum ada kendala yang dihadapi yang berpengaruh pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

6. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut

- a) Realisasi Belanja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp.2.518.930.132,- dengan realisasi fisik sebesar 31,04%.
- b) Belum ada kendala yang dihadapi yang berpengaruh pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

7. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

- a) Realisasi belanja Dinas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar Rp.4.691.342.560,- dengan realisasi kinerja sebesar 4,29%.
- b) Belum ada kendala yang dihadapi yang berpengaruh pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025

8. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

- a) Realisasi Belanja Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar Rp.9.560.989.790,- dengan realisasi kinerja sebesar 1,50%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

9. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a) Realisasi Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.4.468.576.464,- dengan realisasi kinerja sebesar 3,58%.

- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

10. Satuan Polisi Pamong Praja

- a) Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.7.671.138.180,- dengan realisasi fisik sebesar 32,95%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

11. Dinas Sosial

- a) Realisasi Belanja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.5.368.831.240,- dengan realisasi 21,28%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- a) Realisasi Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.781.784.610,- dengan realisasi kinerja sebesar 10,59%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a) Realisasi Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.5.769.718.939,- dengan realisasi kinerja sebesar 17,40%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025 akan tetapi Sumber Daya Manusia khususnya pegawai yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai bidang teknis yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memasuki masa pensiun sedangkan kaderisasi sangat lambat.

14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.924.167.512,- dan realisasi kinerja sebesar 15,04%.
- b) Permasalahan yang dihadapi antara lain :
 - 1) Kebijakan/Peraturan tentang proses Penatausahaan Keuangan yang berubah/berganti
 - 2) Kesiapan PPTK untuk melaksanakan kegiatan belum maksimal
 - 3) Adanya Dokumen DPA yang harus direvisi
 - 4) Adanya kegiatan mendadak yang tidak terjadwal seperti panggilan acara di kementerian, rapat/pelatihan di provinsi

15. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

- a) Realisasi Belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.3.350.288.805,- dengan realisasi kinerja sebesar 8,48%.
- b) Dalam melaksanakan program kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, secara umum masih dalam proses persiapan administrasi baik fisik maupun keuangan.

16. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

- a) Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.8.348.505.142,- dengan realisasi kinerja sebesar 20,64%.
- b) Terdapat Indikator Kinerja yang tidak dapat terlaksana yakni pada indikator persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/KKPR). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, bahwa pelaksanaan KKPR harus dilaksanakan melalui sistem OSS, akan tetapi terdapat keterbatasan pada sistem OSS dalam penerbitan KKPR yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Selatan sehingga sampai dengan saat ini kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan.

17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a) Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.714.540.553,- dengan realisasi kinerja sebesar 7,95%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas PMD Prov. Sumsel sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.829.623.758,- dengan realisasi kinerja sebesar 7,78%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

19. Dinas Perhubungan

- a) Realisasi belanja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.6.100.580.408,- dengan realisasi kinerja sebesar 14,06%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

20. Dinas Komunikasi dan Informatika

- a) Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.5.001.761.689,- dengan realisasi kinerja sebesar 14,68%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a) Realisasi Belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.028.617.759,- dengan realisasi kinerja sebesar 10,99%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a) Realisasi Total Belanja DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.767.105.186,- dengan realisasi kinerja sebesar 2,80%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

23.Dinas Pemuda dan Olahraga

- a) Realisasi Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.4.352.026.106,- dengan realisasi kinerja sebesar 5,60%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

24.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.4.258.146.247,- dengan realisasi kinerja sebesar 9,34%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025..

25.Dinas Perpustakaan

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp.3.106.547.920,- dengan realisasi kinerja sebesar 14,27%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

26.Dinas Kearsipan

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.817.128.883,- dengan realisasi kinerja sebesar 27,31%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

27.Dinas Kelautan dan Perikanan

- a) Realisasi keuangan belanja dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.3.455.818.700,- dengan realisasi kinerja sebesar 8,47%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

28. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.16.503.082.233,- dengan realisasi kinerja sebesar 14,91%.
- b) Kendala yang dihadapi antara lain:
 - 1) Kegiatan masih dalam proses SPJ terutama Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Kegiatan teknis lainnya masih dalam proses CPCL dan penentuan titik lokasi

29. Dinas Perkebunan

- a) Realisasi keuangan total belanja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.670.177.829,- dengan realisasi kinerja sebesar 4,17%
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

30. Dinas Kehutanan

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.11.060.808.402,- dengan realisasi kinerja sebesar 21,53%.
- b) Kendala yang dihadapi antara lain:
 - 1) Patroli kebakaran hutan belum dilakukan karena masih musim hujan
 - 2) Adanya efisiensi anggaran.

31. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I

Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.4.136.344.191,- dengan realisasi kinerja sebesar 19,11%.

b) Kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Beberapa kegiatan mengalami pemangkasan anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran
- 2) Terjadi perubahan rencana aliran kas akibat dari penyesuaian anggaran kegiatan

32. Dinas Perdagangan

a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.620.339.334,- dengan realisasi kinerja sebesar 27,01%.

b) Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dalam pembinaan dan pengembangan sektor Perdagangan di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sektor Perdagangan masih kurang didukung data yang akurat dan tersedia belum tertata dengan baik
- 2) Pelaksanaan program/kegiatan masih belum berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

33. Dinas Perindustrian

a) Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.676.856.056,- dengan realisasi kinerja sebesar 9,78%.

b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

34. Sekretariat Daerah

a. Biro Administrasi Pembangunan Setda

Realisasi Keuangan Total Belanja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.111.246.332,- dengan realisasi kinerja sebesar 8,75%.

b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda

Realisasi Keuangan Total Belanja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.418.465.787,- dengan realisasi kinerja sebesar 12,97%.

c. Biro Organisasi Setda

Realisasi Keuangan Total Belanja Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.129.534.355,- dengan realisasi kinerja sebesar 21,10%.

d. Biro Umum dan Perlengkapan Setda

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.33.019.131.124,- dengan realisasi kinerja sebesar 23,97%.
- b) Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Umum dan Perlengkapan telah berjalan dengan baik dan lancar, namun pada pelaksanaan masih terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum dan Perlengkapan, antara lain :
- 1) Kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap beban kerja yang diberikan atasan, masih rendahnya disiplin dalam bekerja.
 - 2) Perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis yang kadangkala payung hukum aturan petunjuk pelaksanaannya belum terbit.
 - 3) Adanya struktur organisasi yang kurang optimal dan efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seperti adanya overlapp tugas dan fungsi antar biro, adanya volume serta beban tugas dan fungsi yang kurang proposional dengan organisasi pelaksanaannya.

e. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda

Realisasi Keuangan Total Belanja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.51.417.152.842,- dengan realisasi kinerja sebesar 75,61%.

f. Biro Humas dan Protokol Setda

Realisasi Keuangan Total Belanja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.3.302.859.327,- dengan realisasi kinerja sebesar 6,68%.

35. Sekretariat DPRD

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran

2025 sebesar Rp. Rp.54.336.826.907,- dengan realisasi kinerja sebesar 25,16%.

- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

36.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.5.822.716.450,- dengan realisasi kinerja sebesar 16,37%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

37.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 adalah Rp.24.579.837.148,- dengan realisasi kinerja sebesar 5,78%;
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

38.Badan Pendapatan Daerah

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.19.486.985.052,- dengan realisasi kinerja sebesar 7,29%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

39.Badan Kepegawaian Daerah

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan ini sebesar Rp.3.510.265.673,- dengan realisasi kinerja sebesar 16,01%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

40.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.5.956.833.788,- dengan realisasi kinerja sebesar 19,07%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

41.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.434.129.113,- dengan realisasi kinerja sebesar 14,34%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

42.Badan Penghubung

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.519.168.931,- dengan realisasi kinerja sebesar 20,00%.
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

43.Inspektorat

- a) Realisasi Keuangan Total Belanja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.7.656.671.641,- dengan realisasi kinerja sebesar 22,43%.
- b) Ada beberapa kendala yaitu:
 - 1) Penetapan target pada perencanaan kinerja tahunan belum sepenuhnya mempertimbangkan capaian pada tahun sebelumnya.
 - 2) Indikator yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bukan hanya kinerja Inspektorat saja tetapi dipengaruhi juga oleh kinerja dari pihak lain/OPD terkait dan dinilai oleh eksternal, sehingga dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik disamping kompetensi dan kecakapan.
 - 3) Beberapa Indikator Kinerja yang belum bisa diperoleh dikarenakan sebagian besar realisasi dari Indikator Kinerja didapat dari pihak eksternal yang akan dirilis pada triwulan IV.

44.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- a) Realisasi keuangan total belanja sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi sumatera selatan sebesar Rp.2.389.143.225,-, dengan realisasi kinerja sebesar 10,00%;
- b) Belum ditemukan hambatan yang berarti dan mempengaruhi sasaran dan prioritas pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025.

Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 seperti terlihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Urusan	Capaian SPM
1	Pendidikan	81,61
2	Kesehatan	99,26
3	Pekerjaan Umum	100,00
4	Perumahan Rakyat	100,00
5	Trantibumlinmas	94,69
6	Sosial	100,00
Sumatera Selatan		95,93

Sumber : Aplikasi Pelaporan SPM (spm.bangda.kemendagri.go.id)

Dinas Pendidikan

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.602.880.896.500	436.299.326.038	27,22	29,61				
i	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.350.000.000	0	0,00	6,85				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		2 Dokumen	100.000.000	0	0,00	30,00		Kota Palembang,		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lap Kinerja, SPM dan Dapodik)	3 Laporan		0,00	525.000.000	0	0,00	5,00		Kota Palembang,		
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Manajemen Pendanaan Pendidikan SMA, SMK dan SLB, Dewan Pendidikan)	4 Laporan		0,00	725.000.000	0	0,00	5,00		Kota Palembang,		
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.586.791.131.500	436.299.326.038	27,50	29,78				
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran gaji PNS dan tunjangan lainnya	14.000 Orang		14.000 Orang	1.572.947.640.000	436.299.326.038	27,74	30,00		Sumsel		
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Pada SMA/SMK, Pada Dinas Pendidika, Pada SLB, Pada BTK, tutor SKJ)	5 dokumen		0,00	11.243.491.500	0	0,00	5,00		Sumsel		
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen		0,00	350.000.000	0	0,00	5,00		Kota Palembang,		
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		0,00	1.500.000.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		0,00	325.000.000	0	0,00	5,00		Kota Palembang,		
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (transfer pusat , Manajemen Kualifikasi)	2 laporan		0,00	300.000.000	0	0,00	5,00		Kota Palembang,		
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Monev dan pelaporan)	4 Dokumen		0,00	125.000.000	0	0,00	5,00		Kota Palembang,		
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					872.935.000	0	0,00	5,00				
11	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		0,00	210.000.000	0	0,00	5,00		Kota Palembang,		
12	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0,00	200.000.000	0	0,00	5,00		Kota Palembang,		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0,00	293.175.000	0	0,00	5,00		Kota Palembang,		
14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0,00	169.760.000	0	0,00	5,00		Kota Palembang,		
iv	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					80.000.000	0	0,00	30,00				
15	Pelaporan Pengelolaan Retrebusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan		0,00	80.000.000	0	0,00	30,00		Kota Palembang,		
v	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.987.560.000	0	0,00	5,00				
16	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		0,00	363.100.000	0	0,00	5,00				
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Pelatihan ICT, Pelatihan Kepala Bengkel, Pelatihan Media, Asesor, Pengembangan dan Pemanfaatan TIK, Uji Kompetensi, Pelatihan Robotik)	751 Orang		0,00	1.624.460.000	0	0,00	5,00		Kota Palembang,		
vi	Administrasi Umum Perangkat Daerah					904.300.000	0	0,00	7,32				
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 paket		0,00	84.000.000	0	0,00	30,00		Kota Palembang,		
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (ATK, Konsumsi, Jasa Iklan/Reklame)	19 Paket		0	475.000.000	0	0,00	5,00		Kota Palembang,		
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		0	150.300.000	0	0,00	5,00		Kota Palembang,		
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210 Laporan		0	195.000.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
vii	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah					3.110.750.000	0	0,00	5,00				
22	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		0,00	1.650.000.000	0	0,00	5,00		Kota Palembang,		
23	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		0,00	200.000.000	0	0,00	5,00		Kota Palembang,		
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan yang di laksanakan pada UPTD	12 Paket		0,00	1.260.750.000	0	0,00	5,00		UPTD BPPK, BTIKP dan Graha		
viii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.861.550.000	0	0,00	30,00				
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat kedinasan	100 Laporan		0,00	60.000.000	0	0,00	30,00		Kota Palembang,		
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik	12 Laporan		0,00	3.745.200.000	0	0,00	30,00		Kota Palembang,		
27	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan		0,00	56.350.000	0	0,00	30,00		Kota Palembang,		
ix	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.797.670.000	0	0,00	8,61				

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit		0,00	547.920.000	0	0,00	30,00		Kota Palembang,		
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dinas)	3 Unit		0,00	1.038.000.000	0	0,00	5,00		Kota Palembang		
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		0,00	2.211.750.000	0	0,00	5,00		Kota Palembang,		
x	Peningkatan Pelayanan BLUD					125.000.000	0	0,00	0,00				
31	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2 Unit			125.000.000	0	0,00	0,00		Kota Palembang,		
II	Program Pengelolaan Pendidikan					1.098.357.653.500	0	0,00	18,00				
xi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					584.008.968.450	0	0,00	20,06				
32	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah sekolah yang mendapat Pembangunan ruang guru/ Kepala sekolah/tu	3 Ruang		0,00	3.530.600.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
33	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah UKS yang dibangun	4 Ruang		0,00	1.802.117.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
34	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang		0,00	925.274.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
35	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (APBD dan DAK)	12 Unit		0,00	6.557.735.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
36	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang bangunan sekolah SMA yang di rehab (APBD)	5 Ruang		0,00	2.958.043.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
37	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang		0,00	1.873.435.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
38	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		0,00	835.689.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
39	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Meubiler SMA yg diadakan	1080 Paket		0,00	1.891.270.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
40	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7 Paket		0,00	514.772.100	0	0,00	5,00		Sumsel		
41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket		0,00	779.450.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
42	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	219.128 Siswa		0,00	165.018.842.650	0	0,00	5,00		Sumsel		
43	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	22000 Peserta Didik		0,00	2.395.222.500	0	0,00	5,00		Sumsel		
44	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2 Satuan Pendidikan		0,00	15.744.699.200	0	0,00	30,00		Sumsel		
45	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	627 Satuan Pendidikan		0,00	335.898.250.000	0	0,00	30,00		Sumsel		
46	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	627 Orang		0,00	150.000.000	0	0,00	30,00		Palembang		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan		0,00	42.825.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
48	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	44 Ruang		0,00	16.382.380.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
49	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium					330.000.000	0	0,00	5,00				
50	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang		0,00	26.378.364.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
xii	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					470.764.913.100	0	0,00	15,56				
51	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang		0,00	1.452.000.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
52	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	13 Ruang		0,00	15.699.160.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
53	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	20 Ruang		0,00	23.581.917.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
54	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang		0,00	1.105.762.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
55	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang		0,00	1.263.236.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
56	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit		0,00	7.009.846.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
57	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		0,00	1.368.000.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
58	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		0,00	350.748.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
59	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1080 Paket		0,00	1.891.270.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
60	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	124468 Siswa		0,00	46.334.250.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
61	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	42 Paket		0,00	152.484.669.600	0	0,00	5,00		Sumsel		
62	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20.000 Peserta Didik		0,00	2.905.862.500	0	0,00	5,00		Sumsel		
63	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	156 Orang		0,00	638.146.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
64	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	70 Satuan Pendidikan		0,00	1.831.219.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
65	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	325 Satuan Pendidikan		0,00	198.793.020.000	0	0,00	30,00		Sumsel		
66	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	325 Orang		0,00	150.000.000	0	0,00	5,00		Kota Palembang		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	18 Ruang		0,00	9.494.970.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
68	Rehabilitasi ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	25 Ruang		0,00	4.410.837.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
xiii	Pengelolaan Pendidikan Khusus					43.583.771.950	0	0,00	16,79				
69	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		0,00	279.764.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
70	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		0,00	1.033.666.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
71	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	500 Paket		0,00	850.000.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
72	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					325.000.000	0	0,00	5,00				
73	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket		0,00	932.433.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
74	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2150 Peserta Didik		0,00	2.152.000.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
75	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1182 Peserta Didik		0,00	12.496.324.950	0	0,00	5,00		Sumsel		
76	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	96 Orang		0,00	434.800.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
77	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan		0,00	8.500.000.000	0	0,00	30,00		Sumsel		
78	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	39 Satuan Pendidikan		0,00	12.058.700.000	0	0,00	30,00		Sumsel		
79	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	39 Orang		0,00	125.000.000	0	0,00	5,00		Kota Palembang		
80	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	50 Orang		0,00	125.000.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
81	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	10 Ruang		0,00	2.147.124.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
82	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		0,00	996.000.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
83	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		0,00	653.920.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
84	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	4 Ruang		0,00	474.040.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
III	Program Pengembangan Kurikulum					679.340.000	0	0,00	5,00				
xiv	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					679.340.000	0	0,00	5,00				
85	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	160 Orang		0,00	477.800.000	0	0,00	5,00		Sumsel		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	78 Orang		0,00	201.540.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
IV	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan					2.749.750.000	0	0,00	5,00				
xv	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi					2.749.750.000	0	0,00	5,00				
87	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	4 Dokumen		0,00	1.042.800.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
88	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	4 Laporan		0,00	1.706.950.000	0	0,00	5,00		Sumsel		
Jumlah						2.704.667.640.000	436.299.326.038	16,13	24,86				

Dinas Kesehatan

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					223.510.360.500	45.188.932.380	20,22	22,42				
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.750.000.000	0	0,00	0,00				
	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	0	1.750.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prov. Sumsel		
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					183.287.802.000	42.977.587.206	23,45	24,91				
	2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (1212/or/bln)	Bulan	12	3	182.603.402.000	42.977.587.206	23,54	25,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	Prov. Sumsel		
	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	0	509.400.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prov. Sumsel		
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	175.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prov. Sumsel		
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					180.000.000	0	0,00	0,00				
	5 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	180.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prov. Sumsel		
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.304.000.000	0	0,00	0,00				
	6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Paket	1	0	1.200.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prov. Sumsel		
	7 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	0	104.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prov. Sumsel		
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.645.458.500	71.429.896	1,96	10,29				
	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	250.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prov. Sumsel		
	9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	500.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prov. Sumsel		
	10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	0	520.458.500	0	0,00	0,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prov. Sumsel		
	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	0	350.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prov. Sumsel		
	12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	1	0	25.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prov. Sumsel		
	13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	1	1.500.000.000	71.429.896	4,76	25,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prov. Sumsel		
	14 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	500.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prov. Sumsel		
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					3.101.000.000	0	0,00	0,00				
	15 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	0	944.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prov. Sumsel		
	16 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	0	2.157.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prov. Sumsel		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)		Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					14.742.100.000	1.795.253.278	12,18	25,10					
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	20.000.000	2.099.100	10,50	100,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli	Prov. Sumsel		
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	1	3.100.000.000	319.666.178	10,31	25,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli	Prov. Sumsel		
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Paket	12	3	11.622.100.000	1.473.488.000	12,68	25,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli	Prov. Sumsel		
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.000.000.000	344.662.000	2,87	3,29					
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	40	6	1.900.000.000	235.228.000	12,38	15,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli	Prov. Sumsel		
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	0	9.550.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli	Prov. Sumsel		
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	10	2	550.000.000	109.434.000	19,90	20,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli	Prov. Sumsel		
ix	Peningkatan Pelayanan BLUD					3.500.000.000	0	0,00	0,00					
23	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	%	100	0	3.500.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli	Prov. Sumsel		
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					159.108.449.000	56.600.000	0,04	0,05					
x	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					18.432.099.000	0	0,00	0,00					
24	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regiona/ Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	Paket	1	0	200.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli	Prov. Sumsel		
25	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Dokumen	2	0	900.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli	Prov. Sumsel		
26	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Db at, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	100	0	17.332.099.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli	Prov. Sumsel	Stunting	
xi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					138.575.956.000	0	0,00	0,00					
27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	%	100	0	1.517.998.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli	Prov. Sumsel	Kemiskinan	
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	0	1.470.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli	Prov. Sumsel	Kemiskinan	
29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	10	0	1.250.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli	Prov. Sumsel	Stunting	
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	6	0	300.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli	Prov. Sumsel	Stunting	
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	4	0	175.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli	Prov. Sumsel		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	7	0	3.000.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli Prov. Sumsel	Stunting, Kemiskinan	
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dekumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	5	0	1.800.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli Prov. Sumsel		
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	20	0	1.946.500.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli Prov. Sumsel	Stunting	
35	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	0	176.520.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli Prov. Sumsel	Stunting	
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	0	123.930.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli Prov. Sumsel		
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	100	0	4.150.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli Prov. Sumsel		
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	%	100	0	150.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli Prov. Sumsel		
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehalan Jiwa (ODMK)	%	100	0	75.105.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli Prov. Sumsel		
40	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	4.730.206	0	116.000.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli Prov. Sumsel	Stunting, Kemiskinan	
41	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	100	0	325.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli Prov. Sumsel	Stunting	
42	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/ Kota	Paket	1	0	415.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli Prov. Sumsel		
43	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Paket	1	0	350.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli Prov. Sumsel		
44	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	98	0	250.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli Prov. Sumsel		
45	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	%	100	0	350.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli Prov. Sumsel		
46	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	20	0	702.365.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli Prov. Sumsel		
47	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	20	0	3.548.538.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli Prov. Sumsel		
48	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	1	0	500.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli Prov. Sumsel		
xii	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					330.000.000	0	0,00	0,00				
49	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	0	330.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli Prov. Sumsel		
xiii	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					1.770.394.000	56.600.000	3,20	4,25				
50	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	100	0	42.920.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli Prov. Sumsel		
51	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	90	9	752.900.000	56.600.000	7,52	10,00	Pendapatan Daerah (PAD)	Asli Prov. Sumsel		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	90	0	974.574.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prov. Sumsel		
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					1.574.533.000	0	0,00	0,00				
xiv	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi					130.000.000	0	0,00	0,00				
53	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Paket	1	0	82.612.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prov. Sumsel		
54	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Paket	1	0	47.388.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prov. Sumsel		
xv	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					1.444.533.000	0	0,00	0,00				
55	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	Paket	1	0	944.533.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prov. Sumsel		
56	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehalan	Paket	1	0	500.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prov. Sumsel		
IV	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman					697.028.000	0	0,00	0,00				
xvi	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)					697.028.000	0	0,00	0,00				
57	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	Sarana	35	0	697.028.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prov. Sumsel		
V	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					2.738.031.500	0	0,00	0,00				
xvii	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					1.238.031.500	0	0,00	0,00				
58	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	8	0	1.238.031.500	0	0,00	0,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prov. Sumsel	Stunting	
xviii	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi					1.500.000.000	0	0,00	0,00				
59	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Paket	1	0	1.500.000.000	0	0,00	0,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prov. Sumsel	Stunting	
JUMLAH						387.628.402.000	45.245.532.380	11,67	12,95				

RS. Dr. Ernaldi Bahar

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Rumas Sakit Ernaldi Bahar

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	27,91	36.193.469.000	8.987.694.701	24,83	27,91	APBD	RS Ernaldi Bahar		
i	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	%	100%	0%	416.570.000	0	0,00	0,00	APBD	RS Ernaldi Bahar		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1 paket	0 paket	416.570.000	0	0,00	0,00	APBD	RS Ernaldi Bahar		
ii	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang tersedia	%	100%	0%	965.000.000	0	0,00	0,00	APBD	RS Ernaldi Bahar		
2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	unit	5 unit	0 unit	725.000.000	0	0,00	0,00	APBD	RS Ernaldi Bahar		
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	27 unit	0 unit	240.000.000	0	0,00	0,00	APBD	RS Ernaldi Bahar		
iii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	25,00%	6.811.899.000	1.195.826.375	17,55	25,00	APBD	RS Ernaldi Bahar		
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12 laporan	3 laporan	2.712.000.000	547.234.375	20,18	25,00	APBD	RS Ernaldi Bahar		
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12 laporan	3 laporan	4.099.899.000	648.592.000	15,82	25,00	APBD	RS Ernaldi Bahar		
iv	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	%	100%	30,00%	28.000.000.000	7.791.868.326	27,83	30,00	BLUD	RS Ernaldi Bahar		
6	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	unit kerja	1 unit kerja	30,00%	28.000.000.000	7.791.868.326	27,83	30,00	BLUD	RS Ernaldi Bahar		Fleksibilitas penggunaan anggaran BLUD
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase terpenuhinya program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	80%	0,00%	8.903.283.067	0	0,00	0,00	APBD	RS Ernaldi Bahar		
v	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP, Rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	%	85%	0,00%	8.903.283.067	0	0,00	0,00	APBD	RS Ernaldi Bahar		
7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	gedung	8 gedung	0 gedung	6.770.000.000	0	0,00	0,00	APBD	RS Ernaldi Bahar	Pengentasan kemiskinan	
8	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	unit	12 unit	0 unit	2.023.283.067	0	0,00	0,00	APBD	RS Ernaldi Bahar	Pengentasan kemiskinan	
9	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah sarana di fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	unit	2 unit	0 unit	110.000.000	0	0,00	0,00	APBD	RS Ernaldi Bahar		
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase terpenuhinya program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	100%	0%	385.200.000	0	0,00	0,00	APBD	RS Ernaldi Bahar		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
vi	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektorl Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral tingkat daerah provinsi	%	100%	0%	385.200.000	0	0,00	0,00	APBD	RS Ernaldi Bahar		
10	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	dokumen	15 dokumen	0 dokumen	385.200.000	0	0,00	0,00	APBD	RS Ernaldi Bahar	Pengentasan kemiskinan	
	Jumlah					45.481.952.067	8.987.694.701	19,76	22,21				

RSUD Siti Fatimah

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : RSUD Siti Fatimah

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	24,87%	107.769.189.000	23.026.205.696	21,37	23,13				
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	95%	29,48%	400.000.000	2.200.000	0,55	2,32				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	21 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000	-	0,00	1,05	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		Proses pembayaran
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8 Laporan	4 Laporan	200.000.000	2.200.000	1,10	3,60	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		Proses pembayaran
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100%	0	900.000.000	-	0,00	-				
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3 Dokumen	0	200.000.000	-	0,00	-	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		Belum mulai Kegiatan
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	600.000.000	-	0,00	-	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		Belum mulai Kegiatan
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12 Laporan	2 Laporan	100.000.000	-	0,00	-	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		Proses Cetak
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	%	5%	0,01%	3.080.000.000	121.810.754	3,95	5,75				
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1 Paket	0	1.080.000.000	-	0,00	-	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		Dalam Proses Pengadaan
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	900 Orang	10 orang	1.900.000.000	121.810.754	6,41	9,31	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		Dalam Proses Pembayaran
8	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Orang	1 Orang	0	100.000.000	-	0,00	-	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		Belum mulai kegiatan
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	0	10.081.000.000	7.411.300	0,07	0,72				
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	0	1.831.000.000	-	0,00	-	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		Belum mulai Kegiatan
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	0	2.200.000.000	-	0,00	-	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	0	4.500.000.000	-	0,00	-	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		Belum mulai kegiatan
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40 Laporan	0	1.550.000.000	7.411.300	0,48	4,66	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		Belum mulai kegiatan
v	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	%	89%	0	15.708.189.000	-	0,00	-				
13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	4 Unit	0	760.000.000	-	0,00	-	APBD			Belum mulai kegiatan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1 Paket	0	3.000.000.000	-	0,00	-	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		Belum mulai kegiatan
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1 Unit	0	10.448.189.000	-	0,00	-	APBD dan DAK Fisik			Belum mulai kegiatan
16	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	0	1.500.000.000	-	0,00	-	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		Belum mulai kegiatan
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	25%	28.500.000.000	3.612.343.791	12,67	18,80				
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	14.000.000.000	2.745.803.791	19,61	19,71	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		Proses pembayaran
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	0	2.500.000.000	-	0,00	-	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		Belum mulai kegiatan
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12.000.000.000	866.540.000	7,22	21,66	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		
vii	Pemeliharaan BMD penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpelihara	%	89%	45%	5.100.000.000	91.870.300	1,80	2,24				
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1 Unit	1 Unit	2.500.000.000	91.870.300	3,67	4,58	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1 Unit	0	2.600.000.000	-	0,00	-	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		Belum mulai kegiatan
viii	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan BLUD	%	100%	100%	44.000.000.000	19.190.569.551	43,61	43,61				
22	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	44.000.000.000	19.190.569.551	43,61	43,61	BLUD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan upaya keseharan masyarakat yang dilayani	%	100%	0,34%	243.989.468.993	1.384.836.905	0,57	1,06				
ix	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	65%	0,09%	239.989.468.993	1.190.143.169	0,50	0,94				
23	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Unit	5 Unit	0	6.000.000.000	-	0,00	3,99	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		Proses Kontrak
24	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	17 Unit	8 Unit	74.816.811.000	-	0,00	-	APBD dan DAK Fisik	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		Proses Pengiriman Barang
25	Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	1 Unit	0	7.500.000.000	-	0,00	-	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		Dalam Proses Klik

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1 Unit	0	124.672.657.993	-	0,00	-	APBD dan DAK Fisik	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		Persiapan Tender
27	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di fasilitas Kesehatan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	27.000.000.000	1.190.143.169	4,41	7,45	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		
x	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terpenuhiannya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	%	100%	16,60%	4.000.000.000	194.693.736	4,87	8,68				
28	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	4.000.000.000	194.693.736	4,87	8,68	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Meningkatkan	%	100%	73,70%	36.500.000.000	3.076.163.000	8,43	12,51				
xi	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	%	90%	57,41%	36.000.000.000	3.074.863.000	8,54	12,67				
29	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	775 Orang	445 orang	36.000.000.000	3.074.863.000	8,54	12,67	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		
xii	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terpenuhiannya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	%	100%	90%	500.000.000	1.300.000	0,26	1,06				
30	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	50 Orang	45 Orang	500.000.000	1.300.000	0,26	1,06	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		
IV	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	%	100%	100%	1.100.000.000	15.075.000	1,37	1,48				
xiii	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	%	100%	20%	600.000.000	15.075.000	2,51	2,72				
31	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000	15.075.000	2,51	2,72	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		
xiv	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	%	100%	0%	500.000.000	-	0,00	-				

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen			250.000.000	-	0,00	-	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		Belum mulai kegiatan
33	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1 Dokumen		250.000.000	-	0,00	-	APBD	RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel		Belum mulai kegiatan
Jumlah						389.358.657.993	27.502.280.601	7,06	8,24				

Rumah Sakit Mata

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pen dorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi					34.741.011.000	5.853.155.504	16,85	16,85	APBD/BLUD	RSK MATA		
i	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.741.011.000	258.938.000	14,87	14,87	APBD	RSK MATA		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	tahun	12 laporan	47 orang	1.741.011.000	258.938.000	14,87	14,87	APBD	RSK MATA	Kemiskinan	Tidak ada
ii	Peningkatan Pelayanan BLUD					33.000.000.000	5.594.217.504	16,95	16,95	BLUD	RSK MATA		
2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	tahun	1 unit kerja	100%	33.000.000.000	5.594.217.504	16,95	16,95	BLUD	RSK MATA	Kemiskinan	Tidak ada
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					1.069.946.000	0	0,00	0,00	APBD	RSK MATA		
iii	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					1.069.946.000	0	0,00	0,00	APBD	RSK MATA		
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif	kegiatan	1 dokumen	2800 siswa/i	1.069.946.000	0	0,00	0,00	APBD	RSK MATA	Kemiskinan	Tidak ada
Jumlah						35.810.957.000	5.853.155.504	16,34	16,34				

Rumah Sakit Gigi dan Mulut

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah				12.680.170.000	2.518.930.132	19,87	30,74				
i	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Paket	1 Paket	0 Paket	220.000.000	0	0,00	0,00	APBD	RSKGM, Palembang		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1 Paket	0 Paket	220.000.000	0	0,00	0,00	APBD	RSKGM, Palembang	-	Sedang dalam proses pemilihan penyedia
ii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24 laporan	4 laporan	3.460.170.000	404.119.579	11,68	25,00	APBD	RSKGM, Palembang		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	2 Laporan	818.730.000	169.483.579	20,70	25,00	APBD	RSKGM, Palembang	-	Berkas masih tahap verifikasi di bagian keuangan
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	2 Laporan	2.641.440.000	234.636.000	8,88	25,00	APBD	RSKGM, Palembang	-	Berkas masih tahap verifikasi di bagian keuangan
iii	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan BLUD	Unit Kerja	1 Unit kerja	1 Unit kerja	9.000.000.000	2.114.810.553	23,50	33,70	BLUD	RSKGM, Palembang		
4	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1 Unit kerja	1 Unit kerja	9.000.000.000	2.114.810.553	23,50	33,70	BLUD	RSKGM, Palembang	-	Realisasi belanja modal bangunan gedung kantor masih Rp.0,- karena masih proses koordinasi dengan Tim Pengelola Teknis PU
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				400.000.000	0	0,00	40,60	APBD	RSKGM, Palembang		
iv	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM Dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Paket	1 Paket	0 Paket	400.000.000	0	0,00	40,60	APBD	RSKGM, Palembang		
5	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	1 Paket	0 Paket	400.000.000	0	0,00	40,60	APBD	RSKGM, Palembang	-	Berkas masih tahap verifikasi di bagian keuangan
Jumlah						13.080.170.000	2.518.930.132	19,26	31,04				

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					38.578.907.921	4.681.342.560	12,13	13,94				
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					835.000.000	0	0,00	5,00				
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		267.000.000	0	0,00	5,00		Prov. Sumsel		
	2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Laporan	1 Laporan		35.000.000	0	0,00	5,00		Prov. Sumsel		
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	1 Laporan	1 Laporan		533.000.000	0	0,00	5,00		Prov. Sumsel		
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					18.397.200.961	4.249.102.680	23,10	24,95				
	4 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	88 orang/bulan	88 orang/bulan	Gaji dan Tunjangan ASN	13.313.434.000	3.549.811.680	26,66	25,00		Prov. Sumsel		
	5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	117 Dokumen	117 Dokumen	Jasa Tenaga Administrasi (PTT dan TKPD)	5.048.766.961	699.291.000	13,85	25,00		Prov. Sumsel		
	6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		35.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.302.000.000	29.291.800	2,25	7,68				
	7 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket		502.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
	8 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	17 Orang		600.000.000	29.291.800	4,88	15,00		Prov. Sumsel		
	9 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	30 Orang	30 Orang		200.000.000	0	0,00	5,00		Prov. Sumsel		
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.934.000.000	191.849.500	6,54	11,73				
	10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket		50.000.000	15.000.000	30,00	33,00		Prov. Sumsel		
	11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		200.000.000	49.925.500	24,96	33,00		Prov. Sumsel		
	12 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		750.000.000	77.024.000	10,27	15,00		Prov. Sumsel		
	13 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		150.000.000	49.900.000	33,27	40,00		Prov. Sumsel		
	14 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen		10.000.000	0	0,00	5,00		Prov. Sumsel		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1 Laporan	1 Laporan		150.000.000	0	0,00	5,00		Prov. Sumsel		
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan		700.000.000	0	0,00	5,00				
17	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		924.000.000	0	0,00	5,00				
v	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9.873.540.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
18	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		1.140.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		753.500.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
20	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		1.180.040.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		50.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
22	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit		5.100.000.000	0	0,00	0,00		Kota Palembang		
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	7 Unit	7 Unit		1.650.000.000	0	0,00	0,00		Kota Palembang		
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.958.400.000	211.098.580	10,78	15,46		Kota Palembang		
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 Laporan	14 Laporan		1.070.000.000	161.148.580	15,06	20,00		Kota Palembang		
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 Laporan	3 Laporan		888.400.000	49.950.000	5,62	10,00		Kota Palembang		
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.278.766.960	0	0,00	0,00		Kota Palembang		
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	22 Unit	22 Unit		750.000.000	0	0,00	0,00		Kota Palembang		
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	4 Unit	4 Unit		280.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit	1 Unit		100.000.000	0	0,00	0,00		Kota Palembang		
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit		1.950.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit		198.766.960	0	0,00	0,00		Kota Palembang		
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					93.398.286.039	10.000.000	0,01	0,07				
ix	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					50.961.541.039	0	0,00	0,00				

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya melalui koordinasi dan sinkronisasi	1 lembaga	1 lembaga		250.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
32	Rehabilitasi Embung dan penampungan air lainnya	Jumlah embung dan penumpangan air lainnya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		2.500.000.000	0	0,00	0,00		Kab. Muara Enim		
33	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang di normalisasi / Direstorasi	7,5 KM	7,5 KM		19.974.363.000	0	0,00	0,00		Kab. Ogan Ilir, Kab. Banyuasin, Kab. OKU Timur, Kab. OKI, Kab. OKU, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Lahat, Kota Palembang, Kab. OKUT, Ogan Ilir, Lahat		
34	Evaluasi dan rekomendasi Teknis (Rekomtek) pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Rekomtek Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0 Dokumen		100.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
35	Pembangunan Polder/Kolam retensi	Luas Polder/kolam retensi yang di bangun	1 Unit	1 Unit		1.000.000.000	0	0,00	0,00		Kota Palembang		
36	Operasi dan Pemeliharaan sungai	Panjang sungai yang dioperasikan dan dipelihara	5,5 KM	5,5 KM		6.248.778.039	0	0,00	0,00		Kota Palembang		
37	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualittas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0 Dokumen		3.020.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
38	Peningkatan Polder/Kolam retensi	Jumlah Polder/kolam retensi yang di tingkatan	1 Unit	1 Unit		4.458.830.000	0	0,00	0,00		Kota Palembang		
39	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun	5 Titik	5 Titik		1.032.500.000	0	0,00	0,00		Kab. Musi Rawas, Kab. Banyuasin, Kab. OKI		
40	Pembangunan bangunan perkuatan tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun	0,8 KM	0,8 KM		10.827.070.000	0	0,00	0,00		Kota Palembang, Kab. Empat Lawang, Kab. OKU Timur, Kab. OKU, Kab. Banyuasin		
41	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, danau dan bangunan penumpangan air lainnya yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		161.500.000	0	0,00	0,00		Kab. Banyuasin, Kab. OKI dan		
42	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, danau dan bangunan penumpangan air lainnya yang disusun	14 Dokumen	14 Dokumen		150.000.000	0		0,00				
43	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	8 Dokumen	8 Dokumen		1.238.500.000	0	0,00	0,00		Prov sumsel		
x	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					42.436.745.000	10.000.000	0,02	0,16		Prov. Sumsel		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	4 KM	4 KM		23.993.610.000	0	0,00	0,00		Kab. Musi Rawas, Kab.Lahat, Kab. OKUS, Kota PagarAlam		
45	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi	5 Km	5 Km		9.944.535.000	0	0,00	0,00		Kab. OKUT dan Kab. OKI		
46	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	1,4 KM	1,4 KM		3.189.400.000	0	0,00	0,00		Kab. Empat Lawang, Kab. Lahat, Kab. OKUS, Kab. Muara Enim, Kab. Musi Rawas, Kota Pagaram		
47	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara	0,5 KM	0,5 KM		782.200.000	0	0,00	0,00		Kab. OI dan Kab. OKUT		
48	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi rawa	4 dokumen	4 dokumen		4.077.000.000	0	0,00	0,00		Kab. Lahat, Kab. OKUS, Kab. Musi Rawas		
49	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah unit lembaga pengelolaan irigasi yang beroperasi	1 lembaga	1 lembaga		450.000.000	10.000.000	2,22	15,00		Prov. Sumsel		
Jumlah						131.977.193.960	4.691.342.560	3,55	4,29				

*Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Tata
Ruang*

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio kemantapan jalan (%)	Persentase (%)	87,00	-	550.654.708.822	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
i	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan Provinsi yang ditangani (Km)	Km	1779,27	-	550.654.708.822	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
1	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang penyelenggaraannya diawasi	Km	1779,27	-	29.000.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
2	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara secara rutin	Paket	2,00	-	5.080.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
3	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara secara berkala	Paket	2,00	-	7.580.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
4	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang dipantau dan dievaluasi penyelenggaraannya	Km	1779,27	-	400.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
5	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	Km	12,67	-	85.460.488.822	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel, Kab. OKUS, Kab. OKU, Kab. OKUT, Kab. MUARA ENIM, Kab. PALI, Kab. LAHAT, Kab. EMPAT LAWANG, Kab. OKI, Kab. OI,		
6	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan direkonstruksi	Km	10,94	-	88.516.418.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel, Kab. OKUS, Kab. Banyuasin, Kab. MURA, Kab. OI, Kab. MUBA, Kab. EMPAT LAWANG,		
7	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	Unit	1,00	-	7.520.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel, Kota Palembang		
8	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	1779,28	-	18.102.820.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel, Kab. OKU, Kab. OKUS, Provinsi Sumsel, Kab. OKUT, Kab. Muara Enim, Kab. PALI, Kota PAGARALAM, Kab. LAHAT, Kab. EMPAT LAWANG, Kab. Banyuasin, Kab. MUBA, Kab. OKI, Kab. OI, Kab. MURA, Kab. MURATARA, Kota Lubuk Linggau,		
9	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang diganti	Unit	9,00	-	75.300.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel, Kab. OKU, Kab. PALI, Kab. OI, Kab. Musi Rawas,		
10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Km	76,16	-	164.120.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
11	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Km	6,15	-	37.044.982.000	0	0,00	0,00	DAK Fisik	Prov. Sumsel		
12	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, kebijakan, strategi dan teknis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan yang disusun	Dokumen	12,00	-	16.900.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	Km	1,00	-	11.120.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel, Kab. OKUT		
14	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang disurvey kondisinya	Km dan M	1779,27 Km dan 9.044,780 M	-	2.580.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
15	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang dikelola	Dokumen	3,00	-	1.930.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase (%)	75,00	-	6.000.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
ii	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan RTR yang ditetapkan	Dokumen	2,00	-	1.500.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
16	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen	2,00	-	350.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
17	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah Publikasi informasi Penataan Ruang	Dokumen	1,00	-	350.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
18	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pemangku Kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Org	3,00	-	800.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
iii	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Dokumen	14,00	-	2.175.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
19	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Laporan	1,00	-	600.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
20	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	-	200.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
21	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	Dokumen	6,00	-	775.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
22	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kab/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen	8,00	-	600.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
iv	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Dokumen	2,00	-	1.385.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
23	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan Ketentuan Waktu yang berlaku	Layanan	8,00	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
24	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Laporan	1,00	-	735.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
25	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non berusaha	Jumlah Layanan KKPR sesuai dengan Ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	7,00	-	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
26	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Dokumen	1,00	-	300.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
27	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1,00	-	200.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
v	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Dokumen	4,00	-	940.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
28	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus	1,00	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah Kasus Indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang	Kasus	1,00	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
30	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Doumen	1,00	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
31	Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	5,00	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
32	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah Dokumen Tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen	1,00	-	350.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
33	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Penyataan Mandiri Pelaku UMK	Dokumen Tekstual dan spasial hasil penilaian pelaksanan kesesuaian Kegiatan pemanfaatan ruang	Dokumen	1,00	-	190.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase (%)	100,00	-	79.051.055.673	9.560.989.790	12,09	12,09	APBD	Prov. Sumsel		
vi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	12,00	-	1.480.224.273	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
34	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12,00	-	776.024.273	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel, Palembang		
35	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	-	20.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
36	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	-	25.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
37	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	-	20.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
38	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00	-	25.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
39	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1,00	-	284.200.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
40	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1,00	-	330.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel, Palembang		
vii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen	35,00		42.194.731.400	9.017.289.091	21,37	21,37	APBD	Prov. Sumsel		
41	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	261,00	261,00	34.299.006.000	8.035.810.381	23,43	23,43	APBD	Provinsi Sumsel		
42	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	2,00	6.763.575.000	981.478.710	14,51	14,51	APBD	Provinsi Sumsel		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,00	-	1.000.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel		
44	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1,00	-	20.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel		
45	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1,00	-	62.150.400	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel		
46	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2,00	-	20.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel		
47	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	17,00	-	20.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel		
48	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	-	10.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel		
viii	Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	Dokumen	7,00		3.462.600.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
49	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	-	2.000.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel		
50	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1,00	-	350.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel		
51	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2,00	-	900.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel		
52	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	-	100.000.000	0	0,00		APBD	Provinsi Sumsel		
53	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	-	112.600.000	0	0,00		APBD	Provinsi Sumsel		
ix	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan kepegawaian	Dokumen	4,00		1.430.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
54	Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	12,00	-	95.000.000	0	0,00		APBD	Provinsi Sumsel		
55	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2,00	-	150.000.000	0	0,00		APBD	Provinsi Sumsel		
56	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dokumen	2,00	-	1.085.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel, Palembang		
57	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30,00	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel		
x	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi PD	Layanan	10,00		2.286.300.000	227.278.100	9,94	9,94	APBD	Prov. Sumsel		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	-	89.250.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel		
59	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	-	296.370.000	126.568.100	42,71	42,71	APBD	Provinsi Sumsel		
60	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12,00	-	305.340.000	100.710.000	32,98	32,98	APBD	Provinsi Sumsel		
61	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel		
62	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	-	200.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel		
63	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	-	55.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel		
64	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12,00	-	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel		
65	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	-	700.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel		
66	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	-	190.340.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel		
67	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	-	300.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel		
xi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan BMD	Unit	7,00		9.210.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
68	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2,00	-	1.000.000.000		0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel		
69	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	-	400.000.000		0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel		
70	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3,00	-	7.810.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel		
xii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan jasa PD	Layanan	3,00		4.217.200.000	163.247.099	3,87	3,87	APBD	Prov. Sumsel		
71	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	-	15.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel		
72	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	11,00	2,00	1.890.000.000	163.247.099	8,64	8,64	APBD	Provinsi Sumsel		
73	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	-	2.312.200.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel, Palembang		
xiii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	% (Persen)	100,00		14.420.000.000	153.175.500	1,06	1,06	APBD	Prov. Sumsel		
74	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	75,00	-	1.970.000.000	153.175.500	7,78	7,78	APBD	Provinsi Sumsel, Palembang		
75	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Bln	12,00	-	60.000.000		0,00	0,00		Provinsi Sumsel		
76	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bln	12,00	-	4.025.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumsel, Palembang		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00	-	8.365.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel, Provinsi Sumsel		
xiv	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase meningkatnya pelayanan kesehatan BLUD	% (Persen)	100,00		350.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Prov. Sumsel		
78	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1,00	-	350.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumsel		
Jumlah						635.705.764.495	9.560.989.790	1,50	1,50				

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen		34.498.334.678	4.468.576.464	12,95	13,60		Prov. Sumsel		
		Persentase Pelaksanaan Program Pengembangan Permukiman dan Bangunan yang Terpublikasi	80	Persen									
i	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen		1.052.500.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen		387.500.000	0	0,00	0,00		Dalam dan Luar Daerah	P3DN	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		30.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		15.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		30.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		15.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan		275.000.000	0	0,00	0,00		Dalam dan Luar Daerah	P3DN	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan		300.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang Tersusun	100	Persen		16.696.400.000	4.057.970.464	24,30	23,52		Prov. Sumsel	P3DN	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115	Orang		15.709.100.000	4.057.970.464	25,83	25,00		Prov. Sumsel	P3DN	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen		820.300.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen		20.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		107.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen		20.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1	Laporan		20.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersusun	100	Persen		75.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
14	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen		10.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
15	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan		65.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terlayani	100	Persen		580.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket		235.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
17	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		95.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
18	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen		20.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	Orang		200.000.000	0	0,00	0,00		Dalam dan Luar Daerah	P3DN	
20	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	30	Orang		30.000.000	0	0,00	0,00		Dalam dan Luar Daerah	P3DN	
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100	Persen		3.347.195.678	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket		120.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket		869.916.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket		202.279.678	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket		55.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	Dokumen		25.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
26	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan		100.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan		975.000.000	0	0,00	0,00		Dalam dan Luar Daerah	P3DN	
28	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		1.000.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Penunjang Kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100	Persen		5.555.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
29	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit			5.000.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
30	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit		280.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
31	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit Sarpras Gedung		275.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100	Persen		4.429.955.000	410.606.000	9,27	17,27		Prov. Sumsel	P3DN	
32	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan		18.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan		800.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
34	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan		60.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan		3.551.955.000	410.606.000	11,56	21,53		Prov. Sumsel	P3DN	
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100	Persen		2.612.284.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 unit roda empat 3 unit roda dua			1.302.284.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit		150.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
39	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Unit		10.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		1.150.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
ix	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang menyediakan pelayanan	100	Persen		150.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
41	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		150.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	P3DN	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	83	Persen		2.921.400.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
		Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	83	Persen									
x	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2	Dokumen		77.500.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
42	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum	1	Dokumen		57.500.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
43	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1	Dokumen		20.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
xi	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Sosialisasi yang Tersusun	1	Dokumen		330.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
44	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	15	Orang		150.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
45	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	2	Orang		160.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	34	Orang		20.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
xii	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Porvinsi yang Terbangun / Terehabilitasi	9	Unit		2.363.900.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
47	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	6	Unit Rumah		970.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
48	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	8	Unit Rumah		1.000.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
49	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	1	Unit Rumah		393.900.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
xiii	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1	Dokumen		150.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
50	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	8	Rumah Tangga		150.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
III	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	11,43	Persen		19.275.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
xiv	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen /Laporan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha s.d dibawah 15 Ha	1	Dokumen		3.470.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
51	Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	6	Dokumen		1.630.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
52	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1	Sistem Informasi		500.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
53	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina	7	Kelompok Masyarakat		300.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	KEMISKINAN	
54	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	10	Rumah Tangga		190.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
55	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1	Laporan		450.000.000	0	0,00	0,00		Dalam dan Luar Daerah		
56	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100	Orang		200.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	KEMISKINAN	
57	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	10	Rumah Tangga		200.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
xv	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh 10-15 Ha yang ditingkatkan	8	Kws		15.805.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1	Laporan		190.000.000	0	0,00	0,00		Dalam dan Luar Daerah		
59	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	5	Unit Rumah		1.000.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
60	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1	Laporan		350.000.000	0	0,00	0,00		Dalam dan Luar Daerah		
61	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1	Dokumen		40.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
62	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	1	Hektar		5.025.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	KEMISKINAN	
63	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	1628,58	Ha		9.200.000.000	0	0,00	0,00		Kab/Kota	KEMISKINAN	
IV	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	36,1	%		50.792.500.000	0	0,00	0,00		17 Kab/Kota		
xvi	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang terselenggara	20	Lokasi		50.792.500.000	0	0,00	0,00		17 Kab/Kota		
64	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1	Dokumen		4.140.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
65	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	20	Lokasi		46.352.500.000	0	0,00	0,00		Kab/Kota	KEMISKINAN	
66	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	1	Laporan		300.000.000	0	0,00	0,00		dalam dan luar daerah		
V	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI KUALIFIKASI KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah di Wilayah Provinsi yang Tersertifikasi	1	%		200.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
xvii	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Jumlah Laporan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	1	Laporan		200.000.000	0	0,00	0,00		Dalam dan Luar Daerah		
66	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	1	Laporan		200.000.000	0	0,00	0,00		Dalam dan Luar Daerah		
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	89,35	Persen		1.425.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	1,5	Persen									
		Persentase dokumen air minum regional yang tersusun	12,5	Persen									
xvii i	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2	Dokumen		1.425.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
67	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kemitrannya	18	Lembaga		150.000.000	0	0,00	0,00		PALEMBANG	STUNTING	
68	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	17	Kab/Kota		400.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	STUNTING	
69	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1	Dokumen		875.000.000	0	0,00	0,00		Dalam dan Luar Daerah	STUNTING	
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase dokumen pendukung pembangunan infrastruktur persampahan regional yang tersusun	20	Persen		350.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
xix	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional yang tersedia	2	Dokumen		350.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
70	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1	Dokumen		350.000.000	0	0,00	0,00		Dalam dan Luar Daerah	STUNTING	
VIII	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	81,62	Persen		2.325.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
		Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	1,5	Persen									
		Persentase Kabupaten/Kota yang Mengoperasionalkan IPLT	64,71	Persen									
		Persentase dokumen sanitasi regional yang tersusun	12,5	Persen									
xx	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen sanitasi regional yang tersusun	2	Dokumen		2.325.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	4	Kab/Kota		775.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	STUNTING	
72	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	3	Dokumen		1.550.000.000	0	0,00	0,00		Dalam dan Luar Daerah	STUNTING	
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1	Persen		8.460.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
xxi	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Infrastruktur Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1	Unit		8.460.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
73	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	40	Rumah Tangga		1.050.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	STUNTING	
74	Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	4	Ton/hari		3.810.000.000	0	0,00	0,00			STUNTING	
75	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	2	Unit		500.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	STUNTING	
76	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	3	Unit		3.100.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel	STUNTING	
X	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani	33	Persen		1.300.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
xxii	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung dan Lingkungan Ruang Publik yang telah terselenggara	3	Gedung		1.300.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
77	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	10	Peserta		500.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
78	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	10	Rumah Negara		100.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
79	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	10	Lisensi		200.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
80	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	17	Kab/Kota		500.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
XI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan yang tertangani	33	Persen		4.775.000.000	0	0,00	0,00		Dalam dan Luar Daerah		
xxii i	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara	1	Kawasan		4.775.000.000	0	0,00	0,00		Dalam dan Luar Daerah		
81	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1	Kawasan		3.525.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
82	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen		250.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1	Dokumen		500.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
84	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	17	Kab/Kota		500.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
XII	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	0,47	%		4.617.100.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
xxiv	Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah SDM Tenaga Ahli konstruksi yang kompeten dan bersertifikat	140	Orang		2.362.900.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
85	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	15	Orang		250.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
86	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1	Dokumen		100.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
87	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	140	Orang		792.100.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
88	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	44	Lembaga		470.800.000	0	0,00	0,00		Dalam dan Luar Daerah		
89	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1	Dokumen		50.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
90	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	100	Orang		500.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
91	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi	40	Orang		100.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
92	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	2	Lembaga		100.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
xxv	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase data cakupan Provinsi yang diupdate melalui sistem informasi jasa konstruksi	70	%		1.854.200.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
93	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1	Layanan Informasi		134.200.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
94	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1	Perangkat Pendukung		1.200.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
95	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infomasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1	Dokumen		387.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
96	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	17	Orang		133.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
xxvi	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persentase kebijakan Jasa Konstruksi yang di implementasikan	75	%		400.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
97	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	2	Badan Usaha		300.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	2	Dokumen		100.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel		
Jumlah						130.939.334.678	4.468.576.464	3,41	3,58				

Satuan Polisi Pamong Praja

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pend orong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	-	37.095.126.808	7.671.138.180	20,68	32,53	PAD dan DAU			Nihil
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	%	100%	-	300.000.000	0	0,00	25,65	PAD			Nihil
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	-	115.000.000	0	0,00	30,00	PAD	17 Kab/ Kota		Nihil
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	-	90.000.000	0	0,00	25,00	PAD	Luar Daerah		Nihil
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	-	95.000.000	0	0,00	21,00	PAD	Luar Daerah		Nihil
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang terlaksana	%	100%	-	32.449.947.000	7.613.717.880	23,46	33,35	PAD dan DAU			Nihil
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org	157 Orang	-	27.211.971.000	6.656.199.880	24,46	35,00	PAD dan DAU	Palembang		Nihil
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	-	4.569.136.000	957.518.000	20,96	25,00	PAD	Palembang		Nihil
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1 Dokumen	-	468.840.000	0	0,00	22,00	PAD	Dalam dan Luar Daerah		Nihil
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1 Dokumen	-	100.000.000	0	0,00	26,00	PAD	Dalam dan Luar Daerah		Nihil
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	-	100.000.000	0	0,00	25,00	PAD	Dalam dan Luar Daerah		Nihil
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang terlaksana	%	100%	-	970.000.000	0	0,00	12,94	PAD			Nihil
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Besartra atribut	Paket	1 Paket	-	400.000.000	0	0,00	15,00	PAD	Palembang		Nihil
10	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1 Dokumen	-	200.000.000	0	0,00	10,00	PAD	Palembang		Nihil
11	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1 Dokumen	-	200.000.000	0	0,00	10,00	PAD	Palembang		Nihil
12	Pendidikan dan PelatihanPegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Org	5 Orang	-	170.000.000	0	0,00	15,00	PAD	Dalam dan Luar Daerah		Nihil
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang terlaksana	%	100%	-	1.458.179.808	0	0,00	34,83	PAD			Nihil
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Paket	2 Paket	-	80.000.000	0	0,00	25,00	PAD	Palembang		Nihil
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	-	61.622.410	0	0,00	17,00	PAD	Palembang		Nihil
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1 Paket	-	120.000.000	0	0,00	26,00	PAD	Palembang		Nihil
16	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	-	107.750.000	0	0,00	35,00	PAD	Palembang		Nihil

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pend orong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1 Dokumen	-	20.000.000	0	0,00	30,00	PAD	Palembang		Nihil
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	-	100.000.000	0	0,00	15,00	PAD	Palembang		Nihil
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	-	968.807.398	0	0,00	40,00	PAD	Dalam dan Luar Daerah		Nihil
v	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	%	100%	100%	50.000.000	0	0,00	15,00	PAD			Nihil
20	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1 Paket	-	50.000.000	0	0,00	15,00	PAD	Palembang		Nihil
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	%	100%	100%	272.000.000	0	0,00	29,61	PAD			Nihil
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen	1 Dokumen	-	7.000.000	0	0,00	15,00	PAD	Palembang		Nihil
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dokumen	1 Dokumen	-	265.000.000	0	0,00	30,00	PAD	Palembang		Nihil
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%	100%	100%	1.595.000.000	57.420.300	3,60	27,99	PAD			Nihil
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	87 unit	-	840.000.000	57.420.300	6,84	40,00	PAD	Palembang		Nihil
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7 Unit	-	325.000.000	0	0,00	20,00	PAD	Dalam Daerah		Nihil
25	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	5 Unit	-	30.000.000	0	0,00	18,00	PAD	Palembang		Nihil
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1Unit	-	200.000.000	0	0,00	10,00	PAD	Palembang		Nihil
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1Unit	-	200.000.000	0	0,00	10,00	PAD	Palembang		Nihil
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100%	100%	2.835.000.000	0	0,00	40,49	PAD			Nihil
viii	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Prov. Sumsel 2. Persentase Satlinmas yang aktif di Prov. Sumsel 3. Jumlah Aparatur/Masyarakat yang terbina terkait Perda dan Perkada, Ketentrman Umum, Perlindungan Masyarakat serta Bahaya Kebakaran	%, kab/kota	1. 100% 2. 98% 3. 17 Kab/Kota	1. 100% 2. 98% 3. 17 Kab/Kota	1.815.000.000	0	0,00	50,11	PAD			Nihil
28	Penyusunan SOP Ketertiban Umum danKetenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	1 Dokumen	-	20.000.000	0	0,00	20,00	PAD	Palembang		Nihil
29	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	125 Orang	-	300.000.000	0	0,00	23,00	PAD	Palembang		Nihil

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Dokumen	1 Dokumen	-	20.000.000	0	0,00	26,00	PAD	Palembang		Nihil
31	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	1 Laporan	-	575.000.000	0	0,00	24,00	PAD	Palembang		Nihil
32	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Laporan	1 Laporan	-	300.000.000	0	0,00	23,00	PAD	Dalam dan Luar Daerah		Nihil
33	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	1 dokumen	-	300.000.000	0	0,00	26,00	PAD	Dalam dan Luar Daerah		Nihil
34	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1 dokumen	-	300.000.000	0	0,00	25,00	PAD	Palembang		Nihil
ix	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	95%	95%	670.000.000	0	0,00	25,97	PAD	17 kab/Kota		Nihil
35	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	1 Laporan	-	200.000.000	0	0,00	25,00	PAD	Dalam Daerah		Nihil
36	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	1 Laporan	-	150.000.000	0	0,00	26,00	PAD	Dalam Daerah		Nihil
37	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	1 Laporan	-	200.000.000	0	0,00	30,00	PAD	Dalam Daerah		Nihil
38	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				-	20.000.000	0	0,00	25,00	PAD	Dalam Daerah		Nihil
39	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	1 Laporan	-	100.000.000	0	0,00	20,00	PAD	Dalam Daerah		Nihil
x	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Pembinaan PPNS	%	100%	100%	350.000.000	0	0,00	18,34	PAD			Nihil
40	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakkan Perda	Laporan	1 Laporan	-	130.000.000	0	0,00	20,00	PAD	-		Nihil
41	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	1 Dokumen	-	145.000.000	0	0,00	16,00	PAD	Dalam dan Luar Daerah		Nihil
42	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Laporan	1 Laporan	-	75.000.000	0	0,00	20,00	PAD	Palembang		Nihil

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	50%	50%	757.656.590	0	0,00	25,45	PAD			Nihil
xi	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1. Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan 2. Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	%	1. 50% 2. 50%	1. 50% 2. 50%	757.656.590	0	0,00	25,45	PAD			Nihil
43	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	1 Dokumen	-	75.000.000	0	0,00	30,00	PAD	Dalam dan Luar Daerah		Nihil
44	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	20 Keluarga	-	100.000.000	0	0,00	25,00	PAD	Dalam dan Luar Daerah		Nihil
45	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	-	150.000.000	0	0,00	23,00	PAD	Dalam dan Luar Daerah		Nihil
46	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	1 Dokumen	-	200.000.000	0	0,00	25,00	PAD	Dalam dan Luar Daerah		Nihil
47	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasikepada Pemangku Kepentingan dan MasyarakatTerkait Pencegahan, Penanggulangan, PenyelamatanKebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen	1 Dokumen	-	100.000.000	0	0,00	25,00	PAD	Dalam dan Luar Daerah		Nihil
48	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	1Unit	-	132.656.590	0	0,00	27,00	PAD	Palembang		Nihil
Jumlah						40.687.783.398	7.671.138.180	18,85	32,95				

Dinas Sosial

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prosentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi	%	100%	20,00	23.961.892.000	4.189.628.191	17,48	23,07	APBD	17 Kabupaten/Kota		
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilakukan	Dokumen	3 Dokumen	31,67	550.000.000	0	0,00	25,00	APBD	17 Kabupaten/Kota		
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	30,00	250.000.000	0	0,00	30,00	APBD	Palembang		
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersedia	Laporan	1 Laporan	50,00	50.000.000	0	0,00	50,00	APBD	Palembang		
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4 Dokumen	15,00	250.000.000	0	0,00	15,00	APBD	17 Kabupaten/Kota		
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kegiatan administrasi keuangan PD yang dilaksanakan	Unit	68 Unit	31,25	18.501.579.000	4.000.664.685	21,62	25,07	APBD	Palembang dan OI		
	4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gai dan Tunjangan ASN	orang/bln	100 orang/bln	25,00	16.322.079.000	3.741.694.685	22,92	25,00	APBD	Palembang dan OI		
	5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	25,00	1.679.500.000	258.970.000	15,42	25,00	APBD	Palembang dan OI		
	6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	Dokumen	12 Dokumen	25,00	450.000.000	0	0,00	25,00	APBD	Palembang dan OI		
	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	50,00	50.000.000	0	0,00	50,00	APBD	Palembang dan OI		
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	Lokasi	3 Lokasi	30,00	30.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Palembang dan OI		
	8 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik daerah pada SKPD	Laporan	1 Laporan	30,00	30.000.000	0	0,00	30,00	APBD	Palembang dan OI		
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	Lokasi	3 Lokasi	12,50	225.900.000	0	0,00	24,91	APBD	Palembang dan OI		
	9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Unit	1 Unit	30,00	15.900.000	0	0,00	30,00	APBD	Palembang dan OI		
	10 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10 Orang	10,00	150.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang dan OI		
	11 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50 Orang	5,00	30.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Palembang dan OI		
	12 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan	Orang	50 Orang	5,00	30.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Palembang dan OI		
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	Orang	500 Orang	10,00	1.634.413.000	0	0,00	14,83	APBD	Palembang dan OI		
	13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1 paket	10,00	24.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang dan OI		
	14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1 paket	5,00	300.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Palembang dan OI		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	3 paket	5,00	50.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Palembang dan OI		
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12 paket	10,00	60.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang dan OI		
17	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	dok	12 dok	10,00	9.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang dan OI		
18	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	12 paket	15,00	204.413.000	0	0,00	15,00	APBD	Palembang dan OI		
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap	20 Lap	10,00	12.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang dan OI		
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	1 Lap	20,00	900.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.		
21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dok	1 dok	5,00	75.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.		
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase layanan pemeliharaan BMD yang terlaksana	%	100%	6,67	700.000.000	0	0,00	6,43	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI		
22	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1 Unit	5,00	300.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI		
23	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1 Paket	5,00	200.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI		
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	10 unit	10,00	200.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI		
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan PD yang terlaksana	%	100%	20,00	1.227.000.000	188.963.506	15,40	24,35	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 Laporan	15,00	12.000.000	0	0,00	15,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI		
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	30,00	765.000.000	157.883.506	20,64	30,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI		
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12 Laporan	15,00	450.000.000	31.080.000	6,91	15,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI		
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase layanan pemeliharaan BMD yang terlaksana	%	100%	10,00	1.093.000.000	0	0,00	9,97	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI		
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Unit	32 Unit	20,00	350.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI		
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3 unit	10,00	36.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI		
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100 Unit	5,00	24.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	13 unit	5,00	683.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawwas, Kab. OKI, Kota Palembang, Lubuk Linggau, OI		
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase kegiatan Pemberdayaan Sosial yang terlaksana	%	100%	5,00	530.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.		
ix	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		%	100%	5,00	530.000.000	0	0,00	5,00	APBD	17 Kab/Kota	Kemiskinan	
32	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	PSKS	100 PSKS	5,00	130.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
33	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	org	240 org	5,00	100.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
34	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Keluarga	200 Keluarga	5,00	150.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
35	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	240 Lembaga	5,00	150.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
III	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORAN TINDAK KEKERASAN	Prosentase kegiatan Penanganan Warga Negara Migran tindak kekerasan yang terlaksana	%	100%	5,00	50.000.000	0	0,00	5,00	APBD	SumSel	Kemiskinan	
x	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Prosentase kegiatan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal yang terlaksana	%	100%	5,00	50.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
36	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kaupaten/kota	org	15 org	5,00	50.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
IV	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang mendapatkan program Rehabilitasi Sosial	%	100%	11,00	9.947.830.000	1.063.169.900	10,69	21,46	APBD	SumSel	Kemiskinan	
xi	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Prosentase Disabilitas terlantar yg terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	100%	12,00	1.065.885.000	50.921.200	4,78	14,29	APBD	Sumsel	Kemiskinan	
37	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	org	25 org	25,00	252.375.000	20.921.200	8,29	25,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
39	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	org	25 org	15,00	20.000.000	0	0,00	15,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
40	Penyediaan Asrama yang Mudah diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	org	25 org	5,00	250.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan provinsi	org	44 org	5,00	197.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
42	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	org	25 org	25,00	20.000.000	0	0,00	25,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
43	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	org	25 org	25,00	212.510.000	30.000.000	14,12	25,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
44	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas hidup sehari - hari kewenangan provinsi	org	25 org	5,00	50.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
45	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	org	25 org	5,00	29.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
46	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan provinsi	org	25 org	5,00	10.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
47	Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	lap	25 lap	5,00	25.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
xii	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Prosentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	100%	28,33	1.575.775.000	294.457.300	18,69	25,79	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
48	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	org	130 org	25,00	1.034.775.000	167.222.600	16,16	25,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
49	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	org	130 org	15,00	70.000.000	0	0,00	15,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
50	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	org	130 org	5,00	15.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
51	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	org	130 org	25,00	366.000.000	82.327.200	22,49	25,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
52	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas hidup sehari - hari kewenangan provinsi	org	130 org	50,00	50.000.000	24.995.000	49,99	50,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
53	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	org	130 org	50,00	40.000.000	19.912.500	49,78	50,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
xiii	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Prosentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	100%	14,17	2.983.000.000	390.004.000	13,07	21,83	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
54	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	org	200 org	25,00	1.971.000.000	318.004.000	16,13	25,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	org	200 org	15,00	100.360.000	0	0,00	15,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
56	Penyediaan Asrama yang Mudah diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	org	200 org	5,00	250.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
57	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan provinsi	org	200 org	5,00	100.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
58	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	org	200 org	15,00	31.640.000	0	0,00	15,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
59	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	org	200 org	25,00	360.000.000	60.000.000	16,67	25,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
60	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas hidup sehari - hari kewenangan provinsi	org	200 org	25,00	50.000.000	0	0,00	25,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
61	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	org	200 org	10,00	20.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
62	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	org	200 org	5,00	10.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
63	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan provinsi	org	200 org	5,00	10.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
64	Pemulasaran	Jumlah Pemulasaran Kewenangan Provinsi	org	200 org	25,00	50.000.000	12.000.000	24,00	25,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
65	Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar kewenangan provinsi	org	200 org	10,00	30.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Semua Kab/Kota. Kec, Kel.	Kemiskinan	
xiv	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Prosentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	100%	12,50	2.333.900.000	327.787.400	14,04	23,16	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
66	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yangMendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	org	180 org	25,00	1.801.950.000	285.787.400	15,86	25,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
67	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	org	180 org	5,00	90.000.000	0	0,00	5,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
68	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	org	180 org	5,00	43.950.000	0	0,00	5,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
69	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	org	180 org	25,00	282.000.000	42.000.000	14,89	25,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
70	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas hidup sehari - hari kewenangan provinsi	org	180 org	25,00	24.000.000	0	0,00	25,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
71	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang diberikan bimbingan keterampilan dasar kewenangan provinsi	org	180 org	15,00	12.000.000	0	0,00	15,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah,dan atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah dan atau identitas bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan provinsi	org	180 org	5,00	5.000.000	0	0,00	5,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
73	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	org	180 org	5,00	50.000.000	0	0,00	5,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
74	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang dipulangkan ke daerah asal kewenangan Provinsi	org	180 org	5,00	5.000.000	0	0,00	5,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
75	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pembinaan, rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti	org	180 org	10,00	20.000.000	0	0,00	10,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
xv	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya si Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	100%	13,57	1.989.270.000	0	0,00	19,35	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
76	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	org	100 org	25,00	450.900.000	0	0,00	25,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
77	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam1 Tahun Kewenangan Provinsi	org	100 org	15,00	70.000.000	0	0,00	15,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
78	Penyediaan Asrama yang Mudah diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	org	100 org	10,00	240.000.000	0	0,00	10,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
79	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	org	100 org	5,00	17.500.000	0	0,00	5,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
80	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	org	100 org	25,00	790.725.000	0	0,00	25,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
81	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	org	100 org	5,00	56.225.000	0	0,00	5,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
82	Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAFZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dok	400 Dok	10,00	363.920.000	0	0,00	10,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase kegiatan perlindungan dan jaminan sosial yang terlaksana	%	100%	9,17	8.914.584.902	65.350.000	0,73	19,24	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
xvi	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Prosentase layanan pengangkatan anak yang terlaksana	Kab.kota	17 Kab.kota	5,00	194.080.000	0	0,00	5,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
83	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang mendapatkan orangtua asuh/orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan provinsi	org	10 org	5,00	194.080.000	0	0,00	5,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
xvii	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		kab/kota	17 kab/kota	13,33	8.720.504.902	65.350.000	0,75	19,56	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
84	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Keluarga	17 Keluarga	10,00	200.000.000	0	0,00	10,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
85	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Hasil pendampingan / evaluasi dan koordinasi program BPNT/Sembako/Data DTKS	Keluarga	17 Keluarga	10,00	183.818.000	0	0,00	10,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
86	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan provinsi	Orang	1200 Orang	20,00	8.336.686.902	65.350.000	0,78	20,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase layanan penanganan bencana yang terlaksana	%	100%	12,00	1.060.000.000	50.683.149	4,78	5,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
xviii	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Prosentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100%	12,00	1.060.000.000	50.683.149	4,78	12,50	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
86	Penyediaan Permakanan	Jumlah pengungsi yang mendapatkan permakanan 3x1hari dalam masa tanggap darurat kewenangan provinsi	org	1.000 org	10,00	300.000.000	0	0,00	10,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
87	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan provinsi	org	160 org	10,00	80.000.000	0	0,00	10,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
88	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan provinsi	unit	600 unit	10,00	150.000.000	0	0,00	10,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
89	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan provinsi	org	750 org	15,00	346.000.000	50.683.149	14,65	15,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
90	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan provinsi	org	500 org	15,00	184.000.000	0	0,00	15,00	APBD	17 kab/Kota	Kemiskinan	
V	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase TMP yang terpelihara	%	100%	20,00	98.000.000	0	0,00	21,33	APBD	Palembang	Kemiskinan	
xix	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Prosentase kegiatan pengelolaan TMP yang terlaksana	%	100%	20,00	98.000.000	0	0,00	21,33	APBD	Palembang	Kemiskinan	
91	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Porvinsi	unit	1 unit	10,00	24.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	Kemiskinan	
92	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaanny pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	makam	10 makam	25,00	26.000.000	0	0,00	25,00	APBD	Palembang	Kemiskinan	
93	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	laporan	12 laporan	25,00	48.000.000	0	0,00	25,00	APBD	Palembang	Kemiskinan	
Jumlah						44.562.306.902	5.368.831.240	12,05	21,28				

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DA K Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjnag Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					21.068.403.000	2.755.234.610	13,08	14,00				
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan				220.000.000	0	0,00	0,00				
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	1 Dokumen	-	150.000.000	0	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	1 Dokumen	-	10.000.000	0	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
	3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	1 Dokumen	-	10.000.000	0	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
	4 Koordinasi dan Peyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan	Laporan	1 laporan	-	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				13.935.752.000	2.755.234.610	19,77	21,17				
	5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kinerja ASN	Orang	57 Orang	57 Orang	10.134.030.000	2.298.120.610	22,68	24,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
	6 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya pelayanan kantor	Orang	94 Orang	94 Orang	3.701.722.000	457.114.000	12,35	14,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan	1 laporan	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat				361.651.000	0	0,00	0,00				
	8 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkat kapasitas aparatur	Paket	1 Paket	-	150.000.000	0	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkat kpasitas SDM	Orang	30 Orang	-	211.651.000	0	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran Terpenuhi				2.000.000.000	0	0,00	0,00				
	10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	Paket	1 Paket	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
	11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	Paket	1 Paket	-	400.000.000	0	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
	12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya kinerja aparatur dalam bekerja	Paket	1 Paket	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
	13 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran; meningkatnya kenyamanan pegawai dalam bekerja	Paket	1 Paket	-	200.000.000	0	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
	14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pelayanan korban bencana	Jenis Surat Kabar	7 Jenis surat kabar dan	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
	15 Fasilitas Kunjungan Tamu	Meningkatnya pelayanan kantor	Laporan	1 laporan	-	200.000.000	0	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
	16 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan kantor	Laporan	1 laporan	-	900.000.000	0	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
v	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah				1.610.000.000	0	0,00	0,00				
	17 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Unit	1 Unit	-	370.000.000	0	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
	18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Gedung	2 Gedung Kantor	-	1.240.000.000	0	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DA K Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Administrasi Kebutuhan Terpenuhi				1.020.000.000	0	0,00	0,00				
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	- Surat - Lembar	- 500 surat - 6.000 lembar materai Rp 10.000	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12 Bulan (4 tagihan)	-	900.000.000	0	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya kesehatan pegawai	Orang	1 Orang	-	20.000.000	0	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Aset BMD				1.921.000.000	0	0,00	0,00				
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya kelancaran operasional kantor	Unit	45 Unit kendaraan dinas	-	1.000.000.000	0	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya operasional dan kinerja aparatur	Unit	60 Unit	-	200.000.000	0	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya operasional dan kinerja aparatur	Gedung	2 Gedung Kantor	-	721.000.000	0	0,00	0,00	APBD	BPBD Provinsi		Tidak Ada
II	Program Penanggulangan Bencana					7.075.357.129	26.550.000	0,38	0,44				
viii	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota				1.700.000.000	0	0,00	0,00				
25	Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Orang	500 Orang	-	1.700.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
ix	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	- Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota - Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas - Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota				1.161.260.000	20.250.000	1,74	1,89				
26	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang	800 Orang	-	600.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
27	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersedianya dokumen rencana kontijensi yang sah dan legal (per jenis ancaman) bencana prioritas	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	20.250.000	20,25	22,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
28	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Keluarga	3.894 Keluarga	-	461.260.000	0	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DA K Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	- Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana - Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman - Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi				3.104.097.129	0	0,00	0,00				
29	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1 Laporan	-	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
30	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	7.025 Orang	-	1.004.097.129	0	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
31	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1 Laporan	-	2.000.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
32	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1 Laporan	-	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
xi	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	- Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam - Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) - Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi - Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya				1.110.000.000	6.300.000	0,57	0,81				

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DA K Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi - Tersedianya regulasi di daerah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) - Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana) - Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota											
32	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	150.000.000	6.300.000	4,20	6,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
33	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
34	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan□	Kegiatan	1 Kegiatan	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
35	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Laporan	1 Laporan	-	140.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
36	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1 Dokumen	-	100.000.000	0	0,00	0,00				
37	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Bencana	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang	346 Orang	-	400.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
38	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	Kab/Kota	4 Kab/Kota	-	120.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kab/Kota		Tidak Ada
Jumlah						28.143.760.129	2.781.784.610	9,88	10,59				

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pen dorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan layanan Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen		30.877.593.000	5.769.718.939	18,69	18,74				
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100		250.000.000	0	0,00	0,11				
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Usulan Program yg diakomodir	Dok	1	0	100.000.000	0	0,00	0,10				
	2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA dan RKA	dok	1	0	10.000.000	0	0,00	0,01				
	3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA dan RKA	dok	1	0	10.000.000	0	0,00	0,01				
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Buku laporan LAKIP yg disusun	dok	1	0	30.000.000	0	0,00	0,04				
	5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Buku Database Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	dok	1	0	100.000.000	0	0,00	0,15				
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	21,58	26.266.133.000	5.667.785.066	21,58	21,63				
	6 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yg menerima Gaji dan Tunjangan ASN 170 Orang	bln	14	3,21	24.726.133.000	5.667.785.066	22,92	22,92				
	7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Dok	1	0	1.300.000.000	0	0,00	0,98				
	8 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Orang yg menerima Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Vrifikasi Keuangan SKPD (12 org/bln)	Dok	1	0	230.000.000	0	0,00	0,17				
	9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan dan Koordinasi	Lap	19	0	10.000.000	0	0,00	0,01				
iii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	0	470.000.000	0	0,00	0,00				
	10 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian atribut dan kelengkapannya	paket	1	0	270.000.000	0	0,00	0,00				
	11 Diklat Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	tersedianya pegawai mengikuti Diklat	Org	3	0	150.000.000	0	0,00	0,00				
	12 Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan	tersedianya bimtek perundan-perundangan	orang	1	0	50.000.000	0	0,00	0,00				
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	0	1.115.000.000	0	0,00	0,14				
	13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya komponen instalasi listrik/bangunan kantor	Paket	1	0	20.000.000	0	0,00	0,02				
	14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan Rumah tangga	Paket	1	0	45.000.000	0	0,00	0,03				
	15 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Paket	1	0	180.000.000	0	0,00	0,14				
	16 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetaan dan Penggandaan	Paket	1	0	120.000.000	0	0,00	0,09				
	17 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Dok	5		0	0	0,00	0,00				
	18 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu di dinas	Lap	1	0	100.000.000	0	0,00	0,08				
	19 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lap	1	0	550.000.000	0	0,00	0,18				
	20 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Operasionalnya website dan Media Sosial yang dikelola	Dok	1	0	100.000.000	0	0,00	0,08				
v	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani	Persen	100	10	1.125.000.000	0	0,00	0,00				
	21 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya kendaraan dinas jabatan	unit	2	0	925.000.000	0	0,00	0,00				
	22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor	Keg	1	0,2	200.000.000	0	0,00	0,00				
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani	Persen	100	0	1.020.000.000	101.933.873	9,99	10,09				
	23 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Lap	1	0	10.000.000	0	0,00	0,01				

1	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa telepon/listrik/air dan internet	Lap	1	0	650.000.000	101.933.873	15,68	15,68				
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terjaganya kebersihan kantor dan jasa kebersihan	Lap	2	0	360.000.000	0	0,00	0,27				
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang bderfungsi dengan baik	Persen	100	0	631.460.000	0	0,00	0,11				
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Kendaraan dinas yg terpelihara	keg	1	0	300.000.000	0	0,00	0,23				
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan perlengkapan kantor yg terpelihata	Unit	2	0	70.000.000	0	0,00	0,00				
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yg terpelihara gedung/kantor	Unit	1	0	261.460.000	0	0,00	0,00				
II	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kab/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja	Persen	47	0	100.000.000	0	0,00	0,00				
viii	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro (RTK)	Jumlah Kab/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja	Kab/kota	17	0	100.000.000	0	0,00	0,00				
29	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dok	1	0	100.000.000	0	0,00	0,00				
III	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang berkompentensi	Persen	0,16	0	340.000.000	0	0,00	0,00				
ix	Pelaksanaan Latihan Kerja Bedrdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan Kompetensi yang ditempatkan	paket	30	0	340.000.000	0	0,00	0,13				
30	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruksi serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi dan Peningkatan Sarana Prasarana Vokasi dan Produktifitas Tahunan	orang	32	0	240.000.000	0	0,00	0,18				
31	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	1	0	100.000.000	0	0,00	0,00				
IV	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	45	0	705.000.000	0	0,00	0,06				
x	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelayanan Antar Kerja Lintas daerah Kab/kota	Persen	70	0	250.000.000	0	0,00	0,15				
32	Pelayanan Antar Kerja	ditempatkanmelalui layanan AKAD, AKL	orang	25	0	25.000.000	0	0,00	0,03				
33	Perluasan Kesempatan Kerja	diberdayakannya program perluasan Kesempatan Kerja	Orang	50	0	225.000.000	0	0,00	0,17				
xii	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencaker yang ditempatkan	Persen	80	0	300.000.000	0	0,00	0,01				
34	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Aplikasi yg dikelola	Dok	1	0	50.000.000	0	0,00	0,04				
35	Job fair/Bursa Kerja	Mendapatkan Pekerjaan Melalui Jobfair/Bursa Kerja	Orang	125	0	250.000.000	0	0,00	0,00				
xiii	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase PMI yang ditempatkan dan mendapatkan Perlindungan	Persen	80	0	75.000.000		0,00	0,00				
36	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI /PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya	orang	10	0	75.000.000	0	0,00	0,00				
xiv	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yg Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perusahaan pengguna TKA yang melakukan pembayaran retribusi daerah	Persen	80	0	80.000.000	0	0,00	0,06				
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yg tidak mengandung perubahan Jabatan, Jumlah TKA dan Lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah mendapatkan Pengesahan RPTKA	Orang	20	0	80.000.000	0	0,00	0,06				
V	Program Hubungan Industrial	Persentase Pekerjaan yang mendapatkan perlindungan jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	38	0	243.000.000	0	0,00	0,03				
xv	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI, Mogok Kerja dan penutupan perusahaan yg	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas PP dan PKB	Persen	38	0	100.000.000	0	0,00	0,08				
38	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Tri Partit yg dibina	LKS	1	0	100.000.000	0	0,00	0,08				
xvi	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan UMP dan UMK	Dok	1	0	143.000.000	0	0,00	0,00				

1	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Dok	1	0	143.000.000	0	0,00	0,00				
VI	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan Perundang undangan	Persen	66	0	525.000.000	0	0,00	0,00				
	xvii Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang mnerapkan peraturan perundang undangan	perusahaan	120	0	525.000.000	0	0,00	0,00				
40	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Perusahaan yg diperisa Norma Ketenagakerjaan	perusahaan	120	0	225.000.000	0	0,00	0,00				
41	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Kasus yg diselesaikan	Kasus	5	0	200.000.000	0	0,00	0,00				
42	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah Perusahaan Menerapkan K3	Persh	158	0	100.000.000	0	0,00	0,00				
VII	Programn Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitas pembangunanya	Persen	100	0	200.000.000	0	0,00	0,00				
	xvii i Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase Peningkatan Penyelesaian Pelayanan Pertanahan Kawasan Transmigrasi	Persen	100	0	200.000.000	0	0,00	0,00				
43	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Dok	5	0	200.000.000	0	0,00	0,00				
VIII	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah satuan Permukiman Transmigrasi yang difailitasi Pembangunannya	SP	1	0	210.000.000	0	0,00	0,05				
	xix Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah satuan Permukiman Transmigrasi yang difailitasi Pembangunannya	SP	1	0	210.000.000	0	0,00	0,05				
44	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	terciptanya koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan	lap	3	0	85.000.000	0	0,00	0,06				
45	Pelatihan Transmigrasi	tersedianya pelatihan calon transmigran	orang	62	0	75.000.000	0	0,00	0,06				
46	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigrasi Dikawasan Transmigrasi	terciptanya KK transmigrasn yang mampu	Orang	31	0	50.000.000	0	0,00	0,00				
IX	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Satuan Permukiman yag dibina	SP	1	0	50.000.000	0	0,00	0,04				
xx	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Persentase peningkatan penataan persebaran penduduk wilayyyah transmigrasi	Persen	50	0	50.000.000	0	0,00	0,04				
47	Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Telah difasilitasi	orang	31	0	50.000.000	0	0,00	0,04				
Jumlah						33.250.593.000	5.769.718.939	17,35	17,40				

*Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak*

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%		14.502.188.000	1.824.336.964	12,58	18,62	APBD			
i	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%	100%		25.000.000	0	0,00	25,00	APBD			
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	0	0,00	25,00	APBD	Palembang	-	-
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4 Laporan	2 Laporan	15.000.000	0	0,00	25,00	APBD	Palembang	-	-
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang sesuai aturan	%	100%		7.997.963.000	1.567.844.849	19,60	28,02	APBD			
	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	40 Orang	36 Orang	6.766.735.000	1.417.200.849	20,94	28,57	APBD	Palembang	-	-
	4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	956.228.000	118.604.000	12,40	25,00	APBD	Palembang	-	-
	5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	210.000.000	32.040.000	15,26	25,00	APBD	Palembang	-	-
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2 Laporan	1 Laporan	65.000.000	0	0,00	25,00	APBD	Palembang	-	-
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	%	100%		160.000.000	0	0,00	0,23	APBD			
	7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	-	90.000.000	0	0,00	0,40	APBD	Palembang	-	-
	8 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5 Orang	-	70.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	-	-
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	%	100%		1.078.402.000	84.854.650	7,87	19,24	APBD			
	9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	-	30.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Palembang	-	-
	10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	-	100.000.000	0	0,00	50,00	APBD	Palembang	-	-
	11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket	-	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	-	-
	12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8 Paket	1 Paket	200.000.000	44.175.000	22,09	30,00	APBD	Palembang	-	-
	13 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 Paket	1 Paket	80.000.000	11.464.000	14,33	30,00	APBD	Palembang	-	-
	14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1 Dokumen	-	10.000.000		0,00	0,00	APBD	Palembang	-	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	2.466.000	4,93	10,00	APBD	Palembang	-	-
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2 Laporan	1 Laporan	558.402.000	26.749.650	4,79	12,00	APBD	Palembang	-	-
v	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%		1.200.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	4 unit	-	1.200.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	-	-
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%		614.000.000	114.333.226	18,62	0,08	APBD			
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Palembang	-	-
19	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	280.000.000	53.825.226	19,22	0,00	APBD	Palembang	-	-
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	-	-
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	274.000.000	60.508.000	22,08	0,00	APBD	Palembang	-	-
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah pada PD	%	100%		3.426.823.000	57.304.239	1,67	7,15	APBD			
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17 Unit	4 unit	320.000.000	49.979.239	15,62	20,25	APBD	Palembang	-	-
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan	5 Peralatan	1 Peralatan	36.823.000	7.325.000	19,89	41,00	APBD	Palembang	-	-
24	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Website	1 Website	1 website	70.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	-	-
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung	1 Gedung	1 Gedung	3.000.000.000	0	0,00	5,50	APBD	Palembang	-	-
II	Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada Belanja Daerah	%	24,00%		2.400.000.000	16.172.090	0,67	3,68	APBD			
viii	Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi yang Melaksanakan PPRG	%	85,00%		450.000.000	11.326.800	2,52	18,33	APBD			
26	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Palembang	-	-
27	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksana PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi.	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	orang	100	-	200.000.000	11.326.800	5,66	35,00	APBD	Palembang	-	-
ix	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta peningkatan pemberdayaan perempuan bid. Politik dan ekonomi	Orang	10 Orang		450.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
28	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yang mengikuti Peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	Kemiskinan ekstrem	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yang diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Organisasi	10 Organisasi	-	350.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	Kemiskinan Ekstrem	-
x	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Layanan Perempuan yang bersinergi	Lembaga	47 Lembaga		1.500.000.000	4.845.290	0,32	0,39	APBD			
30	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat provinsi	Lembaga	20 Lembaga	-	1.200.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	Kemiskinan ekstrem	-
31	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/H ukum pada LPLPP Tingkat Provinsi	Orang	27 Orang	-	100.000.000	4.845.290	4,85	5,78	APBD	Palembang	Stunting	-
32	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yang terbentuk di provinsi	Unit	1 Unit	-	200.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	Kemiskinan ekstrem	-
III	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	%	8-10%		512.400.000	0	0,00	5,00	APBD			
xi	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan perempuan	%	100%		132.400.000	0	0,00	0,00	APBD			
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	-	82.400.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	-	-
34	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		30	-	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	-	-
xii	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100%		120.000.000	0	0,00	21,33	APBD			
35	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	30 Orang	1 Orang	80.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Palembang	Kemiskinan ekstrem	-
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi.	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Kasus	25 Kasus	1 Kasus	40.000.000	0	0,00	24,00	APBD	Palembang	Kemiskinan ekstrem	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
xiii	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan yang bersinergi dalam perlindungan perempuan		27		260.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
37	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi.	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	50 Orang	-	150.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	-	-
38	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	-	110.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	-	-
IV	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Pemenuhan Hak Anak	%	59,00%		300.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
xiv	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Kg) Dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan KIE kualitas keluarga		2		200.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
39	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Dokumen	1 Dokumen	-	200.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	Stunting	-
xv	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan keluarga yang meningkat kapasitasnya	Lembaga	10 Lembaga		50.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
40	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		50	-	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	-	-
xvi	Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang diberikan layanan komprehensif	%	50%		50.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
41	Pelaksanaan Penyediaan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	1 Layanan	-	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	-	-
V	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak			24		290.000.000	14.150.458	4,88	0,00	APBD			
xvii	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi.	Persentase kab/kota yang memiliki profil gender dan anak	%	100%		290.000.000	14.150.458	4,88	14,18	APBD			
42	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	2 Dokumen	-	150.000.000	8.070.458	5,38	15,67	APBD	Palembang	Kemiskinan ekstrem	-
43	Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data provinsi.	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen	2 Dokumen	-	140.000.000	6.080.000	4,34	12,59	APBD	Palembang	Kemiskinan ekstrem	-
VI	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Indeks Pemenuhan Hak Anak	%	59,00%		610.000.000	0	0,00	12,12	APBD			
xviii	Pelembagaan Pha Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dan Duania Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota yang mengikuti evaluasi Pemenuhan Hak Anak	%	100%		260.000.000	0	0,00	28,43	APBD			

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	0	0,00	25,00	APBD	Palembang	-	-
45	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi.	Jumlah Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi		31	-	160.000.000	0	0,00	30,57	APBD	17 Kab/Kota	-	-
xix	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang meningkat pengetahuannya tentang kualitas hidup anak.				350.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
46	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		1	-	100.000.000	0	0,00		APBD	Palembang	-	-
47	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak		1	-	250.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	-	-
VII	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap anak korban kekerasan per 10.000 anak	nilai	0.75-1,5		1.270.000.000	69.508.000	5,47	8,07	APBD			
xx	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kab/Kota yang melakukan pencegahan kekerasan anak	%	100%		100.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
48	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	-	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	-	-
49	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		50	-	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	-	-
xxi	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kasus kekerasan anak yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100%		220.000.000	10.508.000	4,78	25,00	APBD			
50	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	Anak	40 Anak	3 Orang	50.000.000	0	0,00	25,00	APBD	Palembang	-	-
51	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	Anak	40 Anak	3 Orang	170.000.000	10.508.000	6,18	25,00	APBD	Palembang	-	-
xxii	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan kab/kota	lembaga	25		950.000.000	59.000.000	6,21	5,00	APBD			

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	1 Dokumen	-	50.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Palembang	-	-
53	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000	59.000.000	6,56	5,00	APBD	Palembang	-	-
Jumlah						19.884.588.000	1.924.167.512	9,68	15,04				

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		100%		28.686.257.000	3.350.288.805	11,68	12,17				
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Darah		100%		750.000.000	0	0,00	4,33				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen		400.000.000	0	0,00	2,07		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD		6 laporan		100.000.000	0	0,00	10,11		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan		250.000.000	0	0,00	5,63		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%		21.029.887.000	3.350.288.805	15,93	15,93				
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		142 orang/Bulan		20.869.887.000	3.350.288.805	16,05	16,05		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen		160.000.000	0	0,00	0,00		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%		75.000.000	0	0,00	0,00				
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang		75.000.000	0	0,00	0,00		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%		750.500.000	0	0,00	4,65				
7	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8 Paket		27.000.000	0	0,00	37,00		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		34 Paket		100.000.000	0	0,00	9,79		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis alat dan bahan kebersihan kantor		19 Paket		41.500.000	0	0,00	23,61		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		20 Paket		50.000.000	0	0,00	10,60		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket		75.000.000	0	0,00	0,00		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		4 Dokumen		7.000.000	0	0,00	0,00		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		145 Laporan		450.000.000	0	0,00	0,00		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		305.000.000	0	0,00	0,00				
14	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan		3 Paket		170.000.000	0	0,00	0,00		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Unit		135.000.000	0	0,00	0,00		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penun jang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		4.376.370.000	0	0,00	1,68				
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan		17.000.000	0	0,00	15,45		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Laporan		650.000.000	0	0,00	10,93		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		2 laporan		3.709.370.000	0	0,00	0,00		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		1.399.500.000	0	0,00	0,00				
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		13 Unit Roda 4, 20 Unit Roda 2		510.000.000	0	0,00	0,00		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2 Unit		156.000.000	0	0,00	0,00		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Unit		733.500.000	0	0,00	0,00				
B	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan An Kemandirian Pangan	Persentase Kenaikan Sumber Daya Ekonomi Peningkatan Kualitas Pangan				212.565.100	0	0,00	0,00				

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VIII	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Pada Berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Pada Berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		100%		212.565.100	0	0,00	0,00				
22	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		65 Unit		212.565.100	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Semua Semua	
C	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Stok Cadangan Pangan Daerah				2.235.000.000	0	0,00	0,00				
IX	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		1 Dokumen		610.000.000	0	0,00	0,00				
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis		4 Laporan		135.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Semua Semua	
24	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan		5 Unit		300.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Semua Semua	
25	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)		1 Dokumen		175.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Semua Semua	
X	Pengelolaan dan keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Pengelolaan dan keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		100%		225.000.000	0	0,00	0,00				
26	Pengadaan Cadangan pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		12 Ton		225.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Semua Semua	
XI	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Pertahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Pertahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		100%		1.400.000.000	0	0,00	0,00				
27	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		6 Dokumen		275.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Semua Semua	
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan advokasi,Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam,Bergizi,Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman(B2SA)		1 Laporan		1.000.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Semua Semua	
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun		1 Laporan		125.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Semua Semua	
D	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Daerah Rawan Pangan				500.000.000	0	0,00	0,00				
XII	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		100%		500.000.000	0	0,00	0,00				

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	Pelaksanaan Pengadaan,Pengelolaan,dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah		7 Dokumen		500.000.000	0	0,00	0,00				
E	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Kenaikan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Tersertifikasi/Teregistrasi				600.000.000	0	0,00	0,00				
XIII	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		100%		600.000.000	0	0,00	0,00				
31	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		40 Sertifikat		254.810.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Semua Semua	
32	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan		42 Dokumen		125.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Semua Semua	
33	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		4 Dokumen		220.190.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Semua Semua	
F	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Kenaikan Produksi Daging,susu,Telur				1.285.000.000	0	0,00	0,00				
XIV	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak,Bahan Pakan,serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak,Bahan Pakan,serta Pakan Kewenangan Provinsi		100%		310.000.000	0	0,00	0,00				
34	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak,Bahan Pakan,serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		1 Dokumen		110.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Semua Semua	
35	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak ,Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak ,Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan		1 Laporan		200.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Semua Semua	
XV	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Kewenangan Provinsi		100%		625.000.000	0	0,00	0,00				
36	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah/Benih Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Tersedia dan Yang diProduksi		1 Laporan		500.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel, Kecamatan, Kelurahan/Desa	Semua Semua	
37	Penjaminan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan,Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT ,Bahan Pakan,Pakan Yang Beredar		1 Dokumen		125.000.000	0	0,00	0,00		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XVI	Penyediaan /Benih Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan /Benih Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		100%		350.000.000	0	0,00	0,00				
38	Pengadaan Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit TernakYang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		3000 Ekor		350.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
G	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Kenaikan Produksi Daging,susu,Telur				1.376.500.000	0	0,00	0,00		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
XVII	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Penataan Prasarana Pertanian				1.176.500.000	0	0,00	0,00				
39	Koordinasi,Sinkronisasi,dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi,Sinkronisasi,dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		1 Laporan		75.000.000	0	0,00	0,00		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
40	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana PascaPanen Peternakan	Jumlah Prasarana Pasca Panen Peternakan Yang dikendalikan dan dimanfaatkan		1 Unit		701.500.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
41	Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan,Klinik Hewan,Ambulatori,Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri atau Tempat Pelayanan Parameik Veteriner Keswan	Jumlah Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan,Klinik Hewan,Ambulatori,Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri atau Tempat Pelayanan Parameik Veteriner Keswan		1 Unit		400.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
XVIII	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun / Galur Ternak Yang Wilayahnya Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun / Galur Ternak Yang Wilayahnya Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		100%		200.000.000	0	0,00	0,00				
42	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Yang dilestarikan dan dimanfaatkan		1 Laporan		200.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
H	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Layanan Kesehatan Hewan				855.000.000	0	0,00	0,00				
XIX	Penjaminan Kesehatan Hewan,Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah KAbupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Hewan,Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah KAbupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				325.000.000	0	0,00	0,00				
43	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah Yang Terkendali		1 Laporan		325.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
XX	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		100%		330.000.000	0	0,00	0,00				
44	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		1 Dokumen		330.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XXI	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		100%		200.000.000	0	0,00	0,00				
45	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran,sertifikat Veteriner,dan SKKH/SKPH Hewan,Produk Hewan,dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Sertifikat Veteriner,dan SKKH/SKPH HPM		15 Dokumen		200.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
I	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Lembaga Kelompok Masyarakat di Tingkat Petani dan Peternak Yang Kompeten				5.417.434.900	0	0,00	0,00				
XXII	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		100%		5.117.434.900	0	0,00	0,00				
46	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan		324 Kelompok		5.117.434.900	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
XXIII	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		100%		300.000.000	0	0,00	0,00				
47	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani Yang dibentuk dan Beroperasi		17 Unit		300.000.000	0	0,00	0,00		Prov. Sumsel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		
Jumlah						41.167.757.000	3.350.288.805	8,14	8,48				

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100	6	250.000.000	13.200.000	5,28	20,00	APBD	Prov. Sumsel	-	-
i	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan di Wilayah Provinsi yang ditetapkan	%	100	6	250.000.000	13.200.000	5,28	20,00	APBD	Prov. Sumsel	-	-
1	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi/ Terlaksananya koordinasi kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah	Dokumen	3	0	250.000.000	13.200.000	5,28	20,00	APBD	Prov. Sumsel	-	-
II	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Fasilitasi Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan yang dilaksanakan	%	100	6	150.000.000	9.120.000	6,08	20,00	APBD	6 Kab/Kota (OKI, Banyuasin, MUBA, MURA, Muara Enim, Lahat)	-	-
ii	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi	Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Daerah Provinsi	%	100	6	150.000.000	9.120.000	6,08	20,00	APBD	6 Kab/Kota (OKI, Banyuasin, MUBA, MURA, Muara Enim, Lahat)	-	-
2	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Berita Acara	4	0	150.000.000	9.120.000	6,08	20,00	APBD	6 Kab/Kota (OKI, Banyuasin, MUBA, MURA, Muara Enim, Lahat)	-	-
III	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Terselesaikannya Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100	6	850.000.000	12.480.000	1,47	20,00	APBD	Prov. Sumsel	-	-
iii	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terselesaikannya Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	6	850.000.000	12.480.000	1,47	20,00	APBD	Prov. Sumsel	-	-
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen	1	0	100.000.000	5.280.000	5,28	20,00	APBD	8 Kab/Kota (OKUS, OKUT, OKI, OI, Muara Enim, Prabumulih, MUBA, Banyuasin)	-	-
4	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Terselesaikannya santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	1	0	750.000.000	7.200.000	0,96	20,00	APBD	Palembang	-	-
IV	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Terlaksananya Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	6	200.000.000	4.375.000	2,19	20,00	APBD	Prov. Sumsel	-	-
iv	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	100	6	200.000.000	4.375.000	2,19	20,00	APBD	Prov. Sumsel	-	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	0	50.000.000	0	0,00	20,00	APBD	11 Kab/Kota (MURATARA, MUBA, MURA, PALI, OKI, Banyuasin, OKU, OKUS, OKUT, OI, Muara Enim)	-	-
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	Berita Acara	1	0	100.000.000	4.375.000	4,38	20,00	APBD	15 Kab/Kota (Palembang, MUBA, MURA, OKI, Muara Enim, Pagaram, Prabumulih, Lubuk Linggau, Banyuasin, OKUT, Kantah OI, OKUS, MURATARA, Empat Lawang, PALI)	-	-
7	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	Berita Acara	1	0	50.000.000	0	0,00	20,00	APBD	15 Kab/Kota (Palembang, MUBA, MURA, OKI, Muara Enim, Pagaram, Prabumulih, Lubuk Linggau, Banyuasin, OKUT, Kantah OI, OKUS, MURATARA, Empat Lawang, PALI)	-	-
V	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Terkelolanya Tanah Kosong	%	100	6	350.000.000	2.280.000	0,65	20,00	APBD	8 Kab/Kota (OKU, OKUT, OKUS, Banyuasin, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagaram)	-	-
v	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	%	100	6	200.000.000	2.280.000	1,14	20,00	APBD	8 Kab/Kota (OKU, OKUT, OKUS, Banyuasin, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagaram)	-	-
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong didalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	0	200.000.000	2.280.000	1,14	20,00	APBD	8 Kab/Kota (OKU, OKUT, OKUS, Banyuasin, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagaram)	-	-
vi	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	%	100	6	150.000.000	0	0,00	20,00	APBD	8 Kab/Kota (OKU, OKUT, OKUS, Banyuasin, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagaram)	-	-
9	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	150.000.000	0	0,00	20,00	APBD	8 Kab/Kota (OKU, OKUT, OKUS, Banyuasin, OKI, Muara Enim, Lahat, Pagaram)	-	-
VI	Program Penatagunaan Tanah	Terlaksananya Penatagunaan Tanah	%	100	6	200.000.000	14.880.000	7,44	20,00	APBD	17 Kab/Kota	-	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
vii	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	100	6	200.000.000	14.880.000	7,44	20,00	APBD	17 Kab/Kota	-	-
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	0	200.000.000	14.880.000	7,44	20,00	APBD	17 Kab/Kota	-	-
VII	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	8,28	44.092.509.537	8.211.823.022	18,62	21,56	APBD		-	-
viii	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	10	265.000.000	46.860.500	17,68	25,90	APBD		-	-
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	0	60.000.000	6.966.800	11,61	20,00	APBD	Prov. Sumsel	-	-
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	80.000.000	0	0,00	20,00	APBD		-	-
13	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	0	125.000.000	39.893.700	31,91	32,50	APBD		-	-
ix	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	10	11.875.381.000	3.076.655.024	25,91	31,38	APBD		-	-
14	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	69	67	11.579.261.000	3.075.155.024	26,56	31,67	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
15	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	0	246.120.000	0	0,00	20,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	50.000.000	1.500.000	3,00	20,00	APBD		-	-
x	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan baik	%	100	7	18.000.000	600.000	3,33	20,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
17	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan BMD SKPD	Dokumen	1	0	6.000.000		0,00	20,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD SKPD	Laporan	1	0	6.000.000	600.000	10,00	20,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
19	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD SKPD	Laporan	1	0	6.000.000	0	0,00	20,00	APBD		-	-
xi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	7	125.000.000	17.000.000	13,60	31,00	APBD		-	-
20	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	0	75.000.000	0	0,00	20,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
21	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7	0	50.000.000	17.000.000	34,00	47,50	APBD		-	-
xii	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	9,9	1.147.080.000	24.601.192	2,14	20,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
22	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	0	12.000.000	0	0,00	20,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
23	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3	0	60.000.000	0	0,00	20,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	2	0	145.080.000	3.705.000	2,55	20,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
25	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	0	25.000.000	0	0,00	20,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
26	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	25.000.000	3.544.800	14,18	20,00	APBD		-	-
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah LaporanPenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	700.000.000	17.351.392	2,48	20,00	APBD	Dalam Negeri	-	-
28	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0	30.000.000	0	0,00	20,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
29	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen DukunganPelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	150.000.000	0	0,00	20,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
xiii	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	7	1.138.948.537	0	0,00	20,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
30	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	0	450.000.000	0	0,00	20,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
31	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	2	0	463.948.537	0	0,00	20,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
32	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	1	0	50.000.000	0	0,00	20,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
33	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	5	0	175.000.000	0	0,00	20,00	APBD		-	-
xiv	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	10	1.562.200.000	245.561.611	15,72	21,14	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
34	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	5.000.000	0	0,00	20,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1	0	365.000.000	60.758.611	16,65	20,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
36	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	1	0	4.000.000	3.540.000	88,50	95,00	APBD		-	-
37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	1.188.200.000	181.263.000	15,26	21,25	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
xv	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	6	460.900.000	0	0,00	15,33	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	0	30.000.000	0	0,00	20,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit (mobil, motor)	23 (12 mobil, 11 motor)	0	270.900.000	0	0,00	15,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
40	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	0	60.000.000	0	0,00	15,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
41	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	100.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
xvi	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Meningkatnya Pelayanan BLUD	%	100	7,5	27.500.000.000	4.800.544.695	17,46	17,50	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
42	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	0	27.500.000.000	4.800.544.695	17,46	17,50	APBD		-	-
VIII	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71,93	0	325.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
xvii	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	%	100	6	325.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
43	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Dokumen	1	0	300.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
44	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah Dokumen KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Dokumen	1	0	25.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
IX	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - Persentase Penurunan Emisi GRK	(INDEKS) (%)	- 71,93 - 8,04%	0	2.580.000.000	63.190.120	2,45	15,17	APBD		-	-
xviii	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%	100	7	1.190.000.000	32.205.240	2,71	15,38	APBD		-	-
45	Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	Dokumen	3	0	280.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
46	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	6	0	540.000.000	25.787.000	4,78	15,83	APBD		-	-
47	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) yang dilaksanakan	Lokasi	17	0	370.000.000	6.418.240	1,73	15,00	APBD		-	-
xix	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%	100	6	290.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
48	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Laporan	2	0	290.000.000	0	0,00	15,00	APBD	Prov. Sumsel	-	-
xx	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%	100	6	1.100.000.000	30.984.880	2,82	15,00	APBD		-	-
49	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Kegiatan	4	0	1.000.000.000	30.984.880	3,10	15,00	APBD		-	-
50	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi yang dilaksanakan	kegiatan	1	0	100.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
X	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	0.465	0	500.000.000	17.157.000	3,43	15,00	APBD		-	-
xxi	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	%	100	6	500.000.000	17.157.000	3,43	15,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
51	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1	0	100.000.000	3.580.000	3,58	15,00	APBD	17 Kab/Kota	-	-
52	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	5	0	100.000.000	0	0,00	15,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	5	0	100.000.000	2.880.000	2,88	15,00	APBD	Jakabaring Sport City	-	-
54	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	1	0	100.000.000	0	0,00	15,00	APBD	Jakabaring Sport City	-	-
55	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Unit	1	0	100.000.000	10.697.000	10,70	15,00	APBD		-	-
XI	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 di daerah Kab/ Kota	%	100	6	200.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
xxii	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	100	6	200.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
56	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	0	75.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
57	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	1	0	125.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
XII	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	17	0	200.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
xxiii	Pembinaan dan Pengawasan izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	6	200.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
58	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	25	0	200.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
XIII	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Terinventarisir	MHA	2	0	100.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
xxiv	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	100	6	100.000.000	0	0,00	15,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	1	0	100.000.000	0	0,00	15,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
XIV	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	71.93	0	900.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
xxv	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	6	900.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
60	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	0	100.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
61	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Masyarakat/Kelompok Masyarakat	1204	0	600.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
62	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Keluarga	50	0	100.000.000	0	0,00	15,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
63	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	1	0	100.000.000	0	0,00	15,00	APBD	DLHP Prov. Sumsel	-	-
XV	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71.93	0	1.300.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
xxvi	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	%	100	6	1.300.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
64	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	186	0	1.300.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
XVI	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	%	38	0	700.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
xxvii	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Terselesainya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	%	100	6	700.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
65	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Perkara	20	0	500.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
66	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	Pengaduan	20	0	200.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
XVII	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	%	45	0	250.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
xxviii	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	%	100	6	250.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pen dorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Jumlah Dokumen pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional yang dilaksanakan	Dokumen	1	0	100.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
68	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokumen	1	0	150.000.000	0	0,00	15,00	APBD		-	-
TOTAL						53.147.509.537	8.348.505.142	15,71	20,64				

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/(Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase	100%		10.190.404.000	714.540.553	7,01	8,91	APBD			
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%		137.560.000	0	0,00	0,00	APBD			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10 dokumen	-	45.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10 dokumen	-	40.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	10 dokumen	-	10.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2 Laporan	-	42.560.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100%		5.708.175.000	668.000.553	11,70	14,74	APBD	Kantor OPD		
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	36 orang/bulan	36 orang/3 bulan	5.611.015.000	668.000.553	11,91	15,00	APBD	Kantor OPD		
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1 dokumen	-	77.160.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 laporan	-	10.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1 laporan	-	10.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase	100%	-	5.865.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
9	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1 laporan	-	5.865.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100%	-	635.800.000	0	0,00	0,00	APBD			
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2 paket	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
11	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1 dokumen	-	350.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4 Orang	-	60.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah dan Luar Daerah		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/(Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Orang	85 Orang	-	125.800.000	0	0,00	0,00	APBD	Luar Daerah		
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100%	-	760.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 paket	-	40.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 paket	-	70.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 paket	-	60.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 paket	-	60.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2 dokumen	-	25.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 laporan	-	55.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2 laporan	-	450.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah dan Luar Daerah		
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100%		1.400.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
21	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6 Unit	-	900.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	10 Unit	-	250.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10 Unit	-	250.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100%		948.004.000	46.540.000	4,91	6,98	APBD			
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 laporan	-	3.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 laporan	-	283.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 laporan	-	662.004.000	46.540.000	7,03	10,00	APBD	Kantor OPD		
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100%	-	595.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5 Unit	-	15.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5 Unit	-	250.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	-	250.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/(Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	Pemeliharaan//Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12 Unit	-	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
31	Pemeliharaan//Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit		30.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
II	Program Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Program Pendaftaran Penduduk	Prosentase	100%		400.000.000	0	0,00	0,00				
ix	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terselenggaranya Pendaftaran Kependudukan	Persentase	1005	-	200.000.000	0	0,00	0,00				
32	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1 laporan	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		
33	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1 laporan	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		
x	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase	100%	-	200.000.000	0	0,00	0,00				
34	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1 laporan	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		
35	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1 laporan	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		
III	Program Pencatatan Sipil	Terlaksananya Program Pencatatan Sipil	Prosentase	100%		285.000.000	0	0,00	0,00				
xi	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Terselenggaranya Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase	100%	-	235.000.000	0	0,00	0,00				
36	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	1 laporan	-	160.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		
37	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1 laporan	-	75.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
xii	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksanya Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase	100%		50.000.000	0	0,00	0,00				
38	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	2 laporan	-	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		
IV	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase	100%		511.000.000	0	0,00	0,00				
xiii	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase	100%		375.000.000	0	0,00	0,00				
39	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	1 laporan	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		
40	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dokumen	1 dokumen	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		
41	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	1 dokumen	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah	Kemiskinan	
42	Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dokumen	1 dokumen	-	75.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/(Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
xiv	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase	100%	-	136.000.000	0	0,00	0,00				
43	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	17 Laporan	-	75.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		
44	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	orang	15 orang	-	61.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		
v	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Terlaksananya Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Prosentase	100%		36.000.000	0	0,00	0,00				
xiv	Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan	Persentase	100%		36.000.000	0	0,00	0,00				
45	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	Dokumen	50 dokumen	-	18.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD	Kemiskinan	
46	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	Dokumen	50 dokumen	-	18.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD	Kemiskinan	
JUMLAH						11.422.404.000	714.540.553	6,26	7,95				

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/(Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase	100%		10.190.404.000	714.540.553	7,01	8,91	APBD			
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%		137.560.000	0	0,00	0,00	APBD			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10 dokumen	-	45.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10 dokumen	-	40.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	10 dokumen	-	10.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2 Laporan	-	42.560.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100%		5.708.175.000	668.000.553	11,70	14,74	APBD	Kantor OPD		
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	36 orang/bulan	36 orang/3 bulan	5.611.015.000	668.000.553	11,91	15,00	APBD	Kantor OPD		
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1 dokumen	-	77.160.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 laporan	-	10.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1 laporan	-	10.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase	100%	-	5.865.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
9	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1 laporan	-	5.865.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100%	-	635.800.000	0	0,00	0,00	APBD			
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2 paket	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
11	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1 dokumen	-	350.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4 Orang	-	60.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah dan Luar Daerah		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/(Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Orang	85 Orang	-	125.800.000	0	0,00	0,00	APBD	Luar Daerah		
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100%	-	760.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 paket	-	40.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 paket	-	70.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 paket	-	60.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 paket	-	60.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2 dokumen	-	25.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 laporan	-	55.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2 laporan	-	450.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah dan Luar Daerah		
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100%		1.400.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
21	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6 Unit	-	900.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	10 Unit	-	250.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10 Unit	-	250.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100%		948.004.000	46.540.000	4,91	6,98	APBD			
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 laporan	-	3.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 laporan	-	283.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 laporan	-	662.004.000	46.540.000	7,03	10,00	APBD	Kantor OPD		
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100%	-	595.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5 Unit	-	15.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5 Unit	-	250.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	-	250.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/(Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	Pemeliharaan//Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12 Unit	-	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
31	Pemeliharaan//Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit		30.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
II	Program Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Program Pendaftaran Penduduk	Prosentase	100%		400.000.000	0	0,00	0,00				
ix	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terselenggaranya Pendaftaran Kependudukan	Persentase	1005	-	200.000.000	0	0,00	0,00				
32	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1 laporan	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		
33	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1 laporan	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		
x	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase	100%	-	200.000.000	0	0,00	0,00				
34	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1 laporan	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		
35	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1 laporan	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		
III	Program Pencatatan Sipil	Terlaksananya Program Pencatatan Sipil	Prosentase	100%		285.000.000	0	0,00	0,00				
xi	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Terselenggaranya Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase	100%	-	235.000.000	0	0,00	0,00				
36	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	1 laporan	-	160.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		
37	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1 laporan	-	75.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD		
xii	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksanya Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase	100%		50.000.000	0	0,00	0,00				
38	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	2 laporan	-	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		
IV	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase	100%		511.000.000	0	0,00	0,00				
xiii	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase	100%		375.000.000	0	0,00	0,00				
39	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	1 laporan	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		
40	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dokumen	1 dokumen	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		
41	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	1 dokumen	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah	Kemiskinan	
42	Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dokumen	1 dokumen	-	75.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/(Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
xiv	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase	100%	-	136.000.000	0	0,00	0,00				
43	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	17 Laporan	-	75.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		
44	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	orang	15 orang	-	61.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah		
v	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Terlaksananya Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Prosentase	100%		36.000.000	0	0,00	0,00				
xiv	Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan	Persentase	100%		36.000.000	0	0,00	0,00				
45	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	Dokumen	50 dokumen	-	18.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD	Kemiskinan	
46	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	Dokumen	50 dokumen	-	18.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD	Kemiskinan	
JUMLAH						11.422.404.000	714.540.553	6,26	7,95				

Dinas Perhubungan

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah provinsi	%			44.096.739.553	5.904.370.218	5,73	17,16				
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen			1.040.000.000	0	0,00	10,00				
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3 Dokumen		700.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen		50.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen		50.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen		50.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen		50.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan		70.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan		70.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen			21.023.030.353	4.540.413.920	9,39	22,65				
	8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	138 Orang/Bulan		20.458.808.000	4.540.413.920	22,19	23,00	DAU/APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
	9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1 Dokumen		414.222.353	0	0,00	10,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
	10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan		50.000.000	0		10,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
	11 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1 Dokumen		50.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
	12 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1 Dokumen		50.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen			305.500.000	0	0,00	10,00				
	13 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen		50.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
	14 Pengamanan Barng Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen		50.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
	15 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1 Laporan		50.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1 Laporan		65.500.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
17	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen		90.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Program Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Orang			785.000.000	41.645.800	5,31	10,00				
18	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1 Dokumen		60.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5 Orang		475.000.000	41.645.800	8,77	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
20	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200 Orang		175.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10 Orang		75.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD	Dokumen			2.400.000.000	53.160.125	2,03	10,08				
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10 Paket		240.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11 Paket		300.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	5 Paket		100.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	25 Paket		30.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
26	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2 Paket		150.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1 Dokumen		20.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
28	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1 Paket		150.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
29	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan		100.000.000	9.980.000	9,98	12,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan		980.000.000	43.180.125	3,95	10,00	APBD	Sumsel dan Luar Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
31	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen		330.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang Tersedia	Unit			3.950.000.000	0	0,00	10,00				
32	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional Dinas Lapangan yang Tersedia	Unit	8 Unit		2.750.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
33	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	8 Unit		1.000.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	1 Paket		200.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kantor	Laporan			9.140.543.000	1.240.121.273	7,35	15,41				
35	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan		10.000.000	66.000	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
36	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 laporan		768.000.000	141.484.273	15,83	20,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 laporan		8.362.543.000	1.098.571.000	6,58	15,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang Terpelihara	Unit			4.452.666.200	29.029.100	0,65	10,00				
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12 Unit		225.500.000	7.105.000	3,15	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	32 Unit		576.500.000	21.924.100	3,80	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
40	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	1 Unit		300.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
41	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	1 Unit		100.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1 Unit		200.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
43	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit		2.850.666.200	0	0,00	10,00	APBD dan DAK	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
44	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	412 Unit		200.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
ix	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BMD yang tersedia	Unit			1.000.000.000	0	0,00	10,00				
45	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1 Unit kerja		1.000.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Banyuasin		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 Juta Keberangkatan	Rasio			20.523.235.987	52.967.443	0	10,02				
x	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Dokumen			200.000.000	0	0	10,00				
46	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	1 Dokumen		200.000.000	0	0	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
xi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit			4.043.895.987	0	0	10,00				
47	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	6 Unit		4.043.895.987	0	0	10,00	APBD	Sumsel	Inflasi	Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
xii	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah terminal tipe B yang dikelola	Terminal			7.665.000.000	18.796.151	0,25	10,00				

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terminal	7 Terminal		7.100.000.000	18.796.151	0,26	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
49	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Pemeliharaan	Terminal	7 Terminal		565.000.000	0	0	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
xiii	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Titik Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan			900.000.000	22.960.392	1,15	10,56				
50	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	1 Laporan		800.000.000	12.620.196	1,58	10,00	APBD	Sumsel	Inflasi	Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
51	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	1 Laporan		100.000.000	10.340.196	10,34	15,00	APBD	Sumsel	Inflasi	Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
xiv	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lints (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Laporan			50.000.000	0	0	10,00				
52	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Pengawasan Andalalin	Laporan	1 Laporan		50.000.000	0	0	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Menambah Peserta Diklat
xv	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	Laporan			600.000.000	11.210.900	1,87	10,00				
53	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	8 Orang		100.000.000		0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
54	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	1 Laporan		250.000.000	11.210.900	4,48	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
55	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan	1 Laporan		250.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
xvi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum	Unit			6.114.000.000	0	0	10,00				
56	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Laporan	1 Laporan		150.000.000	0	0	10,00	APBD	Sumsel	Inflasi dan Kemiskinan	Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
57	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Unit	6 Unit		5.964.000.000	0	0	10,00	APBD	Sumsel	Inflasi dan Kemiskinan	Faktor Pendorong, Menambah Jumlah Pelayanan Angkutan Umum
xvii	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan	Dokumen			200.000.000	0	0	10,00				
58	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkoktaan untuk Aangkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1 Dokumen		200.000.000	0	0	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
xviii	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum	Dokumen			400.000.000	0	0	10,00				
59	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1 Dokumen		400.000.000	0	0	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
xix	Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan	Unit			350.340.000	0	0	10,00				
60	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	4 Unit		350.340.000	0	0	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Meningkatkan Fitur pada Aplikasi
III	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Trip Perjalanan Kapal	Trip			12.500.000.000	143.242.747	1,15	10,00				
xx	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau	Unit			650.000.000	0	0	10,00				
61	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Unit	1 Unit		650.000.000	0	0	10,00	APBD	Sumsel	Kemiskinan	Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
xxi	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau	Dokumen			400.000.000	0	0	10,00				
62	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan disetujui Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1 Dokumen		400.000.000	0	0	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
xxii	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas	Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau	Dokumen			150.000.000	2.640.000	0	10,00				

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Terkait Baerupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barng, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1 Dokumen		150.000.000	2.640.000	1,76	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
xxiii	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan yang memiliki RIP dan DLKr/DLKp	Dokumen			1.000.000.000	0	0	10,00				
64	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	2 Dokumen		1.000.000.000	0	0	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
xxiv	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun				9.200.000.000	104.480.926	0	10,00				
65	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	1 Dokumen		200.000.000	7.970.000	3,99	10,00	APBD	Sumsel	Kemiskinan	Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
66	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Unit	1 Unit		8.000.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Banyuasin		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
67	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	1 Unit		1.000.000.000	96.510.926	9,65	10,00	APBD	Banyuasin	Inflasi dan Kemiskinan	Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
xxv	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan			850.000.000	36.121.821	0,13	10,00				
68	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1 Dokumen		200.000.000	0	0	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
69	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	1 Laporan		650.000.000	36.121.821	5,56	10,00	APBD	Sumsel	Kemiskinan	Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
xxvi	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan	Laporan			250.000.000	0	0	10,00				
70	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	1 Laporan		250.000.000	0	0	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
IV	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Jumlah Penumpang Kereta Api	Orang			728.282.300	0	0	10,00				

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
xxvii	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Panjang Jaringan Jalur Kereta Api yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen			253.000.000	0	0	10,00				
71	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kerta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Dokumen	1 Dokumen		253.000.000	0	0	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
xxviii	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Panjang Jaringan Pelayanan Kereta Api yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen			375.282.300	0	0	10,00				
72	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	Dokumen	1 Dokumen		236.690.000	0	0	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
73	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Dokumen	1 Dokumen		138.592.300	0	0	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
xxviv	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Izin Kereta Api Khusus	Dokumen			100.000.000	0	0	10,00				
74	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1 Dokumen		100.000.000	0	0	10,00	APBD	Sumsel		Faktor Pendorong, Komitmen dan Tanggung Jawab
Jumlah						77.848.257.840	6.100.580.408	7,84	14,06				

Dinas Komunikasi dan Informatika

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	%	100%		17.851.128.302	3.182.638.841	17,83	17,83				
i	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan	Dokumen	1 Dokumen		186.256.000	0	0,00	0,00				
	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3 Dokumen		186.256.000	0	0,00	0,00	APBD			
ii	Administrasi keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Tahun	1 Tahun		9.545.915.000	2.301.623.672	24,11	24,11				
	2 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	56 Orang / Bulan		9.284.035.000	2.301.623.672	24,79	24,79	APBD			
	3 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1 Dokumen		236.880.000	0	0,00	0,00	APBD			
	4 Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 laporan		25.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
iii	Adminitrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Aset Dinas Kominfo yang di asuransikan	Tahun	1 Tahun		77.000.000	0	0,00	0,00				
	5 Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen		77.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
iv	Administrasi kepegawaian pemerintah daerah	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Tahun	1 Tahun		370.000.000	0	0,00	0,00				
	6 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1 Paket		200.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
	7 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	18 Orang		170.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
v	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi	Tahun	1 Tahun		1.382.963.166	114.833.252	8,30	8,30				
	8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Paket	1 Paket		20.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
	9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket		100.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
	10 Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1 Paket		40.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
	11 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1 Paket		40.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
	12 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1 Paket		130.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
	13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	1 Dokumen		40.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
	14 Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan		30.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
	15 Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1 laporan		982.963.166	114.833.252	11,68	11,68	APBD			
vii	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan aset BMD	Tahun	1 Tahun		1.115.000.000	0	0,00	0,00				
	16 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	Unit		500.000.000	0	0,00	0,00	APBD			

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	1 Unit		615.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
viii	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penunjang administrasi kebutuhan terpenuhi	Tahun	1 Tahun		3.823.994.136	727.328.757	19,02	19,02				
18	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1 laporan		20.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
19	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	1 laporan		500.000.000	88.317.757	17,66	17,66	APBD			
20	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1 Laporan		3.303.994.136	639.011.000	19,34	19,34	APBD			
ix	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemeliharaan aset BMD	Tahun	1 Tahun		1.350.000.000	38.853.160	2,88	2,88				
21	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasi atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18 Unit (16 Mobil dan 2 Motor)		750.000.000	38.853.160	5,18	5,18	APBD			
22	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	230 Unit		100.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
23	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Tiang Baliho yang terpelihara	Unit	7 Unit		100.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Unit	1 Unit		400.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
II	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	80%		10.020.000.000	1.696.145.550	16,93	16,93				
		2. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	70%									
x	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	Persentase informasi yang dikelola dan ditindaklanjuti	%	80%		10.020.000.000	1.696.145.550	16,93	16,93				
25	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	100 Permohonan		75.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
26	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	1 Rekomendasi		150.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
27	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	%	90%		75.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
28	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi Publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	2 Media		375.000.000	8.946.620	2,39	2,39	APBD			
29	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	%	100%		3.770.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
30	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	7 Konten		1.000.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
31	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	17 Komunitas		75.000.000	0	0,00	0,00	APBD			

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	100 Orang		100.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
33	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	1 Laporan		1.300.000.000	187.198.930	14,40	14,40	APBD			
34	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media Mendiseminasikan Informasi Program dan Kebijakan	Laporan	2 Laporan		3.100.000.000	1.500.000.000	48,39	48,39	APBD			
III	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase jenis pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	%	90%		5.350.000.000	99.885.711	1,87	1,87				
xi	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase layanan pengguna berbasis e-government (Pelayanan Publik/ Pemerintah)	%	100%		100.000.000	0	0,00	0,00				
35	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	Dokumen	1 Dokumen		100.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
xii	Pengelolaan E-Goverment di lingkup pemerintah daerah provinsi	Persentase Pengguna e-government	%	90%		5.250.000.000	99.885.711	1,90	1,90				
36	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Layanan	1 Layanan		1.350.000.000	4.798.750	0,36	0,36	APBD			
37	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen	1 Dokumen		600.000.000	95.086.961	15,85	15,85	APBD			
39	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	49 Perangkat Daerah		2.800.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
40	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Kab/Kota	17 Kab/Kota		100.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
41	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	1 Dokumen		100.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
42	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Dokumen	1 Dokumen		300.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
IV	Perogram penyelengaraan statistik sektoral	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100%		550.000.000	1.620.000	0,29	0,29				
		2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100%			0						

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
xiii	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah provinsi	Persentase data yang tersedia	%	100%		550.000.000	1.620.000	0,29	0,29				
43	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	1 Dokumen		100.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
44	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	100 Orang		75.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
45	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	100%		75.000.000	1.080.000	1,44	1,44	APBD			
46	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	1 Dokumen		300.000.000	540.000	0,18	0,18	APBD			
V	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	100%		300.000.000	21.471.587	7,16	7,16				
xiv	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100%	100%		250.000.000	21.471.587	8,59	8,59				
47	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan		50.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
48	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	49 Perangkat Daerah	49 Perangkat Daerah		200.000.000	21.471.587	10,74	10,74	APBD			
xv	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah koordinasi persandian di daerah	49 Perangkat Daerah	49 Perangkat Daerah		50.000.000	0	0,00	0,00				
49	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	49 Perangkat Daerah	49 Perangkat Daerah		50.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
Jumlah						34.071.128.302	5.001.761.689	14,68	14,68				

Dinas Koperasi dan UKM

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					14.432.325.800	2.028.617.759	14,06	15,09				
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					278.000.000	0	0,00	0,00				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	278.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dinas Koperasi, UKM Prov.Sumsel		-
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.880.533.000	2.028.617.759	11,21	24,52				
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14 Bulan	2 Bulan	8.054.737.000	1.883.306.759	23,38	25,00	APBD	Dinas Koperasi, UKM Prov.Sumsel		-
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Jasa Pendukung Administrasi Pelaksana ASN	Bulan	13 Bulan	1 Bulan	656.316.000	145.311.000	22,14	25,00	APBD	Dinas Koperasi, UKM Prov.Sumsel		-
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Jasa Penatausahaan Keuangan	Bulan	12 Bulan	0 Bulan	169.480.000	0	0,00	0,00	APBD	Dinas Koperasi, UKM Prov.Sumsel		-
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					230.000.000	0	0,00	0,00				
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Dinas Beserta Kelengkapan	Paket	2 Paket	0 Paket	150.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dinas Koperasi, UKM Prov.Sumsel		-
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan Kapasitas ASN	Orang	3 Orang	0 Orang	80.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dinas Koperasi, UKM Prov.Sumsel		-
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.800.000.000	0	0,00	0,00				
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan	12 Bulan	0 Bulan	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dinas Koperasi, UKM Prov.Sumsel	P3DN	-
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	12 Bulan	0 Bulan	600.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dinas Koperasi, UKM Prov.Sumsel	P3DN	-
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	12 Bulan	0 Bulan	280.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dinas Koperasi, UKM Prov.Sumsel	P3DN	-
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	12 Bulan	0 Bulan	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dinas Koperasi, UKM Prov.Sumsel	P3DN	-
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30 Laporan	12 Laporan	700.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dinas Koperasi, UKM Prov.Sumsel		-
12	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	120.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dinas Koperasi, UKM Prov.Sumsel		-
v	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					800.000.000	0	0,00	0,00				
13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Unit		0 Unit Motor 0 Unit Mobil	500.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dinas Koperasi, UKM Prov.Sumsel	P3DN	-
14	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Tersedia	Paket	1 Paket	0 Paket	300.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dinas Koperasi, UKM Prov.Sumsel	P3DN	-
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					675.200.000	0	0,00	0,00				
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim dan Materai Tersedia	Bulan	12 Bulan	0 Bulan	20.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dinas Koperasi, UKM Prov.Sumsel		-
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Frekuensi Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12 Bulan	0 Bulan	330.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dinas Koperasi, UKM Prov.Sumsel		-
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Frekuensi Pembayaran Jasa Pelayanan Kantor Terbayar	Bulan	12 Bulan	0 Bulan	325.200.000	0	0,00	0,00	APBD	Dinas Koperasi, UKM Prov.Sumsel		-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.768.592.800	0	0,00	0,00				
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bulan	1 Bulan	0 Bulan	374.524.000	0	0,00	0,00	APBD	Dinas Koperasi, UKM Prov.Sumsel		-
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bulan	1 Bulan	0 Bulan	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dinas Koperasi, UKM Prov.Sumsel		-
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0 Unit	0 Unit	1.294.068.800	0	0,00	0,00	APBD	Dinas Koperasi, UKM Prov.Sumsel		-
II	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam					100.000.000	0	0,00	0,00				
viii	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					100.000.000	0	0,00	0,00				
21	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	20 Unit Usaha	0 Unit Usaha	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-
III	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi					150.000.000	0	0,00	0,00				
ix	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					150.000.000	0	0,00	0,00				
22	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	20 Unit Usaha	0 Unit Usaha	150.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-
IV	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi					100.000.000	0	0,00	0,00				
x	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					100.000.000	0	0,00	0,00				
23	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktivitas Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	20 Unit Usaha	0 Unit Usaha	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-
V	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian					1.442.500.000	0	0,00	0,00				
xi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1.442.500.000	0	0,00	0,00				
24	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	438 Orang	0 Orang	1.442.500.000	0	0,00	0,00	DAK NON FISIK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Inflasi	-
VI	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi					400.000.000	0	0,00	0,00				

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
xii	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					400.000.000	0	0,00	0,00				
25	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	20 Unit Usaha	0 Unit Usaha	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-
26	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	20 Keluarga	0 Keluarga	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-
27	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha	20 Unit Usaha	0 Unit Usaha	250.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-
VII	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)					3.029.783.351	0	0,00	0,00				
xiii	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					3.029.783.351	0	0,00	0,00				
28	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	200 Unit Usaha	0 Unit Usaha	176.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kemiskinan	-
29	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	656 Orang	0 Orang	2.753.783.351	0	0,00	0,00	DAK NON FISIK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Inflasi	-
30	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha	400 Unit Usaha		100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-
VII	Program Pengembangan UMKM					1.733.608.649	0	0,00	10,00				
xiv	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah					1.733.608.649	0	0,00	10,00				
31	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	150 Unit Usaha	0 Unit Usaha	1.500.000.000	0	0,00	10,00	DAK NON FISIK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-
32	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Orang	200 Orang	0 Orang	233.608.649	0	0,00	10,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-
Jumlah						21.388.217.800	2.028.617.759	9,48	10,99				

*Dinas Penanaman
Modal Daerah dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu*

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN FEBRUARI TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase program penunjang urusan pemerintahan Daerah Povinsi Daerah Povinsi yang tercapai	100%	100%		19.196.704.000	767.105.186	4,00	4,00		Provinsi Sumatera Selatan		
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	9 Dokumen		410.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
1	Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD tahun n+1 yang tersusun	Dokumen	2 Dokumen		320.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
2	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD yang tersusun	Dokumen	2 Dokumen		30.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA SKPD yang tersusun	Dokumen	2 Dokumen		30.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Laporan	3 Laporan		30.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tercapai	Tahun	1 Tahun		14.760.704.000	767.105.186	5,20	5,20		Provinsi Sumatera Selatan		
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1 Tahun		14.020.547.000	767.105.186	5,47	5,47		Provinsi Sumatera Selatan		
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	orang / Bulan selama 1 Tahun	32 orang / Bulan selama 1 Tahun		688.077.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	orang / tahun	9 orang / tahun		34.080.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan		10.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	18 Laporan		8.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang tercapai	Tahun	1 Tahun		280.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta					180.000.000		0,00	0,00				
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	10 orang		100.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadaan BMD yang tercapai	Tahun	1 Tahun		1.482.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	tahun	1 tahun		40.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit	25 Unit		200.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
14	Penyediaan Bahan Logistrik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logisitik Kantor yang Disediakan (Tersedianya ATK, makan minum rapat, peralatan dan bahan pembersih)	1 tahun, 1 tahun, dan unit	1 tahun, 1 tahun, dan 25 unit		260.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 tahun	1 tahun		120.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Expsemplar / buku yang tersedia	2160 Expsemplar / buku yang tersedia		12.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	120 kali		850.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
v	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang tercapai	100%	100%		150.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
18	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15 Unit		150.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercapai	100%	100%		954.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dok/Surat	400 Dok/Surat		12.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
20	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	Kwitansi Rek	48 Kwitansi Rek		500.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung kantor dan terbayarnya jasa tutor SKJ)	1 Tahun, kali	1 Tahun, 44 kali		442.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dan siap operasional	100%	100%		1.160.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperlihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit (R2, R4)	14 unit (5 R2, 9 R4)		500.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peratan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	1 Tahun		340.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit, 1 tahun	1 unit, 1 tahun		320.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tercapainya Persentase Pertumbuhan Investasi Penanaman Modal	7%	7%		3.022.944.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan	Investasi	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
viii	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tingkat capaian pelaksanaan kegiatan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal daerah,Jumlah regulasi /kebijakan yang ditetapkan	dokumen regulasi	2 dokumen regulasi		928.800.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
25	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	kesepakatan, dokumen kajian, raperda	20 kesepakatan, 1 dokumen kajian, 1 ranerda		928.800.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
ix	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Capaian potensi daerah yang berpeluang investasi, Meningkatnya jumlah potensi yang menjadi peluang investasi daerah	proyek/kegiatan	5 proyek/kegiatan		2.094.144.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
26	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Tersedianya dokumen kajian pemetaan potensi dan peluang investasi daerah, Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	dokumen	1 dokumen		2.094.144.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
III	Program Promosi Penanaman Modal	Terlaksananya Penyusunan Strategi dan pelaksanaan kegiatan promosi Penanaman modal kewenangan daerah provinsi	100%	100%		1.400.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan	Investasi	
x	Penyenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tercapainya Promosi penanaman modal kewengan daerah provinsi	dokumen	1 dokumen		1.400.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
27	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	event dan jenis	1 event dan 2 jenis		600.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
28	Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	event, Jenis, Jenis	3 event, 3 Jenis, 2 Jenis		800.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	Tercapainya Kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, terintegrasi dan transparan	perizinan dan non perizinan	675 perizinan dan non perizinan		1.450.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan	Investasi	
xi	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan yang diterbitkan sesuai Standar Operasional Prosedur	perizinan dan non perizinan	675 perizinan dan non perizinan		1.450.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
29	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegritas secara elektronik	Perizinan dan Non Perizinan	2250 Perizinan dan Non Perizinan		1.450.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
V	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tercapainya nilai realisasi Invesasi PMA dan PMDN (Tercapainya nilai realisasi Invesasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri)	Trilyun	41,32 Trilyun		2.088.078.578	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan	Investasi	
xii	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase tingkat kepatuhan investor / pelaku usaha (tingkat kepatuhan investor / pelaku usaha)	95 persen	95 persen		2.088.078.578	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	Pengawasan Penanaman Modal	jumlahnya kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dan pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	BAP	60 BAP		862.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
31	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	LKPM	2500 LKPM		557.134.578	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
32	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan berusaha ber4basis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha		668.944.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
VI	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tercapai Rasio Tingkat layanan terhadap ketersediaan data dan sistem informasi Penanaman Modal	100%	100%		200.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan	Investasi	
xiii	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Tersedianya data dan Informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	100%	100%		200.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
33	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinana Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dok/ database	4 Dok/ database		200.000.000	0	0,00	0,00		Provinsi Sumatera Selatan		
Jumlah						27.357.726.578	767.105.186	2,80	2,80				

Dinas Pemuda dan Olahraga

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	%	100		24.214.319.800	4.136.312.583	17,08	23,97	APBD			
i	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	laporan	79		980.000.000	15.400.330	1,57	5,00	APBD			
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	3	450.000.000	15.400.330	3,42	5,00	APBD			
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Monev)	Dokumen	60	10	530.000.000	0	0,00	5,00	APBD			
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	Dokumen	1		11.242.443.000	2.841.876.926	25,28	29,29	APBD			
	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	910	56	10.752.443.000	2.788.176.926	25,93	30,00	APBD			
	4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	kegiatan	1	1	400.000.000	49.950.000	12,49	15,00	APBD			
	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dokumen	1	1	45.000.000	3.750.000	8,33	10,00	APBD			
	6 Penyusunan Pelaporan dan Anallisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen hasil penyusunan Pelaporan dan Anallisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	45.000.000	0	0,00	5,00	APBD			
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi barang milik daerah	%	100		315.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
	7 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen pengamanan barang milik daerah	Dokumen	1	0	300.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
	8 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah SKPD	Dokumen	2	0	15.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
iv	Administrtasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	Rp 1		780.000.000	26.910.810	3,45	6,28	APBD			
	9 Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas pegawai yang tersedia	kegiatan	1	0	200.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
	10 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	orang	70	5	100.000.000	14.643.000	14,64	15,00	APBD			
	11 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	orang	70	5	100.000.000	12.267.810	12,27	15,00	APBD			
	12 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	orang	70	4	380.000.000	0	0,00	5,00	APBD			
v	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	Rp 1		1.135.000.000	251.746.050	22,18	25,11	APBD			
	13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan/ Kantor	Jumlah paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan/ Kantor	kegiatan	1	1	30.000.000	0	0,00	5,00	APBD			
	14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kegiatan	1	1	60.000.000	0	0,00	5,00	APBD			
	15 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor yang tersedia	jenis	30	0	60.000.000	0	0,00	5,00	APBD			
	16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor	jenis	30	10	120.000.000	78.353.400	65,29	70,00	APBD			
	17 Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah pengandaan/barang cetakan yang tersedia	jenis	10	8	50.000.000	37.000.100	74,00	75,00	APBD			
	18 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	1	20.000.000	0	0,00	5,00	APBD			
	19 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	jenis	20	20	25.000.000	24.967.600	99,87	100,00	APBD			

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	kegiatan	1	1	650.000.000	111.424.950	17,14	20,00	APBD			
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang tertata	kegiatan	1	0	20.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi elektronik yang mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan	aplikasi	1	0	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana	Dokumen	1		1.085.000.000	0	0,00	100,00	APBD			
24	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair kantor yang tersedia	paket	5	0	400.000.000	0	0,00	100,00	APBD			
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin disediakan	paket	5	0	685.000.000	0	0,00	100,00	APBD			
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1		6.150.000.000	972.770.130	15,82	16,13	APBD			
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	kegiatan	1	1	20.000.000	5.000.000	25,00	25,00	APBD			
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	kegiatan	1	1	1.350.000.000	266.361.130	19,73	20,00	APBD			
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	kegiatan	5	5	4.780.000.000	701.409.000	14,67	15,00	APBD			
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah laporan aset yang dipelihara	Dokumen	1		2.526.876.800	27.608.337	1,09	2,05	APBD			
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	paket	36	8	516.876.800	27.608.337	5,34	10,00	APBD			
31	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubelair kantor yang terpelihara	kegiatan	1	0	30.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	kegiatan	1	0	55.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	bangunan	2	0	1.925.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
II	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Angka pertumbuhan wirausaha muda; Angka Partisipasi dan kepemimpinan pemuda; Jumlah Pemuda yang berperan dalam pembangunan	% orang orang	40,75 45 4500		8.990.415.250	63.921.160	0,71	0,71	APBD			
ix	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat secara aktif dalam kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda	orang	2500		8.490.415.250	63.921.160	0,75	0,75	APBD			
34	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah pemuda kader di Provinsi yang ditingkatkan daya saingnya	orang	1849	0	6.440.415.250	29.421.160	0,46	0,46	APBD			
35	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	unit	34	0	200.000.000	0	0,00	0,00				
36	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah Pemuda yang mendapatkan penghargaan atas prestasi/jasa dalam memajukan potensi pemuda	orang	30	0	450.000.000	3.380.000	0,75	0,75	APBD			
37	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan	Dokumen	1	0	200.000.000	5.132.000	2,57	2,57	APBD			
38	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda tingkat Provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	Persentase	50	0	300.000.000	0	0,00	0,00				

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah pemuda pelopor	orang	15	0	150.000.000	6.182.000	4,12	4,12	APBD			
40	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan dan kreativitas pemuda, pelatihan kewirausahaan dan wirausaha muda yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	120	0	750.000.000	19.806.000	2,64	2,64	APBD		kemiskinan	
x	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat	Jumlah Anggota Organisasi Pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda	orang	210		500.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
41	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Manajemen Kelembagaan Organisasi Kepemudaan Tingkat Provinsi	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan manajemen kelembagaan organisasi	OKP	17	46	500.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
III	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Angka Partisipasi masyarakat berolahraga Jumlah medali yang diperoleh dari kejuaraan nasional dan internasional Jumlah Pembinaan Atlet Muda	% medali orang			71.677.278.382	146.191.363	0,20	0,45	APBD			
xi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah atlet pelajar yang dibina	Orang	265		4.400.000.000	41.152.000	0,94	5,00	APBD			
42	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah atlet PPLP, SONS yang difasilitasi	Kegiatan	3	0	3.050.000.000	41.152.000	1,35	5,00	APBD			
43	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah infrastruktur olahraga/venue/ Kab/Kota se Sumatera Selatan yang difasilitasi	Kegiatan	1	0	350.000.000	0	0,00	5,00	APBD			
44	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan,pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah infrastruktur olahraga/venue/ Kab/Kota se Sumatera Selatan yang difasilitasi serta cabor, masyarakat/kelompok/club	Paket	48	0	1.000.000.000	0	0,00	5,00	APBD			
xii	Penyelenggaran Kejuaraan Olahraga	Jumlah fasilitasi penyelenggaran dan keikutsertaan pada kejuaraan olahraga	Event	6		29.744.584.750	105.039.363	0,35	0,35	APBD			
45	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalamPenyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah peserta/kontingen yang mengikuti kejuaraan olahraga	Orang	1000	0	9.500.000.000	105.039.363	1,11	1,11	APBD			
46	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan OlahragaTingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah event yang diselenggarakan	Event	6	0	20.244.584.750	0	0,00	0,00	APBD			
xiii	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Orang	50		1.932.693.632	0	0,00	0,00	APBD			
47	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah olahragawan yang berprestasi menerima penghargaan	Orang	50	0	1.159.361.438	0	0,00	0,00	APBD			
48	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah aplikasi data keolahragaan	Aplikasi	1	0	200.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
49	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah olahragawan berprestasi yang dibina	Orang	50	0	573.332.194	0	0,00	0,00	APBD			
xiv	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	Dokumen	1		35.600.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
49	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah dokumen CSR olahraga dan dokumen kerjasama organisasi olahraga	Dokumen	8	0	35.600.000.000	0	0,00	0,00	APBD			

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah anggota Pramuka yang berperan dalam pembangunan	orang	75		5.700.000.000	5.601.000	0,10	0,00	APBD			
xv	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang dibina	orang	75		5.700.000.000	5.601.000	0,10	0,00	APBD			
50	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah organisasi kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	Organisasi	1	1	5.700.000.000	5.601.000	0,10	0,00	APBD			
	TOTAL					110.582.013.432	4.352.026.106	3,94	5,60				

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tercapainya Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi		16 Dokumen, 46 Laporan, 112 Orang, 24 Unit, 36 Paket, 12 Bulan		26.628.680.100	4.255.146.247	15,98	19,90				
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Dokumen, 3 Laporan		165.000.000	0	0,00	7,00				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen		15.000.000	0	0,00	7,00		Palembang		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monev Kinerja dalam 1 tahun anggaran		3 Laporan		150.000.000	0	0,00	7,00		Dalam Daerah dan Luar Daerah		
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 orang/ bulan, 3 Dokumen, 1 Laporan		20.175.680.100	3.698.477.768	18,33	31,67				
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100 orang/ bulan		14.634.856.000	3.103.925.168	21,21	47,00		Palembang		
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		3 Dokumen		5.525.824.100	594.552.600	10,76	41,00		Palembang		
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan		15.000.000	0	0,00	7,00		Palembang		
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Orang		95.000.000	0	0,00	7,00				
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		12 Orang		95.000.000	0	0,00	7,00		Palembang		
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah		36 Paket, 10 Dokumen, 4 Laporan		1.975.000.000	236.179.619	11,96	34,00				
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket		200.000.000	49.999.100	25,00	39,00		Palembang		
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket		200.000.000	49.999.949	25,00	40,00		Palembang		
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket		150.000.000	49.999.000	33,33	46,00		Palembang		
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan		10 Dokumen		75.000.000	0	0,00	7,00		Palembang		
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 Laporan		1.350.000.000	86.181.570	6,38	38,00		Dalam Daerah dan Luar Daerah		
v	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Unit		1.000.000.000	0	0,00	10,00				
12	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		3 Unit		1.000.000.000	0	0,00	10,00		Palembang		
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		38 Laporan		1.518.000.000	212.944.760	14,03	22,67				

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perlengkapan surat menyurat kantor		2 Laporan		18.000.000	0	0,00	7,00		Palembang		
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pembayaran listrik, air, telp dan Internet		24 Laporan		1.200.000.000	212.944.760	17,75	41,00		Palembang		
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan		300.000.000	0	0,00	20,00		Palembang		
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		21 Unit, 12 Bulan		1.700.000.000	107.544.100	6,33	27,00				
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		18 Unit		1.000.000.000	7.544.100	0,75	35,00		Palembang		
17	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		12 Bulan		200.000.000	100.000.000	50,00	59,00		Palembang		
18	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terpeliharanya Website kantor dan Web Giwang Sumsel		1 Unit		200.000.000	0	0,00	7,00		Palembang		
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit		300.000.000	0	0,00	7,00		Palembang		
II	Program Pengembangan Kebudayaan	Angka Kumulatif Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan, Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan		20 Objek, 50 Orang		6.085.000.000	3.000.000	0,05	17,50				
viii	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselenggaranya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		10 Objek, 50 Orang		4.010.000.000	0	0,00	7,00				
20	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan		10 Objek		3.910.000.000	0	0,00	7,00		Dalam Daerah dan Luar Daerah		
21	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		50 Orang		100.000.000	0	0,00	7,00		Dalam Daerah dan Luar Daerah		
ii	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Tercapainya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		10 Objek		2.075.000.000	3.000.000	0,14	28,00				
22	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		10 Objek		2.075.000.000	3.000.000	0,14	28,00		Dalam Daerah dan Luar Daerah		
III	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Terlaksana Pergelaran Seni		50 Orang, 12 Lembaga		300.000.000	0	0,00	7,00				
ix	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		50 Orang, 12 Lembaga		300.000.000	0	0,00	7,00				
23	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Peserta yang Mengikuti		50 Orang		100.000.000	0	0,00	7,00		Dalam Daerah dan Luar Daerah		
24	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		12 Lembaga		200.000.000	0	0,00	7,00		Dalam Daerah dan Luar Daerah		
IV	Program Pembinaan Sejarah	Terselenggaranya Pembinaan Sejarah		1 Dokumen		207.196.001	0	0,00	7,00				
x	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Terselenggaranya Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi		1 Dokumen		207.196.001	0	0,00	7,00				

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Terdokumentasinya Profil Kebudayaan Sumsel		1 Dokumen		207.196.001		0	0,00	7,00		Dalam Daerah dan Luar Daerah	
V	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Angka Kumulatif Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan, Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan		55 Objek, 22 Orang		275.000.000		0	0,00	7,00			
xi	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Tercapainya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		55 Objek		150.000.000		0	0,00	7,00			
26	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		50 Objek		75.000.000		0	0,00	7,00		Sumsel	
27	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		5 Objek		75.000.000		0	0,00	7,00		Sumsel	
xii	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terselenggaranya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		20 Orang		125.000.000		0	0,00	7,00			
28	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya		20 Orang		125.000.000		0	0,00	7,00		Dalam Daerah dan Luar Daerah	
VI	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Kunjungan Museum		509 Unit		5.161.722.000		0	0,00	7,00			
xiii	Pengelolaan Museum Provinsi	Terpeliharanya Museum Provinsi		509 Unit		5.161.722.000		0	0,00	7,00			
29	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Konservasi dan restorasi koleksi Museum Subkoss, terawatnya koleksi Museum Sriwijaya, Terpublikasinya koleksi Museum Sriwijaya, Museum Masuk Sekolah		500 Unit		5.086.722.000		0	0,00	7,00		Dalam Daerah dan Luar Daerah	
30	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Terpeliharanya Museum Negeri Sumatera Selatan dan Museum Subkoss		9 Unit		75.000.000		0	0,00	7,00		Palembang dan Lubuk Linggau	
VII	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Terselenggaranya Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		9 Lokasi, 10 Dokumen, 2 Laporan, 100 Orang		1.475.000.000		0	0,00	7,00			
xiv	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya Daya Tarik Wisata Provinsi		9 Lokasi, 6 Dokumen, 100 Orang		1.180.000.000		0	0,00	7,00			
31	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Terlaksananya Anugerah Pesona Desa Wisata		9 Lokasi		300.000.000		0	0,00	7,00		Sumsel	
32	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi		2 Dokumen		80.000.000		0		7,00		Sumsel	
33	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Tersedianya Desa Wisata yang dikembangkan & tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan DTW Unggulan Provinsi		4 Dokumen		200.000.000		0	0,00	7,00		Sumsel dan Luar Provinsi	
34	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Bimtek Sapta Pesona dan Sadar Wisata dan Pemilihan Putera Puteri Sriwijaya 2025		100 orang		600.000.000		0	0,00	7,00		Sumsel	
xv	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		2 Laporan, 4 Dokumen		295.000.000		0	0,00	7,00			
35	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Terlaksananya Temu Bisnis Sektor Pariwisata		2 Laporan		120.000.000		0	0,00	7,00		Sumsel dan Luar Sumsel	
36	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi	Terlaksananya Bimtek Perizinan Berusaha		4 Dokumen		175.000.000		0	0,00	7,00		Sumsel	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VIII	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara, Jumlah Wisatawan Nusantara		11 Dokumen, 13 Laporan		5.025.000.000	0	0,00	7,00				
xvi	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		11 Dokumen, 13 Laporan		5.025.000.000	0	0,00	7,00				
37	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Pembuatan Pembuatan video Pariwisata, Penyediaan Bahan-Bahan Promosi dan Promosi Pariwisata melalui media online		9 Dokumen		800.000.000	0	0,00	7,00		Dalam Daerah dan Luar Daerah		
38	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		2 Dokumen		200.000.000	0	0,00	7,00		Dalam Daerah dan Luar Daerah		
39	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri		13 Laporan		4.025.000.000	0	0,00	7,00		Dalam Daerah dan Luar Daerah		
IX	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	Terselenggaranya Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual		1 Laporan		200.000.000	0	0,00	7,00				
xvii	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		1 Laporan		200.000.000	0	0,00	7,00				
40	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	Jumlah Peserta Pelatihan Start Up Usaha Ekonomi Kreatif		1 Laporan		200.000.000	0	0,00	7,00		Dalam dan Luar Daerah		
X	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Kompeten		400 Orang		550.000.000	0	0,00	7,00				
xvii i	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Tersedianya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		400 Orang		550.000.000	0	0,00	7,00				
41	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Tersedianya peserta yang mengikuti sertifikasi kompetensi		50 Orang		250.000.000	0	0,00	7,00		Sumsel dan Luar Sumsel		
42	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta Pelatihan		350 Orang		300.000.000	0	0,00	7,00		Sumsel dan Luar Sumsel		
Jumlah						45.907.598.101	4.258.146.247	9,28	9,34				

Dinas Perpustakaan

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Peprustakaan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/(Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					17.598.161.000	3.106.547.920	17,65	18,54				
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					190.000.000	0	0,00	5,26				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000	0	0,00	25,00	APBD	Kota Palembang		
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.116.817.000	3.106.547.920	25,64	26,84				
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	67 Orang/ Bulan	67 Orang/ 3 Bulan	11.143.697.000	2.902.760.920	26,05	27,00	APBD	Kota Palembang		
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen/3 Bulan	900.000.000	203.787.000	22,64	25,00	APBD	Kota Palembang		
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	73.120.000	0	0,00	25,00	APBD	Kota Palembang		
iii	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah					15.000.000	0	0,00	0,00				
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1 Laporan	0 Laporan	15.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					386.344.000	0	0,00	0,00				
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	100 Paket	0 Paket	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
8	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10 Orang	0 Orang	166.344.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100 Orang	0 Orang	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah					885.000.000	0	0,00	0,00				
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	0 Paket	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket	0 Paket	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	0 Paket	250.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	0 Paket	60.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/(Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	75.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	0 Laporan	400.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.050.000.000	0	0,00	0,00				
17	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2 Mobil dan 2 Motor Unit	0 Unit	800.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
18	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2 Paket	0 Paket	750.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	25 Unit	0 Unit	500.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					870.000.000	0	0,00	0,00				
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	0 Laporan	10.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	0 Laporan	460.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3 Laporan	0 Laporan	400.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.085.000.000	0	0,00	0,00				
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2 Unit	0 Unit	75.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14 Unit	0 Unit	250.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60 Unit	0 Unit	260.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
26	Pemeliharaan Aset Tetap	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit/m2 Unit	1 Unit/1.200 m2 Unit	0 Unit/m2 Unit	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	0 Unit	400.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
II	Program Pembinaan Perpustakaan					4.615.000.000	0	0,00	0,00				
ix	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					1.800.000.000	0	0,00	0,00				
28	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	150 Perpustakaan	0 Perpustakaan	250.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/(Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Orang	80 Orang	0 Orang	250.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota		
30	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	1500 Eksemplar	0 Eksemplar	450.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
31	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
32	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	Nilai	72 Nilai	0 Nilai	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota		
33	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Indeks	17.02 Indeks	0 Indeks	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota		
34	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Jumlah Kerja Sama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
35	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dan Dipelihara	Perpustakaan	1 Perpustakaan	0 Perpustakaan	500.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
x	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi					165.000.000	0	0,00	0,00				
36	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
37	Pembinaan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan Umum dan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	34 Perpustakaan	0 Perpustakaan	65.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota		
xi	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi					2.650.000.000	0	0,00	0,00				
38	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus	3 Lokus	0 Lokus	1.000.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
39	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Perpustakaan	20 Perpustakaan	0 Perpustakaan	1.200.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten / Kota	Kemiskinan	
40	Pemberiaan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang	10 Orang	0 Orang	150.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
41	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan	5 Perpustakaan	0 Perpustakaan	300.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota		
III	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno					650.000.000	0	0,00	0,00				
xii	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi					125.000.000	0	0,00	0,00				

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/(Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpundan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eksemplar	210 Eksemplar	0 Eksemplar	75.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota		
43	Pemberian Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerimaan Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Penerbit	10 Penerbit	0 Penerbit	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang		
xiii	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah					125.000.000	0	0,00	0,00				
44	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	Entry	300 Entry	0 Entry	75.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota		
45	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Naskah	350 Naskah	0 Naskah	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota		
xiv	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi					275.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
46	Pengembangan, Pengelolaan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki Masyarakat yang Dilakukan Pengembangan, Pengolahan, Pengalihmediaan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Naskah Eksemplar	15 Naskah Eksemplar	0 Naskah Eksemplar	125.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota		
47	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	66 Orang	0 Orang	150.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota		
xv	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi					125.000.000	0	0,00	0,00				
48	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar	300 Eksemplar	0 Eksemplar	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota		
49	Pengelolaan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan Penyiangan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar	300 Eksemplar	0 Eksemplar	25.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota		
Jumlah						22.863.161.000	3.106.547.920	13,59	14,27				

Dinas Kearsipan

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Kearsipan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100%	1171,11%	12.723.219.900	1.817.128.883	14,28	28,92	APBD	Palembang		
i	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100%	84,10%	107.000.000	0	0,00	19,63	APBD	Palembang		
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Buku	10	10	6.000.000	0	0,00	100,00	APBD	Palembang		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Buku	10	0	6.500.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	Buku	10	10	7.000.000	0	0,00	100,00	APBD	Palembang		
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Buku	10	0	7.500.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang tersusun	Buku	400	40	80.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang		
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100%	7348,59%	9.349.775.000	1.683.581.883	18,01	35,55	APBD	Palembang		
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	Bulan	14	5	9.279.175.000	1.683.581.883	18,14	35,71	APBN	Palembang		
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan untuk pembayaran Tenaga Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	0	60.600.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Laporan	1	1	10.000.000	0	0,00	100,00	APBD	Palembang		
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100%	15,00%	85.000.000	0	0,00	0,15	APBD	Palembang		
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat	Orang	20	3	85.000.000	0	0,00	15,00	APBD	Palembang		
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100%	746,67%	950.000.000	0	0,00	10,51	APBD	Palembang		
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Jenis	30	0	30.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	30	7	100.000.000	0	0,00	23,33	APBD	Palembang		
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Pembersih yang tersedia dan jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia	Jenis/ Paket	2.038	250	180.000.000	0	0,00	12,27	APBD	Palembang		
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis	30	0	90.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Bahan bacaan yang tersedia	Lembar	1.000	300	20.000.000	0	0,00	30,00	APBD	Palembang		
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana	Kali	65	6	525.000.000	0	0,00	9,23	APBD	Palembang		
16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Laporan	1	0	5.000.000		0,00	0,00	APBD	Palembang		
v	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100%	0%	350.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	8	0	350.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	3,38%	1.147.944.900	59.302.000	5,17	13,93	APBD	Palembang		
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang terlaksana	Kali	100	0	2.500.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bulan	12	3	480.000.000	0	0,00	25,00	APBD	Palembang		
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kwitansi	36	2	665.444.900	59.302.000	8,91	6,00	APBD	Palembang		
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	0%	733.500.000	74.245.000	10,12	10,12	APBD	Palembang		
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	9	0	275.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	Unit	14	0	260.000.000	74.245.000	28,56	28,56	APBD	Palembang		
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Unit	1	0	198.500.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
II	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Tercapainya Program Pengelolaan Arsip	Persen	100%	0%	890.000.000	0	0,00	6,95	APBD	Palembang		
viii	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Tercapainya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persen	100%	0,00%	450.000.000	0	0,00	6,41	APBD	Palembang		
24	Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis yang telah disusutkan	Lembar	1.500	400	20.000.000	0	0,00	26,67	APBD	Palembang		
25	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis yang diciptakan dan dipelihara	Lembar	1.500	400	20.000.000	0	0,00	26,67	APBD	Palembang		
26	Pemilihan Arsip Teladan	Jumlah Arsip Teladan yang tercipta	Orang	6	0	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
27	Pembinaan Kearsipan Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD dan LKD Kab/Kota yang dibina	Laporan	66	10	120.000.000	0	0,00	15,15	APBD	Palembang		
28	Penyusunan Database Arsiparis	Jumlah data Arsiparis yang dikelola dalam Database	Laporan	70	0	40.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
29	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD dan LKD Kab/Kota yang diaudit Kearsipan	Laporan	60	0	150.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
30	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Orang	6	0	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
ix	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Tercapainya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persen	100%	0,00%	140.000.000	0	0,00	12,14	APBD	Palembang		
30	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang diakuisisi	Arsip	300	35	100.000.000	0	0,00	11,67	APBD	Palembang		
31	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dipreservasi	Arsip	300	40	40.000.000	0	0,00	13,33	APBD	Palembang		
x	Pengelolaan Simpul Jaringan Dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase Tercapainya Pengelolaan Simpul Jaringan Dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persen	100%	0,00%	300.000.000	0	0,00	5,33	APBD	Palembang		
32	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Dokumen	500	40	200.000.000	0	0,00	8,00	APBD	Palembang		
33	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Laporan	66	0	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
III	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Tercapainya Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	100%	15,33%	150.000.000	0	0,00	11,56	APBD	Palembang		
xi	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi di bawah 10 tahun	Persentase Pelaksanaan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi di bawah 10 tahun	Persen	100%	26,67%	50.000.000	0	0,00	26,67	APBD	Palembang		
34	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dinilai dan ditetapkan memiliki retensi di bawah 10 tahun	Arsip	1.500	400	50.000.000	0	0,00	26,67	APBD	Palembang		
xii	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100%	4%	100.000.000	0	0,00	4,00	APBD	Palembang		
35	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip yang dinilai dan diautentifikasi sesuai persyaratan penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	50	2	100.000.000	0	0,00	4,00	APBD	Palembang		
Jumlah						13.763.219.900	1.817.128.883	13,20	27,31				

Dinas Kelautan dan Perikanan

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani		100%		24.600.336.335	3.455.818.700	14,05	14,09		Palembang		
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100%		917.000.000	12.000.000	1,31	1,64		Palembang		
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen		700.000.000	12.000.000	1,71	2,14		Palembang		
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1 Dokumen		17.000.000	0	0,00	0,00		Palembang		
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen		200.000.000	0	0,00	0,00		Palembang		
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.484.584.000	3.248.796.988	17,58	17,59		Palembang		
	4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah aparatur yang telah dibayar gaji dan tunjangan ASN	OB	105 Orang/Bulan	Pembayaran Gaji ASN selama 3 bulan	15.793.486.000	3.160.938.988	20,01	20,01		Palembang		
	5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan serta data dan informasi	Dokumen	1 Dokumen	Pembayaran Honorarium tenaga administrasi keuangan selama 3 bulan	2.674.098.000	87.858.000	3,29	3,37		Palembang		
	6 Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan	Dokumen	1 Dokumen		17.000.000	0	0,00	0,00		Palembang		
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan Pengamanan aset BMD				80.000.000	0	0,00	0,00		Palembang		
	7 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kegiatan Pengamanan aset BMD	Jenis	1 Jenis		80.000.000	0	0,00	0,00		Palembang		
v	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				380.000.000	20.500.000	5,39	5,53		Palembang		
	8 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3 Paket		150.000.000	0	0,00	0,00		Palembang		
	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM Yang Telah Terlatih Dalam Hal Pendidikan Dan Kursus Keterampilan	Kegiatan	1 Kegiatan		230.000.000	20.500.000	8,91	9,13		Palembang		
vi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.138.752.335	31.450.000	1,47	1,64		Palembang		
	10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	19 Jenis		120.000.000	0	0,00	0,00		Palembang		
	11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kegiatan	1 Kegiatan		600.000.000	0	0,00	0,00		Palembang		
	12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Jenis	68 Jenis		233.752.335	0	0,00	0,00		Palembang		
	13 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	12 Jenis		230.000.000	0	0,00	0,00		Palembang		
	14 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	Kegiatan	8 Kali		200.000.000	31.450.000	15,73	17,50		Palembang		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tahun	1 Tahun		755.000.000	0	0,00	0,00		Palembang		
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		14 Jenis		925.000.000	143.071.712	15,47	15,47		Palembang		
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	4 Rekening		647.000.000	110.071.712	17,01	17,01		Palembang		
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis	10 Jenis		278.000.000	33.000.000	11,87	11,87		Palembang		
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		66 Unit		1.675.000.000	0	0,00	0,00		Palembang		
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	32 Unit		475.000.000	0	0,00	0,00		Palembang		
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4 Unit		850.000.000	0	0,00	0,00		Palembang		
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	30 Unit		100.000.000	0	0,00	0,00		Palembang		
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit		250.000.000	0	0,00	0,00		Palembang		
II	PROGRAM PENGELOLAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL	Jumlah Orang yang Dibina dalam Rangka Penurunan Ilegal Fishing dan Luas Kawasan Konservasi				500.000.000	0	0,00	0,00				
ix	Pengelolaan ruang laut sampai Dengan 12 mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di luar Minyak dan Gas Bumi	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan		400.000.000	0	0,00	0,00				
22	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Dokumen	1 Dokumen		75.000.000	0	0,00	0,00		OKI		
23	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang direhabilitasi	Luas	5 Ha		325.000.000	0	0,00	0,00		OKI dan Banyuasin		
x	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		100.000.000	0	0,00	0,00				
24	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	60 Orang		100.000.000	0	0,00	0,00		OKI dan Banyuasin		
III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton), Nilai Tukar Nelayan/NTN				6.538.120.000	0	0,00	0,00				

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
xi	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		Jumlah bantuan alat tangkap serta data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		1.200.000.000	0	0,00	0,00				
25	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	30 Unit		1.200.000.000	0	0,00	0,00		MUBA, OKI dan Banyuasin		
xii	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		300 Unit		2.150.000.000	0	0,00	0,00				
26	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Data statistik Perikanan Tangkap	Dokumen	1 Dokumen		100.000.000	0	0,00	0,00		Sumatera Selatan		
27	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Unit	152 Unit		2.050.000.000	0	0,00	0,00		17 Kab Kota		
xiii	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil		Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan		150.000.000	0	0,00	0,00				
28	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan		50 Rekomendasi		150.000.000	0	0,00	0,00		Sumatera Selatan		
xiv	Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Kegiatan Penetapan Lokasi pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Jumlah Kegiatan Penetapan Lokasi pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		3.038.120.000	0	0,00	0,00				
29	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		1 Unit		2.600.768.000	0	0,00	0,00	DAK	Banyuasin (Pelabuhan Perikanan Sungsang)		
30	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		1 Layanan		437.352.000	0	0,00	0,00		Banyuasin (Pelabuhan Perikanan Sungsang)		
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				5.543.600.000	0	0,00	0,00				
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Sumatera Selatan		275.000.000	0	0,00	0,00				

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan Ikan	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha bidang perikanan budidaya	Rekomendasi	30 Rekomendasi		175.000.000	0	0,00	0,00		Sumatera Selatan		
32	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen	1 Dokumen		100.000.000	0	0,00	0,00		Sumatera Selatan		
xv	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				375.000.000	0	0,00	0,00				
33	Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Operasional UPTD BPAPL	Unit	1 Unit		300.000.000	0	0,00	0,00		OKI (UPTD BBPAPL)		
34	Pengelolaan Kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pemantauan hama dan penyakit ikan	Unit	1 Unit		75.000.000	0	0,00	0,00		Sumatera Selatan		
xvi	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat				4.893.600.000	0	0,00	0,00				
35	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten / Kota	Pemberian bantuan kepada pokdakan berupa bibit ikan lele 265.000 ekor, bibit ikan patin 255.000 ekor, bibit ikan gabus 255.000 ekor, pakan ikan 51 ton, dan alat produksi budidaya perikanan untuk 17 Kabupaten/Kota	Ekor	bibit ikan lele 265.000 ekor, bibit ikan patin 255.000 ekor, bibit ikan gabus 255.000 ekor, pakan ikan 51 ton, dan alat produksi budidaya		3.080.000.000	0	0,00	0,00		Sumatera Selatan	Kemiskinan	
36	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten / Kota	rehabilitasi kolam BBI rehabilitasi saluran air sarana produksi	Unit	1 Unit		1.813.600.000	0	0,00	0,00	DAK	BBIS Air Satran	Kemisikinan	
V	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Orang yang Dibina dalam Rangka Penurunan Illegal Fishing dan Luas Kawasan Konservasi				1.775.000.000	0	0,00	0,00				
xvii	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil				1.625.000.000	0	0,00	0,00				
37	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan atau Usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah sarana Perlengkapan POKMASWAS sumberdaya kelautan dan perikanan (DANA ALOKASI KHUSUS)	Pelaku usaha	10 Pelaku Usaha		200.000.000	0	0,00	0,00	DAK	Sumatera Selatan		
38	Penumbuhan dan pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas	bantuan sarpras untuk kelompok masyarakat pengawas sebanyak 30 paket di 17 Kabupaten/Kota	Kelompok	30 Kelompok		1.425.000.000	0	0,00	0,00		Sumatera Selatan		
xvii i	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Genangan Air lainnya yang dapat di usahakan lintas Kabuoaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					150.000.000	0	0,00	0,00				
39	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/ atau Usaha pengolahan hasil Perikanan sesuai kewenangan Provinsi	Operasioanl pengawasan perikanan di bidang pengolahan perikanan	Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha		50.000.000	0	0,00	0,00		Sumatera Selatan		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisas i Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/ Atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa,dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Operasioanl pengawasan perikanan di bidang penangkapan ikan	Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha		50.000.000	0	0,00	0,00		Sumatera Selatan		
41	Pengawasan Usaha pembudidayaan Ikan di Wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Operasioanl pengawasan perikanan di bidang pembudidayaan ikan	Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha		50.000.000	0	0,00	0,00		Sumatera Selatan		
VI	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Sampel yang Teruji (sampel), Penerbitan Sertifikasi Produk Hasil Perikanan				1.950.000.000	0	0,00	0,00				
xix	Penerbitan izin Usaha pemasaran dan Pengolahan Hasil perikanan Lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		250.000.000	0	0,00	0,00				
42	Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha untuk menunjang usaha subsektor pengolahan ikan dan subsektor pemasaran ikanskala usaha menengah dan besar	Bantuan kepada kelompok pengolah dan pemasar berupa chest freezer 30 unit untuk 17 Kabupaten/Kota	Unit	30 unit		250.000.000	0	0,00	0,00		Sumatera Selatan		
xx	Pembinaan Mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		1.100.000.000	0	0,00	0,00				
43	Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, Pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	30 Rekomendasi		500.000.000	0	0,00	0,00		Sumatera Selatan		
44	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Bantuan kepada kelompok pengolah dan pemasar berupa alat pengasapan ikan 5 unit, tungku mata seribu 20 unit, meja stainless 20 unit, vacum sealer 20 unit, dan mesin pengadon 20 unit untuk 17 Kabupaten/Kota	Dokumen	Alat pengasapan ikan 5 unit, tungku mata seribu 20 unit, meja stainless 20 unit, vacum sealer 20 unit, dan mesin pengadon 20 unit		600.000.000	0	0,00	0,00		Sumatera Selatan		
iii	Kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/ kota dalam (satu) daerah Provinsi					600.000.000	0	0,00	0,00			Ketahanan Pangan	
45	Pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/ distribusi ikan lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan Gemarikan dan Angka Konsumsi Ikan	Kegiatan	1 Kegiatan		600.000.000	0	0,00	0,00		Sumatera Selatan		
Jumlah						40.907.056.335	3.455.818.700	8,45	8,47				

*Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan dan
Hortikultura*

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					55.126.248.000	11.896.455.283	21,58	18,53	APBD			
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Tahunan	Dokumen	5 dokumen		1.020.000.000	22.875.538	2,24	1,54				
	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 dokumen		470.000.000	15.775.538	3,36	3,33		Palembang		
	2 Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3 Laporan		550.000.000	7.100.000	1,29	0,00		17 Kab/Kota		
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	100%		44.207.408.000	11.615.581.540	26,28	22,13				
	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	290 orang		41.034.468.000	11.399.341.540	27,78	23,24		Palembang		
	4 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	5 dokumen		3.172.940.000	216.240.000	6,82	7,80				
iii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%		175.000.000	0	0,00	0,00				
	5 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1 dokumen		75.000.000	0	0,00	0,00		Palembang, OKUT		
	6 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1 Laporan		100.000.000	0	0,00	0,00		Palembang, OKUT		
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketaatan terhadap Aturan dan Peningkatan Kapasitas Kepegawaian	100%	100%		146.200.000	0	0,00	0,00				
	7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	10 orang		146.200.000	0	0,00	0,00		Dalam dan Luar Provinsi		
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Umum	100%	100%		4.877.640.000	50.431.199	1,03	0,00				
	8 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1 paket		50.000.000	0	0,00	0,00		Palembang		
	9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1 paket		1.702.200.000	0	0,00	0,00		Palembang		
	10 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	2 paket		230.000.000	0	0,00	0,00		Palembang, OKUT		
	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1 paket		50.000.000	0	0,00	0,00		Palembang, OKUT		
	12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	1 dokumen		55.000.000	0	0,00	0,00		Palembang, OKUT		
	13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi	laporan	2 laporan		1.290.440.000	50.431.199	3,91	0,00				
	14 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SIPD	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	1 dokumen		1.500.000.000	0	0,00	0,00		Palembang		
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran	laporan	2 laporan		1.675.000.000	207.567.006	12,39	24,93				
	15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	1 laporan		5.000.000	0	0,00	0,00		Palembang		
	16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	1 laporan		1.670.000.000	207.567.006	12,43	25,00		Palembang, OKUT		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah	unit	253 unit		3.025.000.000	0	0,00	0,00				
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	253 unit		900.000.000	0	0,00	0,00		Palembang, OKUT		
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	135 unit		160.000.000	0	0,00	0,00		Palembang, OKUT		
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1unit	1 unit		1.965.000.000	0	0,00	0,00		Palembang, OKUT		
II	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian					35.139.500.000	214.331.950	0,61	11,83	APBD		Inflasi	
viii	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					27.394.400.400	87.371.950	0,32	14,08				
20	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	laporan	8 laporan		27.194.400.400	87.371.950	0,32	14,08				
21	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah Pengawasan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	laporan	1 laporan		200.000.000	0	0,00	0,00				
ix	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih TPH yang difasilitasi	dokumen	1 dokumen		7.745.099.600	126.960.000	1,64	3,88				
22	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit hortikultura	0 Sertifikat	0 Sertifikat		4.500.000.000	0	0,00	0,00		Palembang		
23	Pengawasan Mutu, Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit hortikultura	laporan	5 laporan		3.245.099.600	126.960.000	3,91	9,25				
III	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian					3.790.358.000	0	0,00	0,00	APBD			
x	Penataan Prasarana Pertanian					3.790.358.000	0	0,00	0,00				
24	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani					1.371.800.000	0	0,00	0,00		Palembang		
25	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya					2.418.558.000	0	0,00	0,00	DAK			
IV	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian					830.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
xi	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi :				830.000.000	0	0,00	0,00				
26	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan				630.000.000	0	0,00	0,00		17 Kab/Kota		
27	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian TPH yang difasilitasi	ha	500 ha		200.000.000	0	0,00	0,00		17 Kab/Kota		
V	Program Penyuluhan Pertanian					36.016.229.825	4.392.295.000	12,20	14,26	APBD		Kemiskinan	
xii	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya	Dokumen	1 Dokumen		850.000.000	0	0,00	0,00				
28	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah ketenagaan penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya				850.000.000	0	0,00	0,00				
xiii	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					34.331.229.825	4.383.980.000	12,77	14,96				
29	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian	Dokumen	1 Dokumen		250.000.000	12.480.000	4,99	10,00		OKUT		
30	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah kelompok tani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	Kelompok	1400 Kelompok		34.081.229.825	4.371.500.000	12,83	15,00		17 Kab/Kota		
xiv	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani	Unit	1 Unit		835.000.000	8.315.000	1,00	0,00				

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	Pendampingan dan Pengawalan Korporasi Petani					735.000.000	8.315.000	1,13	0,00		Palembang		
32	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani					100.000.000	0	0,00	0,00		Palembang		
Jumlah						130.902.335.825	16.503.082.233	12,61	14,91				

Dinas Perkebunan

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pend orong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	-	15.917.644.882	730.995.829	4,59	5,68	APBD			
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Dokumen	5	-	325.000.000	0	0,00	3,00	APBD			
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	-	300.000.000	0	0,00	3,00	APBD	Disbun		
2.	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	-	25.000.000	0	0,00	3,00	APBD	Disbun		
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	-	10.874.380.000	670.177.829	6,16	7,18	APBD			
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	792	-	10.544.380.000	670.177.829	6,36	7,14	APBD	Disbun		
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	5	-	330.000.000	0	0,00	8,30	APBD	Disbun		
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Perlengkapan Kebutuhan Kantor	Tahun	1	-	285.000.000	0	0,00	3,00	APBD			
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	-	135.000.000	0	0,00	3,00	APBD	Disbun		
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	-	150.000.000	0	0,00	3,00	APBD	Disbun		
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor	Paket	1	-	1.113.264.882	0	0,00	3,00	APBD			
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Paket	1	-	35.000.000	0	0,00	3,00	APBD	Disbun		
8	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	-	300.000.000	0	0,00	3,00	APBD	Disbun		
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	-	50.000.000	0	0,00	3,00	APBD	Disbun		
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	3	-	50.000.000	0	0,00	3,00	APBD	Disbun		
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	150	-	678.264.882	0	0,00	3,00	APBD	Disbun		
v	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan yang Tersedia	Paket	1	-	545.000.000	0	0,00	3,00	APBD			
12	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	250.000.000	0	0,00	3,00	APBD	Disbun		
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	31	-	195.000.000	0	0,00	3,00	APBD	Disbun		
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	35	-	100.000.000	0	0,00	3,00	APBD	Disbun		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pend orong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Penunjang ADM Perkantoran	Tahun	1	-	1.735.000.000	60.818.000	3,51	2,87	APBD			
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	-	20.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Disbun		
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang tersedia	Laporan	12	-	600.000.000	0	0,00	8,30	APBD	Disbun		
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Laporan	24	-	1.115.000.000	60.818.000	5,45	0,00	APBD	Disbun		
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	Tahun	1	-	1.040.000.000	0	0,00	0,55	APBD			
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas opsersional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	90	-	800.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Disbun		
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	-	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Disbun		
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	-	190.000.000	0	0,00	3,00	APBD	Disbun		
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkat Luas Tanaman Menghasilkan	Tahun	1	-	3.523.642.461	0	0,00	2,67	APBD			
viii	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan sarana pertanian	Kab/Kota	17	-	1.278.642.461	0	0,00	3,00	APBD			
21	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	Laporan	4	-	1.278.642.461	0	0,00	3,00	APBD	Kab. Musi Rawas, OKUS, Lahat. OKU.		
ix	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanam	Terlaksananya Penerbitan Serifikat	Tahun	1	-	2.111.000.000	0	0,00	2,64	APBD			
22	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	4.100	-	250.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kab/kota		
23	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah Benih Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 Tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan	1	-	46.000.000	0	0,00	3,00	APBD	Kab/kota		
24	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah Benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang	batang	125000	-	1.815.000.000	0	0,00	3,00	APBD	Kab. Empat Lawang		
x	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Meningkatnya Menejemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Tahun	1	-	134.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
25	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan Mikroorganisme	Laporan	1	-	134.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kab/kota		
III	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan	Kab/Kota	17	-	250.000.000	0	0,00	3,00	APBD			
xi	Penataan Prasarana Pertanian				-	250.000.000		0,00	3,00	APBD			
26	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	4	-	50.000.000	0	0,00	3,00	APBD	Kab/kota		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pend orong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian Serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	1	-	200.000.000	0	0,00	3,00	APBD	Disbun		
IV	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Peningkat Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Tahun	1	-	500.000.000	0	0,00	3,00	APBD			
xii	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Meningkatnya Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Kab/Kota	17	-	500.000.000	0	0,00	3,00	APBD			
28	Pengendalian Oranisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	550	-	300.000.000	0	0,00	3,00	APBD	Kab/kota		
29	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ha	200	-	200.000.000	0	0,00	3,00	APBD	Kab/kota		
V	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	40	-	75.000.000	0	0,00	3,00	APBD			
xiii	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Izin Usaha Pertanian	Kab/Kota	17	-	75.000.000	0	0,00	3,00	APBD			
30	Pembinaan dan Pengawasan penerapan standar dan izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian Yang Dibina dan diawasi	Laporan	18	-	75.000.000	0	0,00	3,00	APBD	Kab/kota		
VI	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Kab/Kota	17	-	15.320.000.000	0	0,00	3,00	APBD			
xiv	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Persentase Pelaksanaan	tahun	1	-	15.220.000.000	0	0,00	3,00	APBD	Disbun		
31	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	93	-	15.220.000.000	0	0,00	3,00	APBD	17 kab/kota		
xv	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis kawasan	Meningkatnya Pembentukan kelembagaan Korporasi Petani	Kab/Kota	17	-	100.000.000	0	0,00	3,00	APBD			
32	Pembentukan dan Penguatan kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	1	-	100.000.000	0	0,00	3,00	APBD	Kab/kota		
Jumlah						35.586.287.343	670.177.829	1,88	4,17				

Dinas Kehutanan

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN FEBRUARI TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Kehutanan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAEARAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase (%)	100	20,09	55.069.890.978	11.060.808.402	20,09	25,14				
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase (%)	100	20,09	275.000.000	0	0,00	30,00				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1	100.000.000	0	0,00	30,00	APBD			
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	14	2	175.000.000	0	0,00	30,00	APBD			
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase (%)	100	20,09	47.603.336.700	10.608.912.402	22,29	24,85				
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	339	339	47.163.336.700	10.571.892.402	22,42	24,90	APBD	Palembang		
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	0	340.000.000	37.020.000	10,89	20,00	APBD	Palembang		
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	8	0	100.000.000	0	0,00	20,00	APBD			
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase (%)	100	20,09	50.000.000	0	0,00	70,00				
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	50.000.000	0	0,00	70,00	APBD			
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase (%)	100	20,09	120.000.000	0	0,00	22,04				
7	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawa	Dokumen	12	0	50.000.000	0	0,00	24,90	APBD			
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	0	70.000.000	0	0,00	20,00	APBD			
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase (%)	100	20,09	1.567.000.000	0	0,00	32,95				
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	60.000.000	0	0,00	20,00	APBD			
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JUmlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	50.000.000	0	0,00	50,00	APBD			
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	60.000.000	0	0,00	25,00	APBD			
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	0	150.000.000	0	0,00	20,00	APBD			
13	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	75.000.000	0	0,00	20,00	APBD			

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	0	12.000.000	0	0,00	20,00	APBD			
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	0	100.000.000	0	0,00	24,90	APBD			
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	0	900.000.000	0	0,00	40,00	APBD			
17	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	160.000.000	0	0,00	20,00	APBD			
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase (%)	100	20,09	35.000.000	0	0,00	20,00				
18	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	35.000.000	0	0,00	20,00	APBD			
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase (%)	100	20,09	4.439.554.278	451.896.000	10,18	24,90				
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	20.000.000	0	0,00	24,90	APBD			
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	584.634.278	0	0,00	24,90	APBD			
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2	3.834.920.000	451.896.000	11,78	24,90	APBD	Palembang		
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase (%)	100	20,09	980.000.000	0	0,00	24,23				
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	22	0	680.000.000	0	0,00	25,00	APBD			
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	0	150.000.000	0	0,00	25,00	APBD			
24	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	150.000.000	0	0,00	20,00	APBD			
II	BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFATAN HUTAN	Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya	Rupiah (Rp)	77.484.874.860	15.508.157.509	6.355.000.000	0	0,00	0,00				
II	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan; Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya; Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	Rupiah (Rp); lokasi; Persentase (%); Hektar (Ha); Persentase (%)	77.484.874.860; 61; 12,91; 10 ; 0,14	15.508.157.509;12; 0,97;358,79;0,0211	8.260.000.000	0	0,00	0,00				
ix	Pengelolaan Rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Kewenangan	Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya	Rp.77.484.874.860	77.484.874.860	15.508.157.509	6.075.000.000	0	0,00	0,00				
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen	2	0	6.075.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
x	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya	Rp.77.484.874.860	77.484.874.860	15.508.157.509	280.000.000	0	0,00	0,00				
26	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	2	0	130.000.000	0	0,00	0,00	APBD			

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	2	0	150.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
III	BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang Dilakukan Penanaman	Ha	10	358,79	625.000.000	0	0,00	0,00				
II	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan; Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya; Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	Rupiah (Rp); lokasi; Persentase (%); Hektar (Ha); Persentase (%)	77.484.874.860; 61; 12,91; 10 ; 0,14	15.508.157.509;12; 0,97;358,79;0,0211	8.260.000.000	0	0,00	0,00				
xi	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman; Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha, Persentase (%)	10 ; 0,14	358,79;0,0211	575.000.000	0	0,00	0,00				
28	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	20	0	500.000.000	0	0,00	0,00	APBD			Kegiatan akan dilakukan pada Triwulan II dan III
29	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	8	0	75.000.000	0	0,00	0,00	APBD			Kegiatan akan dilakukan pada Triwulan II dan III
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	Persentase (%)	0,14	0,0211	50.000.000	0	0,00	0,00				
xii	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman; Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha, Persentase (%)	10 ; 0,14	358,79;0,0211	50.000.000	0	0,00	0,00				
30	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen	1	0	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD			Kegiatan akan dilakukan pada Triwulan II dan III
IV	BIDANG PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDAE	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu; Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutlah	Lokasi; Persentase (%)	61;12,19	12;0,97	1.430.000.000	0	0,00	0,00				
II	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan; Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya; Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	Rupiah (Rp); lokasi; Persentase (%); Hektar (Ha); Persentase (%)	77.484.874.860; 61; 12,91; 10 ; 0,14	15.508.157.509;12; 0,97;358,79;0,0211	8.260.000.000	0	0,00	0,00				
xiii	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu; Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutlia	Lokasi; Persentase (%)	61;12,19	12;0,97	1.330.000.000	0	0,00	0,00				
31	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	200	0	200.000.000	0	0,00	0,00	APBD			Kegiatan akan dilakukan pada Triwulan II dan III
32	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	15	0	1.130.000.000	0	0,00	0,00	APBD			Kegiatan akan dilakukan pada Triwulan II dan III

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
IV	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	Lokasi	61	12	100.000.000	0	0,00	0,00				
xiv	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	Lokasi	61	12	100.000.000	0	0,00	0,00				
33	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	40	0	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD		Kemiskinan	Kegiatan akan dilakukan pada Triwulan II dan III
V	BIDANG PENYULUHAN DAN PERMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan	Kelompok	175	69	821.000.400	0	0,00	0,00				
V	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	Kelompok	175	69	821.000.400	0	0,00	0,00				
xv	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan	Kelompok	175	69	821.000.400	0	0,00	0,37				
34	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	20	0	70.000.000	0	0,00	4,32	APBD			Kegiatan akan dilakukan pada Triwulan II dan III
35	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	70	0	571.000.400	0	0,00	0,00	APBD		Kemiskinan	Kegiatan akan dilakukan pada Triwulan II dan III
36	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	5000	0	180.000.000	0	0,00	0,00	APBD		Kemiskinan	Kegiatan akan dilakukan pada Triwulan II dan III
Jumlah						64.300.891.378	11.060.808.402	17,20	21,53				

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN 1 TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	22,11	24.987.789.975	4.136.344.191	16,55	21,86	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan/Luar Provinsi Sumatera Selatan		
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	10,00	200.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan/Luar Provinsi Sumatera Selatan		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	100	10,00	50.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan/Luar Provinsi Sumatera Selatan	-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	100	10,00	150.000.000	0	10,00	10,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan/Luar Provinsi Sumatera Selatan	-	-
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	22,33	18.295.209.000	3.986.344.191	21,79	24,90	APBD	Palembang		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	100	25,00	16.802.249.000	3.836.962.191	22,84	25,00	APBD	Palembang	-	-
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksaan Tugas ASN	Dokumen	100	25,00	1.270.000.000	149.382.000	11,76	25,00	APBD	Palembang	-	-
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	100	17,00	222.960.000	0	0,00	17,00	APBD	Palembang	-	-
6	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	%	100	15,00	845.000.000	0	0,00	15,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan		
7	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	100	15,00	845.000.000	0	0,00	15,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	20,00	100.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Palembang		
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100	20,00	100.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Palembang	-	-
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	2,00	2.320.464.975	0	0,00	4,22	APBD	Palembang		
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	100	0,00	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	-	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100	0,00	570.464.975	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	-	-
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100	0,00	500.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	-	-
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	100	0,00	200.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	-	-
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	100	0,00	20.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	-	-
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	10,00	980.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Dalam Daerah, Luar Daerah	-	-
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100,00	150.000.000	150.000.000	100,00	100,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan		
15	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	100	100,00	150.000.000	150.000.000	100,00	100,00	APBD	Cabang Dinas Reg II dan 5 (Musi Banyuasin dan Lahat)	-	-
vii	Penyediaan Jasa Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	24,67	1.785.600.000	0	0,00	26,94	APBD	Palembang		
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	100	20,00	15.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Palembang	-	-
17	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	100	27,00	650.000.000	0	0,00	27,00	APBD	Palembang	-	-
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	100	27,00	1.120.600.000	0	0,00	27,00	APBD	Palembang	-	-
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	0,00	1.091.516.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	100	0,00	750.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	-	-
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	0,00	191.516.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	-	-
21	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	0,00	150.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang	-	-
ix	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	5,00	200.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Palembang		
22	Peningkatan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Laporan	100	5,00	200.000.000	0	0,00	5,00	APBD	Palembang	-	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN KEGEOLOGIAN	Terkelola aspek-aspek kegeologian dalam daerah provinsi	%	100	0,00	200.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumatera Selatan		
ix	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terkumpulnya dan terolahnya data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	%	100	0,00	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Provinsi Sumatera Selatan		
23	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah dokumen terkait data zona konservai air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Dokumen	100	0,00	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
x	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan terawasinya implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi	%	100	0,00	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
24	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi nilai perolehan iar tanah dalam daerah provinsi	Laporan		0,00	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
III	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase terlaksananya Pengelolaan Mineral dan Batubara di Wilayah Provinsi	%	100	0,00	2.025.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan		
xi	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	%	100	0,00	175.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan		
25	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	100	0,00	175.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
xii	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	%	100	0,00	132.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan		
26	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	100	0,00	132.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
xiii	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	100	0,00	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan		
27	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	100	0,00	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
28	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan usahanya dalam 1 Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	100	0,00	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
xiv	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Persentase terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	%	100	0,00	288.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan		
29	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen harga patokan mineral bukan logam yang terkumpul dan terolah	Dokumen	100	0,00	130.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
30	Pententuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen harga patokan mineral bukan logam yang telah ditentukan dan ditetapkan	Dokumen	100	0,00	58.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
31	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Laporan	100	0,00	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
xv	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	%	100	0,00	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan		
32	Pengawasan Teknis Kaidah pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	100	0,00	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
xvi	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	%	100	0,00	170.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan		
33	Pengawasan Teknis Kaidah pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	100	0,00	170.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
xvii	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Persentase terlaksananya Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	%	100	0,00	140.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan		
34	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Dokumen	100	0,00	110.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
35	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Laporan	100	0,00	30.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
xviii	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	%	100	0,00	870.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan		
36	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Laporan	100	0,00	270.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
37	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Dokumen Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan	Laporan	100	0,00	600.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
xix	Penatausahaan Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam Lingkup 1 (satu) Provinsi	Persentase terlaksananya Penatausahaan Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	%	100	0,00	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan		
38	Pemberian Rekomendasi Teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam Lingkup 1 (satu) Provinsi	Jumlah Dokumen rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Dokumen	100	0,00	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Energi Terbarukan	%	100	0,00	485.879.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
xx	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	%	100	0,00	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan		
39	Pengendalian dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan Sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar lainnya dengan Kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun	Laporan	100	0,00	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
xxi	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah Provinsi	Persentase PelaksanaanPengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam Wilayah Provinsi	%	100	0,00	95.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan		
40	Penyusunan dan Pemutakhiran data Potensi Biomassa	Jumlah Dokumen Data Potensi Biomassa	Dokumen		0,00	95.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
xxii	Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai Bahan Bakar dalam wilayah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengolalaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai Bahan Bakar dalam Wilayah Provinsi	%	100	0,00	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan		
41	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi Bahan Bakar Biomassa dan Biogas)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Biomassa dan Biogas (Kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi Bahan Bakar Biomassa dan Biogas)	Laporan	100	0,00	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
xxiii	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut dalam Wilayah Provinsi	%	100	0,00	145.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan		
42	Pembinaan dan Pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) dalam daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan	100	0,00	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
43	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah Dokumen Data Potensi Aneka EBT di daerah	Dokumen	100	0,00	95.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
xxiv	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Persentase Pelaksanaan pengelolaan Konservasi Energi terhadap Kegiatan yang izin Usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi	%	100	0,00	75.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi pada Kegiatan yang Izin Usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi	Laporan	100	0,00	75.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
xxv	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan pemangku kepentingan ditingkat daerah provinsi	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan di tingkat Daerah Provinsi	%	100	0,00	70.879.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan		
45	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Energi kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	100	0,00	70.879.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
V	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah Dokumen dan Laporan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	%	100	11,94	1.560.000.000	0	0,00	8,34	APBD	Provinsi Sumatera Selatan		
xxvi	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	%	100	15,00	465.500.000	0	0,00	15,00	APBD	Provinsi Sumatera Selatan		
46	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	100	15,00	465.500.000	0	0,00	15,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
xxvii	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Dokumen dan Laporan Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal Dalam Negeri	%	100	12,50	237.500.000	0	0,00	11,84	APBD	Provinsi Sumatera Selatan		
47	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Dokumen	100	15,00	87.500.000	0	0,00	15,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
48	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Laporan	100	10,00	150.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
xxviii	Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen dan Laporan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	%	100	8,33	857.000.000	0	0,00	3,75	APBD	Provinsi Sumatera Selatan		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen terkait Penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	Laporan	100	15,00	128.500.000	0	0,00	15,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
50	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Kegiatan	100	0,00	600.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	Penurunan angka kemiskinan	-
51	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan	Laporan	100	10,00	128.500.000	0	0,00	10,00	APBD	Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan	-	-
Jumlah						29.258.668.975	4.136.344.191	14,14	19,11				

Dinas Perdagangan

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN MARET TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%		12.935.410.660	2.420.132.194	18,71	22,88	APBD			Didukung oleh anggaran dan SDM yang sesuai kompetensi
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang	%	100%		185.000.000	2.850.000	1,54	25,19	APBD			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen		100.000.000	0	0,00	25,00	APBD	Palembang		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan		10.000.000	2.850.000	28,50	28,50	APBD	Palembang		
3	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan		75.000.000	0	0,00	25,00	APBD	Sumatera Selatan		
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlayani	%	100%		9.530.623.000	2.227.104.089	23,37	25,00	APBD			
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	644 OB untuk 46 orang	644 OB untuk 46 orang	8.182.083.000	2.006.412.089	24,52	25,00	APBD	Palembang		
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.109.740.000	220.692.000	19,89	25,00	APBD	Palembang		
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verivikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12 Dokumen		238.800.000	0	0,00	25,00	APBD	Palembang		
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terlayani	%	100%		13.080.000	0	0,00	25,00	APBD			
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12 Laporan		13.080.000	0	0,00	25,00	APBD	Palembang		
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Meningkat	%	100%		200.000.000	0	0,00	25,00	APBD			
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10 Orang		200.000.000	0	0,00	25,00	APBD	Palembang		
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perkantoran yang terlayani	%	100%	100%	940.000.000	100.254.072	10,67	25,00	APBD			
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4 Paket	4 Paket	25.000.000	6.250.000	25,00	25,00	APBD	Palembang		
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	4 Paket	100.000.000	24.748.000	24,75	25,00	APBD	Palembang		
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4 Paket	4 Paket	50.000.000	12.500.000	25,00	25,00	APBD	Palembang		
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	2.730.000	18,20	25,00	APBD	Palembang		
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPd	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	750.000.000	54.026.072	7,20	25,00	APBD	Sumatera Selatan, Luar Provinsi		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlayani	%	100%		900.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
14	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Kantor yang Disediakan	Paket	1 paket		400.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Kantor yang Disediakan	Unit	50 Unit		500.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlayani	%	100%	100%	536.707.660	82.272.033	15,33	25,00	APBD			
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000	2.950.000	24,58	25,00	APBD	Palembang		
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	424.707.660	72.172.033	16,99	25,00	APBD	Palembang		
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	7.150.000	7,15	25,00	APBD	Palembang		
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	%	100%		630.000.000	7.652.000	1,21	17,06	APBD			
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	144 Unit/Tahun (R4=13 unit, R2= 7 unit)	144 Unit/Tahun (R4=13 unit, R2= 7 unit)	350.000.000	3.152.000	0,90	25,00	APBD	Palembang		
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50 Unit	50 Unit	80.000.000	4.500.000	5,63	25,00	APBD	Palembang		
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Gedung	1 Gedung		200.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
II	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tertib Usaha	%	100,00		100.000.000	0	0,00	0,00	APBD		5. Investasi	Didukung oleh anggaran dan SDM yang sesuai kompetensi
ix	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi	%	100,00		50.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
22	Pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Laporan	1 Laporan		50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
x	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase Penerbitan SKA yang tepat waktu penerbitannya	%	100,00		50.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	6000 Dokumen		50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah sarana dan prasarana Perdagangan	Unit	1200 Unit	1200 Unit	1.900.000.000	179.900.000	9,47	100,00	APBD		1. Kemiskinan	1) Didukung oleh anggaran dan SDM yang sesuai kompetensi 2) Kerjasama dengan Dinas di Kabupaten/Kota untuk pendistribusian

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
xi	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah sarana dan prasarana Perdagangan	Unit	1200 Unit	1200 Unit	1.900.000.000	179.900.000	9,47	19,74	APBD			
24	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit	1200 Unit	1200 Unit	1.500.000.000	179.900.000	11,99	25,00	APBD	Sumatera Selatan		
25	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	1 Laporan		200.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
26	Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang berpartisipasi	Orang	50 Orang		200.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
IV	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	≤5%	≤5%	850.000.000	14.307.140	1,68	20,59	APBD		3. Inflasi	1. Didukung kerjasama Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam mengatasi gejala harga 2. Adanya sistem SP2KP dari Kementerian Perdagangan
xii	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	≤5%		50.000.000	0	0,00	25,00	APBD			
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	1 laporan		50.000.000	0	0,00	25,00	APBD	Sumatera Selatan		
xiii	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	≤5%		650.000.000	11.100.000	1,71	19,23	APBD			
28	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota	Laporan	12 laporan		150.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
29	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	6 Laporan	6 Laporan	500.000.000	11.100.000	2,22	25,00	APBD	Palembang		
xiv	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida terhadap pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di Provinsi	%	100%	100%	150.000.000	3.207.140	2,14	25,00	APBD			
30	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi minimal 90%	Laporan	1 laporan	1 laporan	150.000.000	3.207.140	2,14	25,00	APBD	Sumatera Selatan		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
V	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	2,5 - 5%		900.000.000	0	0,00	0,00	APBD		5. Investasi	1. Barang yang diekspor masih merupakan barang mentah atau setengah jadi, sehingga nilai tambah tidak diperoleh secara optimal 2. Infrastruktur pelabuhan yang memadai.
xv	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah penyelenggaraan promosi dagang bagi produk ekspor unggulan	Kali	3 kali		900.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
31	Pameran Dagang Internasional / Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	5 pelaku usaha		400.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Luar Provinsi, Luar Negeri		
32	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha		300.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
33	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang disusun menjadi Materi Promosi	Produk	10 Produk		200.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
VI	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1). Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen 2). Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku 3). Persentase barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan	%	1). 90% 2). 100% 3). 70%	1). 90% 2). 100% 3). 70%	2.000.000.000	6.000.000	0,30	5,63	APBD		4. P3DN	1. Didukung oleh BPSK Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau 2. Didukung oleh anggaran dan SDM yang sesuai kompetensi
xvi	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	90,00		1.200.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
34	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	2 BPSK		1.200.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
xvii	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	100,00	100,00	500.000.000	6.000.000	1,20	22,50	APBD			
35	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat	200.000.000	3.000.000	1,50	25,00	APBD	Sumatera Selatan		
36	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000	3.000.000	1,20	25,00	APBD	Sumatera Selatan		
37	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah Produk Potensial yang Dipantau	Produk	3 produk	3 produk	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
xviii	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan	%	70,00		300.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
38	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang diawasi	Laporan	12 Laporan		300.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
VI	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	%	100,00		370.000.000	0	0,00	0,00	APBD		4. P3DN	Didukung oleh anggaran dan SDM yang sesuai kompetensi
xix	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah UKM yang difasilitasi untuk pemasaran produk	UMKM	10 UMKM		245.000.000	0	0,00	0,00	APBD			

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Pemasaran Produk Dalam Negeri terutama Produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	UMKM	10 UMKM		245.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Luar Provinsi		
xx	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UKM yang difasilitasi untuk pemasaran produk	UMKM	100 UMKM		75.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
40	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	100 UMKM		75.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
xxi	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	1 Laporan		50.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
41	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	1 Laporan		50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
Jumlah						19.055.410.660	2.620.339.334	13,75	27,01				

Dinas Perindustrian

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi dengan baik.	%	100		12.430.862.900	1.676.856.056	13,49	13,49	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik.	%	100		200.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
	1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1		15.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1		20.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
	3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1		15.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
	4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1		20.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	1		100.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
	6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	1		30.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	100		7.204.889.000	1.511.801.056	20,98	20,98	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
	7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang / bulan	38	38 orang / bulan	6.817.889.000	1.511.801.056	22,17	22,17	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
	8 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1		250.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
	9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1		50.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
	10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	1		20.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
	11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	2		25.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	1		10.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	dokumen	1		12.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1		20.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	tersedianya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan baik	%	100		70.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen	1		50.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1		20.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan baik	%	100		190.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	7		190.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya administrasi umum perangkat daerah dengan baik	%	100		1.529.307.945	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1		30.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1		409.307.945	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1		60.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1		80.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1		40.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1		10.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1		900.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	%	100		2.186.665.955	165.055.000	7,55	7,55	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1		10.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1		767.492.845	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	1		1.409.173.110	165.055.000	11,71	11,71	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	%	100		1.050.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	9		450.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1		100.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1		500.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
II	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Terlaksananya Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan baik	%	100		3.862.472.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
viii	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	%	100		3.862.472.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
31	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	dokumen	1		100.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
32	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	dokumen	1		200.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
33	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen	1		1.417.472.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
34	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen	1		900.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	1		1.160.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
36	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	dokumen	1		85.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
III	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Terlaksananya Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan baik	Industri	230		350.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
ix	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Industri	230		350.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, dan indstrie besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertensu yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat.	dokumen	1		175.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
38	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten / kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kwewnangan pemerintah pusat	dokumen	1		175.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	terlaksananya Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Industri	230		500.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	tersediannya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Industri	230		500.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
39	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dokumen	1		250.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
40	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	dokumen	1		250.000.000	-	0,00	0,00	APBD	Kantor Dinas Perindustrian Sumsel	-	-
Jumlah						17.143.334.900	1.676.856.056	9,78	9,78				

Sekretariat Daerah

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Biro Organisasi Setda

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	-	2.725.000.000	129.534.355	4,75	21,70	APBD	Perangkat Provinsi Sumatera Selatan	Daerah Sumatera	
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	-	35.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Perangkat Provinsi Sumatera Selatan	Daerah Sumatera	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dok	-	35.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan		
ii	Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	-	170.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Perangkat Provinsi Sumatera Selatan	Daerah Sumatera	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	%	100%	-	170.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan		
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100%	-	300.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Perangkat Provinsi Sumatera Selatan	Daerah Sumatera	
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1 Dok.	-	150.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan		
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1 Dok.	-	50.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan		
5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1 Dok.	-	50.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan		
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6 Orang	-	40.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan		
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	5 Orang	-	10.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan		
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	-	633.000.000	37.200.355	5,88	23,58	APBD	Perangkat Provinsi Sumatera Selatan	Daerah Sumatera	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1 Paket	-	130.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan		
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	-	453.000.000	37.200.355	8,21	25,00	APBD	Provinsi/Kab-Kota/Perangkat Daerah/Luar Daerah		
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Dokumen	1 Dok.	-	50.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Provinsi/Kab-Kota/Perangkat Daerah/Luar Daerah		
v	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	-	950.394.000	0	0,00	20,00	APBD	Perangkat Provinsi Sumatera Selatan	Daerah Sumatera	
11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	3 Unit	-	870.394.000	0	0,00	20,00	APBD	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan		
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	10 Unit	-	80.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	-	471.606.000	92.334.000	19,58	25,00	APBD	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan		
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1 laporan	-	471.606.000	92.334.000	19,58	25,00	APBD	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan		
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	-	165.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan		
14	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	4 Unit	-	120.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan		
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1 Unit	-	45.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan		
II	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kinerja Organisasi	%	100%	-	1.475.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Provinsi/Kab-Kota/Perangkat Daerah/Luar Daerah		
viii	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Peningkatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	%	100%	-	520.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Provinsi/Kab-Kota/Perangkat Daerah/Luar Daerah		
16	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	Dokumen	1 dok	-	135.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan		
17	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab./Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab./Kota	Dokumen	1 dok	-	135.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Provinsi/Kab-Kota/Perangkat Daerah/Luar Daerah		
18	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	2 dok	-	250.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan		
ix	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Peningkatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	%	100%	-	955.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Provinsi/Kab-Kota/Perangkat Daerah/Luar Daerah		
19	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1 dok	-	225.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Provinsi/Kab-Kota/Perangkat Daerah/Luar Daerah		
20	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	2 dok	-	270.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan		
21	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan	1 Laporan	-	140.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan		
22	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Dokumen	1 dok	-	170.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan		
23	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	1 dok	-	150.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Provinsi/Kab-Kota/Perangkat Daerah/Luar Daerah		
Jumlah						4.200.000.000	129.534.355	3,08	21,10				

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%	-	279.331.371.532	33.019.131.124	11,82	17,50	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
i	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%	1 dokumen	385.800.000	120.403.450	31,21	39,04	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	93.800.000	31.978.250	34,09	35,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Buku	25 Buku	25 Buku	38.500.000	15.497.300	40,25	45,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Buku	25 Buku	25 Buku	38.500.000	0	0,00	15,00	APBD	Palembang	-	Menunggu APBD Perubahan
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Buku	25 Buku	25 Buku	38.500.000	38.466.400	99,91	100,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Buku	25 Buku	-	38.500.000	0	0,00	15,00	APBD	Palembang	-	Menunggu APBD Perubahan
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LAPORAN Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2 Dokumen	-	66.000.000	34.461.500	52,21	60,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan		72.000.000	0	0,00	15,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100%	572 orang	68.859.918.000	14.854.919.974	21,57	34,66	APBD	Palembang	-	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	470 orang	470 orang	67.674.918.000	14.720.559.974	21,75	35,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	orang	62 orang	62 orang	1.100.000.000	134.360.000	12,21	15,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1 Dokumen	-	25.000.000	0	0,00	15,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	-	30.000.000	0	0,00	15,00	APBD	Palembang	-	Menunggu penyusunan laporan keuangan di akhir tahun anggaran
12	Koordinasi dan Penyusunan Keangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	2 Laporan	-	30.000.000	0	0,00	15,00	APBD	Palembang	-	Menunggu penyusunan laporan keuangan di triwulan/semester
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase	100%		2.080.000.000	18.630.200	0,90	15,00	APBD	Palembang	-	
13	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	R4 = 85 UNIT, Gedung = 21 Unit	R4 = 85 UNIT, Gedung = 21 Unit	-	1.650.000.000	0	0,00	15,00	APBD	Palembang	-	Lamanya proses di asuransi untuk perbaikan kendaraan ke bengkel
14	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1 Laporan	-	130.000.000	10.015.200	7,70	15,00	APBD	Palembang	-	Menunggu rekonsiliasi dan penyusunan BMD di akhir semester
15	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1 Laporan	-	300.000.000	8.615.000	2,87	15,00	APBD	Palembang	-	Menunggu rekonsiliasi dan penyusunan BMD di akhir semester
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100%		2.921.435.580	17.000.000	0,58	1,03	APBD	Palembang	-	
16	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	Kali	30 Kali	-	200.000.000	0	0,00	15,00	APBD	Palembang	-	Terkendala pada aplikasi/system pengadaan
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5 Orang	-	185.900.000	17.000.000	9,14	15,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
18	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Paket	1 Paket	-	2.535.535.580	0	0,00	15,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100%		36.571.000.000	3.890.822.749	10,64	18,14	APBD	Palembang	-	
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	aset bangunan dan	18 aset bangunan dan gedung kantor	-	800.000.000	49.530.000	6,19	15,00	APBD	Palembang	-	Terkendala pada aplikasi/system pengadaan
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Jenis	150 Jenis	-	3.871.000.000	139.561.520	3,61	15,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	80 Jenis	-	500.000.000	99.232.731	19,85	25,00	APBD	Palembang	-	
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Unit	400 Unit	-	22.000.000.000	2.614.333.295	11,88	20,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	luar dan dalam	1500 kali (luar dan dalam daerah)	-	9.000.000.000	978.352.303	10,87	15,00	APBD	Palembang	-	Pelaksanaan pengendalian hama rayap dan fumigasi menggunakan bahan yang sangat beracun dan dapat membahayakan baik kepada manusia maupun hewan peliharaan maka sangat diperlukan safety first.
24	Penatasusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis pada SKPD	persentase	100%	-	400.000.000	9.812.900	2,45	15,00	APBD	Palembang	-	Terkendala pada aplikasi/system pengadaan
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit, jenis	32 unit, 20 jenis		22.328.279.700	1.521.075.750	6,81	15,57	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
25	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	R4 = 22 unit, R2 =12 unit	-	7.798.279.700	0	0,00	15,00	APBD	Palembang	-	1. Terkendala apabila unit yang diinginkan tidak tersedia pada e-Purchasing 2. Proses tender membutuhkan waktu cukup lama
26	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel	Jenis	20 Jenis	-	2.530.000.000	396.075.750	15,66	20,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase	100%	-	12.000.000.000	1.125.000.000	9,38	15,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
vii	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Program Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100%	-	53.928.646.000	5.970.907.778	11,07	13,64	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
28	Penyediaan Jasa dan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa dan Surat Menyurat	surat	4.150 surat	-	220.000.000	30.000.000	13,64	15,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	aset bangunan dan gedung kantor	18 aset dan bangunan gedung kantor	18 aset dan bangunan gedung kantor	13.000.000.000	1.461.832.278	11,24	15,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
30	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	acara	1000 acara	-	26.000.000.000	3.304.976.500	12,71	15,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
31	Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bangunan	7 bangunan	-	14.708.646.000	1.174.099.000	7,98	10,00	APBD	Palembang	-	
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentae	100%	-	63.830.394.252	3.748.682.114	5,87	33,93	APBD	Palembang	-	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	2 unit	-	1.000.000.000	92.687.500	9,27	15,00	APBD	Palembang	-	Faktor Penghambat :1.Pemakai telat menyerahkan STNK untuk dibayar 2.Banyaknya kendaraan yang rusak 3.Lamanya perbaikan kendaraan di bengkel
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	210 unit	-	12.983.074.300	1.373.435.854	10,58	15,00	APBD	Palembang	-	Faktor Penghambat :1.Pemakai telat menyerahkan STNK untuk dibayar 2.Banyaknya kendaraan yang rusak 3.Lamanya perbaikan kendaraan di bengkel
34	Pemeliharaan Meubel	Jumlah mebel dipelihara	aset	18 aset bangunan dan gedung kantor	-	800.000.000	172.657.000	21,58	1.525,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	aset	18 aset bangunan dan gedung kantor	-	46.975.500.000	1.664.150.800	3,54	15,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	aset	18 aset bangunan dan gedung kantor	-	2.071.819.952	445.750.960	21,51	15,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
ix	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase	100%	-	12.675.898.000	626.026.809	4,94	2,57	APBD	Palembang	-	
37	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Daerah	Jumlah orang menerima gaji dan tunjangan KDH dan WKDH	orang	2 orang	-	2.171.437.000	17.110.609	0,79	15,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
38	Pelaksanaan Medical Check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang	4 orang	-	15.000.000	0	0,00	15,00	APBD	Palembang	-	Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH tidak terlaksana karena Pimpinan tidak berkenan jika hanya General Check Up.
39	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang	1 orang	-	3.000.000.000	0	0,00	15,00	APBD	Palembang	-	
40	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunangan operasional KDH dan WKDH	orang	2 orang	-	7.489.461.000	608.916.200	8,13	15,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
x	Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah	Persentase Peningkatan Fasilitas Kerumahtanggan Sekretariat Daerah	Persentase	100%	-	15.750.000.000	2.269.292.500	14,41	20,00	APBD	Palembang	-	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	persentase	100%	-	11.000.000.000	1.579.100.600	14,36	20,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
42	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	persentase	100%	-	3.250.000.000	583.046.700	17,94	20,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
43	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang disediakan	persentase	100%	-	1.500.000.000	107.145.200	7,14	20,00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
Jumlah						279.331.371.532	33.019.131.124	11,82	23,97				

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prosentase Urusan Administrasi yang dilaksanakan				2.301.708.000	212.285.375	9,22	9,22				
i	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan				135.480.000	18.330.000	13,53	13,53				
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	6		135.480.000	18.330.000	13,53	13,53	APBD	Dinas OPD		
ii	Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan				510.000.000	64.843.375	12,71	12,71				
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	32		10.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dinas OPD		
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80		500.000.000	64.843.375	12,97	12,97	APBD	Dinas OPD		
iii	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan				700.000.000	0	0,00	0,00				
4	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang tersedia	Unit	1		700.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dinas OPD		
iv	Penyediaan Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan				956.228.000	129.112.000	13,50	13,50				
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	29		956.228.000	129.112.000	13,50	13,50	APBD	Dinas OPD		
II	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pembangunan Bidang Urusan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan				65.698.292.000	51.204.867.467	77,94	77,94				
v	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Yang Difasilitasi				1.550.000.000	272.012.493	17,55	17,55				
6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	2		800.000.000	146.079.682	18,26	18,26	APBD	Dinas OPD		
7	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	4		750.000.000	125.932.811	16,79	16,79	APBD	Dinas OPD		
vi	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Difasilitasi				3.348.292.000	679.997.683	20,31	20,31				
8	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	106		2.000.000.000	295.328.402	14,77	14,77	APBD	Dinas OPD		
9	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	179		1.348.292.000	384.669.281	28,53	28,53	APBD	Dinas OPD		
vii	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Peningkatan MoU yang difasilitasi				60.800.000.000	50.252.857.291	82,65	82,65				
10	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah Yang Difasilitasi	Dokumen	31		60.800.000.000	50.252.857.291	82,65	82,65	APBD	Dinas OPD		
Jumlah						68.000.000.000	51.417.152.842	75,61	75,61				

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Biro Humas dan Protokol Setda

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	7	49.000.500.000	3.302.859.327	6,74	6,68	APBD	Dalam Daerah, Luar Daerah		
i	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	0	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah, Luar Daerah	-	
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	2 Laporan	0	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah, Luar Daerah	-	Menyesuaikan undangan pembinaan Sakip
ii	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase peningkatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	%	100%	17	229.000.000	38.020.000	17,00	17,00	APBD	Dalam Daerah, Luar Daerah	-	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	%	1 Dokumen	17	229.000.000	38.020.000	16,60	17,00	APBD	Kantor OPD	-	On Proses
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100%	0	420.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah, Luar Daerah	-	
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	%	1 Paket	0	320.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD	-	
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	2 Orang	0	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah, Luar Daerah	-	
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	%	32 Orang	-	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah, Luar Daerah	-	
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	0	2.300.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah, Luar Daerah	-	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan Yang Disediakan	%	1 Dokumen	0	2.000.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD	-	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	%	1 Laporan	0	300.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah, Luar Daerah	-	
v	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase peningkatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	0	600.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah, Luar Daerah	-	
8	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	%	R4 = 1 Unit	-	320.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah, Luar Daerah	-	
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	%	10 Unit	0	280.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD	-	
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	11	1.217.597.000	135.652.000	11,14	10,99	APBD	Kantor OPD	-	
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	%	1 Laporan	25	80.000.000	20.000.000	25,00	25,00	APBD	Kantor OPD	-	
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	%	1 Laporan	10	1.137.597.000	115.652.000	10,17	10,00	APBD	Kantor OPD	-	On Proses
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	14	110.000.000	15.304.000	13,91	14,00	APBD	Dalam Daerah, Luar Daerah	-	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	(Rp)	(%)	Realisasi Fisik (%)	(APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	%	25 Unit	0	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kantor OPD	-	
13	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	%	10 Unit	26	60.000.000	15.304.000	26,00	26,00	APBD	Kantor OPD	-	
viii	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Peningkatan Materi dan Komunikasi Pimpinan	%	100%	1	33.073.903.000	2.031.378.083	6,14	6,05	APBD	Dalam Daerah, Luar Daerah	-	
14	Sub Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan Yang Disiapkan	%	5 Dokumen	4	4.050.000.000	167.777.240	4,14	4,00	APBD	Dalam Daerah, Luar Daerah	-	Masih dalam proses administrasi
15	Sub Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	%	1 Laporan	9	3.250.000.000	303.281.332	9,33	9,00	APBD	Dalam Daerah, Luar Daerah	-	On Proses
16	Sub Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	%	1 Laporan	6	25.773.903.000	1.560.319.511	6,05	6,00	APBD	Dalam Daerah, Luar Daerah	-	On Proses
x	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Peningkatan Fasilitasi Keprotokolan	%	100%	10	11.000.000.000	1.082.505.244	9,84	9,87	APBD	Dalam Daerah, Luar Daerah	-	
17	Sub Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksana Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	%	1 Laporan	9	6.850.000.000	610.441.920	8,91	9,00	APBD	Dalam Daerah, Luar Daerah	-	On Proses
18	Sub Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	%	1 Laporan	14	3.350.000.000	472.063.324	14,09	14,00	APBD	Dalam Daerah, Luar Daerah	-	On Proses
19	Sub Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	%	1 Laporan	0	800.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Dalam Daerah, Luar Daerah	-	On Proses
Jumlah						49.000.500.000	3.302.859.327	6,74	6,68				

Sekretariat DPRD

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase penunjang urusan pemerintahan provinsi yang mendukung kinerja provinsi	%	100,00	14,57	180.427.087.448	26.514.697.011,00	14,70	26,32	APBD			
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersedia	%	100,00	12,50	2.620.000.000	0,00	0,00	0,00	APBD			
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	Ranwal RKPD 2026	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	-	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	-	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	-	30.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	7 Laporan	-	2.310.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3 Laporan	1 Laporan	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100,00	9,50	14.402.791.000	3.018.055.175	20,95	20,16	APBD			
	8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	100/14 Orang/ Bulan	89 Orang / April	14.184.231.000	3.018.055.175	21,28	20,00	APBD	Palembang		
	9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	168.560.000	0	0,00	25,00	APBD	Palembang		
	10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50.000.000	0	0,00	50,00	APBD	Palembang		
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100,00	33,33	1.100.000.000	120.341.115	10,94	31,82	APBD			
	11 Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000	120.341.115	17,19	50,00	APBD	Palembang		
	12 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1 Laporan	-	400.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	30,00	840.000.000	289.000.000	34,40	47,39	APBD			
	13 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	4 Paket	-	200.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian	Dokumen	1 Dokumen	-	20.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
15	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kpegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kpegawaian	Dokumen	1 Dokumen	-	20.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	104 Orang	69 Orang	600.000.000	289.000.000	48,17	66,34	APBD	Palembang		
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	18,00	35.708.940.000	5.530.629.800	15,49	30,35	APBD			
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	3 Paket	-	500.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	10 Paket	3 Paket	10.100.000.000	2.346.786.200	23,24	30,00	APBD	Palembang		
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	8 Paket	4 Paket	9.600.000.000	2.408.846.800	25,09	40,00	APBD	Palembang		
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	50 Paket	31 Paket	4.846.440.000	293.973.800	6,07	40,00	APBD	Palembang		
21	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	6 Paket	1 paket	882.500.000	0	0,00	25,00	APBD	Palembang		
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	14 Dokumen	3 Dokumen	1.045.000.000	0	0,00	20,00	APBD	Palembang		
23	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	400 Laporan	102 Laporan	8.000.000.000	481.023.000	6,01	20,00	APBD	Palembang		
24	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	4 Dokumen	-	75.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
25	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	3 Dokumen	-	660.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	%	100,00	0,00	6.780.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
26	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	5 Unit	-	6.500.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
27	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	8 Unit	-	280.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	%	100,00	16,67	18.346.211.248	1.906.175.272	10,39	24,96	APBD			
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4 Laporan	-	30.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	3 Laporan	5.635.000.000	843.994.772	14,98	25,00	APBD	Palembang		
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	3 Laporan	12.681.211.248	1.062.180.500	8,38	25,00	APBD	Palembang		
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	3,00	38.807.235.200	1.859.570.300,00	4,79	18,40	APBD			

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	46 Unit	16 Unit	4.300.000.000	98.118.750	2,28	35,00	APBD	Palembang		
32	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	23 Unit	1 Unit	25.356.835.200	1.166.989.350	4,60	15,00	APBD	Palembang		
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	100 Unit	20 Unit	9.150.400.000	594.462.200	6,50	20,00	APBD	Palembang		
ix	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang Tersedia	%	100,00	16,67	58.251.910.000	13.790.925.349	23,67	33,64	APBD			
34	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	75 Orang / bulan	75 orang/April	53.189.410.000	13.790.925.349	25,93	36,00	APBD	Palembang		
35	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	4 Paket	Pelaksanaan	4.500.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang		
36	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	75 Orang	-	562.500.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
x	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang Tersedia	%	100,00	6,00	3.570.000.000	0	0,00	23,61	APBD			
37	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	30 Laporan	5 Laporan	330.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang		
38	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	384 Paket	60 Paket	3.240.000.000	0	0,00	25,00	APBD	Palembang		
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100,00	13,33	211.661.930.000	27.822.129.896	13,14	24,51	APBD			
xi	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	%	100,00	0,00	1.410.000.000	0	0,00	0,00	APBD			
39	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	10 Dokumen	-	150.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
40	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	20 Dokumen	-	1.160.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
41	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1 dokumen	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
xii	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	12 Dokumen	0,00	200.000.000	0	0,00	5,00	APBD			
42	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	4 Dokumen	-	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
43	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	4 Dokumen	-	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
44	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	4 Dokumen	Pansus	100.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang		
xiii	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	100%	16,67	35.314.330.000	2.549.010.000	7,22	13,87	APBD			
45	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen (19 Orang)	6.832.330.000	142.000.000	2,08	25,33	APBD	Luar Provinsi		
46	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	55 Orang	54 Orang	3.960.000.000	648.000.000	16,36	25,00	APBD	Palembang		
47	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	9 Orang	8 Orang	432.000.000	64.000.000	14,81	25,00	APBD	Palembang		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2.050.000.000	73.768.000	3,60	15,00	APBD	Palembang		
49	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	50 Dokumen	4 Dokumen	22.040.000.000	1.621.242.000	7,36	8,00	APBD	Palembang		
xiv	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	100%	33,33	39.925.000.000	12.153.890.550	30,44	33,25	APBD			
50	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	2 Dokumen	-	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
51	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	39.825.000.000	12.153.890.550	30,52	33,33	APBD	Palembang		
xv	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang Difasilitasi	%	100%	16,67	134.812.600.000	13.119.229.346	9,73	25,00	APBD			
52	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	134.812.600.000	13.119.229.346	9,73	25,00	APBD	Dalam Provinsi, Luar Provinsi dan Luar Negeri		
Jumlah						392.089.017.448	54.336.826.907	13,86	25,35				

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%		31.340.500.000	5.822.716.450	18,58	21,25		Kota Palembang	-	-
i	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat/berkembang	%	85%		380.000.000	0	0,00	25,00	APBD	Kota Palembang	-	-
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5 dokumen (Renstra, Renja, LKjIP, Sakip dan RB Bappeda)		380.000.000	0	0,00	25,00	APBD	Kota Palembang	-	-
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	%	100%		23.475.802.950	5.392.118.129	22,97	24,48	APBD	Kota Palembang	-	-
	2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	179 orang/bulan (160 org Gaji; 19 org)		22.387.442.950	5.299.727.129	23,67	25,00	APBD dan DAU	Kota Palembang	-	-
	3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	33 dokumen (32 SPK tenaga honor administrasi+ 1 SPK Tenaga Tutor SKJ)		695.200.000	85.696.000	12,33	16,67	APBD	Kota Palembang	-	-
	4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5 Dokumen		283.160.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3 Laporan		110.000.000	6.695.000	6,09	30,00	APBD	Kota Palembang	-	-
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	%	100%		150.000.000	98.730.750	65,82	66,67	APBD	Kota Palembang	-	-
	6 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen		50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
	7 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen (Polis asuransi)		100.000.000	98.730.750	98,73	100,00	APBD	Kota Palembang	-	-
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	%	85%		850.000.000	13.657.320	1,61	10,29	APBD	Kota Palembang	-	-
	8 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	155 Paket		250.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
	9 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1 Dokumen		100.000.000	13.657.320	0,00	20,00	APBD	Kota Palembang	-	-
	10 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10 Orang		150.000.000	0	0,00	15,00	APBD	Kota Palembang	-	-
	11 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100 Orang		50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
	12 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20 Orang		300.000.000	0	0,00	15,00	APBD	Kota Palembang	-	-
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	%	100%		3.042.004.000	56.002.680	1,84	3,45	APBD	Kota Palembang	-	-
	13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20 Paket		200.000.000	9.932.000	4,97	15,00	APBD	Kota Palembang	-	-
	14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10 Paket		1.042.004.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	110 Paket (60 paket alat tulis kantor; 50 paket makan minum rapat dan kunjungan tamu)		450.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
16	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	16 Paket		200.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10 Dokumen		50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120 Laporan		1.000.000.000	46.070.680	4,61	5,00	APBD	Kota Palembang	-	-
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2 Dokumen (website dan buletin)		100.000.000	0	0,00	25,00	APBD	Kota Palembang	-	-
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%	100%		400.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1 Unit		400.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	%	100%		1.892.000.000	262.207.571	13,86	18,63	APBD	Kota Palembang	-	-
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan (1 laporan jumlah pengiriman surat)		10.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan (laporan pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)		1.152.000.000	181.457.571	15,75	20,00	APBD	Kota Palembang	-	-
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan (lap Jenis alat Kebersihan dan Bahan pembersih yang digunakan)		120.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan (lap luasan kantor yang dibersihkan; lap pengamanan kantor; spanduk dan dokumentasi)		610.000.000	80.750.000	13,24	20,00	APBD	Kota Palembang	-	-
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	%	85%		1.150.693.050	0	0,00	15,18	APBD	Kota Palembang	-	-
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26 Unit		260.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Kota Palembang	-	-
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit peralatan & perlengkapan kantor)		295.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Kota Palembang	-	-
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11 Unit		595.693.050	0	0,00	20,00	APBD	Kota Palembang	-	-
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	%	90%		5.429.285.224	0	0,00	0,35	APBD	Kota Palembang	-	-
ix	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	%	88%		2.998.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	1 Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2030;		110.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
29	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Telahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2 Dokumen (1 Dok PK Gubernur dan 1 Dok RKT Provinsi Sumsel Tahun)		590.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
30	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	2 Berita Acara (BA MUSRENBANG RKPD 2026 DAN BA MUSRENBANG RPJMD 2025-2029)		1.000.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
31	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Dokumen	3 DOK (1 DOK RKPD 2026, 1 DOK PERUBAHAN RKPD 2025, 1 DOK RPJMD 2025-2029		1.298.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
x	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis	%	88%		487.170.150	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
32	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1 Dokumen Data dan Informasi		302.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
33	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	3 Buku (Database Profil Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian; Database Profil Pembangunan Daerah Bidang Parindag; Database Bidang Infrastruktur)		185.170.150	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
xi	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi Minimal 75%	%	81%		1.882.000.000	0	0,00	1,01	APBD	Kota Palembang	-	-
34	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Laporan	1 Laporan SPIP		190.000.000	0	20,00	10,00	APBD	Kota Palembang	-	-
35	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	1 Kerja Sama		92.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
36	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	3 Laporan		600.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
37	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	5 DOKUMEN (1 DOK FASILITASI RANPERKADA RKPD KAB/KOTA 2026, 1 DOK FASILITASI RAPERKADA RKPD PERUBAHAN 2025 KAB/KOTA, 1 DOK FASILITASI RANWAL RANPERDA RPJMD KAB/KOTA 2025-2029, 1 DOK FASILITASI RAPERDA RPJMD KAB/KOTA 2025-2029, 1 DOK EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN KAB/KOTA, 1 DOK HASIL PENILAIAN PPD KAB/KOTA)		1.000.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
xii	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi Sistem yang digunakan	Aplikasi	1 Aplikasi		62.115.074	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
38	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	1 Dokumen (1 Dok Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		31.057.537	0	0,00	0,00	APBD		-	-
39	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Dokumen	1 Dokumen		31.057.537	0	0,00	0,00	APBD		-	-
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen	%	90%		4.029.829.850	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
xiii	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPd dengan RPJMD	%	81%		1.605.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
40	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	1 Dokumen		110.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
41	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Laporan	1 Laporan		100.000.000	0		0,00	APBD		-	-
42	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Laporan	1 Laporan		100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
43	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1 Laporan		275.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
44	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	1 Dokumen		220.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
45	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1 Laporan		100.000.000	0	0,00	0,00	APBD		-	-
46	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1 Laporan		100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
47	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	5 Laporan		600.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
xiv	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPd dengan RPJMD	%	81%		1.073.300.868	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah)		350.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
49	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Laporan	5 Laporan		55.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
50	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Laporan	1 Laporan		55.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
51	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1 Laporan (1 Lap Integrasi dan sinkronisasi perencanaan prioritas investasi dan ekonomi kerakyatan)		319.576.540	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
52	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembangan SDA)		55.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
53	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Laporan	1 Laporan		55.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
54	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Laporan	1 Laporan		51.574.328	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
55	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1 Laporan (Lap hasil integritas dan sinkronisasi perencanaan prioritas SDA dan IPTEK)		132.150.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
xv	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	%	81%		1.351.528.982	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
56	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, dan RKPD / Renja)	Dokumen	1 Dokumen		131.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
57	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan RKPD/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan	6 Laporan		95.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
58	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bidang Infrastruktur	Laporan	6 Laporan		146.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
59	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJPD/RKP/RPJMN pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3 Laporan		220.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2 Dokumen		304.528.982	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
61	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renja/RKPD Bidang Kewilayahan	Laporan	2 Laporan		110.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
62	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan RKPD/Renja dan RPJPD Bidang Kewilayahan	Laporan	1 Laporan		110.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
63	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJPD/RKP/RPJMN pada Bidang Kewilayahan	Laporan	3 Laporan (Jumlah Laporan Koordinasi Komisi Irigasi ; Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Infrastruktur; Jumlah Laporan yang disusun)		235.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Kota Palembang	-	-
Jumlah						40.799.615.074	5.822.716.450	14,27	16,37				

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tercapainya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi				87.736.546.418	9.073.490.546,00	10,34	12,32				
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.820.000.000	660.464.850,00	23,42	30,99				
1	Penyusunan Dokumen Perncanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perncanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen		201.000.000	98.600.000,00	49,05	50,00	PAD	Palembang		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	217.500.000	147.957.300,00	68,03	70,00	PAD	Palembang		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen		192.500.000	0,00	0,00	0,00	PAD	Palembang		
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	164.000.000	126.995.500,00	77,44	100,00	PAD	Palembang		
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen		173.000.000	0,00	0,00	0,00	PAD	Palembang		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16 Laporan	1 Laporan	216.000.000	41.478.400,00	19,20	20,00	PAD	Palembang		
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18 Laporan	3 Laporan	1.656.000.000	245.433.650,00	14,82	25,00	PAD	Palembang		
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				29.419.626.000	4.242.068.209,00	14,42	15,36				
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	155 ASN/Bulan	85 ASN	27.341.026.000	3.883.386.508,00	14,20	15,00	DAU	Palembang		
9	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60 Dokumen	10 Dukumen	1.105.000.000	138.940.000,00	12,57	17,00	PAD	Palembang		
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12 Dokumen		181.500.000	31.507.900,00	17,36	20,00	PAD	Palembang		
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	2 Dokumen		200.000.000	129.278.400,00	64,64	65,50	PAD	Palembang		
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Laporan	2 Laporan		242.100.000	0,00	0,00	0,00	PAD	Palembang		
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Lap. Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Lap. Koordinasi Penyusunan Lap. Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	2 Dokumen		180.000.000	17.465.001,00	9,70	10,00	PAD	Palembang		
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2 Dokumen		170.000.000	41.490.400,00	24,41	25,50	PAD	Palembang		
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.345.393.000	101.532.851,00	7,55	13,03				

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1 Laporan		160.000.000	17.160.001,00	10,73	20,00	PAD	Palembang		
16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen		270.000.000	0,00	0,00	20,00	PAD	Palembang		
17	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1 Laporan		590.393.000	0,00	0,00	0,00	PAD	Palembang		
18	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang milik daerah pada SKPD	Laporan	4 Laporan		160.000.000	69.146.850,00	43,22	45,00	PAD	Palembang		
19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4 Laporan		165.000.000	15.226.000,00	9,23	10,50	PAD	Palembang		
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adminsittrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.890.250.000	172.599.450,00	9,13	9,68				
20	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Paket	4 Paket		1.000.000.000	0,00	0,00	0,00	PAD	Palembang		
21	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan	3 Laporan		415.250.000	87.490.450,00	21,07	22,20	PAD	Palembang		
22	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	13 Dokumen	2 Dokumen	275.000.000	85.109.000,00	30,95	33,00	PAD	Palembang		
23	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan	Orang	5 Orang		200.000.000	0,00	0,00	0,00	PAD	Palembang		
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				14.939.690.418	1.793.372.525,00	12,00	15,30				
24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket		1.500.000.000	197.280.000,00	13,15	20,00	PAD	Palembang		
25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket		6.609.890.418	279.392.500,00	4,23	5,00	PAD	Palembang		
26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket		2.230.000.000	630.753.700,00	28,28	30,00	PAD	Palembang		
27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2 Paket		1.394.391.950	399.291.375,00	28,64	30,00	PAD	Palembang		
28	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	7 Dokumen		102.500.000	0,00	0,00	0,00	PAD	Palembang		
29	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12 Laporan	2 Laporan	260.000.000	100.084.000,00	38,49	40,00	PAD	Palembang		
30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	425 Laporan	31 Laporan	1.000.508.050	33.146.000,00	3,31	14,00	PAD	Palembang		
31	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen		917.400.000	153.424.950,00	16,72	15,22	PAD	Palembang		
32	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Dokumen	7 Dokumen		925.000.000	0,00	0,00	20,00	PAD	Palembang		
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah				27.630.000.000	756.086.000,00	2,74	4,46				
33	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1 Unit		800.000.000	0,00	0,00	0,00	PAD	Palembang		
34	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1 Paket		2.200.000.000	0,00	0,00	0,00	PAD	Palembang		
35	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1 Unit		24.630.000.000	756.086.000,00	3,07	5,00	PAD	Palembang		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.548.537.000	904.728.461,00	16,31	16,91				
36	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 Laporan	1 Laporan	60.250.000	3.500.000,00	5,81	15,00	PAD	Palembang		
37	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4 Laporan		1.474.000.000	313.542.461,00	21,27	22,20	PAD	Palembang		
38	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12 Laporan	2 Laporan	4.014.287.000	587.686.000,00	14,64	15,00	PAD	Palembang		
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara				4.143.050.000	442.638.200,00	10,68	14,63				
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Laporan	27 R4, 19 R2		1.005.000.000	10.653.700,00	1,06	10,00	PAD	Palembang		
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Laporan	18 R4, 1 R2		384.250.000	17.004.000,00	4,43	15,00	PAD	Palembang		
41	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	4 Jenis		1.448.800.000	225.788.000,00	15,58	16,50	PAD	Palembang		
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5 Unit		1.305.000.000	189.192.500,00	14,50	16,00	PAD	Palembang		
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	APBD yang Tepat Waktu				3.423.343.235.299	15.251.598.378,00	0,45	5,60				
ix	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				6.185.000.000	514.841.022,00	8,32	14,93				
43	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang	Dokumen	4 Dokumen		430.000.000	82.135.000,00	19,10	20,00	PAD	Palembang		
44	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	4 Dokumen		400.000.000	28.341.244,00	7,09	10,00	PAD	Palembang		
45	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	40 Dokumen		370.000.000	0,00	0,00	0,00	PAD	Palembang		
46	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	40 Dokumen		300.000.000	0,00	0,00	0,00	PAD	Palembang		
47	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	3 Dokumen		1.300.000.000	297.630.878,00	22,89	25,00	PAD	Palembang		
48	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	15 Dokumen		1.150.000.000	0,00	0,00	0,00	PAD	Palembang		
49	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Anggaran	Dokumen	1 Dokumen		2.235.000.000	106.733.900,00	4,78	21,15	PAD	Palembang		
x	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota				2.220.000.000	81.778.300,00	3,68	11,70				
50	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan		530.000.000	81.778.300,00	15,43	16,60	PAD	Palembang		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan		1.010.000.000	0,00	0,00	17,00	PAD	Palembang		
52	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan		680.000.000	0,00	0,00	0,00	PAD	Palembang		
xi	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1.755.250.000	19.192.850,00	1,09	23,30				
53	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	36 Dokumen		614.250.000	1.292.850,00	0,21	24,00	PAD	Palembang		
54	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	18 Dokumen		205.000.000	0,00	0,00	18,00	PAD	Palembang		
55	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	4 Dokumen		374.000.000	0,00	0,00	24,00	PAD	Palembang		
56	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	538 Dokumen		562.000.000	17.900.000,00	3,19	24,00	PAD	Palembang		
xii	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				1.844.130.000	54.936.000,00	2,98	27,35				
57	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban	Buku	16 Buku		670.000.000	17.527.000,00	2,62	5,00	PAD	Palembang		
58	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	1 Laporan		588.600.000	37.409.000,00	6,36	80,00	PAD	Palembang		
59	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Rancangan	2 Rancangan		585.530.000	0,00	0,00	0,00	PAD	Palembang		
xiii	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				3.411.338.855.299	14.580.850.206,00	0,43	5,56				
60	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	17 Laporan		1.734.182.298.350	0,00	0,00	10,00	PAD	Palembang		
61	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dokumen	4 Dokumen		50.000.000.000	0,00	0,00	0,00	PAD	Palembang		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pe ndorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Dokumen	16 Dokumen		1.627.156.556.949	14.580.850.206,00	0,90	1,00	PAD	Palembang		
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah				9.169.673.940	254.748.224,00	2,78	8,53				
xiv	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah				9.169.673.940	254.748.224,00	2,78	8,53				
63	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	4 Dokumen		345.000.000	0,00	0,00	20,00	PAD	Palembang		
64	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	40 Dokumen		65.000.000	0,00	0,00	0,00	PAD	Palembang		
65	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	53 Laporan		625.200.000	81.235.000,00	12,99	22,64	PAD	Palembang		
66	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	17 Laporan		2.982.000.000	36.009.400,00	1,21	2,00	PAD	Palembang		
67	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	60 Laporan		430.000.000	46.769.101,00	10,88	11,00	PAD	Palembang		
68	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	30 Laporan		2.308.660.832	40.998.641,00	1,78	2,00	PAD	Palembang		
69	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	51 Dokumen		1.293.500.000	38.736.082,00	2,99	21,56	PAD	Palembang		
70	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	5 Laporan		770.313.108	0,00	0,00	0,00	PAD	Palembang		
71	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	2 Laporan		350.000.000	11.000.000,00	3,14	40,00	PAD	Palembang		
	Jumlah					3.520.249.455.657	24.579.837.148	0,70	5,78				

Badan Pendapatan Daerah

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah				257.156.929.169	19.475.985.052	7,57	7,57				
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemanfaatan Dokumen Perencanaan dalam Proses Pembangunan yang terlayani				300.000.000	0	0,00	0,00				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3 Laporan	0 Laporan	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlayani				185.024.450.196	17.141.709.570	9,26	9,26				
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	422 Orang	422 Orang	184.480.950.196	17.141.709.570	9,29	9,29	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		On the track sesuai dengan jadwal dan mekanisme pembayaran gaji
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	243.500.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan SK. Pengelola Keuangan
6	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Laporan	1 Laporan	0 Laporan	300.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlayani				228.000.000	0	0,00	0,00				
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyelesaian Berita Acara Rekonsiliasi BMD TA. 2023, penyusunan KAK/TOR dan pelaksanaan movev aset
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1 Laporan	0 Laporan	28.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyelesaian Berita Acara Rekonsiliasi BMD TA. 2023, penyusunan KAK/TOR dan pelaksanaan movev aset

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
iv	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang terlayani				504.266.000	0	0,00	0,00				
9	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	121.266.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
10	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	130.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
11	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	1 Laporan	0 Laporan	210.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
12	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1 Laporan	0 Laporan	43.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
v	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlayani				1.469.026.463	0	0,00	0,00				
13	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	52.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyesuaian DUK berdasarkan ANJAB dan ABK TA. 2023
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	35 Orang	0 Orang	387.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200 Orang	0 Orang	500.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50 Orang	0 Orang	530.026.463	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
vi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlayani				28.517.897.320	0	0,00	0,00				
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	30 Paket	0 Paket	833.172.720	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1 Paket	0 Paket	1.099.750.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1 Paket	0 Paket	750.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	4 Paket	0 Paket	2.584.374.600	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4 Paket	0 Paket	5.550.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	0 Laporan	202.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2 Laporan	0 Laporan	1.202.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
25	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	16.246.600.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
vii	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlayani				6.884.000.600	0	0,00	0,00				
26	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	2 Unit	0 Unit	750.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
27	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	4 Unit	0 Unit	2.100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	1 Paket	0 Paket	1.322.500.600	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	3 Unit	0 Unit	1.611.500.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
30	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	Unit	1 Unit	0 Unit	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
31	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1 Unit	0 Unit	1.000.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
viii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlayani				26.579.933.204	2.334.275.482	8,78	8,78				
32	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	0 Laporan	92.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
33	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1 Laporan	0 Laporan	2.127.000.000	538.238.482	25,31	25,31	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
34	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	1 Laporan	0 Laporan	182.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	13 Laporan	0 Laporan	24.178.933.204	1.796.037.000	7,43	7,43	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
ix	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlayani				7.649.355.386	0	0,00	0,00				
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	37 unit	0 unit	2.150.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29 unit	0 unit	2.939.635.180	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	2 Unit	0 Unit	483.304.945	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JumlahSarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	2 Unit	0 Unit	2.076.415.261	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlayani				220.000.000	0	0,00	0,00				
x	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlayani				220.000.000	0	0,00	0,00				
40	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	3 Laporan	0 Laporan	220.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
III	Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah yang tercapai				9.956.064.300	11.000.000	0,11	0,11				
xi	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah yang tercapai				9.956.064.300	11.000.000	0,11	0,11				
41	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	637.400.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
42	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1.150.000.000	11.000.000	0,96	0,96	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
43	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	3 Laporan	0 Laporan	2.000.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
44	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	5 Sarana dan Prasarana	0 Sarana dan Prasarana	1.255.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2 Laporan	0 Laporan	1.625.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
46	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	2 Laporan	0 Laporan	734.392.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
47	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	175.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
48	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Laporan	2 Laporan	0 Laporan	1.074.821.800	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
49	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
50	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	Dokumen	29 Dokumen	0 Dokumen	589.450.500	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
51	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
52	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasi Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	2 Laporan	0 Laporan	375.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
53	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan	29 Laporan	0 Laporan	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
54	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	1 Laporan	0 Laporan	140.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Tahap persiapan : penyusunan dokumen KAK/TOR, SK. Pengelola Keuangan, waktu pelaksanaan, survei harga satuan barang/jasa
Jumlah						267.332.993.469	19.486.985.052	7,29	7,29				

Badan Kepegawaian Daerah

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN

APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%		22.508.607.831	3.461.895.673	15,38	5,97		Palembang		
i	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya data evaluasi kinerja perangkat daerah	-	100%		130.000.000	0	0,00	28,68		Palembang		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	Mengikuti rapat pembahasan Renja TA 2026 di Bappeda, Menghadiri Rapat Orientasi Penyusunan RPJMD Prov. Sumsel dan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 di Aula Dapunta Hyang Bappeda, Mengikuti Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 melalui Zoom Meeting, Menelaah/ Meneliti/ Menyusun draft Renstra PD 2025-2029 sesuai pedoman RPJMD	50.000.000	0	0,00	12,50	APBD	Palembang		
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	Menelaah/ Meneliti dan Merinci pemotongan anggaran untuk pengurangan perjalanan dinas -50% TA 2025, Membuat tabel untuk efisiensi anggaran TA 2025	30.000.000	0	0,00	6,25	APBD	Palembang		
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Laporan	3 Laporan	Tersusunnya Lap Bulan Des 2024 dan Lap Bulan Jan-Maret 2025, Tersusunnya Lap TW IV 2024, tersusunnya LPPD, LKPJ, dan LKJiP	50.000.000	0	0,00	58,33	APBD	Palembang		
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN/tenaga administrasi honorarium serta honorarium penatausahaan pengujian	-	100%		15.367.105.324	3.218.977.571	20,95	20,95		Palembang		
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	80 Orang	Telah dibayarkan Gaji pegawai bulan Jan-Maret 2025 sebanyak 66 Pegawai PNS dan 4 Pegawai PPPK termasuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja s.d.Februari 2025 dan THR	14.991.570.000	3.218.977.571	21,47	21,47	APBD	Palembang		
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	1 dokumen	belum terealisasi	375.535.324	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan dan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%		736.235.507	0	0,00	0,00		Palembang		
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidian dan pelatihan	Orang	4 Orang	belum terealisasi	200.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidian dan pelatihan	Orang	4 Orang	Telah mengirim Pejabat Pengawas untuk mengikuti Diklat PKP sebanyak 2 Org	136.235.507	0	0,00	50,00	APBD	Palembang		
8	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50 Orang	Masih menunggu arahan Pimpinan selanjutnya	400.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		100%		1.197.000.000	34.089.916	0,00	10,26		Palembang		
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1 Paket	belum terealisasi	15.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1 Paket	belum terealisasi	360.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1 Paket	belum terealisasi	300.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	1 Dokumen	Tersedianya bahan bacaan untuk Eselon II dan III untuk bulan Januari dan Februari 2025	17.000.000	1.850.000	10,88	16,66	APBD	Palembang		
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan		15.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	Telah dilakukam perjalanan dinas untuk menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi	480.000.000	32.239.916	6,72	25,00	APBD	Palembang		
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	belum terealisasi	10.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
v	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	100%		1.535.000.000	0	0,00	0,00		Palembang		
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1 Paket	belum terealisasi	700.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
17	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1 Paket	belum terealisasi	385.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	21 Unit	belum terealisasi	250.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1 unit	belum terealisasi	200.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah		100%		1.360.880.000	194.517.986	14,29	18,90		Palembang		
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 laporan	belum terealisasi	8.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
21	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 laporan	Telah dibayarkan tagihan Telepon, Listrik, Air dan Internet kantor dan rumah dinas s.d. bulan Maret 2025	380.000.000	77.271.986	20,33	25,00	APBD	Palembang		
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1 laporan	telah dibayarkan Jasa Tenaga Honor/Non ASN yang bekerja di BKD Prov. Sumsel sebanyak 9 org dan Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Keamanan sd bulan Februari 2025	972.880.000	117.246.000	12,05	16,67	APBD	Palembang		
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercapainya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100%		2.182.387.000	14.310.200	0,00	1,53		Palembang		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Orang	22 unit	Telah tersedia BBM untuk kendaraan dinas bulan Januari 2025 sedangkan untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinzn Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan belum terealisasi	400.000.000	14.310.200	3,58	8,33	APBD	Palembang		
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10 unit	belum terealisasi	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	belum terealisasi	1.732.387.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
II	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Manajemen ASN		Persentase Nilai IPA Prov. Sumsel Tahun 2021, 77%		1.947.910.000	48.370.000	2,48	12,65		Palembang		
viii	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN Persentase terisinya jabatan, rotasi dan mutasi		100%		610.250.000	0	0,00	13,56		Palembang		
28	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	4 Dokumen	Pengumuman pra sanggah hasil SKB dan Integarisi nilai SKD CPNS formasi 2024, Pengumuman pasca sanggah hasil SKB dan Integarisi nilai SKD CPNS formasi 2024, Pengumuman hasil seleksi kompetensi PPPK GURU TAHAP 1, Verivikasi seleksi administrasil PPPK TAHAP 2 formasi 2024, Pemberkasan CPNS formasi 2024, Pemberkasan PPPK TAHAP 1 formasi 2024 Penyampaian usul NI PPPK Nakes TAHAP 1 formasi 2024, Penyampaian usul NI PPPK TEKNIS TAHAP 1 formasi 2024, Penyampaian usul NIP CPNS formasi 2024 Pembuatan SK CPPPK DAN SPRP TAHAP 1 formasi 2024, Pembuatan SPRP CPNS formasi 2024 Pembuatan SK CPNS formasi 2024	256.000.000	0	0,00	11,54	APBD	Palembang		
29	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1 Lembaga	terselesainya 1. Penerbitan Tugas Belajar Mandiri sebanyak 25 SK 2.Penerbitan izin cuti sebanyak 18 formulir	200.000.000	0	0,00	22,00	APBD	Palembang		
30	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1 Dokumen	tercapainya peremajaan Data ASN sebanyak 596 dokumen	154.250.000	0	0,00	5,96	APBD	Palembang		
ix	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN		100%		599.415.000	0	0,00	0,55		Palembang		
31	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	1 Laporan	Terselesainya Administrasi KP ASN di Lingkungan Prov. Sumsel Periode Februari dan April 2025	49.415.000	0	0,00	23,48	APBD	Palembang		
32	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1 Dokumen	Terselesainya Rotasi, Mutasi dan Promosi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3 Jabatan, terselesainya Surat PLT/Harian Sebayak 2 Surat, terselesainya SK Tim Seleksi TGUPP sebanyak 1 SK	550.000.000	0	0,00	0,55	APBD	Palembang		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN		100%		339.415.000	48.370.000	14,25	31,00		Palembang		
33	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	1 Dokumen	s.d minggu kedua bulan April ada 39 orang yang mengikuti tubel, dengan menggunakan dana APBD (3 orang) dana APBN (28 orang) dan biaya mandiri 8 orang) dan telah terlaksananya pembayaran SPP dan uang buku semester 1	285.000.000	47.970.000	16,83	31,94	APBD	Palembang		
34	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang	500 Orang	Telah memproses SK Kenaikan Pejabat Fungsional sebanyak 149 SK, SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing sebanyak 1 SK, SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan jabatan sebanyak 38 SK, SK Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional sebanyak 1 SK dan SK Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional sebanyak 3 SK.	54.415.000	400.000	0,74	31,00	APBD	Palembang		
xi	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		100%		398.830.000	0	0,00	10,33		Palembang		
35	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1 Dokumen	Terevaluasinya penilaian kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel sebanyak 6.463 pegawai yang bernilai baik (sesuai ekspektasi) dan 12 pegawai yang tidak mempunyai produktivitas kerja (tanpa capaian)	49.415.000	0	0,00	25,00	APBD	Palembang		
36	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	500 Orang	Pemberian penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya masih dalam proses verifikasi berkas (usulan)	300.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Palembang		
37	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	100 Orang	1. Telah terlaksananya penanganan pelaporan LHKPN tahun 2024 sebanyak 647 Wajib Lapo 2. Telah terlaksananya pembinaan disiplin dengan diterbitkannya SK Hukuman Disiplin dan SK Izin cerai	49.415.000	0	0,00	58,37	APBD	Palembang		
Jumlah						24.456.517.831	3.510.265.673	14,35	16,01				

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%		39.431.427.424	5.956.833.788	15,11	20,99				
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%		320.000.000	8.000.000	2,50	9,22				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun		1 Dokumen	-	100.000.000	8.000.000	8,00	10,00	Palembang			
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA SKPD		1 Dokumen	-	25.000.000	0	0,00	10,00	Palembang			
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen TRKA Perubahan SKPD		1 Dokumen	-	25.000.000	0	0,00	0,00	Palembang			
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	-	50.000.000	0	0,00	10,00	Palembang			
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20 Laporan	-	120.000.000	0	0,00	10,00	Palembang			
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%		14.891.676.000	3.207.358.144	21,54	28,26				
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	4 bulan	14.731.136.000	3.207.358.144	21,77	28,57	Palembang			
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD		4 Dokumen	-	160.540.000	0	0,00	0,00	Palembang			
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah		100%		249.800.000	0	0,00	0,00				
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas yang disediakan		2 paket	-	149.800.000	0	0,00	0,00	Palembang			
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		5 Orang	-	100.000.000	0	0,00	0,00				
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Adminisrtasi Umum perangkat Daerah		100%		947.500.000	61.833.472	6,53	13,06				
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		10 Jenis/item	-	150.000.000	0	0,00	10,00	Palembang			
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (alat tulis kantor)		30 Jenis	-	105.000.000	0	0,00	10,00	Palembang			
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		10 Jenis/item	-	80.000.000	0	0,00	10,00	Palembang			
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		84 item	-	17.500.000	0	0,00	10,00	Palembang			
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Bulan	-	65.000.000	0	0,00	10,00	Palembang			
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		120 Kali	-	410.000.000	61.833.472	15,08	20,00				

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pen dorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen	-	120.000.000	-	0,00	0,00	Palembang			
v	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		100%		3.261.644.000	732.599.998	22,46	0,00				
17	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		50 Unit	-	1.618.000.000	732.599.998	45,28	0,00	Palembang			
18	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	-	200.000.000	0	0,00	0,00				
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		50 Unit	-	762.644.000	0	0,00	0,00				
20	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Gedung	-	481.000.000	0	0,00	0,00				
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah srana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		1 Paket	-	200.000.000	0	0,00	0,00	Palembang			
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.589.520.424	338.902.635	9,44	11,55				
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1500 Materai	-	20.000.000	0	0,00	0,00	Palembang			
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		36 rekening	-	1.406.190.424	170.597.635	12,13	16,67	Palembang			
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (pembayaran jasa kebersihan kantor)		12 bulan	-	2.163.330.000	168.305.000	7,78	8,33	Palembang			
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah				2.171.287.000	0	0,00	0,00				
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		16 kendaraan	-	391.550.000	0	0,00	0,00	Palembang			
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 Bulan	-	200.000.000	0	0,00	0,00	Palembang			
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		10 Gedung	-	1.379.737.000	0	0,00	0,00	Palembang			
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		12 Bulan	-	200.000.000	0	0,00	0,00	Palembang			
viii	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan BLUD		100%		14.000.000.000	1.608.139.539	11,49	25,00				
29	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan		1 BLUD	-	14.000.000.000	1.608.139.539	11,49	25,00	Palembang			
II	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Tercapainya program pengembangan sumber daya manusia		100%		3.965.720.000	0	0,00	0,00				
ix	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi teknis		100%		900.000.000	0	0,00	0,00				

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/ Pen dorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi		120 Orang	-	900.000.000	0	0,00	0,00	Palembang			
x	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pelaksanaan Sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional				3.065.720.000	0	0,00	0,00				
31	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/ Kota yang Terkelola dengan Baik (Akreditasi diklat)		1 lembaga	-	300.000.000	0	0,00	0,00	Palembang			
32	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi (bimtek standarisasi dan sertifikasi ; Peningkatan kapasitas asesor)		60 Orang	-	300.000.000	0	0,00	0,00	Palembang			
33	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		1 laporan	-	300.000.000	0	0,00	0,00	Palembang			
34	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (pelatihan fungsional perawat; Pelatihan Fungsional bidan; Bendahara sekolah)		90 Orang	-	2.165.720.000	0	0,00	0,00	Palembang			
Jumlah						43.397.147.424	5.956.833.788	13,73	19,07				

Badan Penelitian dan Pengembangan

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase meningkatnya administrasi perkantoran				20.548.131.000	2.434.129.113	11,85	14,78				
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang				75.000.000	0	0,00	20,00				
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan yang tersusun	dokumen	3 dokumen	2 dokumen	60.000.000	0	0,00	20,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		FAKTOR PENGHAMBAT REALISASI KEUANGAN DI JADWALKAN DI TRIWULAN II KARENA KETERBATASAN KAS DAERAH ANGGARAN TRIWULAN I
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan yang tersusun	dokumen	4 dokumen	1 dokumen	5.000.000	0	0,00	20,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi yang Tersusun	dokumen	5 dokumen	2 dokumen	10.000.000	0	0,00	20,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Meningkat				12.398.428.906	2.099.349.113	16,93	17,08				
	4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	59 orang	59 orang	12.210.928.906	2.099.349.113	17,19	17,19	APBD-Dana Alokasi Umum (DAU)	Palembang		
	5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1 dokumen	0 dokumen	127.500.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
	6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1 dokumen	0 dokumen	50.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	1 dokumen	0 dokumen	5.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
	8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	dokumen	1 dokumen	0 dokumen	5.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Meningkatkan Kapasitasnya				25.000.000	0	0,00	10,00				
	9 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1 dokumen	0 dokumen	5.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
	10 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1 dokumen	0 dokumen	10.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
	11 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	dokumen	1 dokumen	0 dokumen	10.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Meningkatkan Kapasitasnya				97.500.000	0	0,00	10,00				
	12 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	paket	1 Paket	0 Paket	22.500.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
	13 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	50 orang	0 orang	75.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Meningkat				796.924.094	0	0,00	10,63				
	14 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang tersedia	paket	1 paket	0 paket	50.000.000	0	0,00	20,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor (ATK) yang tersedia	paket	1 paket	0 paket	144.202.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang, Ogan Ilir		
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	paket	1 paket	0 paket	100.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	dokumen	1 dokumen	0 dokumen	5.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi ke dalam keluar daerah dan luar negeri	laporan	2 laporan	0 laporan	492.722.094	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1 dokumen	0 dokumen	5.000.000	0		10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana				3.305.000.000	0	0,00	10,00				
20	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	2 unit	0 unit	25.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	10 unit	0 unit	90.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang, Ogan Ilir		
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	2 unit	0 unit	3.190.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Meningkat				2.986.278.000	334.780.000	11,21	13,07				
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikirim	lembar	1000 lembar	0 lembar	6.500.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan/rekening Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang dibayarkan	rekening	1 laporan	0 laporan	550.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran	orang	1 laporan	1 laporan	2.429.778.000	334.780.000	13,78	13,78	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana				864.000.000	0	0,00	10,00				
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan, Bangunan dan Aset Lainnya yang dipelihara dan diasuransikan	paket	2 paket / Tw	0 paket / Tw	314.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	paket	2 paket / Tw	0 paket / Tw	100.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan, Perlengkapan, Gedung kantor dan Mesin inkubator yang terpelihara	jenis	7 Jenis / Tw	0 Jenis / Tw	150.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang, Ogan Ilir		
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit/Gedung/rumah/kandang yang direhab	unit	1 unit gedung	0 unit gedung	100.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang, Ogan Ilir		
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit/Gedung/rumah/kandang yang direhab	unit	1 unit gedung	0 unit gedung	200.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pelembang, Ogan Ilir		
II	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil litbang				2.085.000.000	0	0,00	10,00				

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ix	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah hasil litbang bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				475.000.000	0	0,00	10,00				
31	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	laporan	1 laporan	0 laporan	50.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
32	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	laporan	1 laporan	0 laporan	50.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang, Ogan Ilir		
33	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	laporan	1 laporan	0 laporan	125.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
34	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	laporan	1 laporan	0 laporan	100.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang, Muara Enim, Lahat, Muba, Banyuasin, Musi Rawas		
35	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	dokumen	1 dokumen	0 dokumen	50.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
36	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Dokumen Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	rekomendasi	1 rekomendasi	0 rekomendasi	100.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
x	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah hasil litbang bidang kesehatan				100.000.000	0	0,00	10,00				
37	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian	rekomendasi	1 rekomendasi	0 rekomendasi	50.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
38	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian	rekomendasi	1 rekomendasi	0 rekomendasi	50.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
xi	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah hasil litbang bidang ekonomi dan penanggulangan kemiskinan				625.000.000	0	0,00	10,00				
39	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	dokumen	1 dokumen	0 dokumen	50.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
40	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	dokumen	3 dokumen	0 dokumen	300.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang, Ogan Ilir		
41	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	dokumen	1 dokumen	0 dokumen	100.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Ogan ilir		
42	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	dokumen	1 dokumen	0 dokumen	125.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Ogan ilir		
43	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	dokumen	1 dokumen	0 dokumen	50.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
xii	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pelaku usaha inovatif yang lulus				885.000.000	0	0,00	10,00				
44	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1. Jumlah Produk dalam kaleng 2. Jumlah prototype 3. Jumlah Wirausaha Baru	dokumen	3 dokumen	0 dokumen	125.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang, Ogan Ilir		
45	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	laporan	1 laporan	0 laporan	185.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
46	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Inovasi, Jumlah Inovator dan Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina	laporan	1 laporan	0 laporan	150.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
47	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah jenis media yang digunakan untuk publikasi hasil Litbang	laporan	1 laporan	0 laporan	400.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
48	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	laporan	1 laporan	0 laporan	25.000.000	0	0,00	10,00	APBD-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Palembang		
Jumlah						22.633.131.000	2.434.129.113	10,75	14,34				

Badan Penghubung

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN FEBRUARI TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Badan Penghubung

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	25	16.503.567.472	1.477.003.931	8,95	20,36	APBD	Jakarta		
i	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	25	20.000.000	-	-	12,00	APBD	Jakarta		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	3	10.000.000	-	-	15,00	APBD	Jakarta		
ii	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	3	10.000.000	-	-	12,00	APBD	Jakarta		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlayani	%	100	25	5.276.752.000	651.486.878	12,35	19,83	APBD	Jakarta		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	33	33	5.094.472.000	651.486.878	12,79	20,00	DAU / APBN	Jakarta		
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	3	182.280.000	-	-	15,00	APBD	Jakarta		
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	25	5.000.000	-	-	12,00	APBD	Jakarta		
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	3	5.000.000	-	-	12,00	APBD	Jakarta		
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prsentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	25	125.000.000	-	-	10,00	APBD	Jakarta		
6	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	33	10	-	-	-	-	APBD	Jakarta		
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	0	125.000.000	-	-	10,00	APBD	Jakarta		
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	%	100	25	2.241.443.000	235.802.284	10,52	21,82	APBD	Jakarta		
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	170.000.000	-	-	15,00	APBD	Jakarta		
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	1	250.000.000	-	-	15,00	APBD	Jakarta		
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	308.000.000	74.959.300	24,34	23,00	APBD	Jakarta		
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	200.000.000	5.915.000	2,96	20,00	APBD	Jakarta		
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	300	46	1.313.443.000	154.927.984	11,80	24,00	APBD	Jakarta		
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	25	950.000.000	-	-	10,00	APBD	Jakarta		
13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	0	500.000.000	-	-	10,00	APBD	Jakarta		
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0	450.000.000	-	-	10,00	APBD	Jakarta		
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	25	4.135.372.472	391.618.769	9,47	23,93	APBD	Jakarta		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3	30.000.000	3.500.000	11,67	15,00	APBD	Jakarta		
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	307.785.472	38.320.769	12,45	24,00	APBD	Jakarta		
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3	3.797.587.000	349.798.000	9,21	24,00	APBD	Jakarta		
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	25	3.750.000.000	198.096.000	5,28	19,33	APBD	Jakarta		
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	46	10	2.950.000.000	197.116.000	6,68	20,00	APBD	Jakarta		
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	11	300.000.000	980.000	0,33	20,00	APBD	Jakarta		
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	2	500.000.000	-	-	15,00	APBD	Jakarta		
II	Program Pengelolaan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung	%	100	25	1.200.000.000	42.165.000	3,51	15,00	APBD	Jakarta		
ix	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung	%	100	25	1.200.000.000	42.165.000	3,51	15,00	APBD	Jakarta		
21	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporan	12	3	150.000.000	9.000.000	6,00	15,00	APBD	Jakarta		
22	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan	12	3	400.000.000	24.415.000	6,10	15,00	APBD	Jakarta		
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan	12	3	650.000.000	8.750.000	1,35	15,00	APBD	Jakarta		
Jumlah						17.703.567.472	1.519.168.931	8,58	20,00				

Inspektorat

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	0	40.531.582.000	6.794.185.934	16,76	23,67	APBD	Sumatera Selatan		
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	Laporan	6	0	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	0	50.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	Persen	100	0	29.287.744.300	6.316.124.721	21,57	30,19	APBD	Sumatera Selatan		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang Bulan	1554	475	28.123.343.450	6.162.623.721	21,91	30,57	APBD	Sumatera Selatan		
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga honorer administrasi yang dibayar	Dokumen	12	3	743.680.850	147.501.000	19,83	25,00	APBD	Sumatera Selatan		
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah tenaga penatausahaan dan verifikator yang dibayar	Dokumen	12	0	360.720.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	60.000.000	6.000.000	10,00	100,00	APBD	Sumatera Selatan		
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang dipelihara	Persen	100	0	20.000.000	900.000	4,50	8,33	APBD	Sumatera Selatan		
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah tenaga penatausahaan BMD yang dibayar	Laporan	12	1	20.000.000	900.000	4,50	8,33	APBD	Sumatera Selatan		
iv	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tercapai	Persen	100	0	2.483.674.300	15.528.000	0,63	2,85	APBD	Sumatera Selatan		
7	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya	Paket	115	0	230.000.000		0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	80	3	1.887.130.300	15.528.000	0,82	3,75	APBD	Sumatera Selatan		
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	45	0	366.544.000		0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang tercapai	Persen	100	0	2.469.000.000	301.085.280	12,19	13,38	APBD	Sumatera Selatan		
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	3	0	120.000.000		0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	4	220.000.000	219.611.900	99,82	100,00	APBD	Sumatera Selatan		
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	0	150.000.000		0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	0	220.000.000		0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	30	5	35.000.000	2.688.000	7,68	16,67	APBD	Sumatera Selatan		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	96	6	1.674.000.000	78.785.380	4,71	6,25	APBD	Sumatera Selatan		
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	2	0	50.000.000		0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	0	2.365.911.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan yang disediakan	Unit	1	0	360.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
18	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	3	0	729.911.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	11	0	1.276.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia	Persen	100	0	1.207.980.000	138.669.283	11,48	24,70	APBD	Sumatera Selatan		
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	0	14.520.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	3	598.960.000	82.669.283	13,80	25,00	APBD	Sumatera Selatan		
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	3	594.500.000	56.000.000	9,42	25,00	APBD	Sumatera Selatan		
viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Persen	100	0	2.647.272.400	21.878.650	0,83	1,80	APBD	Sumatera Selatan		
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	20	2	477.272.400	21.878.650	4,58	10,00	APBD	Sumatera Selatan		
24	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	3	0	70.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	50	0	150.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	1.950.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah	Persen	100	0	6.536.229.800	753.002.707	11,52	18,77	APBD	Sumatera Selatan		
ix	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	Persen	100	0	4.298.960.800	525.267.687	12,22	23,11	APBD	Sumatera Selatan		
27	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Laporan	100	2	892.421.000	6.300.000	0,71	2,00	APBD	Sumatera Selatan		
28	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Laporan	100	8	1.223.838.000	95.620.780	7,81	8,00	APBD	Sumatera Selatan		
29	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Laporan	2	1	200.378.000	17.067.327	8,52	50,00	APBD	Sumatera Selatan		
30	Reviu Laporan Keuangan	jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Laporan	1	1	280.670.000	75.027.580	26,73	100,00				
31	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Laporan	45	15	1.279.878.800	300.202.000	23,46	33,33	APBD	Sumatera Selatan		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	6	1	421.775.000	31.050.000	7,36	16,67	APBD	Sumatera Selatan		
x	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Persen	100	0	2.237.269.000	227.735.020	10,18	10,44	APBD	Sumatera Selatan		
33	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/ daerah yang ditangani	Laporan	22	0	135.000.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
34	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah laporan hasil pengawasan daengan tujuan tertentu	Laporan	135	15	2.102.269.000	227.735.020	10,83	11,11	APBD	Sumatera Selatan		
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persen	100	0	1.799.404.000	109.483.000	6,08	7,82	APBD	Sumatera Selatan		
xi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	Persen	100	0	218.099.000	52.900.000	24,26	33,33	APBD	Sumatera Selatan		
35	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan	Rekomendasi	3	1	218.099.000	52.900.000	24,26	33,33	APBD	Sumatera Selatan		
xii	Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	Persen	100	0	1.581.305.000	56.583.000	3,58	4,31	APBD	Sumatera Selatan		
36	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Perangkat Daerah	39	0	490.341.500	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
37	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi, verifikasi dan penilaian birokrasi	Perangkat Daerah	41	5	558.261.500	56.583.000	10,14	12,20	APBD	Sumatera Selatan		
39	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	4	0	208.578.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
40	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Perangkat Daerah	4	0	324.124.000	0	0,00	0,00	APBD	Sumatera Selatan		
Jumlah						48.867.215.800	7.656.671.641	15,67	22,43				

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa Politik

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100		14.860.594.000	2.328.803.098	15,67	10,00	APBD	Palembang	-	
i	Perencanaan,Pengaggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7		335.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokomen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1		250.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1		15.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
	3 Koordinasi dan Penyusunan perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1		15.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1		15.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
	5 Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1		15.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1		25.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persen	100		6.757.306.000	1.732.812.295	25,64	10,00	APBD	Palembang	-	
	7 Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	36	36	6.002.306.000	1.726.229.915	28,76	10,00	APBD	Palembang	-	
	8 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Dokumen	1		650.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
	9 Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1		70.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
	10 Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1		20.000.000	6.582.380	32,91	10,00	APBD	Palembang	-	
	11 Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	1		15.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
iii	Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100		345.340.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
	12 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapan nya	Paket	1		245.340.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
	13 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8		100.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
iv	Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi administrasi umum Perangkat Daerah	Persen	100		1.470.000.000	168.984.280	11,50	10,00	APBD	Palembang	-	
	14 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompnen Alat Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	1		100.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
	15 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	1		400.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
	16 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	1		100.000.000	39.876.900	39,88	10,00	APBD	Palembang	-	
	17 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1		35.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
	18 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1		810.000.000	129.107.380	15,94	10,00	APBD	Palembang	-	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1		25.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
v	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Jenis	25		1.497.948.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2		797.948.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	36		700.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
vi	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persen	100		2.270.000.000	382.404.548	16,85	10,00	APBD	Palembang	-	
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1		20.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	laporan	1		450.000.000	34.928.548	7,76	10,00	APBD	Palembang	-	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	1		1.800.000.000	347.476.000	19,30	10,00	APBD	Palembang	-	
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik Daerah	Persen	100		2.185.000.000	44.601.975	2,04	10,00	APBD	Palembang	-	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36		1.275.000.000	44.601.975	3,50	10,00	APBD	Palembang	-	
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		760.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	80		150.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
II	Program Penguatan Ideologi pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengimplementasi dan mengaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Persen	78,5%		8.037.142.774	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
viii	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakteristik Kebangsaan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen	6		8.037.142.774	0	0,00	10,00	APBD	Palembang		
28	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	1		500.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
29	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis Program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	1		554.298.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
30	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	250		462.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	100		300.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
32	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	1		1.020.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
33	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Keluarga	50		411.970.774	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
34	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Anggota Paskibraka	Orang	50		4.038.874.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
35	Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Dokumen Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	1		750.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
III	Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik	Persen	80		15.007.525.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
ix	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Dokumen	7		15.007.525.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
36	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	2		105.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
37	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1		13.022.525.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Orang	100		250.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
39	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi.Politik di Daerah yang Disusun	Orang	500		630.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
40	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	1		1.000.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
IV	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Yang berkinerja	Persen	5		2.300.000.000	11.347.071	0,49	10,00	APBD	Palembang	-	
x	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	dokumen	3		2.300.000.000	11.347.071	0,49	10,00	APBD	Palembang	-	
41	Penyusunan Program Kerja n di bidang pendafaran ormas Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja n di Bidang pendafaran ormas Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	dokumen	1		400.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
42	Penyusunan Bahan Perumusan di bidang pendafaran ormas Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang pendafaran ormas Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	dokumen	1		300.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
43	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan pelaporan Di bidang Pendaftaran ormas ,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendaftaran ormas Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Orang	50		100.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
44	Pelaksanaan Kordinasi Di bidang Pendaftaran ormas ,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang pendaftaran ormas Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Orang	200		750.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	Pelaksanaan Monitoring Di bidang Pendaftaran ormas ,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang pendaftaran ormas Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Laporan	1		750.000.000	11.347.071	1,51	10,00	APBD	Palembang	-	
V	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya	Persentase Mitra yang Mendukung Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	100		3.400.000.000	42.047.985	1,24	10,00	APBD	Palembang	-	
xi	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	dokumen	3		3.400.000.000	42.047.985	1,24	10,00	APBD	Palembang	-	
46	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Program Kebijakan di bidang g Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika ,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	dokumen	1		400.000.000	25.201.735	6,30	10,00	APBD	Palembang	-	
47	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika ,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	500		1.500.000.000	1.753.250	0,12	10,00	APBD	Palembang	-	
48	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Di bidang Program Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika ,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	300		1.200.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
49	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika ,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika ,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	1		300.000.000	15.093.000	5,03	10,00	APBD	Palembang	-	
VI	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Kasus yang Berpotensi Konflik Sosial	Persen	80		3.807.971.100	6.945.071	0,18	10,00	APBD	Palembang	-	
xii	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksanannya perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	dokumen	6		3.807.971.100	6.945.071	0,18	10,00	APBD	Palembang	-	
50	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah Yang Disusun	dokumen	3		250.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realiasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	Penyusunan bahan Perumusan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah Yang Disusun	dokumen	3		488.064.500	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
52	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	100		200.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
53	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	400		1.600.000.000	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
54	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan hasil Monitoring diBidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	1		300.000.000	6.945.071	2,32	10,00	APBD	Palembang	-	
55	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	dokumen	1		969.906.600	0	0,00	10,00	APBD	Palembang	-	
Jumlah						47.413.232.874	2.389.143.225	5,04	10,00				

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah saling berkaitan. Setiap terjadi perubahan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah akan berpengaruh terhadap meningkatnya atau menurunnya pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka kebijakan ekonomi daerah secara cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat.

Bab ini menjelaskan perkembangan kondisi ekonomi makro Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, dan prospek perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Perubahan perkiraan keuangan daerah serta kebijakan keuangan daerah termasuk kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun 2025 Perubahan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 diselaraskan dengan:

- 1). Arahana Pusat yang terdiri dari Tema, Sasaran dan Prioritas Nasional dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
- 2). Arahana RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045.
- 3). Arahana Tata Ruang, yaitu Arahana Kawasan Strategis dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044.
- 4). Arahana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029
- 5). Kebijakan untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang:

- a. Berkualitas,
- b. Berkesinambungan,
- c. Berkelanjutan,
- d. Berkeadilan,
- e. Inklusif,
- f. Mengedepankan penurunan jumlah penduduk miskin,
- g. Pengelolaan inflasi,
- h. Pengelolaan Sektor UKM dan UMKM,
- i. Perluasan lapangan kerja,dan
- j. Peningkatan pertumbuhan investasi.

Kerangka ekonomi daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Perubahan menjelaskan asumsi dasar dan target ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi daerah juga memuat analisis dan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun 2024 perubahan serta memperhitungkan pengaruh perkembangan ekonomi daerah terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kesenjangan.

3.1.1. Analisis Perekonomian Nasional

3.1.1.1. Perekonomian Nasional Tahun 2024

Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5 (lima) persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2023. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2024 di antaranya adalah intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum di tahun 2024, terjaganya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif.

Kinerja ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan ketahanan yang kuat dalam mengatasi dampak rambatan global. Pertumbuhan ekonomi hingga triwulan IV 2024 cukup baik, dengan permintaan domestik menjadi pendorong utama pertumbuhan Indonesia sejalan investasi yang tetap membaik, terutama di sektor bangunan seiring dengan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN)). Konsumsi rumah

tangga, khususnya dari kelompok menengah ke atas, tetap baik, dan ekspor nonmigas mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi.

Selanjutnya, Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia tumbuh sebesar 4,65 persen, menjadi US\$4.960,3 atau setara dengan Rp78,617 juta di tahun 2024. Dengan realisasi ini, *Gross National Income* per kapita Indonesia tahun 2024 diperkirakan sebesar US\$4.810 mempertahankan predikat kategori *upper-middle income country* di tahun 2023.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tahun 2024 tumbuh sebesar 4,95 persen, didukung oleh subkomponen konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel karena faktor peningkatan aktivitas wisata dan tingginya mobilitas masyarakat.

Selain itu, menjelang tahun pemilu 2024 konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga tahun 2024 tumbuh mencapai 7,42 persen. Tingginya aktivitas kampanye, distribusi logistik kebutuhan pemilu, dan sosialisasi pelaksanaan pemilu memengaruhi tingginya realisasi ini.

Pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto/investasi tumbuh sebesar 4,20 persen secara keseluruhan tahun 2024, menurun 0,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto terutama didorong oleh investasi pada pembangunan perumahan, serta infrastruktur jalan tol dan bendungan. Secara keseluruhan, pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto tersebut didukung terutama oleh komponen bangunan, diikuti kendaraan, serta mesin dan perlengkapan. Konsumsi pemerintah tumbuh positif di tahun 2024 sebesar 3,37 persen, setelah mengalami kontraksi pada tahun sebelumnya. Realisasi ini didukung oleh pendapatan dan belanja negara yang tumbuh positif di tahun 2024.

Ekspor barang dan jasa mencatatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 19,15 persen di tahun 2024. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa di tahun 2024 sebesar 14,18 persen, mengalami perlambatan yaitu sebesar 1,96 persen utamanya disebabkan oleh penurunan harga komoditas. Namun demikian, neraca perdagangan barang masih mengalami surplus sebesar US\$ 36,93 miliar di tahun 2024 yang didorong oleh peningkatan surplus neraca barang nonmigas seperti karet dan barang dari karet dan bubur kayu/ pulp. Karet dan

Barang dari karet serta Bahan bakar mineral menjadi komoditas utama dengan nilai ekspor tertinggi. Berdasarkan subkomponen, ekspor barang terkontraksi dipengaruhi oleh adanya penurunan harga 10 besar ekspor komoditas berdasarkan *Harmonized System Code* selain komoditas nikel. Sementara itu, subkomponen ekspor jasa tumbuh tinggi didukung oleh peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan devisa masuk dari luar negeri. Sementara itu, kinerja impor di tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 46,90 % yang disebabkan oleh adanya peningkatan impor komoditi antara lain Mesin untuk keperluan khusus (142,47%), Mesin untuk keperluan umum (96,96%), dan Generator uap, bukan ketel pemanas (22,70%) yang tumbuh positif.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor mencatatkan realisasi pertumbuhan positif di tahun 2024. Beberapa sektor mampu tumbuh mencapai dua digit, di antaranya sektor Jasa Kesehatan sebesar 13,62 persen, akan tetapi hanya mendistribusikan 0,67 persen dari keseluruhan sektor lapangan usaha.

Transportasi, Real Estate, Jasa Pendidikan, Administrasi Pemerintahan, dan penyediaan akomodasi dan makan minum, masing-masing sebesar 3,27 persen, 8,91 persen, 9,43 persen, 8,83 persen dan 9,05 persen. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman masih terus sejalan dengan sektor Jasa Pendidikan, Administrasi pemerintahan, Transportasi, dan real estate mengingat faktor tingginya mobilitas masyarakat, peningkatan kinerja sektor pariwisata, serta persiapan pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan kedua sektor tersebut.

Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh sektor ekonomi yang cenderung padat modal, dan karenanya sektor ekonomi yang padat tenaga kerja (padat karya) perlu lebih didorong ke depan. Perkembangan ini tecermin pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor dan sebagai hasil dari hilirisasi sumber daya alam seperti Pertambangan dan Penggalian, serta Industri Pengolahan yang tumbuh relatif tinggi. Sektor-sektor yang mencerminkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas seperti Konstruksi, serta Transportasi dan Pergudangan juga mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, sektor-sektor yang sejalan dengan kenaikan konsumsi masyarakat dan digitalisasi seperti Perdagangan Besar dan Eceran, Akomodasi dan Makanan-Minuman

(Akmamin), serta Informasi dan Komunikasi, juga makin tumbuh tinggi. Demikian pula berbagai sektor jasa seperti Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang terus menunjukkan peningkatan. Perkembangan berbagai lapangan usaha ini menunjukkan pola pemulihan ekonomi Indonesia pasca-Covid-19 yang makin kuat, dari sektor-sektor yang makin pulih dari dampak memar (scarring effect) Covid-19 pada periode 2021-2022 ke sektorsektor yang berorientasi ekspor pada periode 2022-2024, dan selanjutnya ke sektor-sektor untuk makin mendorong permintaan domestic ke depan. Ke depan, perkembangan sektorsektor seperti Pertanian, Perdagangan khususnya eceran, makan minum, Informasi dan Komunikasi khususnya digitalisasi, serta berbagai sektor jasa, perlu terus didorong karena tidak saja penting untuk pertumbuhan berkelanjutan, tetapi juga untuk penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Pola pertumbuhan dengan keseimbangan antara sektor padat modal dan padat tenaga kerja seperti inilah yang perlu ditingkatkan dan diperluas untuk memperkuat ketahanan dan transformasi ekonomi nasional yang lebih tinggi ke depan.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks dan normalisasi harga komoditas dunia, industri pengolahan mampu tumbuh sebesar 3,91 persen di tahun 2024. Kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto di tahun 2024 pun menunjukkan gejala *maturity* walaupun masih sangat terbatas, yakni mencapai 24,69 persen atau turun 6.02 persen dibandingkan tahun 2023 (18,67 persen).

Pertumbuhan sektor konstruksi sebesar 4,04 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Aktivitas konstruksi secara keseluruhan meningkat, tecermin dari realisasi pertumbuhan konsumsi semen domestik dan meningkatnya penanaman modal asing dan dalam negeri. Sektor perdagangan tumbuh positif sebesar 7,88 persen, sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas perdagangan barang domestik pada subkomponen perdagangan besar dan eceran, serta peningkatan penjualan sepeda motor pada subkomponen perdagangan mobil dan sepeda motor.

Kinirja pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang solid, tumbuh positif walaupun ada perlambatan pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03% sama dengan pertumbuhan ekonomi Nasional. Kondisi ini

menjadi modal besar dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 berdasarkan trend diperkirakan tumbuh sebesar 4,80 – 5,60 persen walaupun ditargetkan secara optimis oleh Bappenas sebesar 7,1 persen.

Inflasi selama tahun 2024 menurun dan berada dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$ didukung kebijakan moneter Bank Indonesia yang konsisten serta koordinasi yang erat dengan Pemerintah terutama adanya koordinasi yang saling bersinergis dari TPID Provinsi Sumatera Selatan. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2024 tetap terjaga sebesar 1,57% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang terkendali pada level 2,26% (yoy).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Agenda Transformasi Ekonomi berdampak positif pada pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada Februari 2025 sebesar 4,76 persen, turun sebesar 0,06 persen poin dibanding Februari 2024. Pada tahun 2023, jumlah lapangan kerja baru yang tercipta cukup besar, yaitu mencapai 4,55 juta, tertinggi sejak tahun 2018. Jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi pun mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 2,12 juta orang. Untuk meningkatkan jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada tahun 2024, seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan dapat diturunkan ke kisaran 5,0-5,7 persen. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah melakukan program perlindungan pekerja dan peningkatan keahlian antara lain melalui pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pelatihan vokasi, dan Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja akan meneruskan skema awal yang dimulai sejak tahun 2023, yaitu untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan vokasi.

1) Tingkat Kemiskinan

Secara umum, pada periode September 2013–September 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2015 dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 mencapai 24,06 juta orang. Dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin menurun 1,16 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,84 juta orang. Persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 8,57 persen, menurun 0,46 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,79 persen poin terhadap Maret 2023. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2024–September 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 0,59 juta orang sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,57 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,09 persen menjadi 6,66 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 11,79 persen menjadi 11,34 persen.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sehingga upaya penurunan kemiskinan yang dilakukan pemerintah memerlukan pendekatan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Sebagian dari Reformasi Sistem Perlindungan Sosial sudah dilakukan, yaitu melalui pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi dengan pemanfaatan telah dilakukan di 161 kabupaten/kota. Hal ini untuk menjamin perencanaan dan penganggaran program, khususnya untuk pengurangan kemiskinan dilakukan berdasarkan data yang akurat. Beberapa hal lainnya masih terus dilanjutkan, antara lain (1) penyiapan regulasi berupa Instruksi Presiden Registrasi Sosial Ekonomi untuk mengatur pemanfaatan dan pemutakhiran data secara berkala; (2) perluasan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk implementasi skema perlindungan

sosial adaptif; (3) finalisasi instrumen graduasi program bantuan sosial dan komplementaritas program melalui pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dilakukan lintas sektor; (4) peningkatan Standar Pelayanan Minimum khususnya di bidang sosial; dan (5) penjangkauan aktif terhadap kelompok miskin dan rentan, seperti anak telantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan korban bencana yang memerlukan bantuan dan layanan pemerintah.

2) Rasio Gini

Secara nasional, selama periode Maret 2018–September 2019, angka gini ratio terus mengalami penurunan. Akan tetapi, akibat pandemi COVID-19, angka gini ratio mengalami kenaikan pada Maret 2020 dan September 2020. Setelah 2020, angka gini ratio mengalami fluktuasi dan pada Maret 2023 mencapai 0,388 yang merupakan tertinggi sejak September 2018. Pada Maret 2024, gini ratio sudah mengalami penurunan menjadi 0,379. Bahkan, angka tersebut merupakan yang terendah sepanjang Maret 2018–Maret 2024. Artinya, pemerataan pengeluaran penduduk Indonesia pada Maret 2024 sudah semakin membaik. Namun, pada September 2024, gini ratio meningkat menjadi 0,381

Angka rasio gini cukup terkendali karena pemerintah memberikan banyak bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sementara masyarakat berpenghasilan tinggi tertahan pertumbuhannya akibat dari lesunya perekonomian. Namun setelah pandemi berakhir dan ekonomi mulai tumbuh, masyarakat berpenghasilan tinggi mulai merasakan dampak positif dari pulihnya ekonomi sehingga pengeluaran penduduk tersebut mengalami kenaikan. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah terlambat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi setelah pandemi sehingga pengeluaran mereka relatif tidak bertumbuh. Hal tersebut mengakibatkan rasio gini mengalami kenaikan setelah pandemi berakhir.

Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan rasio gini dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 di angka 0,374–0,377. Namun, target tersebut belum tercapai dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan rasio gini membutuhkan upaya berkelanjutan dan sinergi dari berbagai pihak. Meskipun terdapat

kemajuan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, diharapkan Indonesia dapat mencapai pemerataan pendapatan dan mewujudkan pembangunan yang inklusif. Pemerintah telah menjalankan beberapa strategi untuk menurunkan angka rasio gini, beberapa di antaranya (1) penggunaan data registrasi sosial ekonomi dalam proses penargetan berbagai bantuan sosial dan usaha, serta penargetan bantuan iuran jaminan sosial untuk mengurangi inclusion dan exclusion error; (2) mempermudah kepemilikan aset berupa lahan dan modal, serta mendorong inklusi keuangan, termasuk memberikan pendampingan dan pelatihan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan; (3) meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif masyarakat, melalui pengaturan akses kepemilikan lahan dan hak intelektual untuk mendukung ekonomi kreatif; serta (4) peningkatan penerimaan tax ratio dan pengurangan relaksasi pajak agar terjadi redistribusi kekayaan dari masyarakat berpenghasilan tinggi ke masyarakat berpenghasilan rendah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 0,64 poin dari nilai 72,91 pada tahun 2022 menjadi 73,55 di tahun 2023. Capaian ini disumbangkan khususnya pada aspek standar hidup layak dan pengetahuan yang ditunjang oleh akselerasi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2024, diperkirakan kinerja pelayanan kesehatan dan aktivitas pembelajaran akan meningkat sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 bidang kesehatan dan pendidikan. Pemanfaatan teknologi yang menunjang kedua pelayanan dasar tersebut perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka perluasan akses dan perbaikan kualitas layanan yang berdampak pada peningkatan capaian indikator pembangunan ke depannya.

3.1.1.2. Proyeksi Perekonomian Nasional Tahun 2025

Proses pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada 2024 dengan pertumbuhan yang diperkirakan tetap baik pada 2025 dan meningkat pada 2026. Pertumbuhan ekonomi hingga triwulan IV 2024 cukup baik didukung oleh permintaan domestik, meskipun cukup fluktuatif dari 5,06% pada triwulan I 2024 menjadi 4,96% pada triwulan II 2024 terus tumbuh ke 5,03% pada triwulan III 2024 dan Kembali meningkat ke 5,07%. Investasi tetap membaik, khususnya investasi bangunan sejalan dengan penyelesaian berbagai PSN. Konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah ke atas, tetap terjaga. Ekspor nonmigas tumbuh relatif tinggi di tengah perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas. Sementara itu, impor meningkat baik untuk kebutuhan ekspor maupun permintaan domestik, dan karenanya menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh sektor ekonomi yang cenderung padat modal, dan karenanya sektor ekonomi yang padat tenaga kerja perlu lebih didorong ke depan. Perkembangan ini tecermin pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor dan sebagai hasil dari hilirisasi sumber daya alam seperti Pertambangan dan Penggalian, serta Industri Pengolahan yang tumbuh relatif tinggi. Sektor-sektor yang mencerminkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas seperti Konstruksi, serta Transportasi dan Pergudangan juga mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, sektor-sektor yang sejalan dengan kenaikan konsumsi masyarakat dan digitalisasi seperti Perdagangan Besar dan Eceran, Akomodasi dan Makanan-Minuman (Akmamin), serta Informasi dan Komunikasi, juga makin tumbuh tinggi. Demikian pula berbagai sektor jasa seperti Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang terus menunjukkan peningkatan.

Perkembangan berbagai lapangan usaha ini menunjukkan pola pemulihan ekonomi Indonesia pasca-Covid-19 yang makin kuat, dari sektor-sektor yang makin pulih dari dampak memar (scarring effect) Covid-19 pada periode 2021-2022 ke sektorsektor yang berorientasi ekspor pada periode 2022-2024, dan selanjutnya ke sektor-sektor untuk makin mendorong permintaan domestik ke depan. Ke depan,

perkembangan sektorsektor seperti Pertanian, Perdagangan khususnya eceran, Akmamin, Informasi dan Komunikasi khususnya digitalisasi, serta berbagai sektor jasa, perlu terus didorong karena tidak saja penting untuk pertumbuhan berkelanjutan, tetapi juga untuk penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Pola pertumbuhan dengan keseimbangan antara sektor padat modal dan padat tenaga kerja seperti inilah yang perlu ditingkatkan dan diperluas untuk memperkuat ketahanan dan transformasi ekonomi nasional yang lebih tinggi ke depan.

Tabel 3. 1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Sisi Lapangan Usaha (% , yoy)

Lapangan Usaha	2022*	2023**	2024***			2024 ^p	2025 ^p	2026 ^p
			I	II	III			
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,31	5,05	5,11	5,05	4,95	4,7–5,5	4,7–5,5	4,8–5,6
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,33	1,27	-3,5	3,3	1,7	0,3–1,1	4,2–5,0	5,0–5,8
Pertambangan dan Penggalian	4,38	6,09	9,3	3,2	3,5	4,4–5,2	4,2–5,0	5,3–6,1
Industri Pengolahan	4,89	4,64	4,1	4,0	4,7	4,1–4,9	4,2–5,0	4,3–5,1
Pengadaan Listrik dan Gas	6,68	4,89	5,4	5,4	5,0	4,7–5,5	2,4–3,2	4,0–4,8
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,23	4,91	4,4	0,8	0,0	1,5–2,3	3,8–4,6	4,4–5,2
Konstruksi	2,02	4,90	7,6	7,3	7,5	7,1–7,9	5,9–6,7	6,3–7,1
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,53	4,85	4,6	4,9	4,8	4,3–5,1	4,1–4,9	4,5–5,3
Transportasi dan Pergudangan	19,96	14,07	8,7	9,6	8,6	8,6–9,4	8,9–9,7	10,2–11,0
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,98	10,07	9,4	10,2	8,3	8,1–8,9	5,6–6,4	5,8–6,6
Informasi dan Komunikasi	7,72	7,60	8,4	7,7	6,9	7,1–7,9	7,8–8,6	10,3–11,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,94	4,78	3,9	7,9	5,5	6,1–6,9	6,6–7,4	7,1–7,9
Real Estat	1,74	1,43	2,5	2,2	2,3	2,0–2,8	1,7–2,5	2,9–3,7
Jasa Perusahaan	8,77	8,24	9,6	8,0	7,9	8,6–9,4	7,0–7,8	5,6–6,4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,85	1,41	18,9	2,8	3,9	8,1–8,9	-1,7–0,9	4,0–4,8
Jasa Pendidikan	0,59	1,75	7,3	2,4	2,5	3,9–4,7	3,5–4,3	7,2–8,0
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,95	4,76	11,6	8,6	7,6	7,7–8,5	4,4–5,2	4,6–5,4
Jasa Lainnya	9,44	10,52	8,9	8,9	9,9	7,6–8,4	5,0–5,8	6,5–7,3

Sumber: BPS, Bank Indonesia

Keterangan: *Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara; ***Angka Sangat Sangat Sementara; ^pProyeksi Bank Indonesia

Pertumbuhan ekonomi di hampir seluruh wilayah Indonesia juga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) diprakirakan membaik, yaitu menjadi sekitar 5,5% dari 4,0%, didorong oleh pariwisata dan ekspor pertambangan. Ekonomi wilayah Kalimantan juga tumbuh membaik dari 5,4% pada 2023 menjadi sekitar 5,5% pada 2024, karena pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan ekspor pertambangan. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) meningkat dari 6,5% pada 2023 menjadi sekitar 6,9%

pada 2024, didukung oleh investasi industri dan pertambangan terkait dengan hilirisasi sumber daya alam.⁴ Ekonomi wilayah Jawa tumbuh sekitar 4,9% karena aktivitas industri dan perdagangan, sementara ekonomi wilayah Sumatera melambat dari 4,7% menjadi 4,5% karena aktivitas industri dan pertambangan.

Pada tahun 2025, ekonomi wilayah Jawa dan wilayah Sumatera diperkirakan akan kembali membaik dengan aktivitas perdagangan dan ekspor perkebunan. Sementara itu, perlambatan ekonomi diperkirakan akan terjadi di wilayah Sulampua serta wilayah Balinusra karena penurunan aktivitas pertambangan, selain juga di wilayah Kalimantan karena penurunan aktivitas di IKN.

Sinergi kebijakan transformasi ekonomi nasional secara besar-besaran perlu ditempuh Pemerintah apabila ingin mencapai pertumbuhan yang tinggi tanpa menimbulkan instabilitas. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia selama ini di sekitar 5% terutama karena kontribusi pertumbuhan modal, tenaga kerja, dan produktivitas masih rendah. Perlu peningkatan investasi, produktivitas, dan juga efisiensi ekonomi di Indonesia. Dari sisi produktivitas, kontribusi TFP terhadap PDB sejak tahun 2000 dalam kecenderungan menurun dan baru kembali naik sejak 2022 terutama karena kemajuan dari hilirisasi mineral dan pertambangan. Lebih dari itu, efisiensi dalam berinvestasi juga rendah seperti tecermin dari angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang cenderung meningkat tinggi sehingga menyebabkan kontribusi modal terhadap pertumbuhan PDB juga terkendala. Nilai investasi PMA ke Indonesia juga rendah sehingga menyebabkan rasio modal terhadap PDB juga rendah, yaitu di bawah 20%, jauh di bawah Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang telah mencapai sekitar 50% dari PDB. Dibandingkan Vietnam, nilai PMA keIndonesia khususnya yang berasal dari KoreaSelatan, Jepang, dan Taiwan, untuk sektor-sektor seperti tekstil, elektronik, perdagangan ritel, barang konsumsi dan jasa, juga lebih rendah. Investasi pada sektor padat tenaga kerja seperti ini diperlukan untuk keseimbangan dengan investasi pada sektor padat modal untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi, baik dari sisi peningkatan kapasitas perekonomian nasional maupun dari sisi permintaan konsumsi dan investasi.

Dalam Asta Cita, Pemerintah telah menyusun 40 proyek strategis yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga. Apabila diletakkan pada konsepsi peningkatan kapasitas perekonomian nasional seperti dikemukakan di atas, berbagai proyek itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi kenaikan investasi dan modal, maupun penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas. Dari sisi kenaikan investasi dan modal, terdapat 12 proyek infrastruktur dan 8 proyek ketahanan energi. Sementara dari sisi penciptaan lapangan kerja, terdapat 6 proyek hilirisasi dan ketahanan pangan serta 10 proyek untuk pemberdayaan sumber daya manusia. Sementara itu, 3 proyek digitalisasi dan 1 proyek reformasi struktural diharapkan untuk peningkatan produktivitas perekonomian nasional. Tentunya, pengaruh 40 proyek Pemerintah itu terhadap peningkatan kapasitas perekonomian nasional dan pertumbuhan ekonomi akan tergantung pada kecepatan dan ketepatan implementasinya.

Dari berbagai program yang telah disusun tersebut, Pemerintah telah merencanakan kebijakan untuk meningkatkan investasi untuk kenaikan modal dalam perekonomian. Perbaikan iklim investasi ditempuh dengan penyederhanaan perizinan seperti Online Single Submission (OSS), penyederhanaan regulasi serta harmonisasi ketentuan pusat dan daerah. Juga penguatan kerja sama internasional dan bilateral. Yang perlu ditambah ialah insentif fiskal untuk industri berorientasi ekspor, seperti tax holiday dan tax allowance untuk investasi di sektor prioritas dan kawasan tertentu. Prioritisasi implementasi proyek Pemerintah juga akan dilakukan untuk meningkatkan PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta sumber pembiayaannya pada sektor manufaktur, pertambangan, informasi dan komunikasi, pertanian, dan jasa. Juga pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menarik dan fasilitasi Investasi Hijau dan Berkelanjutan, seperti mengeluarkan Green Bond dan Green Sukuk sebagai upaya mendanai proyek-proyek ramah lingkungan. Sementara investasi di sektor padat modal akan didorong melalui hilirisasi mineral dan hilirisasi pangan untuk peningkatan nilai tambah dan penguatan struktur industri, di samping melanjutkan investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Penerimaan negara tahun 2025 naik 7,2% dari 2024 menjadi Rp 3.005,1 triliun ditopang kenaikan penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Belanja negara tahun 2025 naik 8,9% dari tahun 2024 menjadi Rp3.621,3 triliun dengan keseimbangan alokasi anggaran untuk program sosial dan belanja modal untuk keseimbangan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Demikian pula, pembiayaan anggaran untuk defisit fiskal tersebut sebesar Rp616,2 triliun diupayakan dari optimalisasi pinjaman program dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baik di pasar domestik maupun pasar keuangan global. Sementara itu, kebijakan moneter tetap diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah yaitu $2,5 \pm 1\%$ pada 2025 dan 2026. Stabilitas nilai tukar Rupiah akan terus dijaga untuk pencapaian sasaran inflasi dimaksud dan juga untuk mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan maupun berkembangnya dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Inflasi

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2024 menurun dan terjaga dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Inflasi IHK pada Desember 2024 tercatat rendah 1,57% dan juga pada seluruh komponennya. Inflasi inti tercatat rendah sebesar 2,26% (yoy), sementara inflasi volatile food (VF) terus menurun menjadi 0,12% (yoy). Terkendalnya inflasi inti sejalan dengan konsistensi kebijakan suku bunga Bank Indonesia untuk mengarahkan ekspektasi inflasi ke depan berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah juga berpengaruh positif pada terkendalnya inflasi barang impor (imported inflation). Penurunan inflasi VF didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, eratnya sinergi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), juga diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), dan pengaruh base effect harga pangan. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasarnya. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak

positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi VF diperkirakan terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah. Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi tahun 2025 dan 2026 terkendali dalam sasaran yang ditetapkan Pemerintah sebesar $2,5 \pm 1\%$.

Inflasi IHK di seluruh wilayah diperkirakan meningkat pada 2025 dan berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Kenaikan tekanan inflasi IHK disumbang oleh semua kelompok. Kelompok inti meningkat di mayoritas provinsi, seiring dengan perbaikan permintaan dan dampak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di tengah ekspektasi inflasi yang terjaga. Inflasi VF juga meningkat di berbagai daerah akibat permasalahan struktural terkait produksi dan distribusi pangan yang masih perlu menjadi perhatian, di tengah potensi kenaikan permintaan. Sementara itu, kenaikan inflasi AP antara lain dipengaruhi oleh kenaikan harga jual eceran rokok. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan sinergi pengendalian inflasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui GNPIP di berbagai daerah untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasarnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Agenda Transformasi Ekonomi berdampak positif pada pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada Februari 2025 sebesar 4,76 persen, turun sebesar 0,06 persen poin dibanding Februari 2024. Pada tahun 2023, jumlah lapangan kerja baru yang tercipta cukup besar, yaitu mencapai 4,55 juta, tertinggi sejak tahun 2018. Jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi pun mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 2,12 juta orang. Untuk meningkatkan jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada tahun 2024, seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan dapat diturunkan ke kisaran 5,0-5,7 persen. Untuk mendukung target tersebut,

pemerintah melakukan program perlindungan pekerja dan peningkatan keahlian antara lain melalui pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pelatihan vokasi, dan Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja akan meneruskan skema awal yang dimulai sejak tahun 2023, yaitu untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan vokasi.

TPT hasil Sakernas Februari 2025 sebesar 4,76 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat lima orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja. Pada Februari 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,06 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024. Pada Februari 2025, TPT laki-laki sebesar 4,98 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,41 persen. TPT laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen poin, sementara TPT perempuan turun 0,19 persen poin dibandingkan Februari 2024.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (5,73 persen) lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (3,33 persen). Dibandingkan Februari 2024, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,16 persen poin dan 0,04 persen poin. Pada Februari 2025, TPT penduduk kelompok umur muda (15–24 tahun) merupakan TPT tertinggi, yaitu mencapai 16,16 persen. Sementara itu, TPT penduduk kelompok umur tua (60 tahun ke atas) merupakan yang paling rendah, yaitu sebesar 1,67 persen. TPT menurut kelompok umur tersebut memiliki pola yang sama sejak Februari 2023. Dibandingkan Februari 2024, hanya kelompok umur tua (60 tahun ke atas) yang mengalami kenaikan TPT yakni sebesar 0,53 persen poin.

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT mempunyai pola yang hampir sama dari Februari 2023 sampai dengan Februari 2025. Pada Februari 2025, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,00 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 2,32 persen. Selama periode Februari 2023–Februari 2025, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas yang pada Februari 2025 mencapai 28,01 persen. Sementara itu, persentase pengangguran yang terendah adalah tamatan Diploma I/II/III dan

Diploma IV, S1, S2, S3, masing-masing sebesar 2,44 persen dan 13,89 persen.

Tingkat Kemiskinan

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di tahun 2025 di kisaran 7,0-8,0 persen. Sementara tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan ada di 0 persen. Dengan target tersebut, gap target jumlah penduduk miskin yang perlu dientaskan diperkirakan sekitar tiga juta per tahun, baik untuk mengentaskan penduduk miskin ekstrem maupun penduduk miskin secara umum. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif serta inflasi yang stabil untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi prasyarat utama keberhasilan makro penurunan kemiskinan. Hal ini didorong dengan pemenuhan infrastruktur layanan dasar di daerah sulit serta kemudahan akses kesempatan kerja, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan seperti penyandang disabilitas.

Penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tahun 2024 diperkuat dengan melanjutkan arah kebijakan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang diimplementasikan melalui beberapa penekanan, yaitu (i) pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi oleh seluruh kementerian/lembaga/daerah untuk melakukan penyaluran program; (ii) peningkatan kapasitas pemerintah hingga level desa/kelurahan dalam melakukan perencanaan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan yang berbasis bukti menggunakan Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan; (iii) penguatan pelaksanaan sistem perlindungan sosial adaptif yang dilakukan kementerian/lembaga/daerah; (iv) penyempurnaan pelaksanaan bantuan sosial beserta mekanisme graduasi berkelanjutan serta komplementaritasnya dengan program pemberdayaan, seperti kewirausahaan dan akses lapangan kerja; (v) penguatan kapasitas pendamping pembangunan untuk mendorong penjangkauan, pemberdayaan, perubahan perilaku penerima manfaat; serta (vi) penyempurnaan program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan; serta pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial untuk penataan penguasaan lahan.

Rasio Gini

Target rasio gini yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 pada tahun: 2024 adalah 0,366-0,374. Namun, target tersebut sangat sulit untuk dicapai karena pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, dilakukan penghitungan ulang penyesuaian target rasio gini menjadi 0,372-0,377 tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan terus diarahkan tidak hanya pada kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah, tetapi juga pada masyarakat pendapatan menengah ke atas. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan akan memperkecil jarak ketimpangan antarkelompok pendapatan.

Untuk menurunkan ketimpangan, pemerintah melakukan kebijakan afirmasi melalui empat strategi utama, yaitu (1) mempermudah kepemilikan aset berupa lahan dan modal, mendorong inklusi keuangan, memberikan pendampingan, dan pelatihan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan; (2) meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif masyarakat melalui pengaturan akses kepemilikan lahan dan hak intelektual untuk mendukung ekonomi kreatif; (3) mempertajam kebijakan fiskal baik belanja maupun pendapatan yang berkeadilan; dan (4) memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia ditargetkan 73,99-74,02 yang akan dicapai melalui:

- 1) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penguatan upaya promotif preventif melalui pengembangan inovasi pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, kesehatan usia lanjut, gizi, serta pengendalian penyakit yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan nasional;
- 2) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas yang difokuskan pada peningkatan akses di semua jenjang pendidikan terutama dalam percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dan pendidikan tinggi, dengan perhatian khusus pada penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga

- kurang mampu, dan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang meliputi pemanfaatan teknologi dalam pendidikan termasuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh; dan
- 3) upaya di bidang ekonomi terutama peningkatan produktivitas dan nilai tambah di seluruh sektor melalui hilirisasi dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional penguatan pemulihan sosial yang inklusif melalui distribusi bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah, diharapkan mampu mengurangi kemiskinan, menghapus kemiskinan ekstrem, serta memberikan insentif kepada dunia usaha. Selain itu, regulasi yang akomodatif, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan trmbaga Pengelola Investasi diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk dapat meningkatkan kapasitas produktif perekonomian dan mengurangi pengangguran melalui penciptaan kesempatan kerja yang inklusif sehingga pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

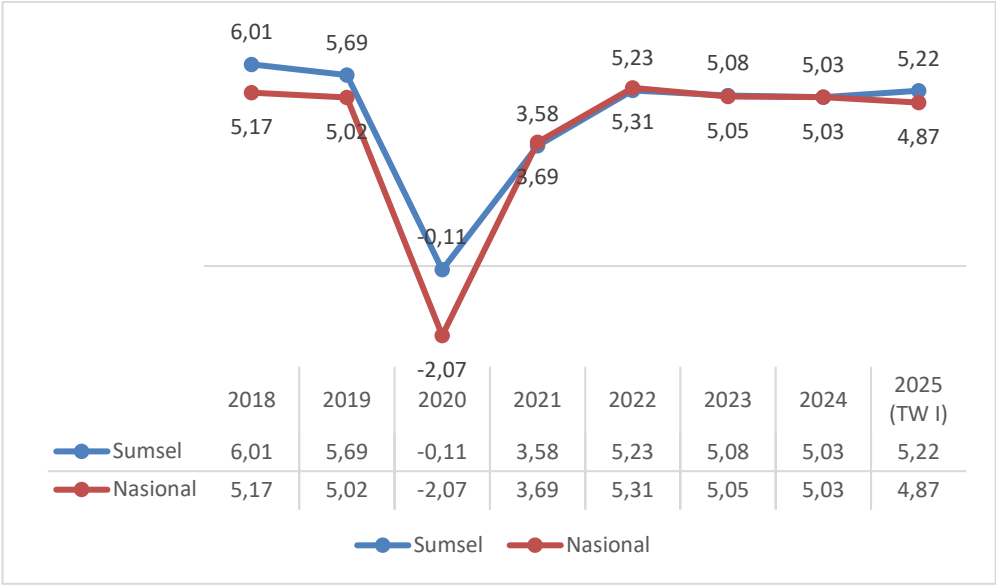
3.1.2.Kondisi Ekonomi Daerah

3.1.2.1. Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2024

Pertumbuhan PDRB

Ekonomi Sumatera Selatan triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,22 persen. Sepanjang triwulan 1 2025 kinerja ekonomi Sumatera Selatan dipengaruhi oleh permintaan domestik dan ekspor yang cenderung meningkat serta terjaganya daya beli sehingga mendorong peningkatan konsumsi masyarakat dan aktivitas produksi. Dari sisi produksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan Triwulan 1 2025 terutama bersumber dari lapangan usaha Perdagangan Pertambangan dan Pertanian, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada Triwulan 1 2025 terutama bersumber dari Ekspor Luar Negeri, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto.

Gambar 3. 1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan,
2018-2025 TW I



Sumber: BPS Tahun 2025

Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang terkontraksi sebesar 0,06 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,39 persen; diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,84 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,85 persen; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,71 persen. Sementara itu, Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 4,07 persen; 3,49 persen; dan 5,17 persen.

Struktur PDRB Sumatera Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Selatan masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 23,34 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 18,52 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,24 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatera Selatan mencapai 56,10 persen.

Tabel 3. 2
Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha,
Tahun 2018-2024

Lapangan Usaha	Pertumbuhan							Distribusi						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, kehutanan, Perikanan	2.33	3.34	1.75	2.91	3.82	2.16	2.59	14.84	14.48	15.17	14.71	13.08	13.1	13.56
B. Pertambangan dan Penggalian	9.09	8.11	-4.08	5.47	6.28	7.89	3.33	20.17	20.33	18.32	21.03	27.71	26.6	24.6
C. Industri Pengolahan	5.4	4.82	0.72	2.18	4.52	3.91	4.39	19.51	19.37	19.73	19.09	17.51	17.91	18.27
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8.85	10.29	14.67	5.76	1.46	4.4	8.48	0.13	0.13	0.15	0.15	0.13	0.13	0.13
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	7.96	7.46	4.83	-4.69	0.66	0.33	2.66	0.12	0.12	0.13	0.12	0.1	0.1	0.1
F. Konstruksi	5.59	3.34	-0.01	-0.02	1.27	3.55	5.89	12.99	12.55	12.53	11.92	10.67	10.69	10.8
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.09	8.22	-1.34	5.79	10.27	7.28	7.42	12.95	13.54	13.71	13.47	12.97	13.4	13.85
H. Transportasi dan Pergudangan	7.36	8.3	-5.91	-2.2	11.63	7.49	3.44	2.37	2.48	2.35	2.12	2.21	2.46	2.5
I. Penyediaan Akomodasi Makan Minum	13.15	15.34	-7.21	4.43	14.67	13.14	9.39	1.76	1.97	1.87	1.81	1.77	1.91	2.01
J. Informasi dan Komunikasi	7.73	8.15	12.79	6.04	8.12	6.35	8.84	2.85	2.91	3.29	3.21	2.91	2.9	3
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.78	-1.44	1.64	4.19	-0.6	4.6	7.09	2.54	2.36	2.39	2.38	2.08	2.07	2.13
L. Real Estate	7.95	8.03	2.24	5.81	5.23	4.28	8.17	3.08	3.19	3.34	3.24	2.9	2.87	2.94
M,N. Jasa Perusahaan	9.51	9.57	-2.08	0.6	2.9	2.03	5.18	0.13	0.14	0.14	0.13	0.11	0.11	0.11
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.7	1.09	4.17	3.88	3.7	3.73	9.35	2.85	2.67	2.9	2.77	2.45	2.42	2.51
P. Jasa Pendidikan	2.72	4.73	-1.5	6.57	2.24	2.23	6.76	2.36	2.35	2.4	2.37	2.06	2.03	2.15
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.56	9.57	10.14	5.63	4.15	-0.02	7.34	0.59	0.62	0.72	0.7	0.63	0.6	0.63
R,S,T,U. Jasa lainnya	9.06	7.77	5.23	0.93	2.05	1.95	4.12	0.76	0.79	0.86	0.8	0.71	0.69	0.7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6.01	5.69	-0.11	3.58	5.24	5.08	5.03	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2024

Pada tahun 2024, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah:

- 1) Pertambangan dan Penggalian sebesar 24,6 persen;
- 2) Industri Pengolahan sebesar 18.27 persen;
- 3) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,85 persen
- 4) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,56 persen; dan
- 5) Konstruksi sebesar 10,8 persen.

Pergeseran lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 3
Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi menurut Lapangan Usaha,
Tahun 2019-2025 TW I

Ranking	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terbesar Tahun 2018-2024						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW I)
I	Pertambangan dan Penggalian (20,33%)	Industri Pengolahan (19,81%)	Pertambangan dan Penggalian (19,92%)	Pertambangan dan Penggalian (27,64%)	Pertambangan dan Penggalian (26,61%)	Pertambangan dan Penggalian (24,6 %)	Pertambangan dan Penggalian (23,34 %)
II	Industri Pengolahan (19,37%)	Pertambangan dan Penggalian (18,35%)	Industri Pengolahan (19,46%)	Industri Pengolahan (17,50%)	Industri Pengolahan (17,84%)	Industri Pengolahan (18.27 %)	Industri Pengolahan (18,52 %)

Ranking	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terbesar Tahun 2018-2024						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW I)
III	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,48%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,22%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,12%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,23%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,45%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,85%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,24%)
IV	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,54%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,65%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,52%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,95%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,10%)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,56%)	Perdagangan Besar dan Eeran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,22%)
V	Konstruksi (12,55%)	Konstruksi (12,50%)	Konstruksi (12,00%)	Konstruksi (10,64%)	Konstruksi (10,69%)	Konstruksi (10,8%)	Konstruksi (10,74%)

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2024

Berdasarkan Tabel di atas, pertumbuhan ekonomi dan distribusi menurut lapangan usaha dari Tahun 2019-2025 TW I, kontribusi tertinggi berada di sektor pertambangan dan penggalian namun pada tahun 2020 sempat tergantikan oleh sektor industri pengolahan dikarenakan gejolak ekonomi global pada masa Pandemi COVID-19. Adapun pada tahun 2021-2024, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian juga meningkat signifikan akan tetapi di tahun 2023 sampai dengan 2025 pada triwulan I mengalami penurunan sampai menjadi sebesar 23,34 persen.

Tabel 3. 4
PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024 (Milyar Rupiah) (ADHB)

Lapangan Usaha per Sub Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Milyar Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	65661.8	68961.2	72602.3	77172.25	82399.82	90046.53
B. Pertambangan dan Penggalian	92166.1	83283	103810.2	163520.9	167372.9	163335
C. Industri Pengolahan	87834.5	89705.8	94212.9	103317.4	112694.8	121330.2
D. Pengadaan Listrik dan Gas	575.1	673	727.7	751.15	800.02	876.5
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	558	606	595	604.09	614.14	640.95
F. Konstruksi	56906.6	56977.9	58864.4	62954.78	67278.81	71717.14
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	61412.8	62324.5	66480.8	76530.69	84297.46	91958.7

Lapangan Usaha per Sub Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Milyar Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
H. Transportasi dan Pergudangan	11223.4	10668.9	10471.9	13043.41	15483.89	16579.86
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8937.5	8519.4	8933.4	10470.48	12044.55	13370.89
J. Informasi dan Komunikasi	13177.4	14936.5	15852.3	17142.47	18257.14	19905.37
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	10716	10878.3	11728.2	12283.33	13028.56	14166.1
L. Real Estat	14462.1	15202.6	15984.2	17127.44	18072.53	19502.51
M,N. Jasa Perusahaan	615.1	616.5	623.1	663.62	698.52	747.94
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	12100.9	13181.3	13653.4	14473.67	15216.34	16669.52
P. Jasa Pendidikan	10636.7	10928.2	11676.2	12164.87	12746.35	14304.86
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2820.4	3254.9	3473.5	3691.86	3799.28	4154.71
R,S,T,U. Jasa Lainnya	3598.1	3889.3	3947.4	4166.98	4363.52	4654.93
Produk Domestik Regional Bruto	453402.7	454607.4	493636.9	590079.4	629168.7	663961.7

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Jika dilihat dari perkembangan PDRB sektoral atas dasar harga berlaku dari tahun 2019-2024, dari sisi nilai terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tujuh belas sektoral lapangan usaha. Tahun 2019 nilai PDRB ADHB sebesar 453.402,71 Miliar Rupiah meningkat menjadi Miliar 663.961,7 Rupiah tahun 2024.

Tabel 3. 5
PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, 2018-2024 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran dengan rincian Net Ekspor	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	277771	296905	295605	308635	347794	381441	410002
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6358.15	7240.99	6748.58	7130.46	8067.44	8983.35	10660.6
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	32460.3	36686.9	31995	34055.6	34163.9	37333.9	40973
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	157635	160153	162651	165436	182083	191037	205916
5. Perubahan Inventori	-972.55	-731.37	-1972.3	380.65	-6.06	3.76	7.56
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-53859	-46851	-40420	-22001	17976.7	10369.8	-3597.6
Produk Domestik Regional Bruto	419392	453403	454607	493637	590079	629169	663962

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2024

Dari sisi pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sumatera Selatan tahun 2018-2024 memiliki tren positif dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2018 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 277.771,06 miliar rupiah dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 410.002 miliar rupiah.

Komponen penyumbang terbesar kedua adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto yang pada tahun 2018 sebesar 157.634,55 miliar rupiah dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 205.916 miliar rupiah namun komponen ini kenaikannya tidak terlalu signifikan.

Tabel 3. 6
PDRB ADHK Menurut Pengeluaran, 2018-2024 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	183421	190641.5	186943.1	190560.7	201978.4	212618.5	222564.2
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4563.1	5009.23	4710.91	4806.55	5067.13	5419.47	6261.17
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21604.63	22801.46	19869.06	20444.95	20691.85	21900.25	23736.29
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	111301.2	113186.3	114605.2	111007.1	108306.9	110986.6	115876
5. Perubahan Inventori	-227.6	-319.38	-1331.43	54.85	-2.07	1.88	3.75
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-22178.2	-15854.4	-9667.59	-468.99	7461.35	10040.73	10678.19
Produk Domestik Regional Bruto	298484.1	315464.8	315129.2	326405.2	343503.6	360967.4	379119.6

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dari sisi pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sumatera Selatan tahun 2018-2024 memiliki tren positif dan selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, sama seperti halnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB juga adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Pada tahun 2018 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 183.420,98 miliar rupiah pada tahun 2024 meningkat menjadi 222.564,2 miliar rupiah. Begitu juga dengan komponen penyumbang terbesar kedua yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto dimana pada tahun 2018 sebesar 111.301,18 miliar rupiah dan pada tahun 2024 menjadi 115.876 miliar rupiah

Ekspor

Ekspor Sumatera Selatan pada Maret 2025 turun US\$70,45 juta (10,91 persen) dibanding Februari 2025, yaitu dari US\$645,99 juta menjadi US\$575,54 juta. Penurunan ekspor Maret 2025, disebabkan oleh penurunan ekspor baik migas maupun nonmigas. Ekspor migas berkurang 6,78 persen dan ekspor nonmigas berkurang 11,11 persen. Penurunan terjadi karena berkurangnya nilai ekspor komoditas batubara, CPO, dan buah-buahan tahunan.

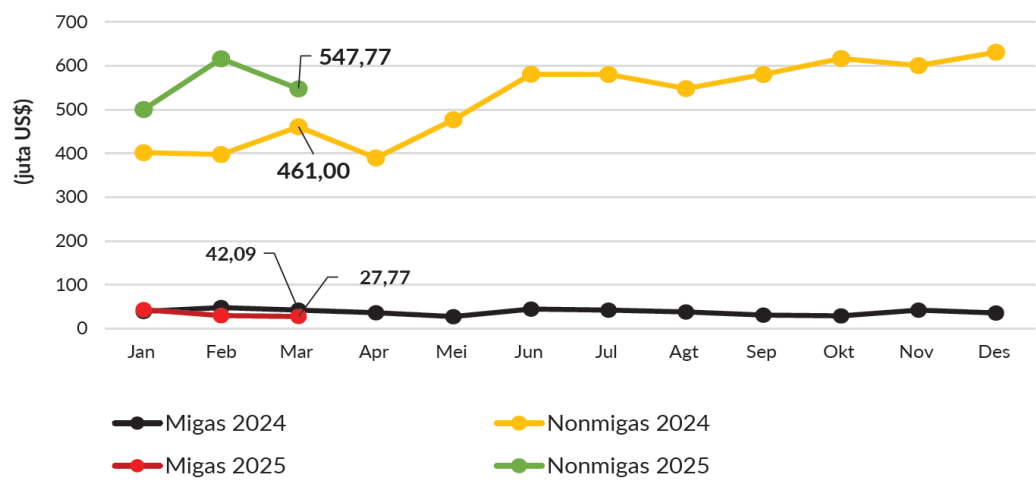
Hal yang berbeda terlihat jika nilai ekspor dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ekspor pada Maret 2025 meningkat sebesar 14,40 persen jika dibandingkan Maret 2024. Hal ini disebabkan peningkatan ekspor nonmigas sebesar 18,82 persen. Begitu juga jika dilihat perbandingan per tahun untuk nilai kumulatif. Pertumbuhan ekspor secara c to c juga mengalami peningkatan. Dan ekspor pada Januari-Maret 2025 masih didominasi ekspor nonmigas dimana peran dari komoditas ini mencapai 94 persen terhadap nilai ekspor.

Tabel 3. 7
Nilai Ekspor Migas dan Nonmigas Sumatera Selatan
Maret 2025

Uraian	Nilai FOB (juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd total ekspor Jan-Mar 2025 (%)
	Maret ^r 2024	Feb 2025	Maret 2025	Jan-Mar ^r 2024	Jan-Mar 2025	Mar'25 thd Mar'24 (y-on-y)	Mar'25 thd Feb'25 (m-to-m)	Jan-Mar25 thd Jan-Mar 24 (c-to-c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total Ekspor	503,09	645,99	575,54	1.389,91	1.764,96	14,40	-10,91	26,98	100,00
Migas	42,09	29,79	27,77	129,76	100,85	-34,02	-6,78	-22,28	5,71
- Minyak mentah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil minyak	42,09	29,79	27,77	129,76	100,85	-34,02	-6,78	-22,28	5,71
- Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nonmigas	461,00	616,20	547,77	1.260,15	1.664,11	18,82	-11,11	32,06	94,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 3. 2
Perkembangan Nilai Ekspor Migas dan Nonmigas
Sumatera Selatan, Maret 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Ekspor non migas mengalami penurunan pada Maret 2025 jika dibandingkan Februari 2025. Penurunan terjadi karena berkurangnya nilai ekspor yang signifikan untuk komoditas batubara dan lignit (22,94 %), CPO (18,75 %), Buah-buahan (66,16 %) dan Produk Farmasi (83,20 %). Kemudian jika dilihat dari nilai y on y, nilai ekspor non migas justru mengalami peningkatan sebesar 18,82 persen. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan signifikan nilai ekspor pada tiga komoditas yaitu Batubara dan Lignit, Karet dan Barang dari karet, serta Lemak & Minyak Hewan/Nabati (CPO). Begitu juga jika nilai kumulatif dibandingkan antar tahun, nilai ekspor secara c to c mengalami peningkatan sebesar 32,06 persen.

Jika dilihat secara komposisi, ekspor nonmigas selama Januari-Maret 2025 masih didominasi oleh Bahan Bakar Mineral hingga 44 persen. Komoditas utama selanjutnya yaitu Karet & Barang dari karet serta Pulp dari kayu dimana nilai keduanya masing-masing sebesar 24,84 persen dan 18,62 persen. Kemudian pada Maret 2025 juga dilakukan ekspor komoditas unggulan daerah yaitu biji kopi dengan nilai US\$90,65 ribu yang memberikan kontribusi 0,016 persen pada nilai ekspor nonmigas. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas unggulan ekspor dari Sumatera Selatan berasal dari sumber daya alam dan hasil industri pengolahan.

Tabel 3. 8
Nilai Ekspor Sepuluh Golongan Barang Utama Nonmigas Sumatera Selatan, Maret 2025

Golongan Barang (HS 2 Dijit)	Nilai FOB (juta US\$)			Perubahan (%)			Nilai FOB (juta US\$)		Peran thd total ekspor Nonmigas Jan-Mar 2025 (%)
	Maret 2024	Feb 2025	Maret 2025	m to m	y on y	c to c	Jan-Mar ^r 2024	Jan-Mar 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Bahan Bakar Mineral [27]	187,63	269,46	207,63	-22,94	10,66	24,66	562,44	701,13	42,13
2. Karet dan Barang dari Karet [40]	104,89	142,62	142,95	0,23	36,28	48,16	278,99	413,36	24,84
3. Pulp dari Kayu [47]	113,99	103,46	113,61	9,80	-0,34	20,62	256,86	309,82	18,62
4. Lemak & Minyak Hewan / Nabati [15]	7,99	59,52	48,37	-18,75	505,26	140,47	53,82	129,42	7,78
5. Kertas & Karton [48]	9,78	11,54	13,21	14,45	35,06	27,21	25,56	32,52	1,95
6. Kayu, Barang dari kayu [44]	13,24	10,04	8,87	-11,61	-32,99	18,08	26,80	31,64	1,90
7. Buah-buahan [08]	2,17	6,22	2,10	-66,16	-3,22	102,90	6,89	13,97	0,84
8. Aneka Produk Kimia [38]	-	3,28	3,18	-3,05	N/A	122,75	2,90	6,46	0,39
9. Produk Farmasi [30]	1,67	3,44	0,58	-83,20	-65,37	11,20	4,24	4,72	0,28
10. Bahan Anyaman Nabati [14]	0,91	1,81	1,88	4,28	105,79	46,77	3,20	4,70	0,28
Total 10 Golongan Barang	442,28	611,38	542,38	-11,29	22,63	34,87	1.221,71	1.647,73	99,02
Lainnya	18,72	4,82	5,39	11,86	-71,21	-57,40	38,45	16,38	0,98
Total Ekspor Non Migas	461,00	616,20	547,77	-11,11	18,82	32,06	1.260,15	1.664,11	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Perkembangan ekspor Sumatera Selatan menurut sektor pada Maret 2025 menunjukkan fenomena yang berbeda jika dibanding Februari 2025. Pada bulan Februari 2025 terjadi peningkatan ekspor komoditas industri pengolahan dan pertambangan. Sedangkan pada Maret 2025 terjadi penurunan ekspor seluruh komoditas menurut sektor. Dan sebaliknya jika dilihat secara y on y, terjadi peningkatan nilai ekspor pada seluruh sektor. Sektor pertanian bertambah US\$0,54 juta (13,71%); industri pengolahan bertambah US\$66,22 juta (24,58%); pertambangan sebesar US\$20 juta (10,66%) sedangkan sektor migas berkurang sebanyak US\$14,32 juta (34,02%). Begitu juga jika dilihat secara kumulatif. Nilai ekspor nonmigas meningkat untuk semua sektor dan sektor migas mengalami penurunan.

Tabel 3. 9
Nilai Ekspor Sumatera Selatan Menurut Sektor, Maret 2025

Uraian	Nilai FOB (juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd total ekspor Jan-Mar 2025 (%)
	Maret ^r 2024	Feb 2025	Maret 2025	Jan-Mar ^r 2024	Jan-Mar 2025	Feb'24 thd Mar'24 (m-to-m)	Mar'25 thd Mar'24 (y-on-y)	Jan-Mar'25 thd Jan-Mar'24 (c-to-c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total Ekspor	503,09	645,99	575,54	1 389,91	1 764,96	-10,91	14,40	26,98	100,00
Migas	42,09	29,79	27,77	129,76	100,85	-6,78	-34,02	-22,28	5,71
Nonmigas	461,00	616,20	547,77	1 260,15	1 664,11	-11,11	18,82	32,06	94,29
- Pertanian	3,94	9,28	4,49	12,17	23,52	-51,65	13,71	93,29	1,33
- Industri pengolahan	269,43	337,47	335,65	685,54	939,46	-0,54	24,58	37,04	53,23
- Pertambangan dan lainnya	187,63	269,46	207,63	562,44	701,13	-22,94	10,66	24,66	39,72

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Impor

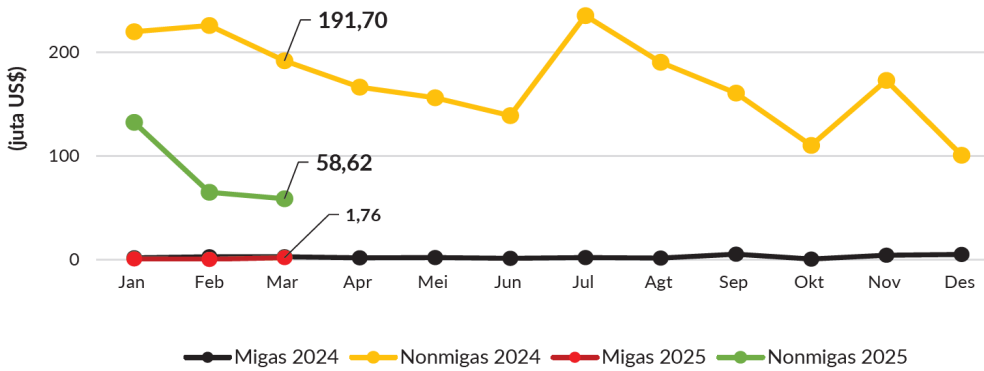
Nilai impor Sumatera Selatan kembali berkurang pada Maret 2025. Nilai impor mencapai US\$60,38 juta atau berkurang US\$4,64 juta (7,13 persen) dibanding Februari 2025. Hal ini disebabkan oleh penurunan signifikan pada impor komoditas nonmigas. Impor nonmigas berkurang sebesar 9,51 persen sedangkan impor migas meningkat hingga enam ratus persen. Hal yang sama juga terlihat jika nilai impor dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai impor menurun signifikan secara y on y dan c to c. Impor di bulan Maret menurun hingga US\$133,84 juta atau 68,91 persen (y on y) karena berkurangnya impor migas sebanyak US\$0,76 juta (30,11 persen) dan non migas sebanyak US\$133,08 juta (69,42 persen). Begitu juga jika dilihat secara kumulatif, nilai impor berkurang hingga US\$385,86 juta (59,90) dikarenakan penurunan impor pada migas dan nonmigas. Kemudian jika dilihat dari distribusinya, impor nonmigas masih mendominasi yaitu sebesar 99 persen.

Tabel 3. 10
Nilai Impor Migas dan Nonmigas Sumatera Selatan
Maret 2025

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd Jan-Mar 2025 (%)
	Maret 2024	Feb 2025	Maret 2025	Jan-Mar 2024	Jan-Mar 2025	m-to-m	y-on-y	c to c	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total	194,22	65,02	60,38	644,19	258,33	-7,13	-68,91	-59,90	100,00
Migas	2,52	0,24	1,76	7,00	2,52	628,40	-30,11	-63,99	0,98
- Minyak Mentah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil Minyak	2,52	0,24	1,76	7,00	2,52	628,40	-30,11	-63,99	0,98
- Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nonmigas	191,70	64,78	58,62	637,19	255,81	-9,51	-69,42	-59,85	99,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 3. 3
Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas
Sumatera Selatan Maret 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Nilai impor nonmigas Sumatera Selatan Maret 2025 yang mencapai US\$58,62 juta, didominasi oleh mesin dan peralatan mekanis dan bagiannya US\$17,18 juta (29,30 persen). Jika dilihat perkembangannya terhadap Februari 2025, impor nonmigas mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan signifikan pada komoditas Mesin baik mesin mekanik maupun elektrik. Begitu juga jika dibandingkan dengan Maret 2024, nilai impor non migas juga menurun. Berkurangnya nilai impor disebabkan oleh penurunan signifikan pada komoditas mesin dan peralatan mekanis, serta karet dan barang dari karet, Kemudian jika dilihat menurut distribusinya pada periode Januari-Maret 2025, komoditas utama yang diimpor masih berupa Mesin dan Peralatan Mekanis dan Bagiannya, Kayu dan barang dari kayu, dan pupuk. Hal ini menunjukkan secara tidak langsung barang yang diimpor didominasi oleh barang modal dan bahan baku industri selama periode tersebut.

Tabel 3. 11
Nilai Impor Sepuluh Golongan Barang Nonmigas Sumatera Selatan,
Maret 2025

Golongan Barang (HS 2 Digit)	Nilai CIF (Juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd Total Impor Nonmigas Jan-Mar 2025 (%)
	Maret ^r 2024	Feb 2025	Maret 2025	Jan-Mar 2024	Jan-Mar 2025	m-to-m	y-on-y	c to c	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Mesin dan Peralatan Mekanis dan Bagiannya [84]	129,78	37,10	17,18	446,69	130,80	-53,69	-86,76	-70,72	51,13
2. Kayu dan Barang dari Kayu [44]	0,04	7,37	12,99	0,06	32,00	76,43	33.911,01	50.396,19	12,51
3. Pupuk [31]	3,83	6,12	8,17	14,78	27,34	33,57	113,03	84,96	10,69
4. Mesin dan Perlengkapan Elektris serta Bagiannya [85]	20,89	1,12	0,23	33,18	15,38	-79,50	-98,91	-53,64	6,01
5. Kendaraan, & bagian serta aksesorinya [87]	0,59	0,98	8,48	2,08	10,10	769,47	1.340,73	384,62	3,95
6. Barang dari batu, semen asbes, atau mika [68]	0,88	1,78	1,62	5,94	5,61	-8,94	84,42	-5,63	2,19
7. Karet dan Barang dari Karet [40]	8,47	0,60	1,21	22,18	5,22	101,37	-85,73	-76,48	2,04
8. Kereta Api, Trem dan Bagiannya [86]	3,02	1,80	1,64	7,21	4,59	-8,81	-45,72	-36,43	1,79
9. Plastik dan barang dari plastik [39]	0,76	2,01	0,22	3,86	3,81	-89,26	-71,69	-1,33	1,49
10. Pulp dari kayu [47]	1,51	1,57	1,18	1,62	2,75	-24,43	-21,58	69,22	1,07
Total 10 Golongan Barang	168,26	58,86	51,74	536,00	234,83	-12,10	-69,25	-56,19	88,26
Lainnya	23,44	5,92	6,88	101,19	20,98	16,26	-70,64	-79,27	11,74
Total Impor Non Migas	191,70	64,78	58,62	637,19	255,81	-9,51	-69,42	-59,85	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Total nilai impor dari 12 negara utama pada Maret 2025 mencapai US\$55,36 juta atau turun US\$3,91 juta (6,59 persen) dibandingkan Februari 2025. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan nilai impor yang signifikan dari negara Tiongkok dan Finlandia. Nilai impor dari Tiongkok berkurang hingga US\$13,8 juta sedangkan dari Finlandia berkurang US\$1,58 juta atau tidak ada impor barang apapun dari Finlandia pada Maret 2025.

Fenomena serupa juga terlihat ketika nilai impor dibandingkan dengan tahun 2024. Impor dari 12 negara utama mengalami penurunan pada Maret 2025 jika dibandingkan Maret 2024. Nilai impor dari 12 negara utama berkurang US\$112,52 juta atau sebesar 67 persen.

Dilihat dari peranannya terhadap total impor Januari-Maret 2025, kontribusi tertinggi masih didominasi oleh Tiongkok dengan nilai US\$139,84 juta (54,13 persen); Vietnam sebesar US\$44,08 juta (17,06 persen); dan Finlandia sebanyak US\$18,49 juta (7,16 persen).

Komoditas impor yang dikirim dari Tiongkok yaitu Mesin untuk keperluan khusus dan umum, serta peralatan listrik; kemudian dari Vietnam yaitu kayu olahan, pupuk dan barang dari karet lainnya dan dari Finlandia yaitu Mesin untuk keperluan khusus dan umum, serta generator uap.

Laju Inflasi

Perkembangan harga berbagai komoditas pada April 2025 secara umum y-on-y menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Sumatera Selatan di 4 kabupaten/kota, pada April 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,74 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,39 pada April 2024 menjadi 109,31 pada April 2025. Secara m-to-m perkembangan harga menunjukkan adanya kenaikan indeks dengan tingkat Inflasi m-to-m sebesar 1,39 persen. Sementara secara kumulatif sampai dengan April 2025 tingkat inflasi y-to-d sebesar 2,15 persen.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,60 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,41 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,48 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,81 persen; kelompok transportasi sebesar 1,69 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,98 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,86 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,12 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 16,44 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,24 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,48 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada April 2025, antara lain: emas perhiasan, cabai merah, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, kopi

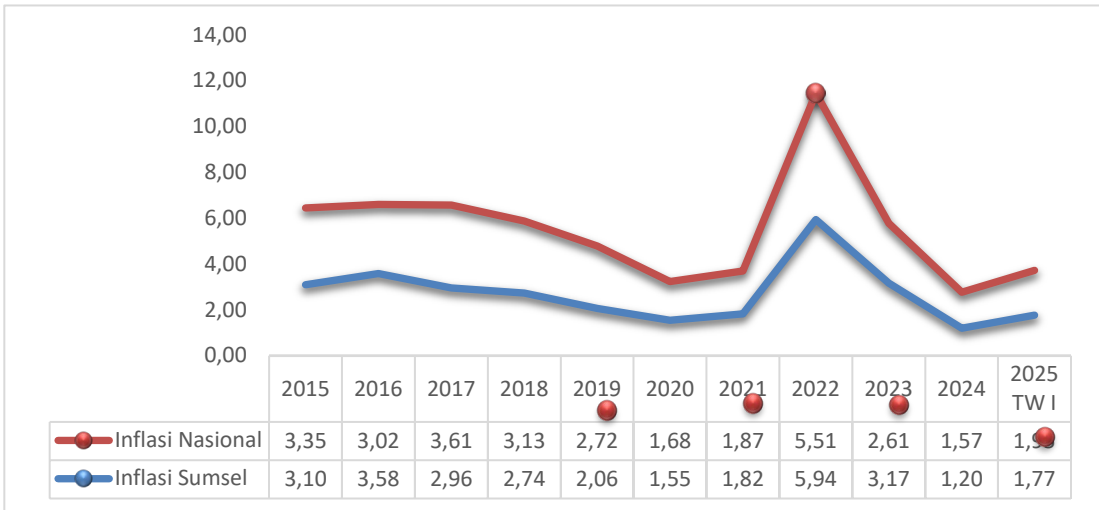
bubuk, sigaret kretek mesin (SKM), mobil dan pemeliharaan/service. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: daging ayam ras, telur ayam ras, udang basah, susu bubuk untuk balita, tomat, bensin, pengharum cucian/pelembut, ikan patin, tarif pulsa ponsel, dan pepaya.

Sementara komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada April 2025, antara lain: tarif listrik, emas perhiasan, tomat, cabai merah, bawang merah, jeruk, bawang putih, ikan patin, ketimun, dan mie kering instant. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, tarif pulsa ponsel, bensin, kentang, bayam, kangkung, wortel, dan ikan gabus.

Pada April 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,80 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,07 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,21 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen; kelompok transportasi sebesar 0,22 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,03 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,10 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,10 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,20 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen.

Tren inflasi Provinsi Sumatera Selatan mayoritas selalu berada di bawah inflasi nasional tetapi di tahun 2022 dan 2023 angka inflasi berada di atas nasional. Puncak inflasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 5,94 persen (yoy). Pada tahun 2016 sampai dengan 2020 inflasi terus mengalami penurunan dari 3,58 persen pada tahun 2016 menjadi 1,82 pada tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup pesat dari tahun 2021 sebesar 1,82 persen hingga mencapai angka 5,94 dan pada tahun 2024 sebesar 1,20 persen. Angka Inflasi Sumatera Selatan berada di bawah angka Inflasi di Nasional.

Gambar 3. 4
Inflasi Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2025 TW I

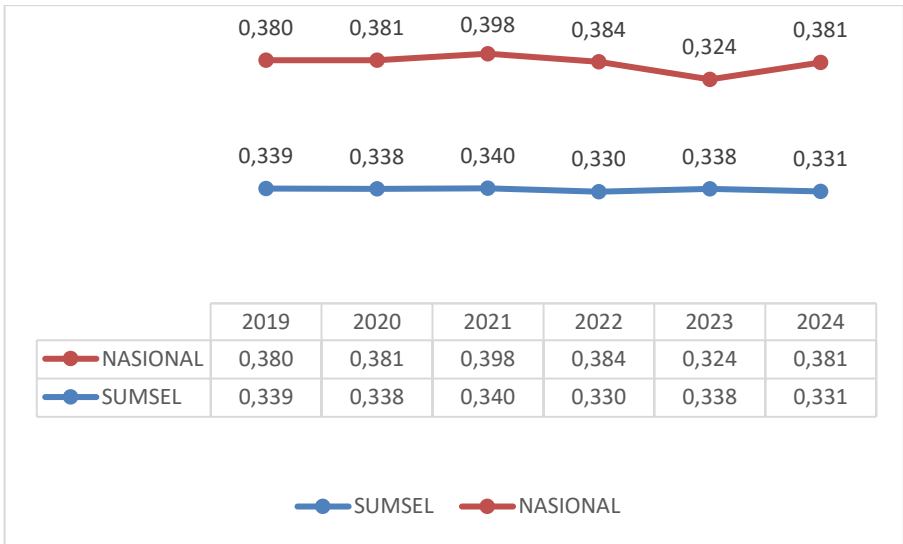


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Gini Ratio

Gini Ratio Sumatera Selatan pada kurun waktu 2019-2024 mengalami fluktuasi dan masih tergolong tinggi, tetapi dalam satu tahun terakhir atau pada periode September 2021-September 2024 angka gini ratio mengalami penurunan menjadi sebesar 0,331.

Gambar 3. 5
Gini Ratio Sumatera Selatan Tahun 2019-2024



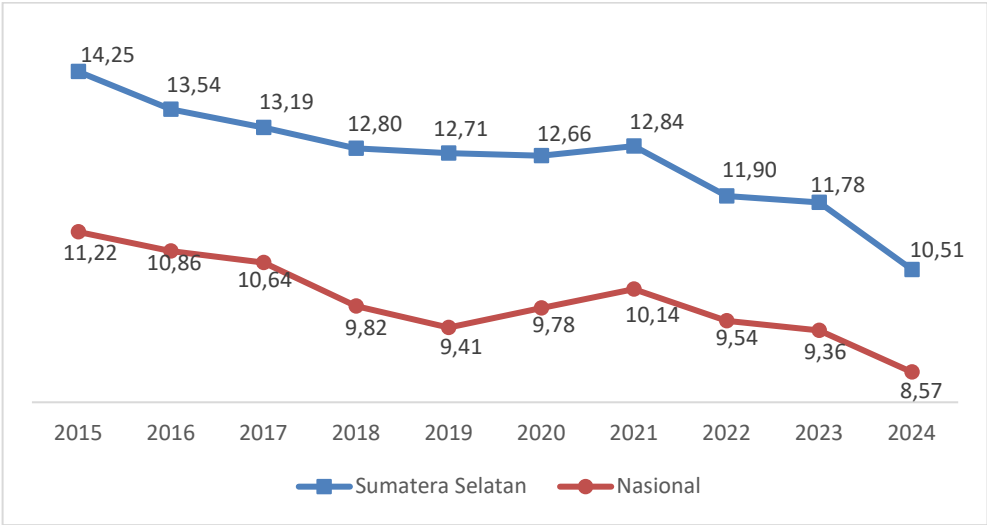
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Gini Ratio Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 0,338 keadaan September 2024 menjadi 0,331 keadaan September 2024 atau turun 0,007 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pengeluaran penduduk di Sumatera Selatan melalui program pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat telah mulai menampakkan hasil walaupun belum sesuai dengan yang diharapkan.

Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan cukup berfluktuatif dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun dari 12,66 persen pada tahun 2020 menjadi 10,51 persen pada tahun 2024. Angka tersebut setara dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 1,081 juta penduduk pada tahun 2020 menjadi 0,948 juta penduduk pada tahun 2024. Meskipun angka kemiskinan menurun, upaya pengentasan kemiskinan masih terus dilakukan agar Provinsi Sumatera Selatan terlepas dari masalah kemiskinan. Dalam target RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026, pada tahun akhir periodesasi RPD persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ditargetkan menurun menjadi satu digit. Sehingga, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus bersinergi untuk menjalankan berbagai program dalam upaya pengentasan kemiskinan agar tercapai target “zero poverty”.

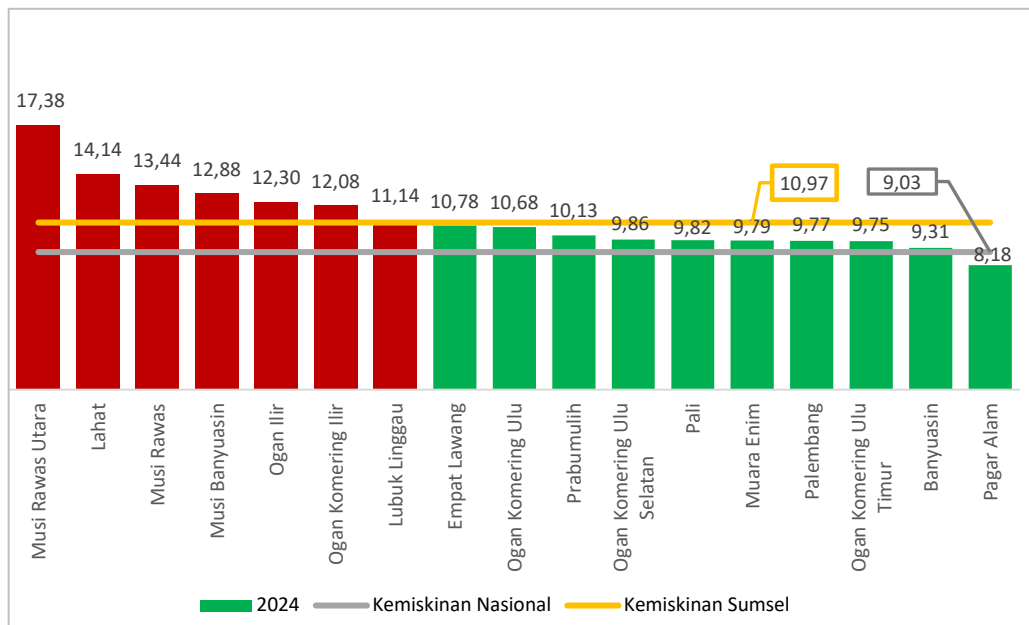
Gambar 3. 6
Perkembangan Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Berdasarkan data BPS, terdapat 7 (tujuh) kabupaten/ kota yang tingkat kemiskinannya dibawah 1 digit pada tahun 2024 yaitu Kabupaten OKU Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir, Muara Enim, Palembang, OKU Timur, Banyuasin dan Pagar Alam. Tingkat kemiskinan kabupaten Musi Rawas Utara menjadi yang tertinggi yaitu 17,38 persen. Sedangkan kabupaten/ kota yang tingkat kemiskinan lebih baik dari capaian Nasional dan Provinsi adalah Kota Pagar Alam yaitu 8,18 persen.

Gambar 3. 7
Perkembangan Tingkat Kemiskinan per- Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 tercatat sebanyak 948,84 ribu jiwa mengalami penurunan sebanyak 61,44 ribu jiwa dibandingkan tahun 2023. Angka ini sudah lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi terjadi pada tahun 2020 yang tercatat sebesar 1.081,58 ribu jiwa. Sedangkan persentase penduduk miskin pada tahun 2024 mengalami penurunan setelah dua tahun sebelumnya mengalami peningkatan akibat pandemi *coronavirus disease* 2019 (covid- 19). Persentase penduduk miskin pada awal *covid-19* pada tahun 2020 sebesar 12,66 persen dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 sebesar 12,84 persen. Tetapi dengan adanya pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan penularan *Covid-19*, memicu perekonomian daerah kembali menggeliat sehingga pada tahun 2022 persentase penduduk miskin menjadi 11,90 persen dan mengalami penurunan kembali sebesar 10,97persen pada tahun 2024.

Tabel 3. 12
Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan
menurut Tempat Tinggal Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2020	387,80	693,78	1.081,58	12,16	12,96	12,66
2021	402,25	711,51	1.113,76	12,36	13,12	12,84
2022	371,50	673,18	1.044,69	11,23	12,31	11,90
2023	371,75	673,93	1.045,68	11,07	12,21	11,78
2024	310,04	638,81	948,84	9,02	11,43	10,51

Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Persentase kemiskinan di perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan perkotaan baik sebelum dan saat terjadinya covid-19. Pada periode satu tahun terakhir persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 1,03 persen poin, begitu pula di perdesaan penduduk miskinnya menurun sebesar 0,68 persen poin. Pada tahun 2020 persentase kemiskinan di perdesaan sebesar 12,96 persen menjadi 11,43 persen pada tahun 2024, sedangkan persentase kemiskinan di perkotaan sebesar 12,16 persen pada tahun 2020 menjadi 9,02 persen pada tahun 2024.

Pemulihan ekonomi dari pandemi covid-19 mampu memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa pandemi covid-19 lebih berpengaruh terhadap aktivitas dan pemulihan ekonomi di perkotaan daripada di perdesaan. Kebijakan pengetatan mobilitas dan kebijakan lainnya yang berkenaan dengan mitigasi penularan covid-19 lebih terasa di perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis daripada di perdesaan.

Upaya penanggulangan kemiskinan secara Nasional sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dengan berbagai pendekatan dan kebijakan. Sebagaimana amanat konstitusi demi terciptanya masyarakat adil dan makmur, program-program pembangunan yang telah terlaksana juga selalu memberikan perhatian besar dalam pengentasan kemiskinan. Sejalan dengan itu, pembangunan yang terjadi di Provinsi Sumatera

Selatan pun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

Distribusi penduduk miskin menurut kabupaten/kota tidak kalah penting untuk ditelaah. Hal tersebut sangat krusial untuk melihat bagaimana sebaran penduduk miskin serta ketimpangan kemiskinan antar kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin terbesar di Kota Palembang dengan jumlah mencapai 173,59 ribu jiwa. Angka tersebut menurun sebesar 5,86 ribu dibanding tahun 2023. Persoalan kemiskinan di Kota Palembang memang terbilang lebih kompleks karena sebagai ibukota provinsi, tentu kota ini menjadi daerah tujuan migrasi dari berbagai kabupaten/ kota di Sumatera Selatan bahkan dari luar Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3. 13
Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024

Kabupaten/Kota 17	Jumlah Penduduk Miskin Maret Menurut Kab/Kota (RibU Jiwa)		Persentase Penduduk Miskin Maret Menurut Kab/Kota (RibU Jiwa)	
	2023	2024	2023	2024
Ogan Komering Ulu	44,11	41,54	11,46	10,68
Ogan Komering Ilir	114,48	106,37	13,15	12,08
Muara Enim	73,24	66,42	10,93	9,79
Lahat	63,36	60,19	15,00	14,14
Musi Rawas	59,75	57,44	14,13	13,44
Musi Banyuasin	101,63	88,94	14,90	12,88
Banyuasin	85,88	84,36	9,58	9,31
Ogan Komering Ulu Selatan	39,3	37,81	10,36	9,86
Ogan Komering Ulu Timur	69,91	68,74	9,99	9,75
Ogan Ilir	59,33	55,49	13,28	12,30
Empat Lawang	30,78	28,42	11,80	10,78
Pali	21,72	19,79	10,91	9,82
Musi Rawas Utara	36,68	35,49	18,26	17,38
Palembang	179,45	173,59	10,22	9,77
Prabumulih	22,33	20,41	11,23	10,13
Pagar Alam	12,73	11,82	8,88	8,18
Lubuk Linggau	31,02	27,65	12,65	11,14
Sumatera Selatan	1.045,68	984,24	11,78	10,97
Nasional	25.898,55	25.219,20	9,36	9,03

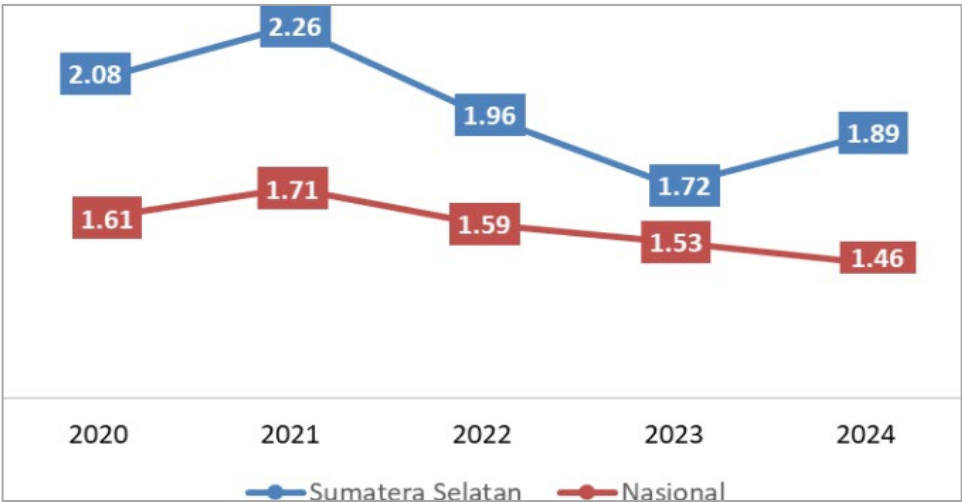
Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Selanjutnya ditinjau dari signifikansi penurunan persentase penduduk miskin antar kabupaten/ kota tidaklah sama. Hal tersebut menjadi suatu gambaran bahwa ada ketidakmerataan kebijakan pengentasan kemiskinan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan hendaknya ditempuh melalui perbaikan ketiga komponen secara tersinergi yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Persoalan kemiskinan tidak hanya seputar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Secara umum, indeks P1 pada periode 2020- 2024 berfluktuasi. Indeks P1 mengalami penurunan dari sebesar 2,08 di tahun 2020 menjadi 1,89 di tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan P1 di tahun 2024, namun tren indeks P1 pasca adanya pandemi Covid-19 cenderung membaik. Penurunan nilai indeks P1 ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk miskin sudah mulai membaik pasca terjadi pandemi yang melanda Indonesia dan dunia.

Gambar 3. 8
Tren Perkembangan Indeks Kedalaman (P1)
Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

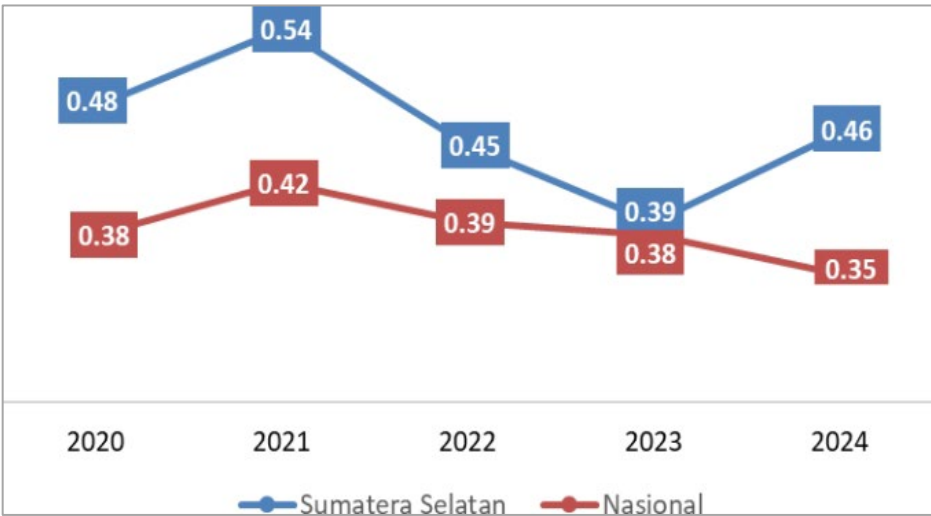


Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Demikian pula dengan indeks keparahan (P2) yang turut menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu dari 0,48 menjadi 0,46 di tahun 2024. Sama hal nya dengan indeks P1, meskipun indeks P2 Provinsi Sumatera Selatan juga menunjukkan peningkatan di tahun 2024 ini, namun sudah menunjukkan perbaikan dibandingkan pada saat adanya pandemi. Penurunan indeks keparahan kemiskinan

mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin semakin menurun. Fenomena itu dapat mengindikasikan bahwa intervensi program pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan cukup dinikmati secara merata di antara penduduk miskin sehingga ketimpangan pendapatan/pengeluaran di antara mereka semakin mendekat. Namun memang masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengingat penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan yang relatif lambat turun.

Gambar 3. 9
Tren Perkembangan Indeks Keparahan (P2)
Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik RI

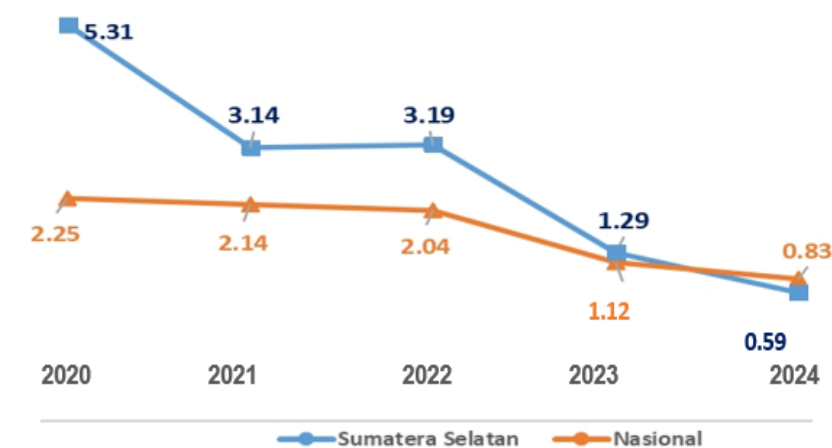
Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Keadaan maret 2024, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,69 sedangkan di daerah perdesaan sebesar 2,02. Sementara itu nilai indeks keparahan kemiskinan (P2) untuk perkotaan sebesar 0,39 sedangkan di daerah perdesaan sebesar 0,49. Fenomena ini mengindikasikan bahwa rata- rata pengeluaran penduduk miskin terhadap GK di perkotaan relatif lebih jauh dibandingkan daerah perdesaan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perdesaan. Dengan demikian dibutuhkan intervensi program pengentasan kemiskinan yang

lebih intensif di daerah perkotaan khususnya dalam menjaga daya beli penduduk miskin.

Peningkatan nilai P1 dan P2 tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan menggambarkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga cenderung meningkat. Fenomena ini mengungkapkan bahwa meskipun secara persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan namun jika kita melihat lebih detil bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat miskin di dalamnya masih perlu perbaikan.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu : kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.

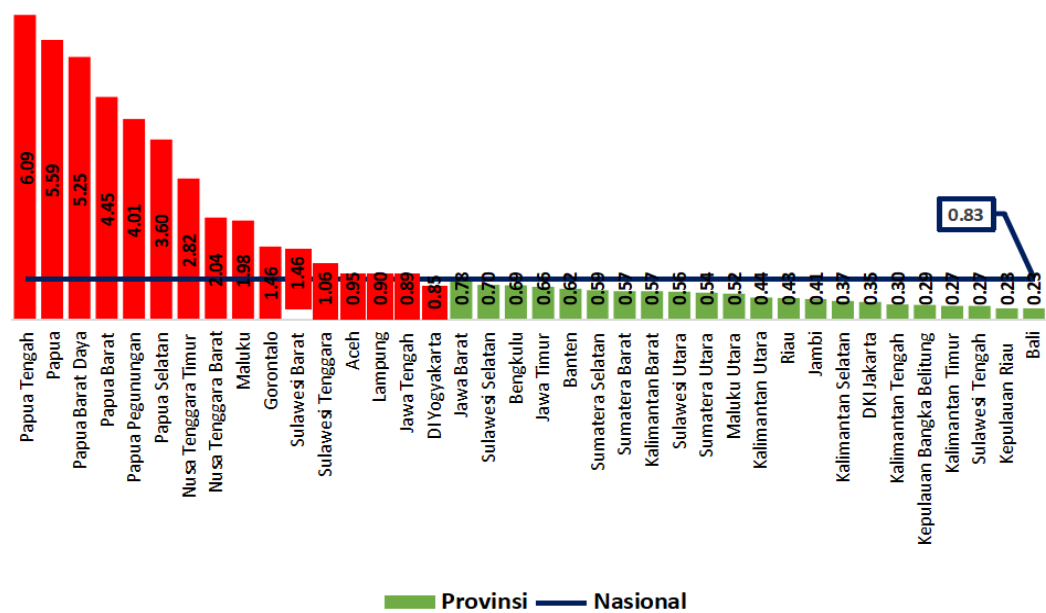
Gambar 3. 10
Tren Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem
Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Untuk mengetahui jumlah dan angka miskin ekstrem setiap tahunnya digunakan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Tingkat kemiskinan ekstrem Nasional terus mengalami penurunan yang cukup baik yaitu dari tahun 2020 sebesar 2,25 persen menjadi 0,83 persen pada tahun 2024. Sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem per Provinsi juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Untuk Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan cukup besar yaitu 4,72 persen poin dari tahun 2020 sebesar 5,31 persen menjadi 0,59 persen pada tahun 2024. Dengan demikian, tingkat kemiskinan ekstrem baik Nasional maupun Provinsi Sumatera Selatan sudah dibawah satu persen dan telah sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen di Indonesia pada tahun 2024.

Gambar 3. 11
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Per Provinsi di Indonesia Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Jika dibandingkan dengan provinsi penurunan kemiskinan ekstrem tercepat perpulau di Indonesia pada tahun 2023 sampai tahun 2024 yaitu di kawasan Pulau Sumatera adalah Provinsi Sumatera Selatan (0,70 persen poin), di kawasan Pulau Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Selatan (0,10 persen poin), di kawasan Pulau Jawa adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,39 persen poin), di kawasan Pulau Sulawesi adalah Provinsi Sulawesi Tengah (1,17 persen poin), di kawasan Pulau

Maluku dan Papua adalah Provinsi Papua (2,08 persen poin), dan di kawasan Pulau Bali dan Nusa Tenggara adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (1,11 persen poin).

Tabel 3. 14
Tren Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Ekstrem Per Provinsi Tahun 2023 – 2024

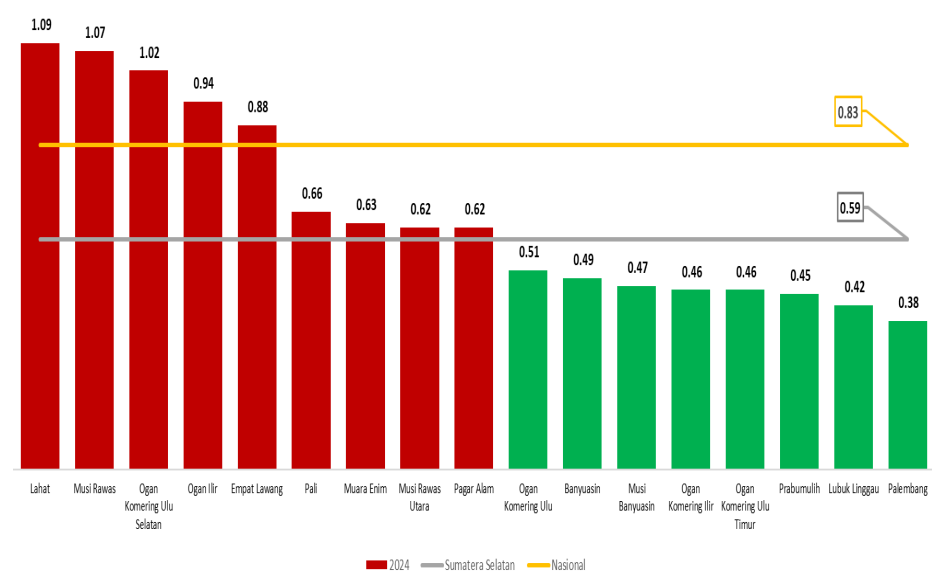
Provinsi	Maret 2023	Maret 2024	Provinsi	Maret 2023	Maret 2024
Papua Tengah		6,09	Sumatera Selatan	1,29	0,59
Papua	7,67	5,59	Sumatera Barat	0,41	0,57
Papua Barat Daya		5,25	Kalimantan Barat	0,99	0,57
Papua Barat	6,43	4,45	Sulawesi Utara	0,78	0,56
Papua Pegunungan		4,01	Sumatera Utara	0,78	0,54
Papua Selatan		3,60	Maluku Utara	0,67	0,52
Nusa Tenggara Timur	3,93	2,82	Kalimantan Utara	0,34	0,44
Nusa Tenggara Barat	2,64	2,04	Riau	0,67	0,43
Maluku	2,59	1,98	Jambi	0,81	0,41
Gorontalo	2,44	1,46	Kalimantan Selatan	0,47	0,37
Sulawesi Barat	0,75	1,46	DKI Jakarta	0,57	0,35
Sulawesi Tenggara	1,65	1,06	Kalimantan Tengah	0,35	0,30
Aceh	1,83	0,95	Kepulauan Bangka Belitung	0,24	0,29
Lampung	1,32	0,90	Kalimantan Timur	0,10	0,27
Jawa Tengah	1,11	0,89	Sulawesi Tengah	1,44	0,27
DI Yogyakarta	1,24	0,85	Kepulauan Riau	0,35	0,23
Jawa Barat	0,79	0,78	Bali	0,19	0,23
Sulawesi Selatan	1,01	0,70	Indonesia	0,83	0,83
Bengkulu	2,08	0,69			
Jawa Timur	0,82	0,66			
Banten	1,12	0,62			

Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Provinsi Sumatera Selatan masuk kedalam 26 (dua puluh enam) Provinsi yang tingkat kemiskinan ekstrem di bawah satu persen atau sekitar 68,42 persen dari total Provinsi di Indonesia dan 12 (dua belas) Provinsi yang berada diatas 1 persen kemiskinan ekstrem atau sekitar 31,58 persen total Provinsi di Indonesia.

Pada tahun 2024 hampir semua kabupaten/ kota yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dari tahun 2023 kecuali Kabupaten OKU Selatan, Penukal Abab Lematang Ilir, OKU Timur, Prabumulih, yang mengalami peningkatan tingkat kemiskinan ekstrem. Ada 9 kabupaten/ kota yang berada di atas capaian Nasional dan Provinsi yaitu Kabupaten Lahat, Musi Rawas, OKU Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir, Muara Enim, Musi Rawas Utara dan Pagar Alam. Sedangkan 8 Kabupaten/Kota lainnya, tingkat kemiskinan ekstremnya sudah berada di bawah capaian Nasional dan Provinsi yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, Kota Prabumulih, Lubuk Linggau dan Palembang.

Gambar 3. 12
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Ekstrem per- Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

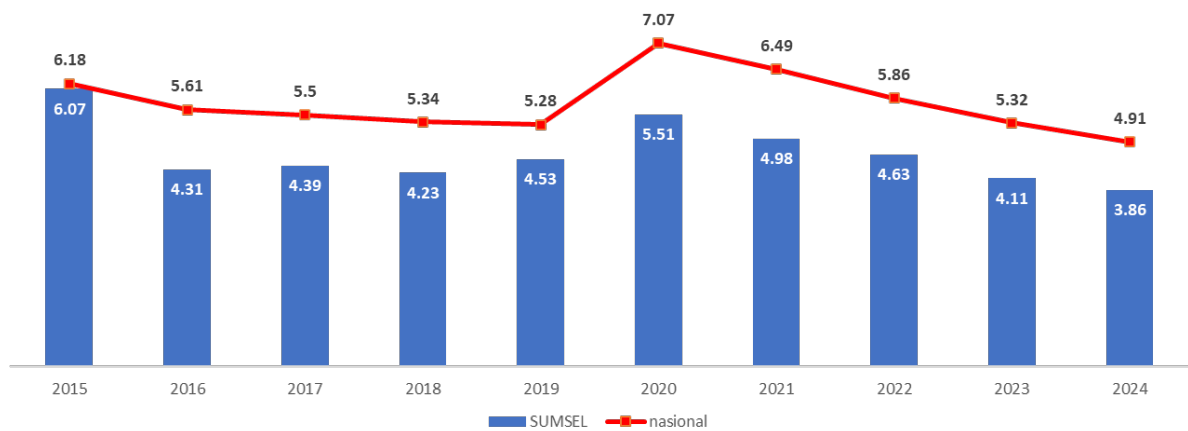


Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara keseluruhan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Selatan bila dilihat dari tahun 2010 hingga tahun 2024 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, angka pengangguran di Sumsel mencapai 4,53 persen, berkurang sebesar 2,17 persen dibandingkan angka pengangguran di tahun 2010. Namun di tahun 2020, tingkat pengangguran meningkat menjadi 5,51% sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Di tahun 2021, Sumsel berhasil menurunkan angka TPT menjadi 4,98%. Angka TPT berhasil diturunkan kembali menjadi 4,63 % di tahun 2022 serta 4,11% di tahun 2023 dan 3,86 di tahun 2024. Hal tersebut seiring dengan capaian TPT nasional di tahun 2023 dan 2024 yang juga mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 2011-2024 capaian TPT Sumsel lebih rendah dibandingkan capaian TPT nasional.

Gambar 3. 13
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Selatan
Tahun 2015-2024



Sumber: BPS, 2024

Secara absolut jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2024 sebanyak 179,71 ribu orang atau berkurang sebanyak 8,80 ribu orang dari Agustus 2023 sebesar 188,51 ribu orang.

7.2. Kondisi Angkatan Kerja

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri atas 4,48 ribu orang penduduk yang bekerja dan 179,71 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 71,64 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 80,44 ribu orang sedangkan pengangguran juga mengalami penurunan sebanyak 8,80 ribu orang. Sementara itu apabila dibandingkan kondisi Agustus 2022, jumlah angkatan kerja meningkat sebesar 161,85 ribu orang. Penduduk bekerja bertambah sebesar 190,4 ribu orang dan pengangguran berkurang sebesar 28,55 ribu orang.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 mengalami peningkatan sebanyak 71,64 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2023. Seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat menjadi 70,82 persen pada Agustus 2024 dibandingkan Agustus 2023 (70,72 persen). Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggur.

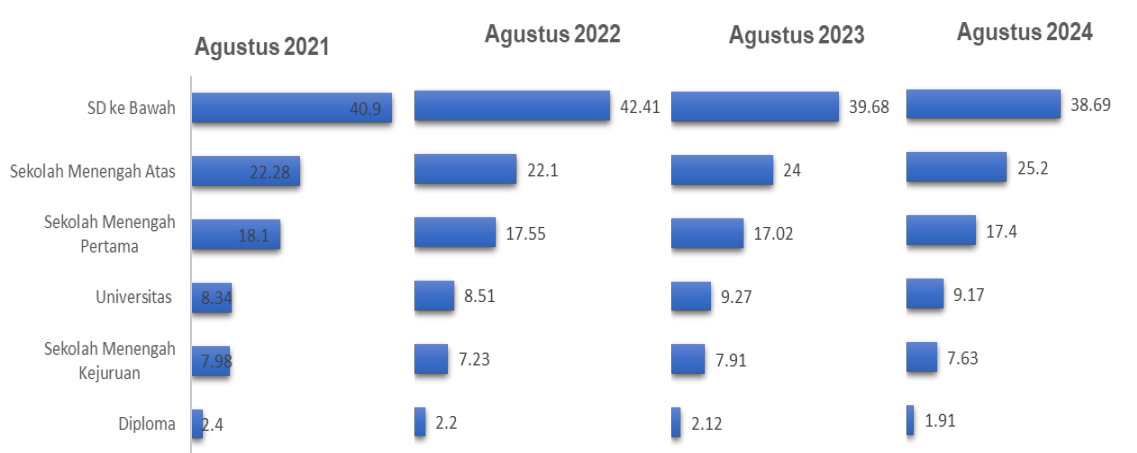
Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 85,79 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 55,35 persen. Apabila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2023, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,40 persen poin sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 0,19 persen poin.

7.3. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 38,69 persen. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 11,08 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022 dan Agustus 2023.

Dibandingkan dengan Agustus 2023, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma I/II/III, dan Diploma IV, S1, S2, S3 mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,99 persen poin, 0,28 persen poin, 0,21 dan 0,10 persen poin. Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (1,20 persen poin).

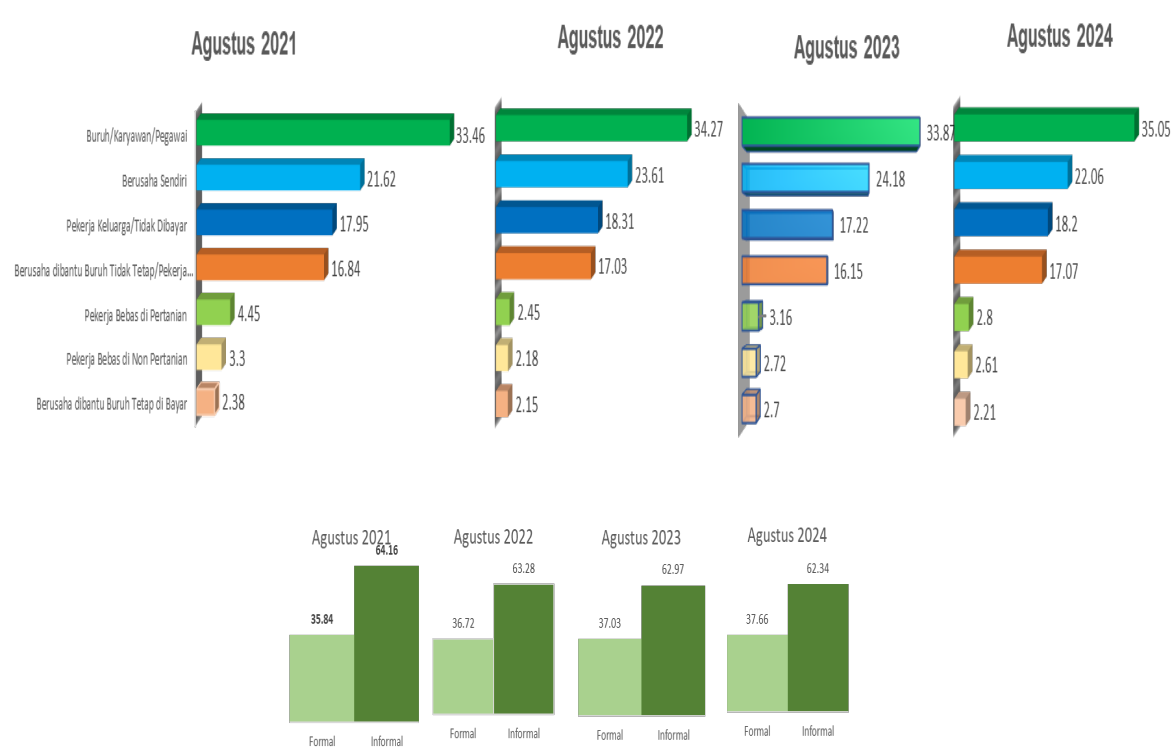
Gambar 3. 14
Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: BPS Sumsel, 2024

Selain itu kurangnya keterampilan pencari kerja juga menyebabkan persentase penduduk yang bekerja di sektor informal lebih tinggi dibandingkan penduduk yang bekerja di sektor formal. Berdasarkan status pekerjaan utamanya tersebut, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/ pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Gambar 3. 15
Persentase Penduduk Bekerja di Sektor Formal dan Informal
Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: BPS Sumsel, 2024

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 2,79 juta orang (62,34 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,69 juta orang (37,66 persen). Dibandingkan Agustus 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 0,63 persen.

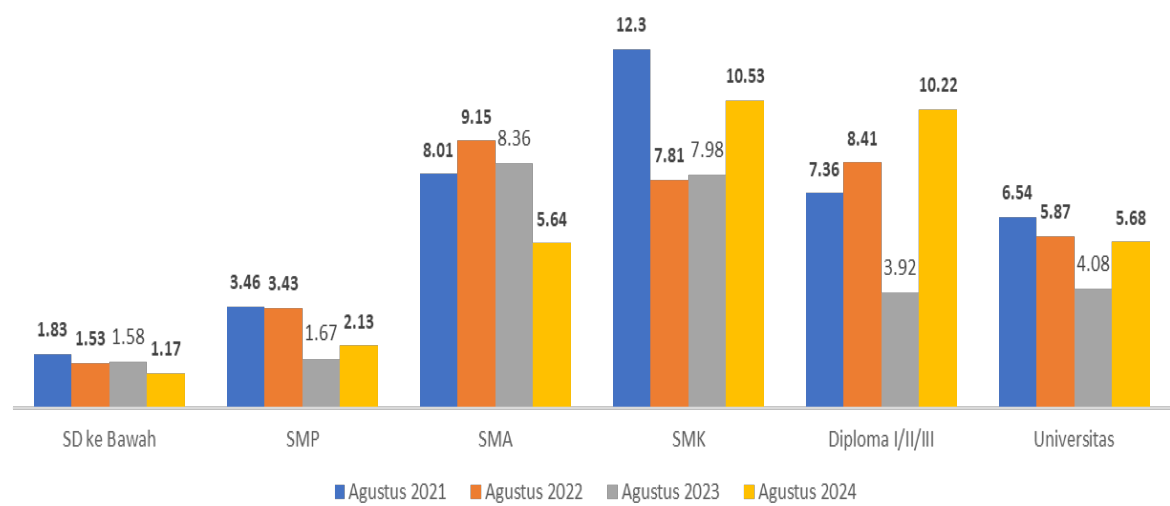
7.4. *Tingginya Jumlah Pengangguran Terdidik*

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, pengangguran di Sumatera Selatan didominasi oleh pengangguran terdidik terutama di daerah perkotaan. TPT menurut kategori pendidikan mempunyai pola yang hampir sama dari Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2024, Pada Agustus 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, kecuali tahun 2022. TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan pada Agustus 2024 yaitu sebesar 10,53 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 1,17 persen.

Dibandingkan Agustus 2023, penurunan TPT terjadi hanya pada tingkat pendidikan SD ke bawah dan Sekolah Menengah Atas. Penurunan terbesar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu sebesar 2,72 persen poin. Sementara itu, lulusan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 mengalami kenaikan TPT. Kenaikan terbesar pada jenjang pendidikan Diploma I/II/III yaitu sebesar 6,30.

Beberapa penyebab yang mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran terdidik adalah terbatasnya lapangan kerja yang tidak diminati oleh tenaga kerja terdidik. Dengan pendidikan yang relatif tinggi menyebabkan para pencari kerja merasa enggan untuk bekerja di kegiatan ekonomi informal. Pilihan utama biasanya adalah bekerja di sektor formal atau sektor ekonomi produktif. Padahal lapangan kerja di sektor tersebut sangat terbatas sehingga mereka terpaksa menganggur. Tingginya angka pengangguran terdidik lebih disebabkan faktor eksternal pendidikan misalnya budaya priyayi, atau pola pikir masyarakat yang menganggap pekerjaan formal lebih bonafit dibandingkan pekerjaan informal.

Gambar 3. 16
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan



Sumber: BPS Sumsel 2024

Dalam mengatasi fenomena tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk menurunkan angka pengangguran terdidik, antara lain melalui pengembangan informasi pasar kerja dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. Dalam penyebarluasan informasi bursa kerja, pemerintah daerah membangun sistem informasi pasar kerja karena dilatarbelakangi oleh minimnya akses informasi lowongan kerja bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja tersebut belum mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya penyebarluasan informasi bursa kerja tersebut diharapkan para pencari kerja mendapatkan akses lowongan kerja dengan cepat. Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja juga telah melaksanakan pelatihan-pelatihan kerja bagi para pencari kerja. Kedepan, Balai Latihan Kerja harus diperkuat peran dan fungsinya agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, bukan hanya mampu menciptakan tenaga kerja yang handal, tetapi juga fokus sesuai dengan kebutuhan pasar.

3.1.2.2. Proyeksi Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2025

A. Kondisi Perekonomian Sumsel TW-1 Tahun 2025

Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Sumatera Selatan triwulan I-2025 tumbuh sebesar 5,22 persen (*y-o-y*). Struktur PDRB Sumatera Selatan menurut lapangan

usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 Struktur PDRB Sumatera Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 23,34 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 18,52 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,24 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatera Selatan mencapai 56,10%.

Tabel 3. 15
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 TW I dan 2025 TW I (y-on-y)

Lapangan Usaha		2024	2024		Triw I-2025
			Triw I	Triw IV	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,56	13,80	12,59	14,24
B.	Pertambangan dan Penggalian	24,60	23,33	24,69	23,34
C.	Industri Pengolahan	18,27	18,89	18,35	18,52
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,13	0,13	0,13
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,09
F.	Konstruksi	10,80	11,20	10,92	10,74
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,85	13,94	14,20	14,22
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,50	2,46	2,53	2,51
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,01	1,96	2,11	2,01
J.	Informasi dan Komunikasi	3,00	3,06	3,04	3,07
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,13	2,23	2,02	2,14
L.	Real Estat	2,94	3,00	3,00	3,00
M,N.	Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,12	0,11
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,51	2,36	2,51	2,44
P.	Jasa Pendidikan	2,15	2,09	2,34	2,12
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,63	0,62	0,67	0,62
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	0,70	0,72	0,71	0,70
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Sumsel, 2025

Pertumbuhan Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,37 persen; diikuti Jasa Keuangan sebesar 5,84 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 2,13 persen. Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 0,26 persen. Sementara itu, Lapangan usaha yang mengalami kontraksi tertinggi adalah Jasa Pendidikan sebesar 8,23 persen; diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial sebesar 7,17 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,18 persen.

Tabel 3. 16
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut
Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2024 dan 2025 TW I (Persen)

Lapangan Usaha		Triw IV-2024 Terhadap Triw III-2024 (Q-to-Q)	Triw I-2025 Terhadap Triw IV-2024 (Q-to-Q)	Triw IV- 2024Terhadap Triw IV-2023 (Y-on-Y)	Triw I-2025 Terhadap Triw I-2024 (Y-on-Y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2025 (Y-on-Y)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-12,54	12,37	2,39	5,17	0,84
B.	Pertambangan dan Penggalian	-5,15	-6,18	4,71	4,07	0,88
C.	Industri Pengolahan	1,36	0,26	3,91	3,49	0,65
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,64	0,23	7,94	11,39	0,01
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,86	-3,73	3,27	-0,06	~0
F.	Konstruksi	2,97	-1,03	4,04	2,92	0,32
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,18	0,36	7,88	8,32	0,98
H.	Transportasi dan Pergudangan	1,85	0,09	3,27	6,65	0,13
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,54	-4,61	9,05	8,71	0,14
J.	Informasi dan Komunikasi	2,98	2,13	9,17	8,85	0,38
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	-7,61	5,84	0,12	2,26	0,05
L.	Real Estat	3,32	0,61	8,91	7,31	0,25
M,N.	Jasa Perusahaan	3,69	-2,20	6,23	4,96	0,01
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,34	-2,11	8,83	10,84	0,32
P.	Jasa Pendidikan	9,98	-8,23	9,43	7,90	0,19
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,52	-7,17	13,62	5,66	0,04
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	1,35	-0,02	-0,05	3,90	0,03
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		-1,85	0,16	5,07	5,22	5,22

Sumber: BPS Sumsel, 2025

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,22 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 17,78 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,91 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,90 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,21 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,21

persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB juga tumbuh sebesar 14,40 persen.

Tabel 3. 17
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut
Pengeluaran Tahun 2025 TW1 (Persen)

Komponen	2024	2024		Triw I-2025
		Triw I	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	61,75	62,92	62,10	63,20
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,61	1,70	1,56	1,63
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,17	4,66	8,15	4,83
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,01	31,78	31,97	30,34
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	24,26	22,96	26,46	24,45
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	24,80	24,03	30,23	24,45
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Sumsel, 2025

Inflasi

Inflasi di Sumatera Selatan pada April 2025 secara umum y-on-y menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Sumatera Selatan di 4 kabupaten/kota, pada April 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,74 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,39 pada April 2024 menjadi 109,31 pada April 2025. Secara m-to-m perkembangan harga menunjukkan adanya kenaikan indeks dengan tingkat inflasi m-to-m sebesar 1,39 persen. Sementara secara kumulatif sampai dengan April 2025 tingkat inflasi y-to-d sebesar 2,15 persen.

Gambar 3. 17
Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Sumatera Selatan
Bulan Januari 2024 – April 2025 (Persen)



Sumber: BPS Sumsel, 2025

Kemiskinan

Penduduk miskin maret 2024 turun jika dibandingkan dengan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin provinsi Sumatera Selatan Maret 2024 mencapai 984,24 ribu orang atau turun 61,4 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2023 yang berjumlah 1.045,68 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 10,97 persen, mengalami penurunan 0,81 persen poin terhadap Maret 2023.

Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, periode Maret 2023 Maret 2024, jumlah penduduk miskin di perkotaan menurun sebesar 29,4 ribu orang dari 371,75 ribu orang Maret 2023 menjadi 342,34 ribu orang Maret 2024. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 menurun sebesar 1,03 persen dari semula 11,07 persen pada Maret 2023 menjadi 10,04 persen pada Maret 2024.

Penduduk miskin di perdesaan Maret 2024 menurun sebanyak 32 ribu orang dibandingkan Maret 2023 dari 673,93 ribu orang menjadi 641,90 ribu orang. Persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 menurun sebesar 0,68 persen poin dari semula 12,21 persen menjadi 11,53 persen pada Maret 2024.

Tabel 3. 18
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2023-Maret 2024 (TW1)

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2023	371,75	11,07
Maret 2024	342,34	10,04
Perdesaan		
Maret 2023	673,93	12,21
Maret 2024	641,90	11,53
Total		
Maret 2023	1.045,68	11,78
Maret 2024	984,24	10,97

Sumber: BPS Sumsel, 2024

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2023 - Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) sama-sama mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 1,888, naik 0,164 poin dari Maret 2023. Indeks Keparahahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami peningkatan dari 0,393 menjadi 0,457 (naik 0,064 poin).

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) pada Maret 2024 untuk perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,688, sedangkan di perdesaan lebih tinggi yaitu mencapai 2,011. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,390, sedangkan di perdesaan nilai Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,499.

Tabel 3. 19
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sumatera Selatan, Maret 2023-Maret 2024 (TW1)

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)			
Maret 2023	1,784	1,688	1,724
Maret 2024	1,688	2,011	1,888
Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)			
Maret 2023	0,433	0,369	0,393
Maret 2024	0,390	0,499	0,457

Sumber: BPS Sumsel, 2024

Prospek Pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2025 diproyeksikan berada pada kisaran 4,8-5,6% (yoy), mencerminkan resiliensi ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dengan sinergi, inovasi, dan optimisme yang terjaga, potensi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tetap besar untuk terus dimanfaatkan.

Untuk memperkuat ketahanan dan mengoptimalkan potensi ekonomi Sumatera Selatan ke depan, diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, mengakselerasi investasi, mendorong digitalisasi, serta hilirisasi komoditas unggulan Sumatera Selatan.

Konsumsi pemerintah di Sumatera Selatan pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh terbatas dibanding tahun sebelumnya. Terbatasnya pertumbuhan konsumsi pemerintah di Sumatera Selatan pada tahun 2025 disebabkan oleh terbatasnya kapasitas fiskal Pemerintah Daerah se-Sumatera Selatan tahun 2025 seiring dengan dikeluarkannya kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, ketergantungan Pemerintah Daerah se-Sumatera Selatan pada komponen Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam belanja daerah menyebabkan adanya ketergantungan kepada pemerintah pusat. Namun demikian, berbagai upaya untuk optimalisasi

PAD seperti pemberian insentif keringanan pajak kendaraan bermotor (bebas denda), optimalisasi aset pemerintah daerah, memperkuat dukungan teknologi untuk penagihan dan pembayaran pajak, serta intensifikasi penagihan langsung ke lapangan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian Pemerintah Daerah se-Sumatera Selatan. Selanjutnya, berbagai program swasembada dan ketahanan pangan serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di Sumatera Selatan diperkirakan dapat mendorong kinerja konsumsi pemerintah di Sumatera Selatan.

Pemulihan ekonomi Sumatera Selatan diperkirakan juga disumbang oleh kinerja investasi yang tumbuh signifikan dibandingkan dengan tahun 2024. Akselerasi investasi didorong oleh berlanjutnya proyek infrastruktur nasional dan daerah antara lain Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), peningkatan kapasitas operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel 8 di Muara Enim, berlanjutnya penyelesaian pembangunan pabrik kertas OKI Pulp and Paper; serta rencana penyelesaian target Proyek Strategis Nasional Berupa bendungan dan daerah irigasi di Sumatera Selatan. Kemudian, pembangunan pabrik pengolahan kelapa terpadu hasil kerja sama dengan Jepang yang akan dimulai pada tahun 2025 dapat mendorong kinerja investasi Sumatera Selatan pada 2025.

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2025 ditopang oleh kinerja beberapa LU utama yang tetap tumbuh kuat seperti LU pertanian, LU industri pengolahan, serta LU konstruksi. Peningkatan kinerja LU Pertanian diperkirakan sejalan dengan cuaca yang lebih kondusif, sehingga mendorong produktivitas pertanian yang didukung oleh bendungan dan jalur irigasi yang ditargetkan telah selesai pada tahun 2025. Hal tersebut didukung juga pelaksanaan program cetak sawah dan padi gogo di Sumatera Selatan. Selain itu, input cost pertanian yang semakin efisien dan berlanjutnya bantuan Gernas Tanam Padi, salah satunya melalui perluasan lahan tanam. Kinerja LU pertanian tahun 2025 juga ditopang oleh kinerja sub-sektor perkebunan terutama kelapa sawit seiring dengan kebutuhan kelapa sawit untuk kebutuhan domestik seperti adanya program biodiesel (B40 dan B50).

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang tetap tumbuh positif juga ditopang oleh kinerja LU industri pengolahan. Pada tahun 2025, kinerja industri pengolahan diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya seiring dengan peningkatan permintaan domestik. Selain itu, berlanjutnya pembangunan pabrik tisu di Kab. OKI juga turut meningkatkan kinerja LU ini pada tahun 2025. Di samping itu, prospek LU ini pada tahun 2025 juga didukung oleh peningkatan permintaan dari industri pangan (minyak goreng) dan penguatan program energi terbarukan yang didukung stok bahan baku yang tinggi (CPO). Selanjutnya, rencana percepatan peningkatan produksi migas domestik seiring dengan pembukaan 85 sumur baru turut meningkatkan kinerja Sub LU industri pengilangan migas pada keseluruhan tahun 2025.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi pada 2025 juga sejalan dengan penyelesaian target PSN yang mendorong kinerja LU Kontruksi. Hal tersebut sejalan dengan berlanjutnya berbagai PSN di Sumatera Selatan yang bersifat multiyears. Selain itu, pembangunan pabrik pengolahan kelapa terpadu hasil yang baru akan dimulai pada tahun 2025 diharapkan dapat mendorong kinerja LU Konstruksi Sumatera Selatan pada 2025.

Sementara itu, kinerja LU pertambangan Sumatera Selatan yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB diperkirakan mengalami perlambatan pada tahun 2025. Hal ini terutama disebabkan oleh normalisasi harga batu bara yang diperkirakan terjadi pada 2025 setelah mencapai puncaknya pada tahun 2024. Namun demikian, terdapat optimisme peningkatan produksi batu bara pada tahun 2025 seiring dengan pembukaan hauling road khusus batu bara dan peningkatan kapasitas angkutan kereta api batu bara.

Proyeksi pertumbuhan PDRB tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 20

Proyeksi Pertumbuhan Sektor PDRB ADHK Sisi Lapangan Usaha

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Lapangan Usaha	Distribusi Sektoral								Proyeksi*	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,13	16,7	15,8	14,84	14,48	15,17	14,71	13,23	13,14	14,67
B. Pertambangan dan Penggalian	21,81	19,71	19,24	20,17	20,33	18,32	21,03	27,64	27,43	24,97
C. Industri Pengolahan	18,36	18,94	19,56	19,51	19,37	19,73	19,08	17,5	17,74	19,68
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,12	0,13	0,13	0,13	0,15	0,15	0,13	0,15	0,16
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12	0,1	0,12	0,12
F. Konstruksi	12,58	13,1	13,24	12,99	12,55	12,53	11,92	10,64	10,26	9,40
Mobil dan Sepeda Motor	10,58	11,68	12,43	12,95	13,54	13,71	13,47	12,95	13,27	13,43
H. Transportasi dan Pergudangan	2,08	2,21	2,31	2,37	2,48	2,35	2,13	2,21	2,31	2,32
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,41	1,56	1,64	1,76	1,97	1,87	1,81	1,77	1,87	1,93
J. Informasi dan Komunikasi	2,5	2,66	2,78	2,85	2,91	3,29	3,21	2,9	3,27	3,35
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,56	2,66	2,63	2,54	2,36	2,39	2,38	2,08	2,05	2,18
L. Real Estat	2,81	1,99	3,03	3,08	3,19	3,34	3,24	2,9	2,72	2,47
M,N. Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,12	0,13	0,14	0,14	0,13	0,11	0,12	0,23
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,78	3,46	3,16	2,85	2,67	2,9	2,77	2,46	2,28	2,11
P. Jasa Pendidikan	2,7	2,62	2,47	2,36	2,35	2,4	2,37	2,07	2,02	2,04
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,26	0,61	0,62	0,59	0,62	0,72	0,7	0,62	0,77	0,71
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,76	0,74	0,73	0,76	0,79	0,86	0,8	0,7	0,78	0,79
Produk Domestik Regional Bruto	99,63	98,99	100,01	100	100	100	100,02	100,01	100,31	100,55

Sumber: FGD Proyeksi Ekonomi Makro Sumsel (BAPPEDA, BPS, BI DAN AKADEMISI), 2023

Prospek Inflasi Keseluruhan Tahun 2025

Inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 akan tetap terkendali pada rentang target sasaran inflasi nasional yang sebesar 2,5±1%. Terjaganya inflasi pada tahun ini didukung oleh upaya penguatan swasembada pangan untuk mendorong ketahanan pasokan dan distribusi pangan, penguatan nilai tukar Rupiah, serta ekspektasi inflasi yang terjaga.

Di tengah optimisme terhadap perbaikan ekonomi dan inflasi yang stabil, perlu dicermati beberapa risiko tekanan inflasi pada tahun 2025, mulai dari kelompok inflasi inti, pangan bergejolak, maupun tarif yang diatur pemerintah. Dari sisi inflasi inti, kebijakan proteksionis di berbagai negara menjadi salah satu faktor pendorong inflasi yang bersumber dari eksternal, meskipun dampaknya relatif terjaga. Di samping itu, ketidakpastian ekonomi global juga berdampak pada volatilitas harga emas global yang mempengaruhi harga emas perhiasan di daerah. Selain itu, tekanan inflasi inti dari domestik juga didorong oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang naik cukup tinggi, yakni 6,5 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat hingga penyesuaian harga-harga kebutuhan pokok seiring meningkatnya biaya upah bagi produsen.

Inflasi pada kelompok tarif yang diatur pemerintah diperkirakan didorong oleh kenaikan biaya energi global dan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi yang memengaruhi harga barang dan jasa yang bergantung pada energi. Selain itu, rencana penambahan komponen tarif PDAM Tirta Musi Palembang untuk penanganan limbah juga berpotensi mendorong tekanan inflasi pada kelompok ini. Di samping itu, tekanan inflasi rokok juga akan meningkat sejalan dengan peningkatan harga jual eceran (HJE) rokok pada tahun 2025 yang diputuskan melalui dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yaitu PMK 96/2024 dan PMK 97/2024. Kenaikan HJE ini berlaku mulai 1 Januari 2025. Di tengah berbagai tekanan di atas, laju inflasi pada kelompok ini dapat ditahan dengan berbagai diskon tarif yang diberikan pemerintah, seperti diskon listrik dan tiket pesawat pada periode peak season.

Inflasi kelompok pangan bergejolak diperkirakan terjaga seiring dengan perbaikan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perbaikan sistem irigasi, optimalisasi pengolahan pasca panen, penggunaan bibit unggul, program dukungan penyediaan sarana produksi (saprodi) dan alat mesin pertanian (alsintan), serta pendampingan budidaya kepada petani oleh penyuluh. Di samping itu, kondisi cuaca pada tahun ini diperkirakan lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya sehingga berpotensi mendorong produktivitas komoditas pangan strategis yang didukung juga oleh program swasembada pangan sebagai salah satu misi dalam Asta Cita pemerintahan baru periode 2024-2029.

Secara keseluruhan, sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tetap diharapkan mampu menjaga inflasi pada level yang terkendali. Penguatan koordinasi dalam menjaga stabilitas harga, terutama pada bahan pangan dan energi, akan menjadi kunci dalam mengantisipasi tantangan inflasi di tahun ini.

Dengan berbagai perkembangan diatas serta berbagai koordinasi, inovasi dan sinergi dalam pengendalian inflasi termasuk dalam Tim Pengendalian Inflasi dan Satgas Pangan, maka **inflasi Sumatera Selatan di tahun 2025** diperkirakan berada pada kisaran **2,5 ± 1% (yoy)**.

Strategi Perekonomian Daerah Tahun 2025

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di level global, nasional, dan Sumatera Selatan di 2025, seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Selatan perlu memperkuat sinergi dalam memanfaatkan peluang dan mengantisipasi peluang dan tantangan perekonomian. Untuk itu, diperlukan strategi penguatan antara lain:

1. Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi Pangan

Sumatera Selatan merupakan salah satu pusat lumbung pangan nasional, yang terlihat dari produksi padi 2,83 juta ton di 2023 (tertinggi kelima se-nasional). Pada saat yang sama, beras menjadi penyumbang andil inflasi tahunan tertinggi di Sumatera Selatan. Adapun peluang dan tantangan dari sisi produksi antara lain masih kurangnya infrastruktur untuk pengembangan lahan rawa untuk pertanian; tingginya biaya produksi terutama dari harga dan ketersediaan pupuk; dan hambatan pada akses pembiayaan dan asuransi usaha tani padi (AUTP) untuk mendukung kegiatan produksi petani. Dari sisi distribusi, maraknya sistem ijon dengan tengkulak ditengarai menyebabkan panjangnya rantai distribusi beras di Sumsel yang melibatkan hingga 5 pedagang perantara serta belum optimalnya pemanfaatan kerja sama antardaerah (KAD) untuk stabilisasi harga dan memperkuat ketahanan pangan.

2. Pengentasan Kemiskinan

Untuk memastikan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan, pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan harus diterapkan. Pertama, menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin dapat dilakukan dengan memperkuat jarring pengaman sosial, seperti program bantuan sembako dan bantuan tunai. Program ini harus disertai dengan mekanisme penyaluran yang tepat sasaran, khususnya bagi kelompok miskin ekstrem yang paling rentan. Selain itu, operasi pasar murah dapat diadakan secara rutin di kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tinggi, guna menekan harga kebutuhan pokok yang berkontribusi signifikan terhadap garis kemiskinan, terutama beras. Namun, intervensi ini harus diiringi dengan upaya mengurangi ketergantungan masyarakat miskin pada bantuan, dengan cara memperkuat daya beli melalui program-

program yang mendorong kemandirian ekonomi. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat miskin harus menjadi fokus utama dalam jangka panjang. Ini dapat dicapai melalui pemberdayaan ekonomi lokal, yang melibatkan pelatihan keterampilan, penyediaan akses modal, dan pendampingan usaha bagi UMKM. Pemerintah daerah dapat mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha, sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

Di samping itu, pengembangan inklusi keuangan perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang memadai terhadap layanan keuangan, seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi, yang dapat membantu mereka mengelola risiko ekonomi dan memanfaatkan peluang usaha. Sinergi lintas sektor dan koordinasi antarperangkat daerah dan instansi vertikal sangat penting untuk memastikan implementasi strategi ini berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

3. Mengakselerasi Investasi

Untuk meningkatkan investasi, Sumatera Selatan perlu mengoptimalkan soft infrastructures dan hard infrastructures yang menjadi penopang iklim investasi. Dari sisi soft infrastructures, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dan pendampingan dalam penyusunan RTRW dan RDTR, serta memastikan monitoring berkala terhadap progress persetujuan RTRW di DPRD dan prioritas pembahasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Penyusunan regulasi turunan insentif fiskal di level provinsi dan kabupaten/kota juga dapat dipercepat untuk meningkatkan daya tarik investasi. Kemudian, sinergi kebijakan antarlembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu diperkuat untuk mengatasi kendala birokrasi dan meningkatkan efisiensi proses perizinan. Selain itu, peningkatan kualitas layanan dan kapabilitas aplikasi Online Single Submission (OSS) berbasis risiko (RBA) sangat penting untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan investasi di daerah. Selain itu, dibutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam mempercepat pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri, a.l. melalui pendidikan vokasi (SMK).

Sedangkan dari sisi hard infrastructures, pembangunan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas terutama jalan antarkota dan pelabuhan, ketersediaan lahan yang clean and clear serta kawasan industri, dan pasokan energi dan air memadai juga memegang peranan penting dalam menarik investasi. Melalui pendekatan ini, diharapkan daya tarik Sumatera Selatan sebagai tujuan investasi dapat semakin meningkat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4. Mengembangkan Ekonomi Digital

Untuk meningkatkan ekonomi digital di Sumatera Selatan, beberapa langkah strategis dapat diambil. Pertama, perluasan infrastruktur digital perlu diprioritaskan, dengan fokus pada blank spot di daerah-daerah yang belum terjangkau layanan internet yang memadai. Kolaborasi antara pemerintah daerah melalui TP2DD, pemerintah pusat, dan operator telekomunikasi, sangat penting untuk memastikan akses internet yang merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah pedesaan dan terpencil. Kedua, peningkatan literasi digital perlu digalakkan melalui program pelatihan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama sektor UMKM yang memiliki potensi besar untuk didigitalisasi. Selain itu, penguatan perda yang mendorong penggunaan layanan pembayaran nontunai untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran pemda juga berperan penting dalam mendorong akseptasi masyarakat terhadap pembayaran nontunai. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing digital dan mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Selatan.

5. Mendorong Hilirisasi Komoditas Unggulan Sumatera Selatan

Kinerja ekonomi Sumsel cukup rentan dengan gejolak global karena dominasi komoditas unggulan ekspor yang berbasis SDA mentah. Ketergantungan yang tinggi pada ekspor komoditas mentah membuat perekonomian Sumatera Selatan cenderung rentan terhadap fluktuasi harga internasional dan perubahan kebijakan di negara tujuan ekspor.

Hilirisasi komoditas berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah produk sehingga ekonomi Sumatera Selatan lebih resilien terhadap kondisi perekonomian global. Namun, masih terdapat tantangan dalam hilirisasi komoditas unggulan Sumatera Selatan, seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet. Masih belum optimalnya ketersediaan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri hilir menjadi kendala signifikan. Keterbatasan dalam pendidikan dan pelatihan yang relevan menyebabkan rendahnya kesiapan tenaga kerja lokal untuk mendukung proses hilirisasi. Selain itu, akses terhadap teknologi modern dan inovasi dalam proses pengolahan masih terbatas, yang mengakibatkan rendahnya efisiensi dan daya saing produk olahan Sumatera Selatan di pasar global. Kendala logistik dan infrastruktur dalam mendukung industri hilir, seperti tingginya biaya transportasi akibat infrastruktur pelabuhan yang sudah tidak memadai perlu turut ditangani.

Untuk mendorong hilirisasi di Sumatera Selatan, beberapa langkah strategis dapat diambil. Dari sisi ketenagakerjaan, penting untuk memperkuat sektor pendidikan dan pelatihan dengan menciptakan program link and match antara institusi pendidikan dan kebutuhan industri, sehingga tenaga kerja lokal lebih siap dan mampu memenuhi permintaan industri hilir. Pemerintah daerah dapat bermitra dengan industri dalam mendorong pendirian sekolah vokasional yang mendukung kebutuhan industri hilir ketiga komoditas tersebut. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah pusat, diperlukan untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi hilirisasi dan pemberian dukungan dalam bentuk kebijakan yang mendorong investasi di sektor ini. Penguatan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga penelitian juga penting untuk mengembangkan teknologi pengolahan yang lebih efisien dan ramah lingkungan, yang dapat diterapkan pada komoditas unggulan seperti karet dan kelapa sawit. Terakhir, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dapat memfokuskan upaya pada pengembangan kawasan industri yang didedikasikan untuk hilirisasi, seperti kawasan industri Tanjung Enim untuk batu bara dan pengembangan pelabuhan New

Palembang Port untuk mendukung pelabuhan eksisting (Boom Baru) terutama untuk menampung kapal-kapal dengan tonase besar.

Strategi peningkatan ekonomi di Sumatera Selatan di beberapa sector untuk tahun 2025, sebagai berikut:

Sektor	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025
Pertanian	- Stabil dengan peningkatan efisiensi input cost dan program perluasan lahan tanam. - Infrastruktur irigasi dan bendungan mendukung produktivitas padi dan hortikultura. - kebutuhan kelapa sawit untuk kebutuhan domestik seperti adanya program biodiesel (B35)	- Tumbuh positif karena permintaan domestik komoditas (biodiesel B35) dan dukungan pemerintah. - Lanjutan bantuan pemerintah untuk pengembangan tanaman pangan dan perkebunan.
Industri Pengolahan	- Tumbuh lebih tinggi, didorong oleh permintaan domestik terkait pemilu. - Kontribusi pembangunan pabrik tisu di Kabupaten OKI.	- Pertumbuhan kuat dalam pengolahan kelapa sawit, minyak goreng, dan energi terbarukan.
Pertambangan	- Pertumbuhan melambat karena target produksi batu bara lebih rendah dan penurunan permintaan ekspor. - Fenomena El-Nino memengaruhi produktivitas tambang. - Pasokan batu bara dari India dan Tiongkok turut menahan permintaan ekspor	- Stabil dengan peningkatan permintaan domestik dan pasokan batu bara yang cukup.
Konstruksi	- Pertumbuhan positif berkat percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti jalan tol, pembangunan Bendungan Tiga Dihaji, preservasi jalan dan jembatan nasional, dan pembangunan jaringan irigasi.	- Stabil, didukung oleh kelanjutan PSN dan peningkatan belanja barang modal pemerintah.
Perdagangan & Transportasi	- Tumbuh dengan dinamika permintaan domestik dan global, dipengaruhi pemulihan ekonomi pasca-pandemi.	- Stabil, dengan tantangan inflasi dan volatilitas harga yang berpotensi memengaruhi konsumsi.

Sumber: Laporan Perekonomian Sumatera Selatan, 2024

Tabel 3. 21
Kerangka Ekonomi Makro Sumatera Selatan

INDIKATOR MAKRO	2023			2024			2025	
	Target RKPD	Capaian	Capaian Nasional	Target RKPD	Capaian	Capaian Nasional	Target RKPD	Target P-RKPD
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8-6,5	5,08	5,05	4,70 - 5,50*	5,03	5,03	5,3 - 5,5	4,8 - 5,6
Inflasi (%/tahun)	2-4	3,17	2,61	2,5 ± 1*	1,2	1,57	2,5 ± 1*	2,5 ± 1*
Tingkat Kemiskinan (%)	11,59-12,66	11,78	9,36	10,95	10,51	8,57	9,37 - 10,37	9,37 - 10,37
Tingkat Pengangguran (%)	3,06-4,22	4,11	5,32	4,14	3,86	4,91	3,83 - 3,95	3,82 - 3,93
Gini Ratio	0,350	0,338	0,388	0,324	0,331	0,381	0,316-0,320	0,316-0,320
Indeks Pembangunan Manusia	73,09	74,39	73,55	71,63	73,84	75,02	71,96	-
Indeks Modal Manusia (IMM)	-	-	-	-	-	-	-	0,53

Sumber : Data BPS, Bank Indonesia *Laporan Perekonomian Sumsel Feb, 2025

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional serta berbagai indikator dini, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2025 diperkirakan tumbuh kuat dibandingkan dengan tahun 2024. Perbaikan aktivitas perekonomian global dan domestik mendorong peningkatan kinerja perekonomian Sumatera Selatan baik dari sisi konsumsi, investasi, maupun lapangan usaha. Peningkatan kinerja perekonomian diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat serta terus mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat dan dapat meningkatkan pendanaan dan keuangan daerah.

Secara umum, kerangka pendanaan Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 diperkirakan sebesar Rp.10.631.783.507.681,00 meningkat sebesar Rp.282.287.085.419,00 atau 2,66 persen bila dibandingkan dengan APBD Tahun anggaran 2025 sejumlah Rp. 10.349.496.422.262,00. Dilihat dari realiasi Pendapatan triwulan I tahun 2025 sebesar Rp. 486.976.865.920.65 maka peningkatkan profesi pendapatan untuk paruh penuh tahun 2025 masih dalam kategori optimis akan tercapai diakhir tahun.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan mendorong sumber pendapatan dan subjek penerima pendapatan yang baru, antara lain melalui Badan Layanan Umum Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga memperluas cakupan layanan dan mempermudah proses pembayaran melalui layanan pembayaran

elektronik dalam meningkatkan pendapatan daerah maka proyeksi perubahan pendapatan untuk tahun 2025 sebesar Rp.10.523.288.856.473,90

Berbagai strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendorong penerimaan pada tahun 2025, diantaranya; sosialisasi E-faktur untuk mendukung upaya penertiban atas pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), inovasi penggunaan teknologi melalui e-Dempo (elektronik Data dan Sistem Pajak Daerah Online), SOS (Samsat Online Sumsel), dan SIGNAL (Samsat Digital Nasional) serta pembayaran pajak melalui kanal, seperti QRIS, EDC (Electronic Data Capture), Indomaret, dan Tokopedia dan penagihan langsung kepada objek-obje pajak daerah dilapangan.

I. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menjadi obyek PAD adalah: 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 4) Lain-lain PAD yang Sah. Penetapan Target PAD dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mempertahankan penerimaan PAD, antara lain:

1.1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah:

- 1) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pendataan, pencatatan, pemungutan, penagihan dan pengelolaan pajak daerah;

- 2) Memperkuat proses tata kelola pajak daerah melalui penyusunan dan pemutakhiran produk hukum daerah terkait pajak daerah beserta aturan pendukungnya;
- 3) Meningkatkan penggunaan teknologi informatika untuk mempersingkat prosedur dan waktu layanan serta mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah secara non tunai dengan menggunakan mesin EDC, QRIS dan pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal;
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan dan pelatihan substantif dan penjenjangan;
- 5) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung guna peningkatan layanan publik pada pelayanan pajak daerah di UPTB;
- 6) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak, OPD terkait seperti DPMPTSP, BPKAD, PUPSDA dan OPD penghasil retribusi serta OPD lainnya.
- 7) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak melalui inovasi dan terobosan pelayanan menuju pelayanan prima;
- 8) Meningkatkan pemanfaatan beragam sosial media untuk penyebaran informasi dan sosialisasi pajak daerah.
- 9) Meningkatkan dan mengembangkan aplikasi perpajakan daerah baik untuk kesamsatan maupun non kesamsatan;
- 10) Meningkatkan kualitas pengawasan internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta melakukan koordinasi dan sinergitas dengan institusi pengawasan lainnya;

- 11) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi dari UPTB tentang pentingnya pembayaran pajak daerah;
- 12) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk berkontribusi dalam Optimalisasi Pajak Daerah;
- 13) Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti Samsat Desa/Kelurahan dan Samsat Drive Thru;
- 14) Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi terkait seluruh aplikasi perpajakan daerah yang saling terintegrasi guna keakuratan dan penyajian data real time yang informative bagi seluruh stake holder;
- 15) Meningkatkan kinerja Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD), dengan melakukan kunjungan, pendataan, pengawasan dan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada dalam pengelolaan badan /unit usaha potensial diwilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- 16) Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait;
- 17) Melakukan pendataan dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara persuasive dengan pola Door to Door.
- 18) Meningkatkan peran serta showroom asosiasi penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II);

b. Retribusi Daerah:

- 1) Melakukan rekonsiliasi data penerimaan dengan OPD pemungut retribusi;
- 2) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pendataan, pemungutan, pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah;
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian retribusi daerah pada masing-masing OPD penghasil retribusi;
- 4) Meningkatkan peran serta OPD peghasil retribusi dalam melakukan sosialisasi dan peningkatan pelayanan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang dikenakan retribusi daerah.
- 5) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan OPD penghasil retribusi daerah dalam rangka optimalisasi.
- 6) Peningkatan pengawasan dalam melakukan pemungutan retribusi dengan melibatkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- 7) Memperkuat proses tata kelola retribusi daerah melalui penyusunan dan pemutakhiran produk hukum daerah terkait retribusi daerah beserta aturan pendukungnya,
- 8) Mempercepat dan mengoptimalkan pemanfaatan eletronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) dalam pengelolaan penerimaan retribusi daerah dengan menggunakan transsaksi nontunai berupa EDC dan QRIS,
- 9) Sosialisasi terhadap peraturan yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi;
- 10) Menggali objek pemungutan retribusi baru;

c. **Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:**

- 1) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan;
- 2) Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kontribusi BUMD, salah satunya dengan membuat rencana bisnis perusahaan.
- 4) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah melalui :
 - Melakukan penyehatan internal perusahaan baik dengan cara perampingan jumlah tenaga kerja dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia perusahaan, serta melakukan efisiensi pengeluaran rutin perusahaan;
 - Memperluas cakupan pelayanan perusahaan dengan membuka kantor cabang di Kabupaten/Kota yang potensial;
 - Memperluas cakupan bidang usaha dari perusahaan, antara lain BPR Sriwijaya juga berpotensi untuk melakukan pembiayaan disektor pertanian atau agrobisnis dan PDPDE berpotensi untuk memperluas usaha di sektor hulu migas;
 - Menyusun Rencana Pengembangan Usaha (Business Plan) perusahaan untuk jangka menengah;

- Memperkuat pengawasan dan pembinaan BUMD oleh Pemerintah Provinsi melalui Biro Perekonomian;
- Menambah stimulan pembiayaan untuk perusahaan yang baru berdiri atau stimulan untuk perusahaan yang memiliki rencana pengembangan usaha yang layak secara ekonomi dan finansial;
- Mendorong BUMD untuk melakukan kerjasama usaha dengan investor baik dalam maupun luar negeri.

d. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah:

- 1) Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya.
- 2) Meningkatkan kinerja Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) dalam mengali pendapatan asli daerah.
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah seperti gedung, asrama, aula dan aset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan aset tersebut;
- 4) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan berbagai aset daerah;
 - a. Membenahi sistem administrasi menjadi sistem online dan tersentral pusat kontrolnya.
 - b. Memaksimalkan pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

II. Pendapatan Transfer

Mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor penerimaan Pendapatan Transfer, baik komponen penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;
- 2) Melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan RI di Jakarta dalam rangka membahas pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Bidang Pertambangan Umum dan Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan;
- 3) Realisasi dari semua kegiatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk selanjutnya akan dijadikan pedoman dan patokan terhadap besarnya pembagian Pendapatan Transfer yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya akan didistribusikan ke masing-masing Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan jatah/porsinya masing-masing.

III. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Upaya optimalisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain dari sektor Pendapatan Hibah dari beberapa perusahaan BUMN maupun perusahaan BUMS yang berada dan beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun upaya-upaya optimalisasi atau intensifikasi Pendapatan Daerah dari sektor pendapatan ini dapat dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS agar berperan aktif dan berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing-masing BUMN maupun

BUMS tersebut maka diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- 2) Terus mengadakan pendekatan kepada beberapa BUMN maupun BUMS yang belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Melalui berbagai upaya untuk mempertahankan penerimaan Pendapatan Daerah khususnya PAD tersebut, maka diharapkan target PAD Provinsi Sumatera Selatan dapat tercapai. Dilihat dari data capaian realisasi PAD tahun 2024 sebesar Rp.5.309.757.143.255,46 dan realiasi per-Mei tahun 2025 sebesar Rp.1.581.709.192.531,64 maka proyeksi Perubahan PAD Tahun Anggaran 2025 diperkirakan sejumlah Rp.4.757.901.225.640,93. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Pajak Daerah untuk Perubahan APBD 2024 diproyeksikan sejumlah Rp. 3.772.331.557.656,93
- 2) Pendapatan Retribusi Daerah diproyeksikan sejumlah Rp.5.110.991.800,00.
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah diproyeksikan sejumlah Rp. 173.213.785.434,00.
- 4) Lain-lain PAD yang Sah diproyeksikan sejumlah Rp.807.244.890.750,00.

1.2 Pendapatan Transfer

Kebijakan TKD pada tahun 2024 secara umum diarahkan untuk :

1. Mendukung pembangunan daerah dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diantaranya melalui:
 - a) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk penanganan stunting;

- c) penguatan daya saing usaha dan peningkatan investasi di daerah;
 - d) pembangunan rendah karbon dan transisi energi untuk mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup;
 - e) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
 - f) peningkatan kualitas belanja daerah dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.
2. Mendorong pengalokasian TKD berdasarkan kinerja pemerintah daerah;
 3. Meningkatkan sinergi pendanaan TKD dengan sumber pendanaan lainnya;
 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan melalui penguatan monitoring dan pemanfaatan teknologi informasi oleh daerah.

Pendapatan Transfer untuk proyeksi Perubahan Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sejumlah Rp. 6.286.774.924.300,24. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

A.1 Dana Perimbangan

- 1) Pendapatan dari DBH-Pajak/Bukan Pajak untuk Perubahan Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sejumlah Rp.2.168.604.568.000,00.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk perubahan Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sejumlah Rp.1.765.321.372.000,00. Arah Kebijakan DAU di Tahun 2025 meliputi, sebagai berikut:
 - a. menentukan skema penggunaan DAU berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah;
 - b. mengutamakan pemanfaatan DAU dalam memenuhi SPM sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
 - c. menyempurnakan formula DAU berdasarkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik kewilayahan, seperti letak geografis dan

perekonomian daerah; dan

d. mengalokasikan DAU untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perubahan Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sejumlah Rp.1.185.053.612.000,00.

Berdasarkan RKP maka Arah kebijakan umum DAK Fisik tahun 2025 antara lain:

1. mendorong pencapaian target PN berbasis MP terpilih, khususnya untuk memperkuat daya saing usaha melalui penguatan destinasi pariwisata prioritas dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan;
2. mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah untuk mengurangi kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengentasan kawasan kumuh; mengurangi angka stunting melalui pembangunan infrastruktur dasar; mempercepat pembangunan infrastruktur untuk penataan kota/kabupaten serta konektivitas di daerah afirmasi.
3. Mengurangi kesenjangan layanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan;
4. memfokuskan kegiatan DAK Fisik dalam menuntaskan target prioritas tematik atau bidang yang belum diselesaikan pada tahun sebelumnya;
5. mempertajam pemilihan lokasi prioritas dan menu kegiatan agar DAK lebih berdampak signifikan;
6. mengukur capaian hasil jangka pendek (immediate outcome) sebagai salah satu instrumen monitoring dan evaluasi DAK Fisik;
7. mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi berbasis web dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi DAK;

8. mendorong komitmen pemerintah daerah dalam mempersiapkan dan melaksanakan DAK serta kolaborasi kegiatan di APBD

Adapun arah kebijakan DAK Nonfisik Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. mendukung operasionalisasi layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan perempuan dan anak;
2. memperkuat daya saing usaha dan investasi serta pengurangan kemiskinan;
3. mendorong penuntasan target PN;
4. mempertajam pemilihan lokasi prioritas dan menu kegiatan DAK Nonfisik;
5. meningkatkan kualitas data dalam proses perencanaan dan penganggaran DAK Nonfisik.

A.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) untuk perubahan Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sejumlah Rp.6.489.293.000,00

B. Kurang Salur DBH SDH dan Pajak

Kurang Salur DBH SDH dan Pajak untuk perubahan Tahun Anggaran 2025 yang sumbernya diproyeksikan berasal dari Tahun 2023 sejumlah Rp.751.604.197.000,00 dan Tahun 2024 sejumlah Rp.409.701.882.300,24.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus mengupayakan mempertahankan pendapatan daerah dari sektor penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Melakukan rekonsiliasi antara pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota penghasil sebagai dasar penyaluran dana perimbangan;
- b. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;

- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
- d. Mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK).

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk Perubahan Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sejumlah Rp. 4.062.924.000,00.

Adapun upaya optimalisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah antara lain dari sektor Pendapatan Hibah dari beberapa perusahaan BUMN maupun perusahaan BUMD yang berada dan beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun upaya-upaya optimalisasi atau intensifikasi Pendapatan Daerah dari sektor pendapatan ini dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusinya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk Sumbangan Pihak Ketiga berupa pemberian dana hibah. Dengan dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing-masing BUMN maupun BUMS tersebut maka diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dimaksud pada saatnya dapat meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Terus mengadakan pendekatan kepada beberapa BUMN maupun BUMS yang belum memberikan kontribusinya pada Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3. 22
Realiasi Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 – 2025

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2025	2025
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Realisasi per Mei (Rp)	Proyeksi APBD-P (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	10.036.955.961.132,70	9.547.779.371.502,99	10.962.497.244.934,50	10.060.185.345.574,40	3.220.788.224.632,64	11.048.739.073.941,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.930.954.855.677,74	4.875.950.557.289,99	5.309.757.143.255,46	4.459.311.556.974,42	1.581.709.192.531,64	4.757.901.225.641,00
A.	Pendapatan Pajak Daerah	4.461.152.465.008,25	4.287.466.538.999,46	4.744.634.642.741,87	3.739.026.413.140,42	1.458.552.364.258,42	3.772.331.557.657,00
B.	Pendapatan Retribusi Daerah	12.185.155.716,25	12.477.067.295,00	8.552.046.241,00	5.213.358.400,00	1.599.157.438,00	5.110.991.800,00
C.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	153.032.882.582,11	223.885.947.856,00	138.824.929.544,35	173.213.785.434,00	-	173.213.785.434,00
D.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	304.584.352.371,13	352.121.003.139,53	417.745.524.728,24	541.858.000.000,00	121.557.670.835,22	807.244.890.750,00
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	5.090.093.999.526,00	4.667.946.127.537,00	5.648.721.133.679,00	5.597.130.535.600,00	1.639.079.032.101,00	6.286.774.924.300,00
A.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.090.093.999.526,00	4.667.946.127.537,00	5.648.721.133.679,00	5.200.304.650.600,00	1.639.079.032.101,00	5.118.979.552.000,00
A.1	Dana Perimbangan	5.029.223.442.526,00	4.667.946.127.537,00	5.642.095.592.679,00	5.200.304.650.600,00	1.639.079.032.101,00	5.118.979.552.000,00
A.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	2.442.737.296.896,00	1.854.967.347.879,00	2.645.802.349.840,00	765.459.964.000,00	613.868.338.750,00	882.079.548.000,00
A.1.2	Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak				1.478.848.909.000,00		1.286.525.020.000,00
A.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.563.041.287.000,00	1.653.766.188.000,00	1.806.673.215.634,00	1.750.244.931.000,00	666.548.627.670,00	1.765.321.372.000,00
A.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.023.444.858.630,00	1.159.212.591.658,00	1.189.620.027.205,00	1.205.750.846.600,00	358.662.065.681,00	1.185.053.612.000,00
A.2	Dana Insentif Daerah	60.870.557.000,00	-	6.625.541.000,00	-	-	6.489.293.000,00
B.	Kurang Salur DBH SDH dan Pajak				396.825.885.000,00		1.161.306.079.300,24
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	15.907.105.929,00	3.882.686.676,00	4.018.968.000,00	3.743.253.000,00	-	4.062.924.000,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	15.907.105.929,00	3.882.686.676,00	4.018.968.000,00	3.743.253.000,00	-	4.062.924.000,00
1.3.2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-				
1.3.3.	Pendapatan Lainnya						

Sumber: TAPD Provinsi Sumatera Selatan, 2025 (data diolah)

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dan jenis belanja.

Untuk Perubahan Tahun Anggaran 2025 belanja diproyeksikan sejumlah Rp. 11.157.233.725.148,00. Dimana kebutuhan belanja ini diarahkan untuk pembiayaan dan pemenuhan pembangunan provinsi Sumatera Selatan tahun 2025.

Serta dalam mendukung percepatan belanja yaitu dengan percepatan digitaliasi dan peningkatan akuntabilitas transaksi pemerintah daerah, dimana telah berkoordinasi dan bersinergi dengan Bank Indonesia bersama kabupaten/kota untuk mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah periode tahun 2023 dimana menunjukkan seluruh Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan telah berhasil pada tahap tahap digital, meningkat dari sebelumnya di tahun 2022 hanya 13 kabupaten yang terklasifikasi digital.

**Arah kebijakan Belanja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025
adalah sebagai berikut:**

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- c. Meningkatkan alokasi fungsi pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total belanja daerah sesuai peraturan perundangan.
- d. Meningkatkan alokasi anggaran fungsi kesehatan minimal 10 persen dari total belanja daerah diluar gaji.
- e. Mengalokasikan belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD;
- f. Mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan public paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepda daerah dan atau desa.
- g. Mengalokasikan belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- i. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu:
 - 1) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
 - 2) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD

dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

- j. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Sumatera Selatan.
- k. Dalam rangka dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional Indonesia EMAS 2045 yang merujuk kepada Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden 2025-2030 dan Arah Kebijakan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030, memperhatikan situasi terkini, yaitu:
 - 1. Perlindungan sosial dan pemberdayaan peningkatan pendapatan masyarakat belum optimal
 - 2. Hilirisasi sektor unggulan daerah belum optimal
 - 3. SDM berbasis kompetensi belum optimal
 - 4. Kinerja pelayanan publik berbasis digital belum optimal
 - 5. Akses, Kualitas, dan Kuantitas Infrastruktur Layanan Pendidikan dan Kesehatan belum optimal
 - 6. Infrastruktur Wilayah dan Infrastruktur Dasar belum optimal
 - 7. Pengelolaan SDA dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung.
 - 8. Program Prioritas Presiden RI :
 - a. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
 - b. Program Pembangunan 3 Juta Rumah
 - c. Pembentukan Koperasi Merah Putih.
 - d. Pemeriksaan Kesehatan Gratis
 - e. Program Sekolah Rakyat
 - f. Program Sekolah Garuda
- l. Penggunaan prinsip selektif, efektif, efisien, patut dan wajar dalam penyusunan rencana anggaran dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Nomor : 900.1.1/004/BPKAD/2025 tentang Pemberitahuan Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

- m. Upaya akomodasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kewenangan dan kapasitas anggaran yang adil dan transparan;
- n. Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Pengalokasian belanja untuk membiayai 7 prioritas daerah RKPD 2025 yang dijabarkan ke dalam program prioritas daerah seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3. 23
Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah RKPD
Tahun 2024

PRIORITAS NASIONAL 2025-2029	PRIORITAS DAERAH SUMATERA SELATAN 2025-2029
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	6. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	2 Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
	3 Ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2 Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
	4 Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1 Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	2 Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
	5 Kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan

PRIORITAS NASIONAL 2025-2029	PRIORITAS DAERAH SUMATERA SELATAN 2025-2029
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4 Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	6 Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	7 Kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, berorientasi pada kearifan lokal

Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2025 (data diolah)

1. Optimalisasi Belanja Daerah (PP Nomor 12 Tahun 2019)

Belanja pada perubahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Untuk komponen Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, besarnya penganggaran diperuntukkan untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD. Belanja Pegawai untuk Perubahan APBD 2024 diproyeksikan sejumlah Rp 3.050.219.901.150,00. Belanja Barang dan jasa diproyeksikan sejumlah Rp. 2.416.200.239.130,00. Belanja bunga tidak dialokasikan, Belanja Hibah Tahun 2025 dialokasikan sejumlah Rp. 402.510.376.890,00 termasuk didalamnya Hibah kepada kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Belanja Modal untuk Perubahan APBD 2024 diproyeksikan sejumlah Rp.1.565.769.539.916,00. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Belanja Tidak Terduga untuk Perubahan APBD 2023 diproyeksikan sejumlah Rp.25.000.0000.000,00 yang

diperuntukkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Perubahan Tahun Anggaran 2025, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Transfer dimana terdiri dari Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah untuk Perubahan APBD 2025 diproyeksikan sejumlah Rp.1.698.080.940.377,00. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dialokasikan sejumlah Rp. 1.998.152.727.685,00.

Uraian anggaran dan proyeksi belanja daerah Perubahan APBD 2025 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 24
Anggaran dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2022 – 2025

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2025	2025
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Realisasi per Mei (Rp)	Proyeksi APBD-P (Rp)
2	BELANJA DAERAH	9.663.575.726.750,69	9.698.252.360.233,98	10.899.989.950.243,70	10.349.496.422.262,00	2.238.076.497.565,93	11.157.233.725.148,10
1.	BELANJA OPERASI	4.499.276.793.174,07	4.975.235.925.372,77	5.311.081.939.178,72	5.554.243.851.496,00	1.314.287.894.796,43	5.870.230.517.170,00
A.	Belanja Pegawai	2.092.571.068.579,00	2.190.116.137.939,00	2.528.391.380.267,00	2.731.880.497.202,00	865.513.081.219,00	3.050.219.901.150,00
B.	Belanja Barang dan Jasa	2.042.275.862.382,07	2.405.532.045.847,87	2.259.380.999.928,72	2.410.319.440.644,00	360.665.563.577,43	2.416.200.239.130,00
C.	Belanja Bunga	13.227.699.524,00	8.817.133.280,00	2.786.684.555,00			
D.	Belanja Subsidi		-	510.541.824.428,00	5.000.000.000,00		1.300.000.000,00
E.	Belanja Hibah	351.202.162.689,00	370.770.608.305,90	9.981.050.000,00	407.043.913.650,00	88.109.250.000,00	402.510.376.890,00
F.	Belanja Bantuan Sosial		-				
	Belanja Biaya Provinsi Pengelolaan Pinjaman						
2.	BELANJA MODAL	1.536.370.414.095,28	1.206.711.898.808,99	1.292.420.009.833,96	1.383.913.715.467,00	28.103.562.550,00	1.565.769.539.916,00
A.	Belanja Tanah	8.708.743.955,00	1.743.753.503,00	701.091.453,00	4.419.000.000,00	909.775.000,00	3.819.000.000,00
B.	Belanja Peralatan dan Mesin	342.811.302.542,00	345.465.230.996,00	282.043.992.981,25	315.057.021.819,00	20.481.445.945,00	349.345.068.468,00
C.	Belanja Bangunan dan Gedung	361.568.165.909,82	266.624.790.389,12	259.121.500.988,71	428.370.418.326,00	1.796.139.150,00	278.962.791.106,00
D.	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	747.812.255.898,46	541.178.479.003,87	699.082.171.086,00	555.925.433.822,00	4.916.202.455,00	852.348.387.977,00
E.	Belanja Aset Tetap Lainnya	75.469.945.790,00	50.703.578.417,00	48.066.059.521,00	73.450.541.500,00		73.909.038.000,00
F.	Belanja Modal Aset Lainnya		996.066.500,00	3.405.193.804,00	6.691.300.000,00		7.385.254.365,00
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	19.553.804.801,00	16.000.000.000,00	82.301.295,00	50.000.000.000,00	-	25.000.000.000,00
4.	BELANJA TRANSFER	3.608.374.714.680,34	3.500.304.536.052,22	4.296.405.699.936,00	3.361.338.855.299,00	895.685.040.219,50	3.696.233.668.062,00
A.	Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota	1.914.984.234.446,00	2.179.118.758.571,00	2.399.428.901.098,00	1.627.156.556.949,00	610.953.483.173,00	1.698.080.940.377,00
B.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	1.693.390.480.234,34	1.321.185.777.481,22	1.896.976.798.838,00	1.734.182.298.350,00	284.731.557.046,50	1.998.152.727.685,00

Sumber: TAPD (data diolah), 2025

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan untuk Perubahan APBD 2025 di proyeksikan sebesar Rp.108.494.651.207,00,00 dan Pengeluaran Pembiayaan tidak diproyeksikan pada tahun 2025.

Tabel 3. 25
Realiasi Anggaran dan Proyeksi/Target Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024	2025	2025	2025
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Realisasi per Mei (Rp)	Proyeksi APBD-P (Rp)
3	PEMBIAYAAN	354.251.259.039,14	436.744.445.834,19	257.986.372.616,46	289.311.076.688,00	108.494.651.207,36	108.494.651.207,00
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	151.894.033.565,14	322.922.821.755,19	154.808.667.409,91	289.311.076.688,00	108.494.651.207,36	108.494.651.207,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	202.357.225.474,00	113.821.624.079,00	103.177.705.206,55	-	-	-

Sumber: TAPD (data diolah), 2025

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menggambarkan proses penyusunan dan substansi perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan serta hal-hal yang terkait dan berpengaruh pada perencanaan di Sumatera Selatan. Selanjutnya dinarasikan pula bagaimana implementasi dan keterkaitan Prioritas Nasional dalam RKP yang diterjemahkan dalam RKPD, termasuk bagaimana penentuan isu strategis, terkait dengan permasalahan daerah serta kebijakan dan sasaran serta target yang akan diambil.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, tahun kedua pelaksanaan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dan sekaligus akan menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017: "*Rancangan awal RKPD provinsi disusun berpedoman pada RPJMD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD*". Oleh karena itu, penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 berpedoman pada RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, RKP Tahun 2025, Program Strategis Nasional Tahun 2025, pedoman penyusunan Perubahan RKPD 2025. Selain itu, penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah disesuaikan dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Selanjutnya, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 juga tetap mempertimbangkan dokumen *Sustainable Development Goal's* (SDG's), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun

2024-2044, dan dokumen perencanaan lainnya. Dengan demikian secara teknokratis Perubahan RKPD ini sudah dapat mengakomodir apa yang diharapkan dari dokumen perencanaan tersebut.

Sebagaimana proses penyusunan perencanaan tahun-tahun sebelumnya, maka arah pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 juga mempedomani capaian pembangunan tahun berjalan terhadap target pada RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, yang dalam pelaksanaannya masih ada beberapa capaian yang belum tercapai secara optimal serta isu strategis yang akan dihadapi hingga akhir tahun 2025 yang juga menjadi perhatian.

Isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional seperti: a) penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan; b) Program Makan Bergizi Gratis (MBG); c) pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrim; d) pengendalian inflasi di daerah; e) peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; f) dukungan swasembada pangan; g) pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), juga disinergikan dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, merupakan implementasi dari tahun kedua RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yang juga sekaligus menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Oleh sebab itu, penyusunan Perubahan RKPD untuk periode ini sangat penting karena merupakan langkah awal dalam pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tahun 2024 yang akan termuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD. Untuk itu, dalam penetapan sasaran pembangunan pada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tahun 2024 yang akan termuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Adapun sasaran dan target yang akan dicapai hingga akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran serta Target Pembangunan pada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Prioritas Daerah/ Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Prioritas Daerah 1: Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas				
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		1. Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,54
		2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,40
		3. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	69,16 – 69,17
	1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM	1. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	9,19 – 9,20
		2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,80 – 12,81
		3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
		- Literasi Membaca	%	5,88 – 11,76
		- Numerasi	%	0,00 – 5,88
		4. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
		- Literasi Membaca	%	65,01
		- Numerasi	%	40,12

Prioritas Daerah/ Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
		5. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Satu Tahun Setelah kelulusan	%	82,54
		6. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	85,68
	1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan	1. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,48
		2. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	14,80
	1.3 Meningkatnya Pembangunan Sektor Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	55,45
	1.4 Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	1. Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,465
		2. Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,93-93,99
		3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,00
Prioritas Daerah 2: Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat				
2. Meningkatnya Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah		1. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,30 – 5,50
		2. PDRB per Kapita	Rp (Juta)	79,90
		3. Kontribusi PDRB Provinsi	%	3,06
		4. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	%	1,41
		5. Indeks Entropy Theil	Indeks	1,32
		6. Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,48
	2.1 Meningkatnya Pengembangan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	1. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,70
		2. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalan	%	3,33
		3. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman	%	2,00
	2.2 Meningkatnya Investasi dan	1. Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB)	%	30,5

Prioritas Daerah/ Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	Perdagangan Daerah	2. Persentase Pertumbuhan Investasi	Nilai	7,50
		3. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	13,92
		4. Ekspor Barang dan Jasa (PDRB %)	%	21,26
		5. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	7,13
		6. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	0,47
	2.3 Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1. Tingkat Inflasi	%	1,5 – 3,5
		2. Inklusi Keuangan	%	94,46
		3. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,72
Prioritas Daerah 3: Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru				
3. Terwujudnya keterkaitan ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air		1. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	62,22
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	20,19
	3.1 Meningkatnya Ketahanan Pangan, Energi, dan Air	1. Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77,52
		2. Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	23,10
		3. Rasio Elektrifikasi	%	100
		4. Persentase Desa Berlistrik	%	100
		5. Kapasitas air baku	m3/detik	2,24
		6. Indeks Ketahanan Air Provinsi	Indeks	3,57
	3.2 Meningkatnya Pengembangan Hilirisasi Berbasis Sektor Unggulan	1. Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	18,90
		2. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	5,15
		3. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	%	2,34
4. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan		1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,19
		2. Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	69,97
		3. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	0,465

Prioritas Daerah/ Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	4.1 Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1. Persentas Penurunan Emisi GRK Kumulatif	%	18,50
		2. Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	%	31,02
Prioritas Daerah 4: Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan				
5. Meningkatkan Kualitas Konektivitas Daerah		Rasio Konektivitas Transportasi	%	0,634
	5.1 Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang Berkualitas	1. Waktu Tempuh Jalan Provinsi	jam/ 100 km	2,5
		2. V/C Rasio Jalan	Rasio	0,390
		3. Rata-Rata Load Factor Penumpang Angkutan Umum	%	71,00
6. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Masyarakat		Persentase Bangunan Gedung, Hunian dan Permukiman dengan akses layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	40,95
	6.1 Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi	1. Akses Air Minum Layak	%	89,35
		2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	80,54
		3. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	34,00
	6.2 Meningkatnya Hunian dan Permukiman yang Layak	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	50,17
7. Meningkatkan Pengelolaan Bencana		Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Indeks	130,41
	7.1 Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,39
Prioritas Daerah 5: Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan				
8. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1. Tingkat Kemiskinan	%	9,37 – 10,37
		2. Rasio Gini	Indeks	0,316 – 0,320

Prioritas Daerah/ Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	8.1 Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	1. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,82 – 3,93
		2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,83
		3. Rasio Kewirausahaan	%	2,57
		4. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	%	0,41
	8.2 Meningkatnya Upaya Perlindungan Sosial	1. Persentase Kemiskinan Ekstrem	%	0,34
		2. Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,22
Prioritas Daerah 6: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas				
9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (75-76)
	9.1 Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi	1. Nilai SAKIP	Indeks	BB (78,00)
		2. Opini BPK	Indeks	WTP
		3. Manajemen Risiko Indeks	Indeks	2,923
		4. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	1,95 (Sedang)
		5. Indeks Integritas Daerah	Indeks	72,66
	9.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A (4,60)
2. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi		Indeks	5,9	
Prioritas Daerah 7: Kehidupan Beragama, Seni dan Budaya Dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi Pada Kearifan Lokal				
10. Terwujudnya Stabilitas Sosial		Indeks Harmoni Indonesia (Sumatera Selatan)	Indeks	6,50
	10.1 Menguatnya Ketentraman di Masyarakat	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	78,01
		2. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	70,82
	10.2 Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	58,71

Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Dalam mencapai target pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, telah dilakukan perumusan penentuan prioritas pembangunan daerah yang bertujuan untuk memfokuskan rencana pembangunan di Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan dengan melakukan telaah RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2024 yang akan dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, telaah RKP Tahun 2025, telaah RTRW Provinsi Sumatera Selatan, telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDGs) dan Analisis Isu Strategis Daerah.



Gambar 4.1

Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah

Dengan mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2024 yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, RKP Tahun 2025, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dan Isu Strategis, maka tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan pada Perubahan RKPD tahun 2025 ini tetap

merujuk pada tema RKPD Tahun 2025, yaitu **“Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan”**, dengan tujuh Prioritas Daerah yang merupakan hasil penjabaran dari misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah diselaraskan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang termuat dalam RKP Tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas;
2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat;
3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan;
6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas;
7. Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal.

Adapun keterkaitan dan konsistensi antara isu strategis dan Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2.

Isu Strategis dan Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

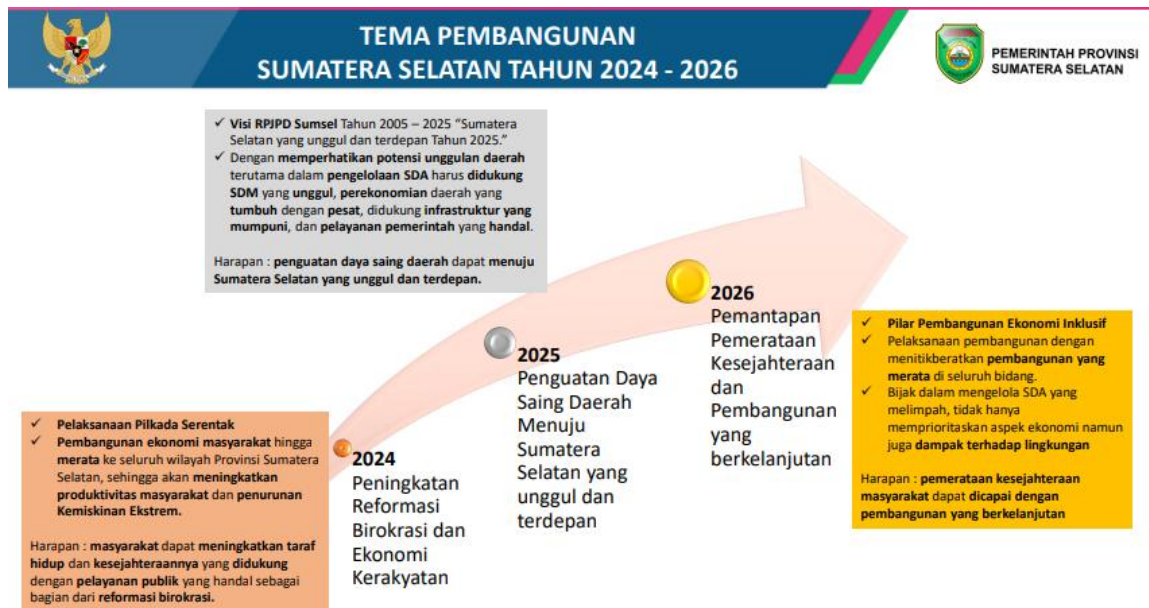
Isu Strategis	Prioritas Daerah Perubahan RKPD 2025
Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Peningkatan Pendapatan Belum Optimal	PD5: Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan
Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah Belum Optimal	PD2: Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
SDM Berbasis Kompetensi Belum Optimal	PD1: Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas PD7: Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal
Kinerja Pelayanan Publik Berbasis Digital Belum Optimal	PD6: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
Akses, Kualitas, dan Kuantitas Infrastruktur Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal	PD1: Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas
Infrastruktur Wilayah dan Infrastruktur Dasar Belum Optimal	PD4: Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
Pengelolaan SDA dengan Mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung	PD3: Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Penetapan Tujuan, Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 tersebut disusun dengan mempertimbangkan dan menelaah beberapa dokumen perencanaan lainnya seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

4.2.1. Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya

4.2.1.1. Telaah RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 disesuaikan dengan Fokus atau Tema Pembangunan Tahunan pada periode tahun 2024-2026, yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.2.

Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026

Sumber: RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

Pembangunan tahun 2025 menjadi estafet pembangunan tahun 2024, berbagai capaian pembangunan Provinsi Sumatera Selatan telah dicapai di 2024. Pada pembangunan tahun 2025 ini Provinsi Sumatera Selatan akan berfokus pada beberapa sektor yaitu ekonomi, infrastruktur dan sosial, dengan tema pembangunan, **“Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan”**. Sesuai dengan fokus dan tema pembangunan tahun 2025, dengan memperhatikan potensi unggulan daerah terutama dalam pengelolaan SDA harus didukung dengan SDM yang unggul, perekonomian daerah

yang tumbuh dengan pesat, dengan dukungan infrastruktur yang mumpuni dan pelayanan pemerintah yang handal. Dengan penguatan daya saing daerah diharapkan mampu menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan.

4.2.1.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2024 dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Visi

Visi, Misi, dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2024 dijabarkan dan dituangkan menjadi visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Adapun Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, yaitu:

SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Sumsel memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di Kota Palembang dengan jumlah penduduk sebanyak 8.837 (ribu) jiwa pada tahun 2024. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di timur, Provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu di barat. Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi hingga akhir abad ke-14 dengan luas wilayah 9,1 juta hektar atau 4,7 persen dari total luas daratan Indonesia.

Maju bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kamajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik

dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Terus bermakna kata berkisinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial, keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Semua mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan, sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan ketimpangan antar wilayah.

Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, yaitu:

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing.

Misi 2 : Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Misi 3 : Mewujudkan keterkaitan (*nexus*) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Misi 5 : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.

Misi 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 7 : Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Arah Kebijakan Pembangunan

Visi dan misi tersebut secara detil dijabarkan dalam tujuan dan sasaran disertai indikator dan targetnya seperti yang telah disajikan pada Tabel 4.1 pada Subbab 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah. Selanjutnya, setiap misi dirumuskan arah kebijakan pembangunan untuk setiap tahunnya. Adapun dukungan Prioritas Pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 terhadap Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4.3.

Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 terhadap Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2025

Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 untuk Tahun 2025	Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2025
• Meningkatkan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Kuratif, Preventif dan Promotif • Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. • Meningkatkan akses, partisipasi, dan motivasi masyarakat atau peserta didik dalam menempuh pendidikan • Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, kurikulum dan sarana-prasarana pendidikan • Meningkatkan layanan perpustakaan sesuai standar perpustakaan nasional • Meningkatkan kualitas kompetensi pemuda	PD1: Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas
• Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Petani • Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Peningkatan Penerimaan dan Pendapatan Daerah dari Sektor ESDM • Peningkatan Kemudahan Berinvestasi • Meningkatkan Promosi Penanaman Modal • Peningkatan Ekspor ke Luar Negeri • Peningkatan Perdagangan Antar Wilayah • Upaya Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis • Peningkatan Efektivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) • Optimalisasi upaya Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	PD2: Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
• Peningkatan Ketersediaan Pangan • Peningkatan Keterjangkauan Pangan • Peningkatan Pemanfaatan Pangan • Peningkatan Ketersediaan Energi • Peningkatan Aksesibilitas Energi • Peningkatan Keterjangkauan Energi • Peningkatan Konservasi Sumberdaya Air • Peningkatan Pendayagunaan Air • Peningkatan Kemitraan dalam Hilirisasi • Peningkatan Fasilitas Pendukung Industri Hilir • Peningkatan Daya Saing Produk Hilir • Peningkatan Akses Pasar Produk Hilir	PD3: Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 untuk Tahun 2025	Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2025
• Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air untuk mewujudkan kedaulatan air di Sumatera Selatan • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menurunkan emisi Gas Rumah kaca untuk mendukung pembanguna yang berkelanjutan	
• Meningkatkan Infrastruktur Konektivitas yang terintegrasi antar kawasan untuk mendukung pergerakan orang dan barang dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan • Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas, merata, dan berwawasan lingkungan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat. • Meningkatkan kualitas tata kelola bencana dan ketahanan Daerah	PD4: Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
• Memperluas Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja • Memperkuat Perlindungan Sosial yang Terintegrasi dan Berkesinambungan • Meningkatkan Intervensi Terpadu untuk Penanganan Kemiskinan dan Stunting	PD5: Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan
• Penerapan Sistem Pemerintahan Digital Terintegrasi untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik • Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Teknologi Informasi dan Partisipasi Publik Digital • Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital yang didukung oleh kualitas data dan informasi	PD6: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
• Penguatan Identitas Budaya dan Moderasi Keagamaan • Revitalisasi Seni dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal	PD7: Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal

Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Program Strategis Gubernur dan Wakil Gubernur

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 juga memuat janji-janji politik dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berupa 12 (dua belas) program strategis yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.4.
Keterkaitan Misi dan Program Strategis HDCU

No	Misi	12 Program Strategis HDCU
1	Misi 1: Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing.	PS 2: Melanjutkan Program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP) - Bebas Iuran BPJS untuk Kelas 3 dengan Berkat Plus - Penyediaan Rumah Singgah bagi Keluarga Pasien - Meningkatkan Layanan Primer Kesehatan dengan Memperluas Ketersediaan Dokter Keluarga - Insentif Nakes Terutama di Daerah Terpencil - Pengembangan Investasi dalam Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional - Meningkatkan Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan di Daerah dengan Merevitalisasi Puskesmas PS 4: Pendidikan Yang Berkeadilan - Melanjutkan Program Sekolah yang Berkualitas dan Berkeadilan - Meningkatkan Sumber Daya Pendidikan dan Mendorong Kurikulum Bermuatan Lokal - Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Guru- Penyediaan Beasiswa Kuliah Bagi Siswa Berprestasi - Melanjutkan Program Literasi Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan PS 11: Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak - Mendukung Program Makan Siang Gratis. - Meningkatkan Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak - Mendukung Peningkatan Prestasi Akademik- Mengurangi Beban Ekonomi Keluarga - Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal- Penguatan Ekosistem untuk Kebijakan Inklusif Guna Peningkatan Pemenuhan Hak dan Penyandang Disabilitas

No	Misi	12 Program Strategis HDCU
2	Misi 2: Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.	PS 1: Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat PS 9: Sumsel Wonderfull 2030 - Meningkatkan Wisata Olahraga (Sport Tourism) dengan menjadi tuan rumah event internasional, event nasional, event iconic Sumsel antara lain seperti Sriwijaya Ranau Grand Fondo, Sriwijaya Dempo Run, Festival Bidar Musi terbesar dan event-event besar lainnya. - Meningkatkan Wisata Kuliner (Food Tourism) dengan cara mempromosikan dan menggalakan kuliner-kuliner lokal yang ada di Sumatera Selatan. - Meningkatkan Wisata Budaya (Culture Tourism) dengan menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di Sumatera Selatan. - Membangun Wisata Kesehatan (<i>Health Tourism</i>) PS 12: Revitalisasi Pasar Tradisional - Melanjutkan Revitalisasi Pasar Tradisional untuk Menjadi Sentra Pertumbuhan Ekonomi. - Meningkatkan Kapasitas Pasar-Pasar Rakyat untuk Memperkuat Ekonomi Kerakyatan - Membangun Pusat-Pusat Ekonomi Baru yang Dapat Menciptakan Lapangan Kerja dan Daya Saing Daerah untuk menghapus kemiskinan ekstrem
3	Misi 3: Mewujudkan keterkaitan (<i>nexus</i>) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.	PS 3: Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) - Mempertahankan Swasembada Beras dan Meningkatkan Produksi Pangan Lainnya (Sumsel Lumbung Pangan Nasional) - Melanjutkan Program Satu Desa Satu Penyuluh Pertanian - Ketersediaan Pupuk yang Mudah Terjangkau - Mendukung Program Food Estate - Melanjutkan Program 10 Juta Stek (Sambung Pucuk) Kopi - Meningkatkan Produksi Tanaman Lainnya

No	Misi	12 Program Strategis HDCU
4	Misi 4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/ kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.	PS 5: Infrastruktur Tuntas Merata - Mempertahankan Sumatera Selatan pada Kategori Jalan Rusak Terendah di Indonesia - Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dalam Wilayah dalam Keadaan Mantap - Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten dan Kota melalui BANGUBSUS (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus) PS 6: Sumsel Interkoneksi - Melanjutkan Konektivitas Antar Daerah - Penyediaan Internet Desa, Terutama bagi Daerah yang Masih Blank Spot - Mewujudkan 100% Desa Teraliri Listrik - Menggalakan Program Listrik Masuk Sawah - Bantuan Operasional Desa/Kelurahan Sampai Dengan 150 Juta Tahun
5	Misi 5: Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.	PS 3: Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) - Mempertahankan Swasembada Beras dan Meningkatkan Produksi Pangan Lainnya (Sumsel Lumbung Pangan Nasional) - Melanjutkan Program Satu Desa Satu Penyuluh Pertanian - Ketersediaan Pupuk yang Mudah Terjangkau - Mendukung Program Food Estate - Melanjutkan Program 10 Juta Stek (Sambung Pucuk) Kopi - Meningkatkan Produksi Tanaman Lainnya PS 7: 100.000 Sultan Muda Sumsel - Bantuan Operasional Desa/Kelurahan Sampai Dengan 150 Juta Per tahun - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Terampil dengan Memperbanyak Pelatihan Skill - Meningkatkan Promosi Usaha Kecil dan Menengah Para Wirausaha Muda Sumatera Selatan. PS 12: Revitalisasi Pasar Tradisional - Melanjutkan Revitalisasi Pasar Tradisional untuk Menjadi Sentra Pertumbuhan Ekonomi. - Meningkatkan Kapasitas Pasar-Pasar Rakyat untuk Memperkuat Ekonomi Kerakyatan

No	Misi	12 Program Strategis HDCU
		- Membangun Pusat-Pusat Ekonomi Baru yang Dapat Menciptakan Lapangan Kerja dan Daya Saing Daerah untuk menghapus kemiskinan ekstrem
6	Misi 6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.	PS 10: Sumsel Berintegritas dan Melayani - Melanjutkan dan Meningkatkan Upaya Menciptakan Pemerintahan yang Bersih (Good and Clean Government), Responsive dan Melayani. - Mengembangkan Meritokrasi, dengan memberikan kesempatan seseorang memimpin berdasarkan kemampuan dan prestasi. - Menerapkan Sistem Berbasis Elektronik, Keamanan Cyber dan Transformasi Digital dalam Pengembangan SDM. - Membangun Pendidikan Anti Korupsi, Keterbukaan Informasi Publik dan Reformasi Birokrasi.
7	Misi 7: Mewujudkan kehidupan beragama, seni, dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.	PS 8: Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya - Melanjutkan Program 1 Desa 1 Rumah Tahfiz - Mempermudah Pendirian Rumah-Rumah Ibadah di Daerah Sumatera Selatan - Melanjutkan Program Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD) dan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Kelurahan (P2UKK) - Meningkatkan Upaya Program Moderasi Umat Beragama - Mewujudkan Pembangunan Masjid Raya Sumatera Selatan - Meningkatkan pendidikan agama, dan mengembangkan toleransi beragama. - Melaksanakan Program Rumah Layak Huni - Mendirikan ISBI Sumsel, membangun Taman Seni Budaya, Melestarikan Aksara Ulu, dan Memperkuat nilai-nilai kebangsaan serta kearifan lokal

4.2.1.2. Telaah RKP Tahun 2025

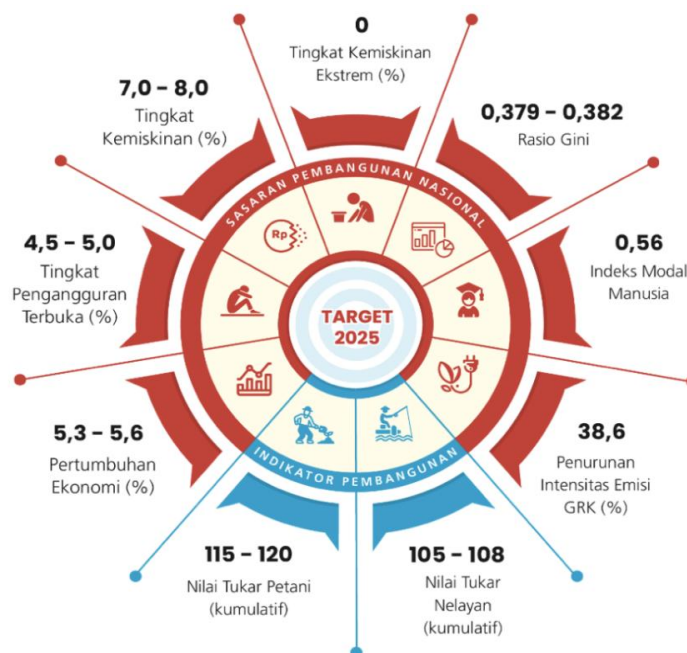
Tema Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan cita-cita 100 tahun Indonesia

merdeka atau Indonesia Emas 2045 yang tercantum dalam RPJPN Tahun 2025-2045, yaitu menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045. Tema RKP Tahun 2025 ditetapkan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik. tema RKP Tahun 2025 yang ditetapkan, yaitu “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan**”.

Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.3.

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Sumber: RKP Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan tujuan utama pembangunan nasional, yaitu mengurangi kesenjangan antarwilayah, ditetapkan kebijakan pembangunan kewilayahan berupa target sasaran pembangunan daerah untuk setiap provinsi tahun 2025. Adapun penyelarasan sasaran pembangunan nasional dan sasaran pembangunan daerah untuk Provinsi Sumatera Selatan pada RKP 2025 dengan sasaran pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5.

Sasaran Pembangunan RKP dan Perubahan RKPD Tahun 2025

Indikator Pembangunan	Target Nasional pada RKP 2025	Target Sumatera Selatan pada RKP 2025	Target Sumatera Selatan pada Perubahan RKPD 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,6	5,3-5,5	5,3-5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 – 5,0	3,82 – 3,93	3,82 – 3,93
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	9,37 – 10,37	9,37 – 10,37
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0	-	0,34**
Rasio Gini (nilai)	0,379 – 0,382	0,316 – 0,320	0,316 – 0,320
Indeks Modal Manusia (nilai)	0,56	0,53	0,54*
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	38,6	69,97	69,97
Nilai Tukar Petani (kumulatif)	115 – 120	-	109,56
Nilai Tukar Nelayan (kumulatif)	105 – 108	-	-

Sumber: RKP Tahun 2025

Keterangan: Target pada Perubahan RKPD 2025 sama dengan target pada RKPD murni 2025. *Terdapat penyesuaian target tahun 2025 dari pusat pada saat penyusunan RPJMD 2025-2029. **Baru ditargetkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengikuti target pada RPJMD 2025-2029.

Seluruh target sasaran makro pembangunan yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Indeks Modal Manusia, penurunan intensitas Gas Rumah Kaca pada Perubahan RKPD Tahun 2025 telah selaras dengan rentang target pada RKP Tahun 2025 untuk Sumatera Selatan.

Target ini juga merujuk pada target yang tercantum dalam dokumen RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 murni kecuali target Indeks Modal Manusia yang mengalami penyesuaian target mengikuti arahan penyalarsan dari pemerintah pusat.

Prioritas Nasional

Dalam rangka menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) pada RKP Tahun 2025 seperti pada gambar berikut.

Gambar 4.4.

Prioritas Nasional RKP Tahun 2025

PRIORITAS NASIONAL 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PRIORITAS NASIONAL 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
PRIORITAS NASIONAL 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	PRIORITAS NASIONAL 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
PRIORITAS NASIONAL 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PRIORITAS NASIONAL 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
PRIORITAS NASIONAL 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.	PRIORITAS NASIONAL 8 Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sumber: RKP Tahun 2025

Keterkaitan Prioritas Nasional RKP Tahun 2025 dengan Prioritas Daerah RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6.

Keterkaitan Prioritas Nasional RKP Tahun 2025 dengan Prioritas Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025

PRIORITAS NASIONAL RKP 2025	PRIORITAS DAERAH PERUBAHAN RKPD SUMATERA SELATAN 2025
PN1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
PN2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas PD7. Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal
PN3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan

PRIORITAS NASIONAL RKP 2025	PRIORITAS DAERAH PERUBAHAN RKPD SUMATERA SELATAN 2025
PN4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PD1. Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas PD5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
PN5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
PN6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
PN7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PD2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas

PRIORITAS NASIONAL RKP 2025	PRIORITAS DAERAH PERUBAHAN RKPD SUMATERA SELATAN 2025
PN8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PD4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan PD7. Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal

4.2.1.3. Telaah RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

Salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan mengacu pada arahan RTRW Provinsi Sumatera Selatan khususnya wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi untuk dapat diprioritaskan. Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Deliniasi kawasan strategis provinsi berbentuk poligon dan bersifat indikatif.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintah daerah kabupaten/kota tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis.

Kawasan strategis provinsi ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah provinsi;

- b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi penanganan kawasan;
- d. Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah provinsi;
- e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;
- f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki kekhususan;
- g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional yang berada di wilayah provinsi;
- h. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/ kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi yang jelas;
- i. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah provinsi untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat;
- j. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah provinsi;
- k. Dapat berupa kawasan yang berada pada satu kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota; dan
- l. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, kawasan strategis yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan sebagai berikut.

a. Kawasan Strategis Nasional yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Kawasan strategis nasional yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi:

1. KSN Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat;
2. KSN Kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang;
3. KSN Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; dan
4. KSN Kawasan Perkotaan Palembang – Betung – Indralaya – Kayuagung.

b. Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan

Penetapan Kawasan strategis di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan sudut kepentingan terdiri dari 2 (dua) kawasan strategis yang meliputi:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

• Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, meliputi:

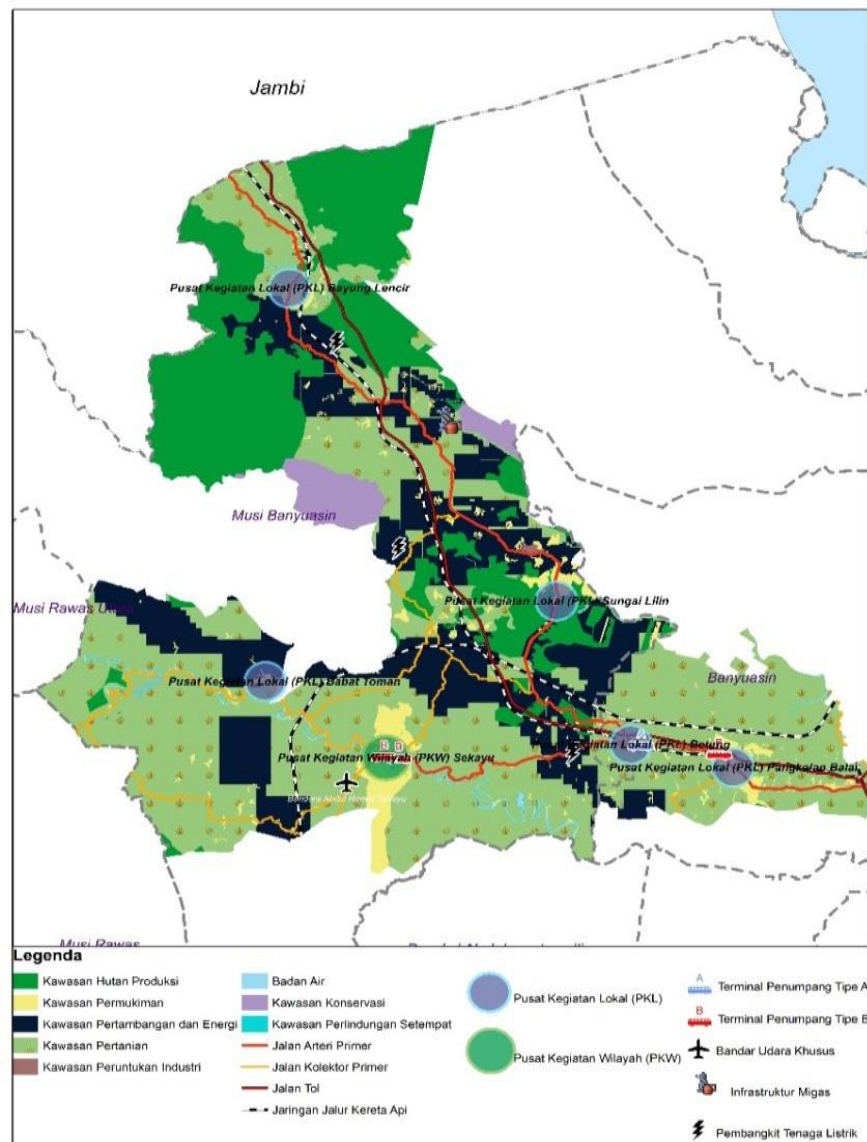
1. KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya;
2. KSP Kawasan Lubuklinggau dan sekitarnya;
3. KSP Kawasan Pagar Alam dan sekitarnya;
4. KSP Kawasan Muara Enim dan sekitarnya;
5. KSP Kawasan Martapura dan sekitarnya.

A. KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya

KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya meliputi 2 wilayah administrasi kabupaten yaitu:

1. Kawasan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Babat Toman,

- Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang, Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tungkal Jaya; dan
2. Kawasan wilayah Kabupaten Banyuasin meliputi seluruh kecamatan.



Gambar 4.5 KSP Kawasan Sekayu dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya adalah mengembangkan pusat kegiatan ekonomi berbasis

hilirisasi sumber daya alam terintegrasi dengan KSN Patungraya Agung.

Arah pengembangan KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya adalah sebagai berikut:

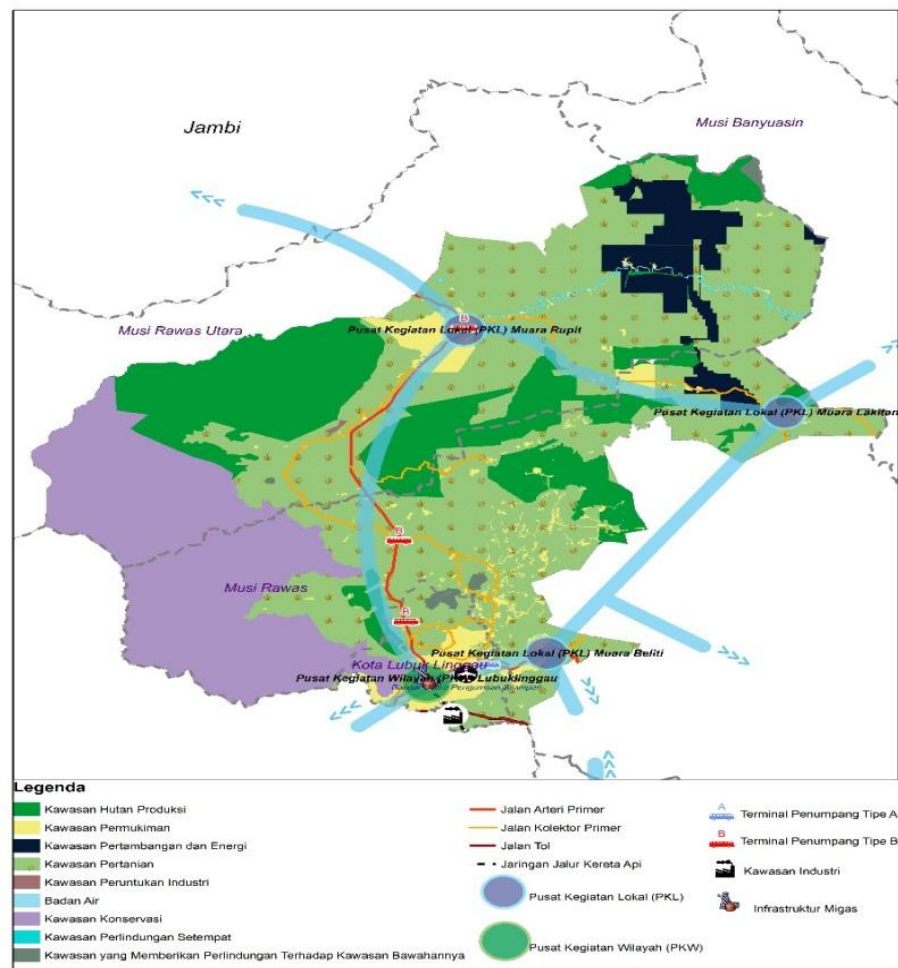
- a. pengembangan kawasan-kawasan yang dapat mendukung fungsi PKN Patungraya Agung dan PKW di sekitarnya;
- b. pengembangan kawasan industri hijau desa Mulyo Rejo Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biogas di Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. pengembangan food estate sentra produksi padi di Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik;
- f. mencegah dan mengendalikan kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi pusat kegiatan di sekitarnya; dan
- g. menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

B. KSP Kawasan Lubuklinggau dan sekitarnya

Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya meliputi 3 wilayah administrasi kabupaten/kota yaitu:

1. Kawasan wilayah Kota Lubuklinggau meliputi seluruh kecamatan;
2. Kawasan wilayah Kabupaten Musi Rawas meliputi Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu, Kecamatan Selangit, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Muara Lakitan, dan Kecamatan Megang Sakti; dan

3. wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo.



Gambar 4.6 KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya adalah untuk mendukung percepatan peningkatan ekonomi dalam mendorong pertumbuhan kawasan tertinggal.

Arah pengembangan KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

- pengembangan Kawasan Perkotaan Lubuklinggau yang dapat mendukung percepatan peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;

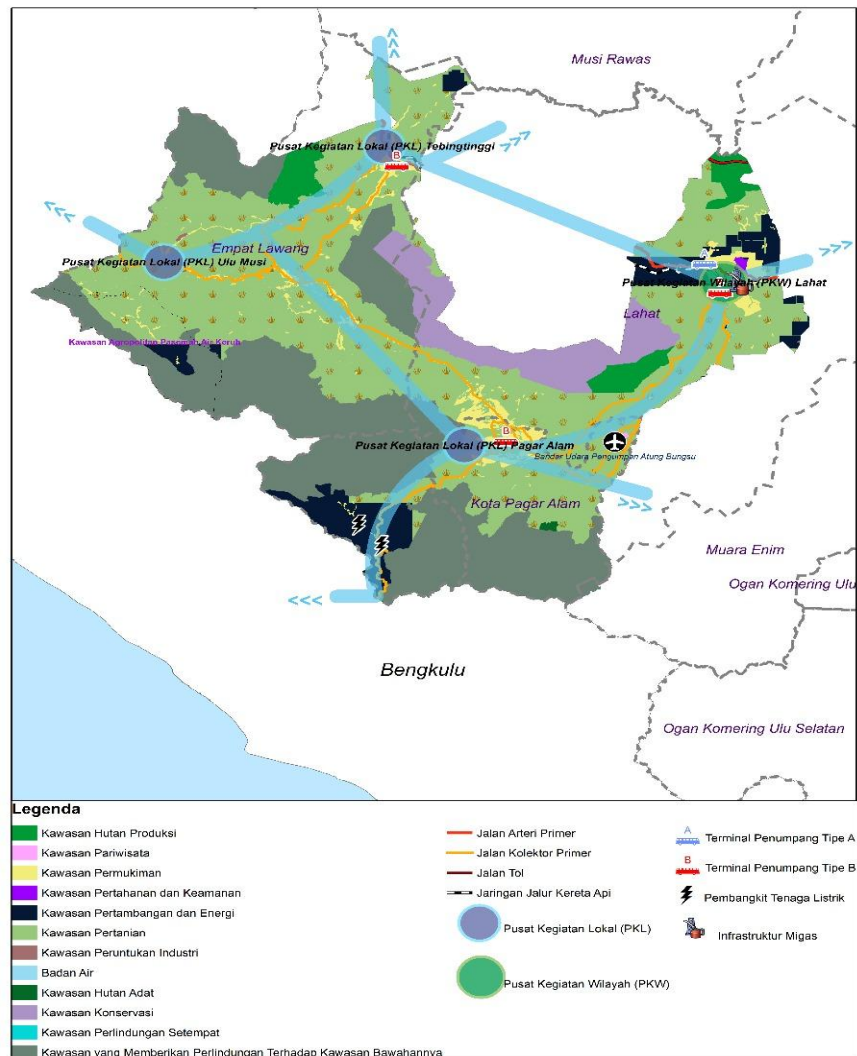
- b. pengembangan kawasan agropolitan Musi Rawas;
- c. pengembangan kawasan yang mendukung PKW Lubuklinggau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya;
- d. pengembangan desa tertinggal di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- e. pengembangan potensi sumber daya mineral logam seng, batu bara dan timah hitam di Kabupaten Musi Rawas Utara;
- f. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan;
- g. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan Kawasan serta pelayanan publik;
- h. menjaga Kawasan yang berfungsi lindung; dan
- i. peningkatan kerjasama antar kawasan perbatasan.

C. KSP Kawasan Pagar Alam dan sekitarnya

KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya meliputi 3 wilayah administrasi yaitu:

- 1. Kawasan wilayah Kota Pagar Alam meliputi seluruh kecamatan;
- 2. Kawasan wilayah Kabupaten Lahat meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Sukamerindu, Kecamatan Lahat, Kecamatan Gumay Talang dan Kecamatan Lahat Selatan; dan
- 3. Kawasan wilayah Kabupaten Empat Lawang meliputi Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Sikap

Dalam, Kecamatan Talang Padang dan Kecamatan Tebing Tinggi.



Gambar 4.7 KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya adalah untuk mengembangkan pusat kegiatan ekonomi baru berbasis pariwisata dan sumber daya energi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.

Arah pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

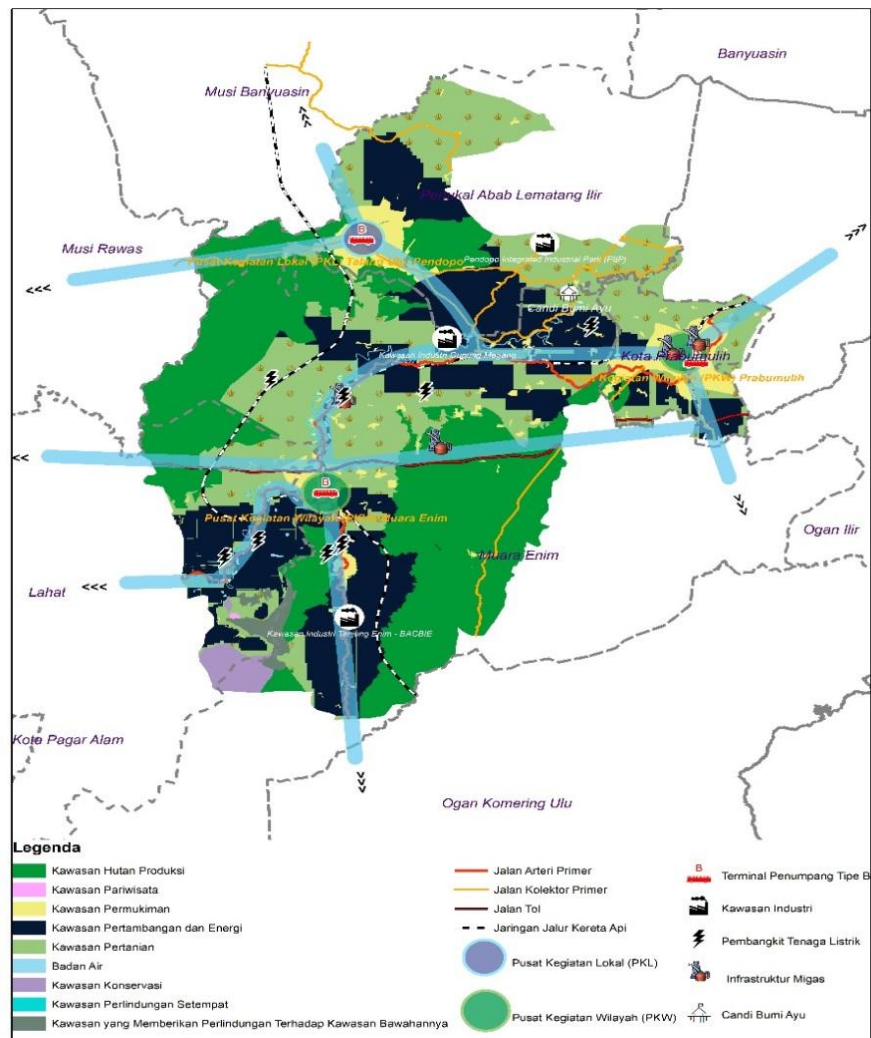
- a. pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu;
- b. Pengembangan kawasan agropolitan Pasemah Air Keruh di Kabupaten Empat Lawang;
- c. pengembangan objek daya tarik wisata kawasan situs Megalith yang terdapat di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam;
- d. pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan di Kabupaten Empat Lawang, Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- e. penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan;
- f. peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan; dan
- g. menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung.

D. KSP Kawasan Muara Enim dan sekitarnya

KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya meliputi 4 wilayah administrasi yaitu:

1. Kawasan wilayah Kabupaten Muara Enim meliputi Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Benakat, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku;
2. Kawasan wilayah Kota Prabumulih meliputi seluruh kecamatan;

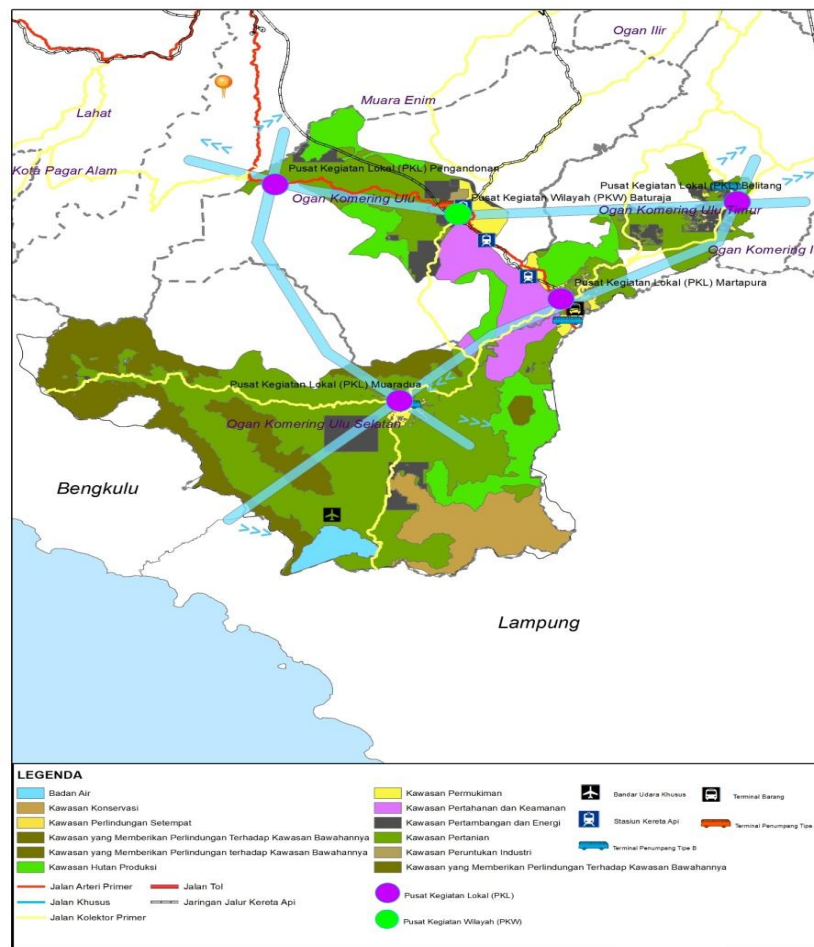
3. Kawasan wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir meliputi Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Talang Ubi dan Kecamatan Tanah Abang; dan
4. Kawasan wilayah Kabupaten Lahat meliputi Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Selatan dan Kecamatan Merapi Timur.



Gambar 4.8 KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

E. KSP Kawasan Martapura dan sekitarnya



Gambar 4.9 KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya meliputi 3 wilayah administrasi yaitu:

1. Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi Kecamatan Martapura, Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Jaya Pura, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kecamatan Buay Madang, Kecamatan Buay Madang Timur, Kecamatan Belitang Madang Raya, dan Kecamatan Belitang;
2. Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu meliputi Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan,

Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Baturaja Barat; dan

3. Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meliputi Kecamatan Mekakau Ilir, Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Simpang, Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Kisam Ilir, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Sindang Danau dan Kecamatan Sungai Are.

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya adalah untuk mengembangkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan berbasis pertanian, energi dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.

Arah pengembangan KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- b. pengembangan kawasan ekonomi terpadu Danau Ranau;
- c. pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten OKU Timur;
- d. pengembangan kawasan wisata Goa Harimau dan Goa Puteri di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- e. pengembangan kawasan wisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam Danau Ranau berupa pengembangan pelabuhan dermaga Danau Ranau dan dermaga wisata

- f. pengembangan energi panas bumi Ulu Danau sebagai salah satu energi terbarukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
 - g. pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biodiesel/ biofuel berbasis kelapa sawit di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - h. pengembangan potensi sumber daya mineral logam bijih besi sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - i. pengembangan *food estate* sentra produksi padi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - j. peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan melalui pengembangan jaringan jalan dan Bandar Udara Banding Agung; dan
 - k. menjaga kawasan yang berfungsi lindung.
- **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Penetapan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan meliputi wilayah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kecamatan Sungai Menang, Kecamatan Tulung Selapan, Kecamatan Cengal, Kecamatan Pangkalan Lampam dan Kecamatan Air Sugihan) dan Kabupaten Banyuasin (Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Makarti Jaya dan Kecamatan Air Salek).

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan adalah untuk mengendalikan ruang di Pesisir

Timur Sumatera Selatan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan.

Arah pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- a. perwujudan Kawasan Lindung untuk mendukung fungsi konservasi, keanekaragaman hayati, dan menjaga iklim makro, serta mencegah dan/atau mengurangi resiko bencana;
- b. penerapan kaidah konservasi lahan dan kegiatan budi daya ramah lingkungan, khususnya pada daerah budi daya pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- c. pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas;
- d. optimalisasi lahan gambut fungsi budidaya sebagai kawasan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan potensial dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan;
- e. pengembangan *food estate* sentra produksi padi di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- f. pengembangan kawasan kerbau rawa Pampangan dan Itik Pegagan di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- g. percepatan pertumbuhan kawasan tertinggal yaitu kawasan Tulung Selapan – Cengal di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- h. melindungi kawasan pesisir dan pantai;
- i. menjaga keterpaduan fungsi kawasan di darat dan pesisir; dan
- j. peningkatan kerjasama kawasan perbatasan provinsi.
- k. pengembangan kawasan pariwisata pesisir (coastal ecotourism) berbasis *zero-waste*, terintegrasi dan mandiri energi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan beberapa Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Selatan.

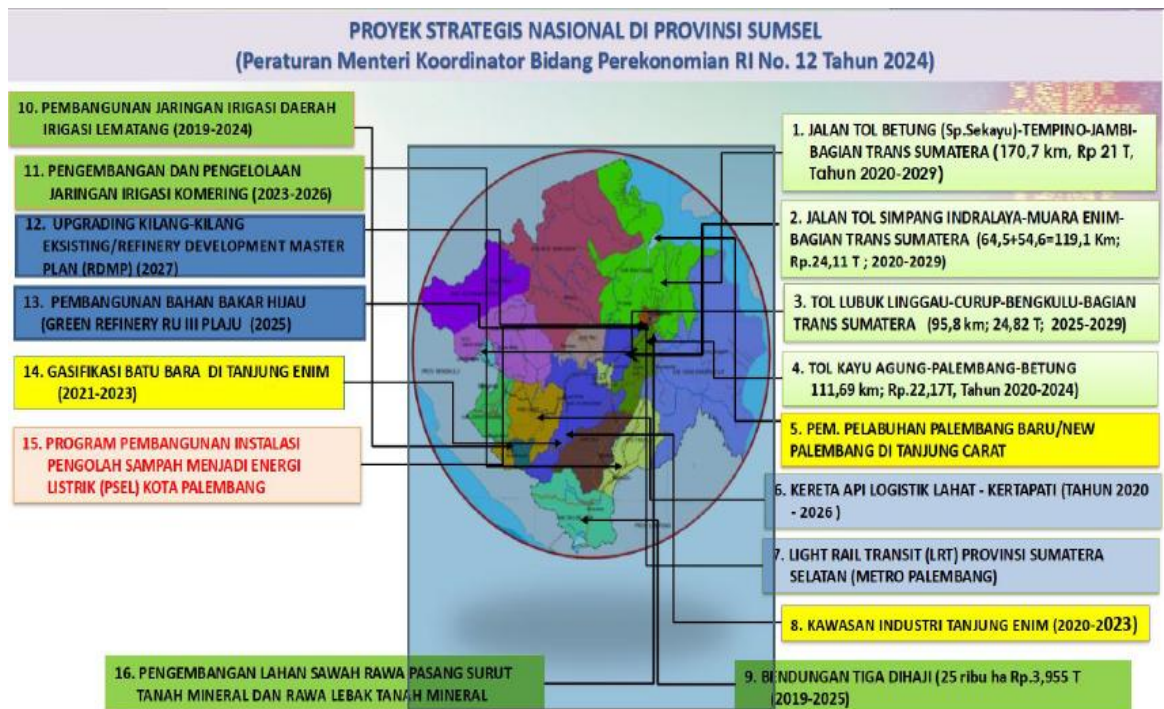
Tabel 4.7

Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025-2029

No	PROYEK	LOKASI	PELAKSANA
	<i>Makan Bergizi Gratis</i>		
1	Program Makan Bergizi Gratis	17 Kabupaten/Kota	• Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator) • Pemerintah Kab/Kota
	<i>Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</i>		
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	17 Kabupaten/Kota	• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator) • Pemerintah Kab/Kota
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	17 Kabupaten/Kota	• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator) • Pemerintah Kab/Kota
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	17 Kabupaten/Kota	• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (koordinator)

No	PROYEK	LOKASI	PELAKSANA
			Pemerintah Kab/Kota
5	Program Penuntasan TBC	17 Kabupaten/Kota	- Kementerian Kesehatan (koordinator) - Pemerintah Kab/Kota
	Swasembada Pangan		
6	Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan <i>Food Estate</i>	Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Musi Rawas dan Kab. Muara Enim	- Kementerian Pertanian, Swasta (koordinator) - Pemerintah Kab/Kota
7	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan	Kabupaten/Kota Sumatera Selatan	- Kementerian Pekerjaan Umum - Pemerintah Kab/Kota
8	<i>Biorefinery</i> Sumatera	PT. Pertamina	- Kementerian Kesehatan (koordinator) - Pemerintah Kab/Kota
9	Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan	Kota Palembang	- PT. Pertamina/PGN - Pemerintah Kota Palembang
	<i>Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital</i>		

No	PROYEK	LOKASI	PELAKSANA
10	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	Kabupaten/Kota Sumatera Selatan	• Swasta • Pemerintah Kab/Kota
11	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	17 Kabupaten/Kota	• Kemen PAN RB (koordinator) • Pemerintah Kab/Kota
12	Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia	17 Kabupaten/Kota	• Badan Informasi Geospasial • Pemerintah Kab/Kota
13	Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas	Kabupaten/Kota	BUMN (Penugasan)
14	Pembangunan 3 Juta Rumah	17 Kabupaten/Kota	• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator) • Pemerintah Kab/Kota
15	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	Kota Palembang	• Pemerintah Kota Palembang • Swasta



Gambar 4.10
Peta Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No.12 Tahun 2024

Sumber: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 12 Tahun 2024, terdapat 16 Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas Sektor Jalan dan Jembatan berupa Proyek Jalan Tol, Sektor Pelabuhan berupa Pembangunan Pelabuhan, Sektor Kereta berupa Kereta Api Logistik dan *Light Rail Transit* (LRT), Sektor Kawasan berupa Kawasan Industri (KI), Sektor Bendungan dan Irigasi berupa Pembangunan Jaringan Irigasi, dan Sektor Energi berupa *Upgrading* Kilang-kilang Eksisting, *Green Refinery* (Bahan Bakar Hijau) dan Gasifikasi Batu Bara, serta sektor pertanian berupa pengembangan lahan sawah.

Tabel 4.8
Progres Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
1	Jalan Tol Betung (SP. Sekayu)- Tempino-Jambi- Bagian Trans Sumatra (170,7 Km, Rp. 21 T, Tahun 2020-2029)	Betung Kab.Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Tempino dan Jambi	Seksi Betung-Tungkal Jaya (62,38km) progres 16,97%, Seksi Tungkal Jaya-Bayung Lencir (56,76km) progres 0,28%, Seksi Bayung Lencir-Tempino (34km) 100% telah diresmikan pada 16 Oktober 2024, Seksi Tempino- Jambi (18km) progres 40,26%
2	Jalan Tol Samping Indralaya-Muara Enim-Bagian Trans Sumatra (64,5+54,6=119,1 Km; Rp.24,11 T; 2020-2029)	Indralaya Kab.Ogan Ilir, Kota Prabumulih, Kab.Muara Enim	• Seksi Indralaya-Prabumulih (63,5 Km) Progres 100%, Operasional 31 Juli 2023, • Seksi Prabumulih-Muara Enim (56,85 Km) Progres Fisik 8,69% (Ditangguhkan). • Penambahan <i>Junction</i> Palembang (8,26km) progres 47%.
3	Tol Lubuk Linggau-Curup- Bengkulu-Bagian Trans Sumatra (95,8 Km; 24,82 T; 2025-2029)	Kota Lubuk Linggau, Kab. Rejang Lebong, Kab.Kepahiang, dan Kota Bengkulu	• Seksi 1 Lubuk Linggau- Kepahiang 54,5 Km dan Seksi 2 Kepahiang-Taba Penanjung 23,7 Km ditangguhkan • Seksi 3 Taba Penanjung- Bengkulu (17,6 Km) sudah Operasional.
4	Tol Kayu Agung- Palembang-Betung (111,69 Km; Rp. 22,17 T, Tahun 2020-2024)	Kab. Ogan Komerling Ilir, Kota Palembang, Kab. Banyuasin	Tahap 1: Seksi Kayu Agung – Kramasan (Palembang) (42,5 Km) telah beroperasi. Tahap 2: - Seksi Kramasan – Sungai Rengas (21,5km) progres 89,06%

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
			- Seksi Sungai Rengas – Pangkalan Balai (33 Km) progress 4,24%
5	Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang di Tanjung Carat	Kab. Banyuasin	• Terkait Lahan: SK Menteri KLHK No. 1259 Tahun 2024 tentang penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan produksi tetap untuk pembangunan Pelabuhan New Palembang atas nama Gubernur Sumsel di Kab. Banyuasin seluas 59,95 Ha. • Kantor Pertanahan Kab.Banyuasin telah bersurat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terkait permohonan hak pengelolaan lahan seluas 59,95 Ha pada tanggal 3 Februari 2025. • Terkait Pengadaan tanah: a. Sertifikasi lahan pelabuhan (59,95 Ha) telah dilakukan Pemeriksaan dan Sidang Panitia Tanah A pada tanggal 31 Januari 2025 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. b. Sertifikasi lahan areal fasilitas penunjang (mozaik 5 seluas 810.577 m² dan

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
			mozaik 6 seluas 882.943 m²) telah dilakukan Pemeriksaan dan Sidang Panitia Tanah A oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. c. Setelah sertifikat lahan selesai selanjutnya lahan akan diserahkan/dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan untuk dibangun Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang.
6	Kereta Api Logistik Lahat – Kertapati (Tahun 2020-2026)	Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kota Prabumulih, Kab. Ogan Ilir, Kota Palembang.	• <i>Milestone</i> KA Logistik Segmen I Lahat-Kertapati sedang berproses. • Terminal Bongkar Batubara (TBB)/Terminal <i>Unloading System (TULS)</i> Stasiun Kramasan, Sumatera Selatan progres 13,90% • Pembangunan <i>Flyover</i> Koridor Ujan Mas beserta kebutuhan pembebasan lahan dibiayai oleh PT. Kereta Api (Persero)
7	<i>Light Rail Transit</i> (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)	Kota Palembang	Status : Operasi 1) Total <i>Ridership LRT</i> Sumatera Selatan di tahun 2023 mencapai 4,08 Juta penumpang 2) Mekanisme Subsidi (PSO) dilakukan melalui Subsidi

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
			KA Perintis di Kementerian Perhubungan 3) Terdapat 2 eskalator yang belum terpasang
8	Kawasan Industri Tanjung Enim (2020-2023)	Tanjung Enim, Kab. Muara Enim	- Konstruksi ditunda sementara sampai diperoleh kepastian tenant baru - Upaya penjajakan calon tenant baru
9	Bendungan Tiga Dihaji (25 ribu ha Rp. 3,955 T (2029-2025)	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Progres konstruksi keseluruhan 49,6%
10	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang (2019-2024)	Kota Pagar Alam	<i>Phase II</i> Paket I Saluran Primer 5,49 Km dan Talang = 6 Bh <i>Phase II</i> Paket I Saluran Primer 5,49 Km dan Talang = 6 Bh progres 97,13% <i>Phase II</i> Paket II Saluran Sekunder = 34,43 Km Bangunan = 138 Bh progres 94,5%
11	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Komering (2023-2026)	Kab. Ogan Komering Ulu Timur dan Kab. Ogan Komering Ilir	<i>Package 1</i> Perjaya <i>Headworks</i>, Komering <i>Main Canal</i>, Lempuing <i>Secondary Canal (Section -3)</i>, Lempuing <i>Sub Secondary Canal and Tertiary Development (Block G and H)</i> and <i>Telemetry System</i> sedang proses lelang <i>Package 2</i> Belitang <i>Secondary Canal (BB.0-BB.15)</i>, Lempuing <i>Secondary and Sub Secondary</i>

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
			<i>Canal and Tertiary Development</i> (Blok I and J) progres 18,67% • <i>Package 3 Belitang Secondary Canal</i> (BB.15-BB.25), <i>Lempuing Secondary and Sub Secondary Canal and Tertiary Development</i> (Blok K) progress 18,10%
12	<i>Upgrading Kilang-Kilang Eksisting/ Refinery Development Master Plan (RDMP) (2027)</i>	Kota Palembang	Tahap transaksi <i>Bidding FEED, BEDP</i>
13	Pembangunan Bahan Bakar Hijau (<i>Green Refinery</i> RU III Plaju (2025)	Kota Palembang	• Pekerjaan Pra FS, Dokumen <i>Basic Engineering Design Package (BEDP)</i>, Dokumen <i>Front End Engineering Design (FEED)</i> sudah selesai.
14	Gasifikasi Batu Bara di tanjung Enim (2021-2023)	Kab. Muara Enim	• PTBA telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri berlaku Efektif pada Lahan Kawasan Industri 585,4 Ha di Tanjung Enim sejak tanggal 24 Mei 2021. • Proses mendapatkan mitra strategis pendanaan.
15	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik	Kota Palembang	• Progres pembangunan sudah tahap tiang pancang dan diharapkan ada <i>Ground Breaking</i>.

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
	(PSEL) Kota Paalembang		- Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dengan PT. PLN pada 21 Desember 2023. - Jaminan pelaksanaan kegiatan sudah ada dan diserahkan dari PT. IGP.
16	Pengembangan Lahan Sawah Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawah Lebak Tanah Mineral	Berlokasi di 7 Kabupaten: Kab. OKI, Kab. Ogan Ilir, Kab. MUBA, Kab. OKU Timur, Kab. PALI, Kab. Banyuasin, Kab. Muara Enim.	- Cetak Sawah seluas 2.000 Ha - Pembangunan Pabrik Penggilingan Padi Skala besar (1 unit) berlokasi di Desa Kota Bumi, Kec. Tanjung Lubuk Kab. Ogan Komering Ilir. - Progres : - Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Belitang Panen Raya (BPR) tentang Implementasi Cetak Sawah dan Pembangunan Penggilingan Padi Modern pada tanggal 13 Januari 2025. - Rencana <i>Groundbreaking</i> Cetak Sawah seluas 2.000 Ha dan Pembangunan Penggilingan Padi Modern di Desa Kota Bumi Kec. Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir pada pertengahan April 2025.

No	PROYEK	LOKASI	PROGRES FISIK
			c. Survei Investigasi Desain (SID) Cetak Sawah untuk luasan 75.000 Ha dan Konstruksi Cetak Sawah seluas 50.000 Ha di 5 (lima) kabupaten yaitu Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur dan Penukal Abab Lematang Ilir pada Tahun Anggaran 2025 sedangkan seluas 25.000 Ha akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dengan sumber dana APBN Kementerian Pertanian

(Progres kemajuan fisik per Januari-Februari 2025)

Sumber: Kementerian PUPR (BBPJN Sumsel, BBWSS VIII), Hutama Karya Trans Sumatera, Bappeda Prov. Sumsel, Dishub Prov. Sumsel, 2025

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Pembangunan kabupaten/kota diharapkan dapat mendukung capaian Provinsi Sumatera Selatan. Berikut sasaran (target indikator makro) dan prioritas pengembangan wilayah di setiap kabupaten/kota.

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu

Target indikator makro untuk Kabupaten OKU sebagai berikut:

Tabel 4.9

Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,06	5,30-5,60
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	53,43	54,52-55,10
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	3,02	2,98

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
4	Tingkat Kemiskinan (%)	10,68	10,30-10,70
5	Gini Ratio	0,334	0,317-0,316
6	Indeks Pembangunan Manusia	73,70	74,20
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	204.268,67
8	IKLH Daerah	67,94	68,75
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,05	3,85-3,97

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BA Pembahasan Pra Musrenbang RKPD Tahun 2026

Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki 1 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Baturaja, dan 2 Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pengandonan dan Peninjauan. Arah pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai bagian dari KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya diantaranya, pengembangan kawasan wisata Goa Harimau dan Goa Puteri, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, dan menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

Dilihat distribusi PDRB, sumber pertumbuhan wilayah sebanyak 4 (empat) sektor dengan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB pada tahun 2024 adalah 1) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,70%, 2) Industri pengolahan sebesar 19,30%, 3) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 16,07%, dan 4) Pertambangan dan penggalian sebesar 13,36%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.

- 6) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 7) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 10) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2025, antara lain diarahkan pada:

- 1) Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Baturaja, antara lain melalui:
 - Penyusunan *masterplan* penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu
 - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau
 - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
 - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
- 2) Pengembangan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, gen z, dan gen milenial di Kawasan Perkotaan Baturaja (PHTC).
- 3) Pengembangan SPAM Perkotaan Baturaja.
- 4) Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja (PHTC).
- 5) Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan *biodefense* pada RS Tk-III dr. Noesmir Baturaja.

- 6) Preservasi jalan ruas Baturaja-Martapura, Baturaja-Prabumulih, dan Baturaja-Muaradua.
- 7) Pengembangan kota agropolitan Baturaja.
- 8) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
- 9) Pengembangan KSPP Sumatera Selatan.
- 10) Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi).
- 11) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 12) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 13) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 14) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
- 15) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida /pakan organik.
- 16) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 17) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan

manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.

- 18) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
- 19) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
- 20) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
- 21) Peningkatan Jalur KA Prabumulih-Baturaja-Tarahan.
- 22) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 23) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi dan kelapa)
- 24) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 25) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 26) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi dan kelapa.
- 27) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.

- 28) Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC).
- 29) Pengembangan destinasi wisata Goa Harimau dan Goa Puteri di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 30) Mempertahankan Kawasan Hutan Lindung dan resapan air, serta Sub-DAS.
- 31) Pengembangan Kawasan Industri.
- 32) Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- 33) Mempercepat hilirisasi dari sektor-sektor unggulan daerah.
- 34) Mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan kemudahan berusaha guna menjaga momentum pergeseran struktur ekonomi menuju sektor sekunder.
- 35) Peningkatan daya saing dan kualitas SDM.
- 36) Mengadakan program pelatihan spesifik sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam rangka meningkatkan *employability* dari para tenaga kerja.
- 37) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat pelayanan dasar melalui pembangunan unit sekolah baru dan puskesmas pembantu.
- 38) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
- 39) Intensifikasi kegiatan pemeriksaan *Antenatal Care (ANC)* terutama di daerah dengan akses kesehatan yang cenderung terbatas.

2. Kabupaten Ogan Komering Ilir

Target indikator makro untuk Kabupaten OKI sebagai berikut:

Tabel 4.10

Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ilir

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,13	5,25
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	57,80	58,00
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	6,89	6,66
4	Tingkat Kemiskinan (%)	12,08	11,60
5	Gini Ratio	0,306	0,290
6	Indeks Pembangunan Manusia	71,48	71,60
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ -e)	N/A	2.121.264,43
8	IKLH Daerah	69,90	69,10
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,38	3,20

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BA Pembahasan Pra Musrenbang RKPD Tahun 2026

Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki 1 (satu) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kayu Agung, 3 (tiga) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Sungai Lumpur, Air Sugihan, dan Tugumulyo, serta juga termasuk ke dalam KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan. Kawasan Kayu Agung dikembangkan sebagai Kawasan Perkotaan Sekitar dalam Metropolitan Patungraya Agung, yang berperan sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa, pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, pusat kegiatan industri, dan pusat pelayanan transportasi darat skala regional.

Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai bagian dari KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan diarahkan untuk perwujudan Kawasan Lindung untuk mendukung fungsi konservasi, keanekaragaman hayati, dan menjaga iklim makro, serta mencegah dan/atau mengurangi resiko bencana; penerapan kaidah konservasi lahan dan kegiatan budi daya ramah lingkungan, khususnya pada daerah budi daya pertanian, perkebunan dan kehutanan; pengendalian dan pembatasan

pembangunan guna mempertahankan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas; optimalisasi lahan gambut fungsi budidaya sebagai kawasan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan potensial dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan; pengembangan *food estate* sentra produksi padi, pengembangan kawasan kerbau rawa Pampangan dan Itik Pegagan; percepatan pertumbuhan kawasan tertinggal yaitu kawasan Tulung Selapan–Cengal; melindungi kawasan pesisir dan pantai; menjaga keterpaduan fungsi kawasan di darat dan pesisir; peningkatan kerjasama kawasan perbatasan provinsi, dan pengembangan kawasan pariwisata pesisir (*coastal ecotourism*) berbasis *zero-waste*, terintegrasi dan mandiri energi.

Dilihat distribusi PDRB, ada sebanyak 4 (empat) sektor dengan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar pada tahun 2024, yaitu 1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 44,71%; 2) Sektor Industri Pengolahan sebesar 22,09%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 12,22%; dan 4) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,09%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 8) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 9) Pembangunan 3 juta rumah.

- 10) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 11) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (111,69 Km).
- 2) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi DI Komering.
- 3) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2025 antara lain diarahkan pada:

1. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat di D.I.R. Sugihan Kanan dan D.I.R. Sungai Lumpur
2. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
3. Pengembangan KSPP Sumatera Selatan
4. Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi)
5. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
6. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)
7. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
8. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
9. Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan

pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik

10. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen
11. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
12. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
13. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering
14. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering
15. Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, dan kelapa).
16. Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet dan kelapa).

17. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa).
18. Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, dan kelapa).
19. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa.
20. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
21. Peningkatan produktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan menuju kedaulatan pangan.
22. Percepatan pertumbuhan kawasan tertinggal yaitu kawasan Tulung Selapan–Cengal di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
23. Melindungi kawasan pesisir dan pantai.
24. Melindungi Kawasan lindung gambut.
25. Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
26. Penurunan *Stunting*.
27. Pengembangan Kayuagung sebagai Kawasan Perkotaan Sekitar.

3. Kabupaten Muara Enim

Target indikator makro untuk Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:

Tabel 4.11
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Muara Enim

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,89	7,01
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	182,11	193,73
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	17,24	18,04
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,79	9,49
5	Gini Ratio	0,309	0,312-0,307*

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
6	Indeks Pembangunan Manusia	73,10	73,67*
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	8.005.066,77
8	IKLH Daerah	64,35	66,74
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,09	3,88

Sumber: BPS Prov.Sumsel dan BA Pembahasan Pra Musrenbang RKPD Tahun 2026,

*penyesuaian target mempertimbangkan capaian terakhir dan Ranwal RPJMD

Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

Kabupaten Muara Enim memiliki 1 PKW, yaitu Muara Enim. Arah pengembangan Kabupaten Muara Enim yaitu, pusat industri pertambangan batubara dan turunannya, sebagai lumbung energi, pengembangan kawasan perkotaan Muara Enim untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan disekitarnya, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan kawasan industri di kecamatan Gunung Megang, Pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan mendukung keberlanjutan energi nasional, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan, dan penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan kawasan.

Dilihat distribusi PDRB, sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 94,73% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 69,59%; 2) Sektor Industri Pengolahan sebesar 9,7%; 3) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,26%; 4) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,87%; dan 5) Sektor Konstruksi sebesar 3,31%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Muara Enim pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 8) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 9) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 10) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 11) Pembangunan 3 juta rumah.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Muara Enim (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Kawasan Industri Tanjung Enim.
- 2) Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim bagian dari Trans Sumatera sepanjang 119 km.
- 3) Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati.
- 4) Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025 antara lain diarahkan pada:

- 1) Pengembangan Kawasan Perkotaan Muaraenim dan Kawasan Pengembangan Industri Tanjung Enim.
- 2) Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Muara Enim, antara lain melalui:

- Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu.
 - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau.
 - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.
 - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan.
- 3) Pengembangan industri hilirisasi/industrialisasi di Tanjung Enim.
 - 4) Hilirisasi hasil tambang batubara, termasuk produk-produk turunan, seperti briket, gasifikasi batubara, dan karbon aktif.
 - 5) Pengembangan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, gen z, dan gen milenial di Kawasan Perkotaan Muara Enim (PHTC).
 - 6) Pengembangan SPAM Perkotaan Muara Enim-Tanjung Enim.
 - 7) Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim (PHTC).
 - 8) Preservasi jalan ruas Muara Enim-Lahat-Pagar Alam dan Muara Enim-Baturaja.
 - 9) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan /peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah.
 - 10) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah.
 - 11) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intesifikasi).
 - 12) Peningkatan produktivitas perternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan Kawasan Peternakan).
 - 13) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.

- 14) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, Peternakan dan hortikultura.
- 15) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain Kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi and revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 16) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/ benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas' mitigasi OPT dan Kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 17) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan, penguatan Kelembagaan koperasi dan korporasi petani, pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani, perluasan akses asuransi usaha tani: peningkatan Infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan system resi Gudang, pengelolaan penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 18) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 19) Pembangunan infrastruktur PLTP Rantau Dedap.
- 20) Pembangunan PLTU Mulut Tambang.

- 21) Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Muaraenim-Tarahan-Kalianda.
- 22) Pembangunan infrastruktur sistem jaringan transmisi listrik 275 kV Lumutbalai-Muaraenim-Gumawang-GITET 275 kV Lampung 1.
- 23) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 24) Pengembangan dan perlindungan Kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 25) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 26) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industry (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 27) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi dan kelapa.
- 28) Pengembang produksi bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 29) Indikasi daerah prioritas intervensi program Makan Bergizi Gratis, bantuan pangan, dan penanganan rawan pangan (PHTC).
- 30) Pengendalian kualitas lingkungan hidup.
- 31) Pengembangan destinasi pariwisata.
- 32) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
- 33) Penurunan *stunting*.
- 34) Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Gunung Megang.
- 35) pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional.
- 36) peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan.

- 37) Optimalisasi verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui pemanfaatan data regsosek.
- 38) Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur *high value economy & industry*.
- 39) Penguatan sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- 40) Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan tenaga kesehatan.
- 41) Peningkatan pengetahuan sumber daya manusia terkait dengan mitigasi bencana.

4. Kabupaten Lahat

Target indikator makro untuk Kabupaten Lahat sebagai berikut:

Tabel 4.12

Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Lahat

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11	5,38 – 6,38
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	66,58	81,88
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	4,43	4,36
4	Tingkat Kemiskinan (%)	14,14	13,18 – 13,99
5	Gini Ratio	0,311	0,273 – 0,301
6	Indeks Pembangunan Manusia	72,83	73,33
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ -e)	N/A	187.024,11
8	IKLH Daerah	63,38	70,08
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,11	2,57 – 3,10

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BA Pembahasan Pra Musrenbang RKPD Tahun 2026

Kabupaten Lahat memiliki 1 PKW, yaitu Lahat. Arah pengembangan Kabupaten Lahat yaitu, pengembangan potensi wisata

minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu, pengembangan objek daya tarik wisata kawasan situs Megalith, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan, serta menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung. Selanjutnya, Kabupaten Lahat memiliki 1 (satu) PSN yaitu Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati untuk mempercepat hilirisasi barang.

Dilihat Distribusi PDRB, sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 86,66% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 52,78%; 2) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,97%; 3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,88%; 4) Sektor Konstruksi sebesar 6,41%; 5) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,62%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Lahat pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.

- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Lahat (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (111,69 Km Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.
- 2) Kereta Api Logistik Lahat – Kertapati

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Lahat pada tahun 2025 antara lain diarahkan pada:

- 1) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 2) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 3) Peningkatan produktivitas perternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 4) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 5) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan dan hortikultura.
- 6) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain Kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi and revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 7) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan

perluasan akses alsintan modern/ benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas' mitigasi OPT dan Kesehatan hewan; peningkatan Infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.

- 8) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan, penguatan Kelembagaan koperasi dan korporasi petani: pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani: perluasan akses asuransi usaha tani: peningkatan Infrastruktur logistic dan perluasan akses layanan sistem resi gudang. pengelokaan penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 9) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 10) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kikim.
- 11) Pengembangan gasifikasi batubara.
- 12) Pembangunan infrastruktur PLTA Tanjungsakti.
- 13) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
- 14) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
- 15) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
- 16) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).

- 17) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi, dan kelapa.
- 18) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 19) Melindungi Kawasan konservasi.
- 20) Pengembangan Pariwisata Megalith dan Pariwisata Alam.
- 21) Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup (Galian C) dan Pasca Tambang.
- 22) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana longsor.
- 23) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan peningkatan daya tarik pariwisata di Kabupaten Lahat melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas lokal.
- 24) Pemberian bantuan yang bersifat pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan sebagai upaya peningkatan ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan.
- 25) Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor industri, teknologi, dan pariwisata.
- 26) Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan tenaga Kesehatan.
- 27) Mendorong efisiensi iklim investasi di Kabupaten Lahat.

5. Kabupaten Musi Rawas

Target indikator makro untuk Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut:

Tabel 4.13

Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,95	5,3

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	61,86	62,87
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	3,76	3,76
4	Tingkat Kemiskinan (%)	13,44	10,85 – 11,90
5	Gini Ratio	0,285	0,256
6	Indeks Pembangunan Manusia	71,21	71,35
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	654.108,15
8	IKLH Daerah	71,44	71,14
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,94	1,94

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BA Pembahasan Pra Musrenbang RKPD Tahun 2026

Kabupaten Musi Rawas memiliki 1 KSN (Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)), 2 PKL (Muara Beliti dan Muara Lakitan). Arah pengembangan Kabupaten Musi Rawas diantaranya diarahkan sebagai pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan desa tertinggal, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah, menjaga Kawasan yang berfungsi lindung, dan peningkatan kerjasama antar kawasan perbatasan.

Dilihat distribusi PDRB, sumber pertumbuhan wilayah sebanyak 5 (lima) sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2024 dengan total 90,42% adalah 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,83%, 2) Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 28,77%, 3) Sektor Industri Pengolahan sebesar 14,60%, 4) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,88%, dan 5) Konstruksi 5,34%. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi, Kabupaten

Musi Rawas harus melakukan penanganan untuk mengatasi kemiskinan.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Musi Rawas pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 8) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 9) Pembangunan 3 juta rumah.
- 10) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 11) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Musi Rawas (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Jalan Tol Betung (SP. Sekayu)-Tempino-Jambi-Bagian Trans Sumatera ((170,7 Km).
- 2) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2026 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi berkisar 4,85% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 12,30%.

- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 1,84%.
- 4) Peningkatan IPM menjadi 69,40.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi kemantapan jalan provinsi saat ini sebesar 95,87%, akses air minum layak Kabupaten Musi Rawas sebesar 91,39%, dan akses sanitasi layak Kabupaten Musi Rawas sebesar 70,98%.
- 6) Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan Musi Hulu.
- 7) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat di Daerah Irigasi Kelingi Tugumulyo dan Daerah Irigasi Air Lakitan.
- 8) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
- 9) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 10) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 11) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 12) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
- 13) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 14) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas

transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.

- 15) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 16) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 17) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* DAS Musi.
- 18) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada DAS Musi.
- 19) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
- 20) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
- 21) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
- 22) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 23) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa.

- 24) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 25) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Kerinci Seblat.
- 26) Percepatan pembangunan Jalan Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu.
- 27) Mendorong realisasi investasi pada sektor riil terutama yang berfokus pada industri peningkatan nilai tambah dari sektor unggulan daerah (pertanian/perkebunan/ pertambangan).
- 28) Menyusun strategi diversifikasi ekonomi dalam rangka peningkatan inklusivitas dan keberlanjutan ekonomi ke depan.
- 29) Pemerataan jumlah fasilitas sarana dan prasarana layanan kesehatan terutama peningkatan jumlah faskes tingkat I.
- 30) Pemerataan kualitas pelayanan dasar (kesehatan dan Pendidikan) khususnya melalui penguatan kapasitas SDM baik untuk tenaga kesehatan maupun tenaga pendidik serta standarisasi sarana prasarana antar sekolah dan fasilitas kesehatan.
- 31) Pemanfaatan data Regsosek sebagai upaya peningkatan akurasi data penerima bantuan sosial ke depan.
- 32) Peningkatan kerjasama perdagangan antardaerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu.
- 33) Pengembangan konektivitas jalan intra kecamatan dan desa.

6. Kabupaten Musi Banyuasin

Target indikator makro untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:

Tabel 4.14

Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,94	4,5 – 5,0
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	142,14	145,00 - 159,00
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	13,69	13,48
4	Tingkat Kemiskinan (%)	12,88	12,7 – 12,8
5	Gini Ratio	0,314	0,290 – 0,310
6	Indeks Pembangunan Manusia	72,27	72,67
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	1.828.335,80
8	IKLH Daerah	68,17	64,44
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,13	2,08

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BA Pembahasan Pra Musrenbang RKPD Tahun 2026

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 1 KSN (Taman Nasional Berbak Sembilang), 1 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) (Sekayu), dan 3 Pusat Kegiatan Lokal (PKL) (Bayung Lencir, Sungai Lilin, dan Babat Toman). Arah pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu, pengembangan kawasan industri hijau desa Mulyo Rejo Kabupaten Musi Banyuasin, pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biogas, pengembangan *food estate* sentra produksi padi, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik, mencegah dan mengendalikan kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi pusat kegiatan di sekitarnya, serta menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

Dilihat distribusi PDRB, ada sebanyak 5 (lima) sektor dengan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar pada tahun

2024 yaitu 1) Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 49,79%, 2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,09 %, 3) Sektor Industri Pengolahan sebesar 11,92%, 4) Sektor Konstruksi sebesar 8,20% dan 5) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,90%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Musi Banyuasin (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Jalan Tol Betung (SP.Sekayu)-Tempino-Jambi-Bagian Trans Sumatera ((170,7 Km).
- 2) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2025 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 5,10% melalui sektor unggulan.
- 2) Penurunan angka kemiskinan menjadi 14,08%.
- 3) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,06%.
- 4) Peningkatan IPM menjadi 69,58%.
- 5) Peningkatan infrastruktur, dengan kondisi saat ini jalan mantap sebesar 82,12%, akses air minum layak Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 86,11%, dan akses sanitasi layak Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 79,03%.
- 6) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 7) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 8) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 9) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 10) Program penuntasan TBC.
- 11) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
- 12) Pengembangan KSPP Sumatera Selatan.
- 13) Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi).
- 14) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 15) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 16) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 17) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
- 18) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan

pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.

- 19) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 20) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 21) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 22) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi.
- 23) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada DAS Musi.
- 24) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, dan kelapa).
- 25) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet dan kelapa).

- 26) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa).
- 27) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, dan kelapa).
- 28) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa.
- 29) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 30) Peningkatan akses energi.
- 31) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir serta longsor.
- 32) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Berbak Sembilang.
- 33) Peningkatan produksi pertanian padi dan komoditas pangan lainnya melalui pendekatan pengembangan pertanian *holistic close loop model*, pengelolaan dengan *system integrated farm management* yang modern dan digital, dan penyediaan irigasi dan/atau irigasi presisi/*smart irrigation* sesuai kebutuhan komoditas.
- 34) Optimalisasi industri dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pengolahan produk unggulan daerah.
- 35) Peningkatan daya saing dan kualitas SDM.
- 36) Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor industri, teknologi, dan pariwisata
- 37) Pemutakhiran rutin dan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
- 38) Optimalisasi penurunan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat

- 39) Pemerataan kapasitas, kualitas, dan kuantitas pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan sosial adaptif dan inklusif di kantong kemiskinan berdasarkan *spatial based policy*.
- 40) Optimalisasi Iklim investasi dan penanaman modal.
- 41) Pengembangan kawasan industri hijau Desa Mulyo Rejo.
- 42) Pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biogas.
- 43) *Land4lives* (Pemberdayaan Masyarakat Terkait Gender).

7. Kabupaten Banyuasin

Target indikator makro untuk Kabupaten Banyuasin sebagai berikut:

Tabel 4.15

Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Banyuasin

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,14	5,0 - 5,5
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	44,73	47 – 57
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	5,85	5,82
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,31	8,5 – 9,0
5	Gini Ratio	0,267	0,265 – 0,290
6	Indeks Pembangunan Manusia	71,55	72,94*
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ -e)	N/A	5.010.054,71
8	IKLH Daerah	66,44	67,11
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,24	3,20*

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BA Pembahasan Pra Musrenbang RKPD Tahun 2026, *penyesuaian target mempertimbangkan capaian terakhir dan Ranwal RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

Kabupaten Banyuasin memiliki 2 KSN mencakup Kawasan Perkotaan Patungraya Agung (Palembang–Betung–Indralaya–Kayu

Agung) dan Taman Nasional Berbak Sembilang dan 2 PKL (Pangkalan Balai dan Sungsang), serta termasuk juga ke dalam KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan. Kabupaten Banyuasin dikembangkan terutama dalam sektor perdagangan jasa, kawasan pertanian, perikanan dan pariwisata. Arah pengembangan Kabupaten Banyuasin yaitu, pengembangan kawasan-kawasan yang dapat mendukung fungsi KSN Patungraya Agung dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di sekitarnya, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik, mencegah dan mengendalikan kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi pusat kegiatan di sekitarnya, dan menjaga kawasan yang berfungsi lindung. Selain itu, dikembangkan Kawasan Perkotaan Inti Sungsang dalam Metropolitan Patungraya Agung sebagai pusat pengembangan ekonomi skala nasional, pusat kegiatan industri, kawasan peruntukan pengembangan sistem logistik terpadu (multimoda), pusat pelayanan transportasi laut skala internasional, nasional dan regional, pusat kegiatan perikanan, dan pusat distribusi logistik.

Kawasan Perkotaan Sekitar dalam Metropolitan Patungraya Agung yang meliputi Betung, Pangkalan Balai, dan Telang juga dikembangkan. Betung sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat permukiman, pusat pelayanan transportasi darat skala nasional dan regional, dan pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, Pangkalan Balai sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan transportasi darat skala regional, pusat permukiman, dan pusat pelayanan kesehatan regional, serta Telang sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengembangan pertanian terpadu, pusat pengembangan perkebunan, pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, dan pusat kegiatan perikanan.

Kabupaten Banyuasin yang juga sebagai bagian dari KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan diarahkan untuk perwujudan Kawasan Lindung untuk mendukung fungsi konservasi, keanekaragaman hayati, dan menjaga iklim makro, serta mencegah dan/atau mengurangi resiko bencana; penerapan kaidah konservasi lahan dan kegiatan budi daya ramah lingkungan, khususnya pada daerah budi daya pertanian, perkebunan dan kehutanan; pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas; optimalisasi lahan gambut fungsi budidaya sebagai kawasan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan potensial dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan; pengembangan *food estate* sentra produksi padi, pengembangan kawasan kerbau rawa Pampangan dan Itik Pegagan; melindungi kawasan pesisir dan pantai; menjaga keterpaduan fungsi kawasan di darat dan pesisir; peningkatan kerjasama kawasan perbatasan provinsi, dan pengembangan kawasan pariwisata pesisir (*coastal ecotourism*) berbasis *zero-waste*, terintegrasi dan mandiri energi.

Dilihat dari sektor unggulannya, sumber utama pertumbuhan ekonomi sebanyak 4 (empat) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 85,46% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 31,25%; 2) Sektor Industri Pengolahan sebesar 25,42%; 3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,60%; 4) Sektor Konstruksi sebesar 13,19%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Banyuasin pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.

- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 8) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 9) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 10) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 11) Pembangunan 3 juta rumah.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Banyuasin (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung sepanjang 111,69 Km.
- 2) Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu)-Tempino-Jambi bagian dari Trans Sumatera sepanjang 170,7 km.
- 3) Pembangunan Pelabuhan Baru/New Palembang di Tanjung Carat.
- 4) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2025:

- 1) Pengembangan SPAM Regional Palembang-Banyuasin.
- 2) Pembangunan TPST Regional Palembang-Banyuasin.
- 3) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Telang.
- 4) Pengembangan koridor industri Palembang-Banyuasin dengan prioritas: industri kimia, industri energi, industri pengolahan hasil kelapa, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri manufaktur.
- 5) Hilirisasi sawit untuk produk turunan dengan nilai tambah tinggi (*biofuel, fatty acid, fatty alcohol, biofertilizer, green diesel, green jet fuel, dan bioplastik biodegradable*).

- 6) Hilirisasi karet untuk produk lateks, ban, dan produk *value-added rubber* lainnya.
- 7) Hilirisasi komoditas rumput laut untuk asam alginat, kosmetik, farmasi, dan pupuk hayati.
- 8) Hilirisasi mineral tambang yang terintegrasi dengan industri hilir logam.
- 9) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/ peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah.
- 10) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat di D.I.R. Air Saleh, D.I.R. Delta Upang, D.I.R. Karang Agung Tengah, D.I.R. Pulau Rimau, D.I.R. Telang I dan II.
- 11) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
- 12) Pengembangan KSPP Sumatera Selatan.
- 13) Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi).
- 14) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 15) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 16) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 17) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
- 18) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 19) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan

perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.

- 20) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 21) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 22) Pengembangan Lokasi Prioritas Kawasan Swasembada Air dan Energi Cekungan Musi.
- 23) Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Betung-Kenten.
- 24) Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Betung-PLTU MT Sumsel 1.
- 25) Pembangunan infrastruktur sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Kenten-Sungsang-Muntok (Interkoneksi 275 kV Sumatera-Bangka).
- 26) Pengembangan Lokasi Prioritas Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, Kopi, dan Kelapa Cekungan Musi.

- 27) Pengembangan Lokasi Prioritas Kawasan Komoditas Unggulan Banyuasin Ekonomi Biru.
- 28) Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Sungsang.
- 29) Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap.
- 30) Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya.
- 31) Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat.
- 32) Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan.
- 33) Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan.
- 34) Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan.
- 30) Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya Air Tawar, serta pengolahan dan pemasaran ikan di Sungsang.
- 31) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
- 32) Pusat pergudangan Tanjung api-api.
- 33) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Berbak Sembilang.
- 34) Peningkatan produksi pertanian padi dan komoditas pangan lainnya melalui pendekatan pengembangan pertanian *holistic close loop model*, pengelolaan dengan *sytem integrated farm management* yang modern dan digital dan penyediaan irigasi dan/atau irigasi presisi/ *smart irrigation* sesuai kebutuhan komoditas.
- 35) Optimalisasi industri dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pengolahan produk unggulan daerah.
- 36) Peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia.
- 37) Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor industri, teknologi, dan pariwisata.

- 38) Pemutakhiran rutin dan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
- 39) Optimalisasi penurunan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 40) Pemerataan kapasitas, kualitas, dan kuantitas pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan sosial adaptif dan inklusif di kantong kemiskinan berdasarkan *spatial based policy*.
- 41) Optimalisasi Iklim investasi dan penanaman modal.
- 42) Pengembangan kawasan-kawasan yang dapat mendukung fungsi KSN Patungraya Agung dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di sekitarnya.
- 43) Pencegahan dan pengendalian dampak pencemaran dari aktivitas di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi pusat kegiatan di sekitarnya.
- 44) Menjaga kawasan yang berfungsi lindung.
- 45) Melindungi Kawasan pesisir.
- 46) Peningkatan Jalan Eks. Transmigrasi.
- 47) Land4lives (Pemberdayaan Masyarakat Terkait Gender).

8. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Target indikator makro untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai berikut:

Tabel 4.16

Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,58	4,65
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	27,72	28,62*
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	1,76	1,75
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,86	9,0 – 9,5
5	Gini Ratio	0,356	0,310-0,315
6	Indeks Pembangunan Manusia	70,00	72,40

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ -e)	N/A	155.181,23
8	IKLH Daerah	69,34	69,60
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,80	1,79

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BA Pembahasan Pra Musrenbang RKPD Tahun 2026, *penyesuaian target mempertimbangkan capaian terakhir dan Ranwal RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki 1 (satu) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan 1 (satu) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Muaradua. Arah pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai bagian dari KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya yaitu, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan kawasan ekonomi terpadu Danau Ranau, pengembangan kawasan wisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam Danau Ranau berupa pengembangan pelabuhan dermaga Danau Ranau dan dermaga wisata, Pengembangan energi panas bumi Ulu Danau sebagai salah satu energi terbarukan, pengembangan potensi sumber daya mineral logam bijih besi, pengembangan *food estate* sentra produksi padi, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan melalui pengembangan jaringan jalan dan bandara udara Banding Agung, serta menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

Dilihat Distribusi PDRB, sumber pertumbuhan wilayah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 84,36% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024 adalah 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 29,77 %; 2) Perdagangan sebesar 24,43%; 3) Konstruksi sebesar 17,42%; 4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 8,19%; dan 5) Sektor *Real Estate* sebesar 4,55 %.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 8) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 9) Pembangunan 3 juta rumah.
- 10) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 11) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu Bendungan Tiga Dihaji.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2025, antara lain diarahkan pada:

- 1) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
- 2) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
- 3) Revitalisasi Danau Ranau.
- 4) Pembangunan infrastruktur PLTP Danau Ranau.
- 5) Pembangunan PLTS Apung Danau Ranau.
- 6) Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Ogan Komering Ulu Selatan.

- 7) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 8) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 9) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 10) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 11) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi dan kelapa.
- 12) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 13) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
- 14) Pelestarian Kawasan Situs Bersejarah.
- 15) Peningkatan kerjasama dengan kawasan perbatasan.
- 16) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, serta longsor.
- 17) Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- 18) Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi.
- 19) Menjaga kawasan yang berfungsi lindung.
- 20) Perluasan akses internet dan digitalisasi.
- 21) Mempercepat industrialisasi dan pemberdayaan aktivitas ekonomi dari sektor-sektor unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.
- 22) Dukungan promosi dan kemudahan investasi.
- 23) Mengadakan program pelatihan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

- 24) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan dasar melalui pembangunan unit sekolah baru dan penguatan peran puskesmas pembantu.
- 25) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan serta standarisasi kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

9. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Target indikator makro untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai berikut:

Tabel 4.17

Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,12	5,1 – 5,6
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	31,50	31,98
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	3,02	2,98
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,75	9,60
5	Gini Ratio	0,298	0,240 – 0,290
6	Indeks Pembangunan Manusia	73,64	74,00
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ -e)	N/A	273.154,65
8	IKLH Daerah	68,73	66,30
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,45	3,30

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BA Pembahasan Pra Musrenbang RKPD Tahun 2026

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki 2 Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu di Gumawang dan Martapura. Arahkan pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai bagian dari KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya yaitu, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan *biodiesel/ biofuel* berbasis

kelapa sawit, pengembangan *food estate* sentra produksi padi, dan menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

Dilihat Distribusi PDRB, sumber utama pertumbuhan sebanyak 5 (lima) sektor pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 32,35%; 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,66%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 17,92%; 4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 10,01%; dan 5) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,80%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 8) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 9) Pembangunan 3 juta rumah.
- 10) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 11) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati khususnya proyek *flyover* Sungai Tuha.
- 2) Pembangunan Jaringan Irigasi DI Komering.

- 3) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Tahun 2025 antara lain diarahkan pada:

- 1) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
- 2) Pengembangan KSPP Sumatera Selatan.
- 3) Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi).
- 4) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 5) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 6) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 7) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
- 8) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida /pakan organik.
- 9) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.

- 10) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 11) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 12) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
- 13) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
- 14) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 15) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 16) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 17) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa)
- 18) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi dan kelapa.
- 19) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 20) Menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

- 21) Pendekatan pengembangan pertanian holistik melalui model *closed-loop*.
- 22) Peningkatan kerjasama perdagangan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.
- 23) Mendorong realisasi investasi sektor rill dan peningkatan nilai tambah sektor unggulan daerah.
- 24) Pemanfaatan data Regsosek sebagai upaya peningkatan akurasi data penerima bantuan sosial.
- 25) Pemerataan kualitas pelayanan dasar dan kapasitas SDM tenaga kesehatan maupun tenaga pendidik.
- 26) Standarisasi sarana prasarana antar sekolah dan fasilitas kesehatan.

10. Kabupaten Ogan Ilir

Target indikator makro untuk Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut:

Tabel 4.18

Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Ogan Ilir

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,81	4,95 – 5,45
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	34,95	36,52
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	2,25	2,27
4	Tingkat Kemiskinan (%)	12,30	10,5 – 11,0
5	Gini Ratio	0,304	0,290 – 0,292
6	Indeks Pembangunan Manusia	72,67	73,62
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ -e)	N/A	80.979,57
8	IKLH Daerah	66,25	65,44
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,65	2,12 – 2,02

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BA Pembahasan Pra Musrenbang RKPD Tahun 2026

Kabupaten Ogan Ilir memiliki 1 (satu) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Indralaya. Kawasan Indralaya dikembangkan sebagai Kawasan Perkotaan Sekitar dalam Metropolitan Patungraya Agung, yang berperan sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan tinggi dan riset skala nasional, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan transportasi nasional dan regional, pusat kegiatan industri dan pusat pelayanan kesehatan regional. Kabupaten Ogan Ilir diarahkan untuk memantapkan perannya sebagai sentra produksi pangan dan daerah penyangga perkotaan Palembang dan Prabumulih. Komoditi unggulan daerah adalah hortikultura buah-buahan, sayur-sayuran, padi dan ternak sapi.

Berdasarkan Distribusi PDRB Kabupaten Ogan Ilir menurut lapangan usaha tahun 2024, terdapat tiga sektor lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,41%; 2) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 20,46%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 16,62%. Hal ini menggambarkan besarnya pengaruh kegiatan di daerah kota tetangga yaitu Kota Palembang dan Kota Prabumulih.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Ogan Ilir pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 8) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.
- 9) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.

- 10) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 11) Pembangunan 3 juta rumah.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Ogan Ilir (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Jalan Tol Samping Indralaya-Muara Enim-Bagian Trans Sumatera (119,1 Km).
- 2) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2025 antara lain diarahkan pada:

- 1) Pengembangan sektor perdagangan jasa, kawasan pertanian, perikanan dan pariwisata.
- 2) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan.
- 3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat di Daerah Irigasi Rawa (DIR) Ogan Keramasan.
- 4) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah.
- 5) Pengembangan KSPP Sumatera Selatan.
- 6) Peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi).
- 7) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 8) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 9) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 10) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura.
- 11) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung

perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.

- 12) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascaPanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 13) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 14) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 15) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Sub-DAS Ogan.
- 16) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada Sub-DAS Ogan.
- 17) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit,karet,kopi dan kelapa).

- 18) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet dan kelapa).
- 19) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa).
- 20) Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) pada komoditas produksi industri (sawit, karet, dan kelapa).
- 21) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa.
- 22) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 23) Pengembangan Indralaya sebagai Kawasan Perkotaan Sekitar.
- 24) Pengembangan Pusat Pendidikan.
- 25) Percepatan Pembangunan *junction* Palembang.
- 26) Pengembangan Daerah Perbatasan Palembang-Ogan Ilir.
- 27) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

11. Kabupaten Empat Lawang

Target indikator makro untuk Kabupaten Empat Lawang sebagai berikut:

Tabel 4.19

Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Empat Lawang

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,44	4,95 – 5,00
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	19,45	19,82
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	0,99	0,98
4	Tingkat Kemiskinan (%)	10,78	10,25 – 10,92
5	Gini Ratio	0,396	0,290

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
6	Indeks Pembangunan Manusia	69,63	69,80
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ -e)	N/A	183.631,33
8	IKLH Daerah	65,85	66,67
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,84	2,80 – 3,20

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BA Pembahasan Pra Musrenbang RKPD Tahun 2026, *penyesuaian target mempertimbangkan capaian terakhir

Kabupaten Empat Lawang memiliki 2 PKL (Tebing Tinggi dan Ulu Musi). Arahkan pengembangan Kabupaten Empat Lawang yaitu, pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perdagangan jasa dan pariwisata, diarahkan sebagai pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan, pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu, Pengembangan kawasan agropolitan Pasemah Air Keruh, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan; dan menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung.

Berdasarkan Distribusi PDRB Kabupaten Empat Lawang menurut lapangan usaha tahun 2024, terdapat tiga sektor lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan *share* sebesar 34,04%, 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparaasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 22,61%, 3) Sektor Industri Pengolahan sebesar 12,21%.

Arahkan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Empat Lawang pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Empat Lawang (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Jalan Tol Betung (SP.Sekayu)-Tempino-Jambi-Bagian Trans Sumatera ((170,7 Km).
- 2) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2025 antara lain diarahkan pada:

- 1) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah pusat pada D.I. Air Keruh, D.I. Lintang Kanan, dan D.I. Lintang Kiri.
- 2) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah daerah.
- 3) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 4) Peningkatan produktivitas perternakan/panagn hewani (termasuk pengembangan Kawasan Peternakan).
- 5) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.

- 6) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, Peternakan dan hortikultura.
- 7) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain Kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi and revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.
- 8) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/ benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas' mitigasi OPT dan Kesehatan hewan; peningkatan Infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 9) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan, penguatan Kelembagaan koperasi dan korporasi petani, pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani, perluasan akses asuransi usaha tani: peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang, pengelolaan penyerapan hasil panen komoditas pangan utama.
- 10) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 11) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi.

- 12) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada DAS Musi.
- 13) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
- 14) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
- 15) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi, dan kelapa).
- 16) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
- 17) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi dan kelapa.
- 18) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 19) Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC).
- 20) Pengembangan destinasi wisata.
- 21) Pengembangan Kawasan Agropolitan Pasemah Air Keruh.
- 22) Peningkatan penangan dan pelayanan kesehatan melalui pemenuhan fasilitas kesehatan khususnya fasilitas kesehatan tingkat I.
- 23) Peningkatan kapasitas pengelolaan teknologi informasi dan digitalisasi pemerintah daerah terutama dalam mendukung percepatan pelayanan publik berbasis digital.
- 24) Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM penanggulangan bencana.
- 25) Inklusivitas pembangunan di antara berbagai kelas ekonomi.

12. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Target indikator makro untuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai berikut:

Tabel 4.20
Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,98	5,20
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	45,70	47,56
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	1,39	1,33
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,82	9,30
5	Gini Ratio	0,293	0,290
6	Indeks Pembangunan Manusia	69,63	70,99
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	287.342,64
8	IKLH Daerah	71,02	67,95
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,72	3,65

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BA Pembahasan Pra Musrenbang RKPD Tahun 2026

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki 1 PKL (PKL Talang Ubi/Pendopo). Arahkan pengembangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai bagian dari KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya yaitu, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan kawasan industri di Kawasan Industri Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pengembangan kawasan wisata Candi Bumi Ayu di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi

kawasan, dan penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan kawasan.

Berdasarkan Distribusi PDRB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menurut lapangan usaha tahun 2024, terdapat 4 (empat) sektor lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 38,94%, 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,26%, 3) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 15,68% dan 4) Sektor Konsruksi dengan *share* sebesar 14,91%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kabupaten Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Jalan Tol Betung (SP.Sekayu)-Tempino-Jambi-Bagian Trans Sumatera ((170,7 Km).
- 2) Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2025 antara lain diarahkan pada:

- 1) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Petata (SP1 Desa Tempirai Selatan).
- 2) Peningkatan RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Penukal Abab Lematang Ilir.
- 3) Peningkatan Produktivitas Perkebunan dan kualitas produksi (sawit dan karet).
- 4) Pengembangan dan perlindungan Kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit dan karet).
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit dan karet).
- 6) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas peoduksi industri (sawit dan karet).
- 7) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit dan karet.
- 8) Pengembang produksi bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
- 9) Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan untuk mendukung kedaulatan pangan.
- 10) Pengembangan Pariwisata dan Pelestarian Kawasan Bersejarah Candi Bumi Ayu.
- 11) Pengembangan Kawasan Industri Talang Ubi.
- 12) Melindungi Kawasan lindung gambut.
- 13) Pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- 14) Pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional.

- 15) Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan.
- 16) Diversifikasi ekonomi melalui optimalisasi hilirisasi sektor unggulan daerah seperti pertanian dan perkebunan.
- 17) Peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia.
- 18) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan peningkatan daya tarik pariwisata melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas lokal.
- 19) Pemberian bantuan yang bersifat pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan.
- 20) Pemutakhiran rutin dan pemanfaatan data Registrasi Sosial EKonomi (Regsosek).
- 21) Pemerataan kapasitas, kualitas, dan kuantitas pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan sosial adaptif dan inklusif di kantung kemiskinan berdasarkan *spatial based policy*.

13. Kabupaten Musi Rawas Utara

Target indikator makro untuk Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:

Tabel 4.21

Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas Utara

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,52	4,3 – 4,6
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	48,87	51,36
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	1,43	1,36
4	Tingkat Kemiskinan (%)	17,38	16,00 – 17,00
5	Gini Ratio	0,254	0,253*
6	Indeks Pembangunan Manusia	70,45	71,00
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ -e)	N/A	639.336,12
8	IKLH Daerah	72,08	71,37

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91	3,84 – 4,50

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BA Pembahasan Pra Musrenbang RKPD Tahun 2026, *penyesuaian target mempertimbangkan capaian terakhir dan Ranwal RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029*

Pengembangan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai daerah otonomi baru memiliki 1 KSN (Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat), 1 PKL (Muara Rupit). Arahannya pengembangan Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu, pengembangan desa tertinggal, pengembangan potensi sumber daya mineral logam seng, batu bara, dan timah hitam, peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah, menjaga Kawasan yang berfungsi lindung; dan peningkatan kerjasama antar kawasan perbatasan.

Berdasarkan Distribusi PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara menurut lapangan usaha tahun 2024, terdapat 2 (dua) sektor lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 47,77% dan 2) Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 21,54%.

Arahannya Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Musi Rawas Utara pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.

- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2025 antara lain diarahkan pada:

- 1) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
- 2) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
- 3) Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)
- 4) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
- 5) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
- 6) Peningkatan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk mendukung perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
- 7) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen

- 8) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
- 9) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
- 10) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* DAS Musi
- 11) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada DAS Musi
- 12) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
- 13) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
- 14) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
- 15) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa)
- 16) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa
- 17) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura

- 18) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Kerinci Seblat.
- 19) Menjadi indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)
- 20) Pengembangan kawasan perkotaan Muara Rupit dan sekitarnya.
- 21) Pengembangan desa tertinggal.
- 22) Pengembangan potensi sumber daya mineral logam seng, batu bara dan timah hitam
- 23) Peningkatan kerjasama antarkawasan perbatasan
- 24) Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan
- 25) Perluasan akses internet dan digitalisasi
- 26) Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan (pertanian/Perkebunan/perikanan/peternakan *high value*)
- 27) Dukungan promosi dan kemudahan investasi penyediaan
- 28) Implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas, seperti pelatihan modal keterampilan, usaha, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
- 29) Mengembangkan program pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar, terutama bagi pemuda dan lulusan sekolah
- 30) Mengembangkan potensi pariwisata dengan mempromosikan objek wisata alam dan budaya, serta membangun infrastruktur pendukung penginapan dan aksesibilitas

14. Kota Palembang

Target indikator makro untuk Kota Palembang sebagai berikut:

Tabel 4.22**Capaian dan Target Indikator Makro Kota Palembang**

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,13	5,1 – 5,5*
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	121,15	134,45
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	30,75	30,65
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,77	8,90 – 9,90
5	Gini Ratio	0,354	0,329*
6	Indeks Pembangunan Manusia	82,29	82,82
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	10.144,83
8	IKLH Daerah	63,14	61,46
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,98	6,08

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BA Pembahasan Pra Musrenbang RKPD Tahun 2026, *penyesuaian target mempertimbangkan capaian terakhir dan Ranwal RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029*

Kota Palembang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dikembangkan sebagai Kawasan Perkotaan dan Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung, serta penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan. Kota Palembang juga direncanakan sebagai pusat kegiatan Kawasan Perkotaan Inti dalam KSN Patungraya Agung, sebagai pusat pemerintahan provinsi dan pusat pemerintahan kota, pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan pendidikan tinggi dan riset skala nasional, pusat pelayanan olah raga skala internasional, nasional, dan regional, pusat pelayanan kesehatan skala nasional dan regional, pusat kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif, pusat pelayanan transportasi udara skala internasional, nasional dan regional, pusat pelayanan transportasi sungai dan laut skala nasional dan regional, pusat pelayanan transportasi darat skala

nasional dan regional, pusat pertemuan, pameran, dan konvensi skala nasional dan internasional, dan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara. Kota Palembang juga memiliki Kawasan Konservasi yaitu Taman Wisata Alam Punti Kayu.

Dilihat dari Distribusi PDRB sektor yang menjadi sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 79,30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Industri Pengolahan sebesar 31,68%; 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 18,78%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 15,36%; 4) Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 7,74%; 5) Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,74%.

Pembangunan Kota Palembang akan menentukan sejauh mana wilayah Sumatera Selatan mendapatkan manfaat dari percepatan pembangunan Koridor Ekonomi Sumatera. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi Kota Palembang juga harus melakukan penanganan untuk mengatasi kemiskinan.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kota Palembang pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Pembangunan jaringan gas perkotaan.

- 10) Program pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kota Palembang (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung–Palembang– Betung Tahap 2 Keramasan-Betung sepanjang 111,69 Km.
- 2) *LRT* Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang).
- 3) Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati
- 4) *Upgrading* kilang-kilang *eksisting/refinery development master plan (RDMP)*. Pembangunan bahan bakar hijau (Green Refinery) RU III Plaju.
- 5) Pembangunan bahan bakar hijau/*Green Refinery* di Plaju.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, prioritas pembangunan wilayah Kota Palembang pada tahun 2025 antara lain diarahkan pada:

- 1) Pengembangan dan penataan WM Palembang, antara lain melalui:
 - Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Palembang;
 - Penyusunan *masterplan* penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu;
 - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau;
 - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan;
 - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan;
 - Penyusunan *metropolitan statistical area*;
 - Penataan Kawasan Strategis dan Penyediaan Perumahan Publik Vertikal Perkotaan Terpadu di Wilayah Metropolitan Palembang.

- 2) Pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD) dan *Urban Renewal* Kawasan Stasiun Ampera.
- 3) Pengembangan Jalan Lingkar Timur Palembang.
- 4) Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di WM Palembang.
- 5) Pengembangan SPAL Regional Perkotaan WM Palembang.
- 6) Pengembangan SPAM Regional Palembang-Banyuasin.
- 7) Pembangunan TPST Regional Palembang-Banyuasin.
- 8) Percepatan pengembangan Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati, khususnya pada pengembangan Terminal Bongkar Batubara (TBB)/ *Terminal Unloading System* (TULS) Stasiun Keramasan.
- 9) Percepatan proyek *Upgrading Kilang-Kilang Eksisting/Refinery Development Masterplan (RDMP)* Plaju.
- 10) Pengembangan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di WM Palembang (PHTC).
- 11) Pengembangan koridor industri Palembang-Banyuasin dengan prioritas: industri kimia, industri energi, industri pengolahan hasil kelapa, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri manufaktur.
- 12) Optimalisasi pengelolaan kawasan industri terpadu berbasis pusat logistik berikat dan pelabuhan serta kawasan industri prioritas publik Pusri III-D.
- 13) Pengembangan *Fly Over* Sudirman dan *Underpass* Charitas.
- 14) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan /peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah.

15. Kota Prabumulih

Target indikator makro untuk Kota Prabumulih sebagai berikut:

Tabel 4.23

Capaian dan Target Indikator Makro Kota Prabumulih

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,01	5,30
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	51,81	54,03
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	1,56	1,57
4	Tingkat Kemiskinan (%)	10,13	10,10
5	Gini Ratio	0,353	0,347
6	Indeks Pembangunan Manusia	78,68	79,05
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ -e)	N/A	26.375,98
8	IKLH Daerah	62,79	62,17
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,94	4,85

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BA Pembahasan Pra Musrenbang RKPD Tahun 2026

Kota Prabumulih digolongkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Selain itu, Kota Prabumulih memiliki 2 (dua) kegiatan PSN meliputi pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim bagian dari Trans Sumatera sepanjang 119 km dan Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati. Arahannya pengembangan Kota Prabumulih yaitu, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan, dan penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan kawasan.

Berdasarkan Distribusi PDRB, sektor yang menjadi sumber utama pertumbuhan daerah di Kota Prabumulih pada tahun 2024 berdasarkan sektor lapangan usaha terdapat 5 (lima) sektor yang memberikan kontribusi sebesar 70,90% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)

pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 27,15%; 2) Sektor Konstruksi sebesar 17,12%; 3) Sektor Industri Pengolahan sebesar 10,85%; 4) Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,20%; dan 5) Sektor Real Estate sebesar 7,58%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kota Prabumulih pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kota Prabumulih (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu:

- 1) Pembangunan jalan tol Simpang Indralaya–Muara Enim tahap 2 Ruas Prabumulih-Muara Enim sepanjang 56,85 km.
- 2) Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kota Prabumulih pada tahun 2025 antara lain diarahkan pada:

- 1) Peningkatan produktivitas perkebunan menuju kedaulatan pangan.
- 2) Pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

- 3) Pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional.
- 4) Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan.
- 5) Optimalisasi industri dan UMKM pengolahan produk unggulan daerah seperti hilirisasi produk nanas.
- 6) Peningkatan daya saing dan kualitas SDM.
- 7) Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor industri, teknologi, dan pariwisata.
- 8) Pemutakhiran rutin dan pemanfaatan data regsosek.
- 9) Pemerataan kapasitas, kualitas, dan kuantitas pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan sosial adaptif dan inklusif di kantung kemiskinan berdasarkan *spatial based policy*.
- 10) Kualitas lingkungan hidup dan kesadaran masyarakat terkait lingkungan.

16. Kota Pagar Alam

Target indikator makro untuk Kota Pagar Alam sebagai berikut:

Tabel 4.24

Capaian dan Target Indikator Makro Kota Pagar Alam

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,50
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	25,54	30,97*
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	0,56	0,55
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,18	7,48 – 7,60
5	Gini Ratio	0,283	0,278
6	Indeks Pembangunan Manusia	74,00	74,51
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ -e)	N/A	51.487,98
8	IKLH Daerah	72,17	72,02

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,34	2,00

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BA Pembahasan Pra Musrenbang RKPD Tahun 2026, *penyesuaian target mempertimbangkan capaian terakhir dan Ranwal RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029*

Kota Pagar Alam merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Arahannya pengembangan Kota Pagar Alam yaitu, pengembangan objek daya tarik wisata kawasan situs Megalith, pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu, pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan, penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan, menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung, serta sebagai pengembangan Kawasan pariwisata dataran tinggi karena dikelilingi oleh bentang alam pegunungan dan daerah pertanian yang indah, sehingga potensi pengembangan pariwisata sangat menjanjikan.

Berdasarkan Distribusi PDRB, sektor yang menjadi sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 75,28% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,84%; 2) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,61%; 3) Sektor Konstruksi sebesar 15,33%; 4) Sektor Jasa Pendidikan sebesar 10,12%; 5) Sektor Real Estat sebesar 5,38%.

Arahannya Proyek Strategis Nasional di Kota Pagar Alam pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 7) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 8) Pembangunan 3 juta rumah.
- 9) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
- 10) Layanan irigasi pendukung lumbung pangan.

Arahan proyek strategis lainnya di Kota Pagar Alam (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu Bendungan Tiga Dihaji (25 ribu Hektar)

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kota Pagar Alam pada tahun 2025, antara lain diarahkan pada:

- 1) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah pusat pada D.I. Muara Riben.
- 2) Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 3) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi).
- 4) Peningkatan produktivitas perternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan).
- 5) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- 6) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, Peternakan dan hortikultura.
- 7) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain Kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan

pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi and revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.

- 8) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas' mitigasi OPT dan Kesehatan hewan; peningkatan Infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen.
- 9) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan, penguatan Kelembagaan koperasi dan korporasi petani, pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani, perluasan akses asuransi usaha tani: peningkatan Infrastruktur logistic dan perluasan akses layanan system resi Gudang, pengelolaan penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
- 10) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.
- 11) Pengembangan pariwisata (mendukung KSPN Pagar Alam dan sekitarnya).
- 12) Peningkatan ekonomi kreatif serta UMKM dengan skema kerja sama swasta dan komunitas lokal.
- 13) Pelestarian Kawasan Bersejarah Situs Purbakala Megalith.
- 14) Peningkatan akses jalan menuju Kota Pagar Alam dan jalur transportasi udara (Bandara Atung Bungsu).

- 15) Peningkatan produktivitas dan hilirisasi hasil perkebunan dan hortikultura.
- 16) Penataan Kawasan Rawan Bencana sekitar Gunung Dempo.
Pengembangan Pusat Kesehatan Perkotaan.
- 17) Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan.
- 18) Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan.
- 19) Menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung.
- 20) Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan, pariwisata, serta perdagangan.
- 21) Peningkatan daya saing dan kualitas SDM.
- 22) Beasiswa daerah untuk mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
- 23) Optimalisasi pemberdayaan sosial, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah.
- 24) Pemberian bantuan yang bersifat pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan.

17. Kota Lubuk Linggau

Target indikator makro untuk Kota Lubuk Linggau sebagai berikut:

Tabel 4.25
Capaian dan Target Indikator Makro Kota Lubuk Linggau

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,62	4,50 – 5,00
2	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp juta)	35,43	40,37
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	1,29	1,30
4	Tingkat Kemiskinan (%)	11,14	10,20 – 10,70

No.	Indikator Makro	Capaian 2024	Target 2025
5	Gini Ratio	0,353	0,332 – 0,350
6	Indeks Pembangunan Manusia	78,98	79,28
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2-e)	N/A	21.780,11
8	IKLH Daerah	71,83	68,74
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,29	4,62 – 5,30

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BA Pembahasan Pra Musrenbang RKPD Tahun 2026

Kota Lubuk Linggau memiliki 1 KSN Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), 1 PKW (Lubuk Linggau). Arah pengembangan Kota Lubuk Linggau yaitu, pengembangan Kawasan Perkotaan Lubuk Linggau yang dapat mendukung percepatan peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang, pengembangan kawasan yang mendukung PKW Lubuk Linggau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya, peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan; penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan Kawasan serta pelayanan publik; menjaga Kawasan yang berfungsi lindung; serta peningkatan kerjasama antar kawasan perbatasan.

Berdasarkan Distribusi PDRB, sektor yang menjadi sumber utama pertumbuhan daerah sebanyak 5 (lima) sektor dengan memberikan kontribusi sebesar 67,00% terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2024, meliputi 1) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 23,67%, 2) Sektor Konstruksi sebesar 21,09%; 3) Sektor Real Estat sebesar 8,58%; 4) Sektor Industri Pengolahan sebesar 7,16%; 5) Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,50%.

Arahan Proyek Strategis Nasional di Kota Lubuk Linggau pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- 2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas.
- 3) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
- 4) Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas.
- 5) Program penuntasan TBC.
- 6) Pengembangan *food estate*.
- 7) Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu.
- 8) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5000) seluruh wilayah kabupaten.
- 9) Pembangunan 3 juta rumah.
- 10) Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.

Arahan proyek strategis lainnya di Kota Lubuk Linggau (Permenko RI No.12 Tahun 2024) yaitu terkait pembangunan Jalan Tol Lubuklinggau-Curup-Bengkulu yang merupakan bagian dari Trans Sumatera sepanjang 94,9 km.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kota Lubuk Linggau pada tahun 2025 antara lain diarahkan pada:

- 1) Penyusunan *masterplan* penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu.
- 2) Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau.
- 3) Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan.
- 4) Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan.

- 5) Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Lubuklinggau dalam Progran Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
- 6) Pengembangan SPAM Perkotaan Lubuk Linggau.
- 7) Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau (PHTC).
- 8) Preservasi jalan ruas Lubuk Linggau-Tebing Tinggi-Lahat, Lubuklinggau-Rupit, Lubuk Linggau-Curup.
- 9) Pengembangan kota agropolitan Lubuk Linggau.
- 10) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
- 11) Pengembangan destinasi wisata.
- 12) Pengembangan Kawasan Industri Lubuk Linggau.
- 13) Pengembangan Pusat Pendidikan Perkotaan dan Kesehatan.
- 14) Pengembangan konektivitas wilayah.
- 15) Pemenuhan amenitas perkotaan (antara lain ruang terbuka hijau, ruang terbuka publik, jalur pedestrian, *landmark* kota).
- 16) Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan perkotaan.
- 17) Optimalisasi kerjasama antar kabupaten/kota.
- 18) Penguatan promosi pariwisata.
- 19) *Scaling-up* UMKM dan wirausaha muda.
- 20) Optimalisasi investasi sektor swasta.

4.2.1.4. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan kemajuan yang merata, inklusif, dan ramah lingkungan, sehingga dapat menjamin kesejahteraan bagi

generasi sekarang dan masa depan. Untuk itu, pada tahun 2015, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, *Sustainable Developments Goals* (TPB/SDGs). SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”. Tujuan ini diharapkan dapat dicapai melalui sinergi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya di tingkat global, nasional, dan daerah.



Gambar 4.11.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Sumber: Sekretariat Nasional SDGs

Untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut berkontribusi melalui upaya-upaya yang memastikan bahwa pencapaian SDGs dapat berjalan seiring dengan visi pembangunan daerah serta kebutuhan dan tantangan lokal yang ada. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan ketahanan pangan dan energi, optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan pertumbuhan

ekonomi yang tetap berwawasan lingkungan (*Green Growth South Sumatra*) merupakan rangkaian upaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, terdapat 249 indikator yang harus dicapai pada TPB/SDGs Provinsi Sumatera Selatan, dimana sebanyak 98 indikator pada Pilar Pembangunan Sosial, 59 indikator pada Pilar Pembangunan Ekonomi, 69 indikator pada Pilar Pembangunan Lingkungan dan 23 indikator pada Pilar Hukum dan Tata Kelola.



Gambar 4.12
Pemetaan Goals, Target dan Indikator TPB/SDGs
Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, diolah

Gambaran umum capaian TPB/SDGs Sumatera Selatan berdasarkan laporan RAD SDGs terakhir diketahui bahwa dari 249 total indikator yang ada, sebanyak 131 indikator atau 52,21 persen yang dilaksanakan tercapai, 57 indikator atau 22,89 persen yang dilaksanakan akan tercapai atau membaik dan 62 indikator atau 24,90 persen yang dilaksanakan mengalami perubahan negatif atau perlu perhatian khusus/tidak tersedia data.

Memperhatikan analisis terhadap masing-masing capaian SDGs, berikut adalah rumusan isu strategis berdasarkan capaian SDGs yang dibagi dalam empat pilar yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan serta pilar hukum dan tata kelola. Rumusan isu strategis merupakan capaian SDGs dalam kelompok yang belum mencapai target dan yang belum memiliki data. Sedangkan untuk indikator SDGs yang telah mencapai target maka perlu untuk tetap dipertahankan kinerja agar tidak turun.

Tabel 4.26
Isu Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
Pilar Sosial		
Tujuan 1 mengentaskan segala bentuk kemiskinan	• Persentase Penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK) di Sumatera Selatan masih diatas rata-rata nasional; • Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan Komponen pembentuk GK yang memiliki peranan terbesar dibandingkan non makanan;	• Perlunya meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar khususnya wilayah dengan kantong-kantong kemiskinan yang tinggi; • Diperlukan intensifikasi terhadap strategi pendekatan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin khususnya komponen makanan melalui Bantuan Sosial;
	• Komoditas sumbangan terbesar pada GK baik perkotaan maupun perdesaan pada beras dan rokok.	• Perlunya dilakukan pemberdayaan dan kegiatan ekonomi produktif lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan penduduk miskin serta membudayakan prilaku hidup sehat.

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
Tujuan 2 menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan	• Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. • Prevalensi Stunting masih cukup tinggi dan adanya ketidakseimbangan dalam pencegahan stunting, terutama di daerah tertentu yang justru mengalami peningkatan angka stunting • Pola konsumsi pangan masyarakat masih tergantung pada konsumsi beras sebagai komoditas utama dan konsumsi pangan penting lainnya seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, dan buah-buahan masih rendah	• Memperkuat konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan dalam peningkatan cakupan dan kualitas intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive pada sasaran prioritas di lokasi fokus pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi; • Kampanye edukasi yang intensif mengenai pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), serta pentingnya pemberian ASI eksklusif dan pola asuh yang baik. • Program subsidi pangan atau pemberian bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah perlu diperluas untuk meningkatkan akses ekonomi terhadap pangan bergizi.
Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia	• Jumlah kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi • Meningkatnya persentase penyalahgunaan narkoba • Meningkatnya Angka kelahiran pada Perempuan usia 15-	• Menurunkan AKI dan AKB melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan reproduksi bagi Ibu dan remaja putri; • Peningkatan kesehatan masyarakat disetiap siklus hidup melalui peningkatan mutu posyandu aktif

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
	19 tahun dan masih relative tinggi	• Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif pemberdayaan masyarakat sehat melalui GERMAS • Peningkatan strategi yang komprehensif dan terpadu dalam pembinaan ketahanan remaja dan Pembangunan keluarga
Tujuan 4 menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua	• Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat masih kurang • Persentase Harapan Lama sekolah masih lebih rendah menunjukkan bahwa banyak individu belum menyelesaikan pendidikan mereka hingga jenjang yang lebih tinggi • Persentase guru sekolah dan PLB yang bersertifikat pendidik masih kecil	• Meningkatkan akses dan layanan pendidikan • Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan • Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, distribusi pendidik yang merata • Pemerataan pendidikan baik di daerah maupun di perkotaan karena masih terdapat kesenjangan pendidikan baik di kota maupun di desa • Mengoptimalkan Pendidikan Non Formal Bagi Masyarakat Usia Produktif yang Masih Berpendidikan Rendah
Tujuan 5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	• Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menunjukkan angka yang tinggi • Masih adanya praktik perkawinan dini yang dapat berdampak	• Memperluas Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak dengan meningkatkan kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
	pada kesehatan reproduksi Jumlah perempuan yang menduduki posisi managerial, keterlibatan perempuan dalam politik dan sosial masih terbatas	- Memperkuat peran perempuan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang lebih komprehensif. - Melakukan sosialisasi terkait resiko perkawinan usia dini yang berdampak pada kesehatan reproduksi
Pilar Ekonomi		
Tujuan 7 menjamin akses energi terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	- Kebutuhan dan Konsumsi listrik terus meningkat; - Sumber energi masih bergantung pada Sumber Energi Fosil, belum ada bauran energi terbarukan.	- Menambah ketersediaan energi listrik untuk masyarakat, terutama di daerah terpencil (pesisir, pegunungan, perbatasan) melalui Pembangkit Listrik Berbasis EBT; - Optimalisasi penyediaan energi melalui alternatif energi non batubara/fosil dalam mendukung terwujud Energi Baru Terbarukan di Tahun 2060.
Tujuan 8 mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua	- Pertumbuhan ekonomi masih dibawah nasional; - PDRB daerah masih didominasi oleh Sektor Pertambangan dan Penggalian; - Tenaga kerja formal masih rendah dibandingkan tenaga kerja informal; - TPT diwilayah perkotaan masih tinggi;	- Mengurangi hambatan investasi - Menyediakan prasarana dan sarana pendukung investasi - Penguatan Sektor Kesehatan untuk memberikan keyakinan kepada Investor. - Mengembangkan industri pengolahan (manufaktur) untuk hilirisasi SDA unggulan dengan memprioritaskan penggunaan sebesar-besarnya tenaga kerja

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
		lokal dan pemanfaatan sumber daya alam (resources)/ bahan baku lokal;
Tujuan 9 membangun infrastruktur yang Tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	• Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita cenderung menurun; dan • Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur meningkat namun lambat.	• Meningkatkan kondisi jalan mantap; • Pengembangan Kawasan industri dan Pelabuhan New Port Palembang; dan • Kemudahan dalam berinvestasi melalui Mall pelayanan publik dan Legalisasi Regulasi tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
Tujuan 10 mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara	• Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggal; dan • persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	• Perlu adanya inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua untuk mengurangi ketimpangan pendapatan; • Peningkatan jumlah pekerja kelompok menengah bawah pada sektor formal melalui penyediaan pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja untuk mengembangkan kesempatan kerja yang baik mencetak tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. • Pemerataan pembangunan yang berfokus pada proyek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi daerah

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
		Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang merubah mindset masyarakat dari pembeli menjadi penghasil secara langsung dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat
Tujuan 17 menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan	- Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya - Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB Sumatera Selatan	- Mengoptimalkan penggalan potensi sumber pajak dan efektivitas pengumpulannya, - Meningkatkan kesadaran wajib pajak, - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi domestik yang diperkirakan masih sekitar 5 persen,
	- Rata-rata pertumbuhan investasi PMA dan PMDN. - Pertumbuhan ekspor produk non migas.	- Perlunya peningkatan investasi baik PMA maupun PMDN - Perlunya upaya peningkatan ekspor khususnya produk non migas
Pilar Lingkungan		
Tujuan 6 menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak masih berada di bawah capaian - Persentase masyarakat berpendapatan rendah yang tidak memiliki akses fasilitas BAB masih rendah	- Memanfaatkan dana pihak ketiga terutama CSR dalam membangun infrastruktur dasar sanitasi - Membangun kerjasama dengan swasta, masyarakat di dalam pembangunan infrastruktur dasar sanitasi

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
Tujuan 11 membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, Tangguh, dan berkelanjutan	• Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Sumsel masih tinggi; • Sampah perkotaan yang tertangani masih sedikit; • Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) masih tinggi;	• Perlu upaya kolaborasi dan terintegrasi berupa kajian dan peta resiko bencana, pembangunan basis data bencana dan perubahan iklim, menindak upaya-upaya yang berdampak pada pencemaran udara, meningkatkan kualitas air sungai dan danau serta pengendalian karhutla. • Pengelolaan sampah terpadu. • Emisi gas rumah kaca yang terus meningkat, penanganan karhutla, dan persentase rumah tangga dengan hunian layak dan terjangkau masih perlu mendapat perhatian khusus ke depannya.
Tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	• Jumlah Perusahaan Peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru masih rendah; • Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister masih belum terlaksana	• Mendorong seluruh pelaku usaha besar untuk melaksanakan Program Proper • Mendorong perubahan gaya hidup yang ramah lingkungan tidak hanya melalui edukasi di pendidikan formal tetapi juga di fasilitas publik • Peningkatan mutu dan kualitas Pelayanan Publik
Tujuan 13 membuat langkah segera untuk	• Penurunan jumlah hotspot dan luas kebakaran hutan dan lahan;	• Pemberian edukasi dan penegakan hukum untuk pembukaan lahan dengan bakar dan

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
mengatasi iklim dan dampaknya	• Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang;	pengeringan lahan gambut; • Memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan tata ruang; • Meningkatkan kapasitas dan akses terhadap sarana kedaruratan untuk MPA dalam penanganan kebakaran;
Tujuan 14 melakukan konservasi sumber daya laut, samudera dan maritime untuk pembangunan yang berkelanjutan	• Jumlah luasan kawasan konservasi laut • Rehabilitasi mangrove • Jumlah kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK)	• Meningkatkan status kawasan konservasi dari Pencadangan ke Penetapan • Penanaman mangrove (Konservasi spesies yang terancam punah, lokal dan bernilai ekonomi tinggi) • Meningkatkan jumlah kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK)
Tujuan 15 melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggunaan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan	• Masih rendahnya tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan • Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan masih belum mencapai target • Meningkatkan jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi. • Meningkatkan jumlah penyelesaian kasus	• Mengidentifikasi dan pemetaan lahan kritis • Penanganan pemanfaatan/ eksploitasi berlebihan dan peredaran /perdagangan tumbuhan dan satwaliar; • Konservasi spesies yang kritis, terancam, rentan, atau bernilai ekonomi tinggi; • Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pranata kebijakan dan penegakan hukum keanekaragaman hayati.

TPB Pilar Sosial	Isu Strategis/ Permasalahan dan Tantangan pencapaian	Upaya Tindak Lanjut
keanekaragaman hayati	tindak pidana lingkungan hidup di pengadilan.	
Pilar Lingkungan		
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan kelembagaan yang kokoh	• Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah. • Belum optimalnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. • Belum terpenuhinya keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif	• Penguatan kelembagaan yang efektif, akuntabel dan transparan; dan • Kemudahan akses penduduk terhadap informasi publik.

Upaya menjaga kelestarian alam melalui program penghijauan, pengelolaan sampah, dan pengurangan emisi karbon telah menunjukkan perkembangan yang positif. Namun, isu deforestasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan masih memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Namun, beberapa tantangan besar tetap harus menjadi fokus perhatian ke depan, yaitu:

1. Ketimpangan Pembangunan: Meskipun ada kemajuan, ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih sangat signifikan. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang lebih inklusif yang memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah tertinggal, mendapatkan akses yang setara terhadap berbagai layanan dasar;
2. Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan: Meningkatkan infrastruktur dasar seperti akses jalan, energi, dan transportasi

yang ramah lingkungan perlu terus diupayakan, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang;

3. Tantangan Perubahan Iklim: Perubahan iklim yang semakin nyata memerlukan tindakan lebih konkret untuk mengurangi dampaknya, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan terhadap ekosistem yang ada.

Rekomendasi untuk peningkatan capaian SDGs di tahun mendatang:

1. Kolaborasi yang Lebih Kuat, Pencapaian SDGs yang lebih cepat dan merata hanya dapat terwujud dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta organisasi non-pemerintah. Kolaborasi ini harus lebih terstruktur dan terkoordinasi dalam berbagai program Pembangunan;
2. Peningkatan Infrastruktur di Daerah Tertinggal, Pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal, termasuk akses ke air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi. Ini penting agar ketimpangan pembangunan dapat dikurangi dan masyarakat lebih merasakan manfaat dari Pembangunan;
3. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi, Teknologi digital dan inovasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam. Pemanfaatan teknologi dapat mempercepat proses pengumpulan data, analisis, serta implementasi kebijakan yang berbasis pada bukti;
4. Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan, Untuk mencapai SDG yang terkait dengan pendidikan dan pekerjaan yang layak, perlu ada peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan vokasional, dan pelatihan kerja untuk memastikan generasi muda siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif;
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Masyarakat perlu dilibatkan lebih aktif dalam pengelolaan sumber

daya alam dan perlindungan lingkungan. Program pemberdayaan yang berbasis pada pengelolaan alam secara berkelanjutan akan membantu mewujudkan SDG yang berfokus pada kelestarian lingkungan.

4.2.1.5. Telaah Pokok – Pokok Pikiran DPRD

Rekomendasi kebijakan dari DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran diarahkan untuk selaras dengan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Hasil telaah pokok-pokok pikiran DPRD tersebut dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan seperti kurangnya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, kurangnya bahan literasi perpustakaan, perlunya pembangunan/perbaikan gedung sekolah, kelas belajar, dan fasilitas gedung/lapangan olahraga, pembangunan fasilitas laboratorium, penyediaan mobiler kelas, peralatan seni, dan bantuan beasiswa.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan seperti bantuan renovasi puskesmas dan bantuan gizi untuk bayi.
 - c. Kurangnya akses air minum/air bersih sehingga perlunya penyediaan air bersih melalui penyediaan tanki air, instalasi pipa, pembuatan sumur bor, dan pembuatan embung (waduk) penampungan air.
 - d. Kurang optimalnya perlindungan dan jaminan sosial seperti masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak terdaftar di PBI.

- e. Kurangnya pembinaan dan pengembangan olahraga seperti kurangnya sarana dan prasarana olahraga.
 - f. Kurangnya keterampilan tenaga kerja seperti belum adanya pelatihan bagi tenaga kerja serta perlunya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan.
2. Permasalahan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
- a. Kurangnya akses infrastruktur jalan seperti perlunya pembangunan/perbaikan jalan, baik jalan provinsi, jalan poros/lingkungan/lingkar desa, jalan lingkungan, jalan permukiman, jalan/jalur lalu lintas pertanian, jalan menuju perkebunan, jalan menuju sekolah, dan jalan produksi.
 - b. Kurangnya akses infrastruktur jembatan seperti perlunya pembangunan/perbaikan akses jembatan penghubung antar desa dan jembatan gantung.
 - c. Kurangnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman seperti sumur bor.
 - d. Kurangnya Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang salah satunya mengakibatkan banjir sehingga perlu pembuatan/perbaikan siring/gorong-gorong, talud, dan embung.
 - e. Kurangnya sarana dan prasarana pertanian seperti bantuan bibit, pupuk, obat-obatan, dan alat mesin pertanian diantaranya traktor dan *combine harvester*.
 - f. Kurangnya sarana perkebunan seperti bantuan bibit buah-buahan.
 - g. Kurangnya sarana dan prasarana peternakan seperti bantuan untuk ternak kambing dan sapi.
 - h. Kurang optimalnya pengelolaan perikanan budidaya seperti bantuan untuk lahan lebak lebung.
 - i. Jaringan irigasi belum tersedia atau dalam kondisi rusak sehingga perlunya pembangunan/perbaikan irigasi

- pertanian/sawah, revitalisasi sawah, siring, dan normalisasi sungai.
- j. Kurang optimalnya pengembangan UMKM seperti bantuan untuk alat tenun songket.
 - k. Kurangnya sarana dan prasarana kelistrikan yang dapat menyebabkan terjadi kecelakaan dan tindak kriminal di malam hari sehingga perlunya bantuan pemasangan lampu penerangan jalan.
3. Permasalahan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
- a. Tingginya potensi bencana longsor sehingga perlunya pembangunan tembok penahan.
 - b. Tingginya potensi bencana banjir sehingga perlunya pembangunan siring dan DAM.
 - c. Tingginya potensi genangan di jalan yang rawan banjir sehingga perlunya pembuatan siring pasang dan siring lingkungan.
 - d. Kurangnya pengembangan dan pengelolaan Sistem Persampahan Regional termasuk kurangnya penyediaan bak sampah.
 - e. Penyempitan badan sungai dan sedimentasi tinggi sehingga perlunya normalisasi anak sungai.
4. Permasalahan Reformasi Birokrasi dan Trantibum
- a. Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana Keagamaan seperti pembangunan gedung Taman Pendidikan Alqur'an (TPA), pembangunan musholla, dan renovasi masjid.
 - c. Kurang Optimalnya Penataan Desa seperti pembangunan dan bantuan sarana dan prasarana kantor desa.

Seluruh permasalahan dari pokok-pokok pikiran tersebut termuat di dalam Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 yang keterkaitannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.27

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025
➤ Kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan ➤ Kurangnya sarana dan prasarana Kesehatan ➤ Kurangnya pembinaan dan pengembangan Olahraga	PD1: Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas
➤ Kurangnya prasarana peternakan ➤ Kurangnya sarana perkebunan ➤ Kurang optimalnya pengelolaan perikanan budidaya ➤ Jaringan Irigasi belum tersedia atau dalam kondisi rusak ➤ Kurang optimalnya pengembangan UMKM	PD2: Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Serta Hilirisasi dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
➤ Kurangnya sarana pertanian ➤ Kurangnya prasarana pertanian ➤ Kurangnya sarana dan prasarana kelistrikan ➤ Kurangnya pengembangan dan pengelolaan Sistem Persampahan Regional ➤ Penyempitan badan sungai dan sedimentasi tinggi	PD3: Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
➤ Kurangnya akses infrastruktur jalan ➤ Kurangnya akses infrastruktur jembatan ➤ Kurangnya akses air minum/air bersih	PD4: Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025
➤ Kurangnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman ➤ Kurangnya Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase ➤ Tingginya potensi bencana longsor ➤ Tingginya potensi bencana banjir ➤ Tingginya potensi genangan di jalan yang rawan banjir	
➤ Kurang optimalnya perlindungan dan jaminan sosial ➤ Kurangnya keterampilan tenaga kerja	PD5: Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan
➤ Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik ➤ Kurang Optimalnya Penataan Desa	PD6: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
➤ Kurangnya sarana dan prasarana Keagamaan	PD7: Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal

4.2.1.6. Isu Strategis Daerah

Mempertimbangkan permasalahan hasil evaluasi pembangunan dan pencapaian indikator pembangunan RKPD sampai dengan Triwulan I 2025 serta perkembangan isu terkini yang akan dihadapi maka dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

1. Perlindungan sosial dan pemberdayaan peningkatan pendapatan masyarakat belum optimal;

2. Hilirisasi sektor unggulan daerah belum optimal;
3. SDM berbasis kompetensi belum optimal;
4. Kinerja pelayanan publik berbasis digital belum optimal;
5. Akses, Kualitas, dan Kuantitas Infrastruktur Layanan Pendidikan dan Kesehatan belum optimal;
6. Infrastruktur Wilayah dan Infrastruktur Dasar belum optimal; dan
7. Pengelolaan SDA dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Terjadinya perkembangan penyesuaian terhadap kebijakan Asta Cita dan kebijakan Visi Misi Program Strategis Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai periodisasi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang mempengaruhi keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, serta hasil pengendalian evaluasi pelaksanaan triwulan I tahun 2025 yang menyebabkan perlunya Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian maka pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dengan melakukan fokus ulang terhadap skala prioritas yang menunjang pencapaian sasaran strategis dalam mencapai tujuan merupakan suatu konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari. Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 per perangkat daerah sebagai berikut :

BAB VI PENUTUP

Demikianlah dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran.

Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, Pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah serta dasar penyusunan Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU